



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN  
KONAWE TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap kondisi yang ada saat ini atas terjadinya perubahan mendasar pada kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta ketentuan dalam Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, disebutkan RPJPD, RPJMD dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 - 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renjana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun

- 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe;  
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019 Nomor 233), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah, sehingga selengkapnya dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Konawe.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan yang selanjutnya disebut RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Konawe untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2018 sampai Tahun 2023.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja- PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
12. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Pokok-pokok pikiran adalah kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses.
16. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ketentuan dalam lampiran RPJMD Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah , sehingga selengkapnya dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dalam Peraturan Daerah ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terbaru;
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
  - a. Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah dan bersifat wajib
  - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan program pembangunan selama kurun waktu 2018-2023;
  - c. Dasar penyusunan RKPD; dan
  - d. Instrumen pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Ketentuan Pasal 6 di hapus.

6. Ketentuan Pasal 7 di hapus.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Perubahan RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2023, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, guna pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2023-2028 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
pada tanggal 27-8- 2021



Diundangkan di Unaaha  
pada tanggal 27-8- 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,



FERDINAND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR : 254  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA NOMOR : 2/06/2021

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN  
KONAWE TAHUN 2018-2023

1. UMUM.

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Konawe sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah, maka berdasarkan ketentuan yang telah berlaku dalam :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025.

Perlu Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dilakukan perubahan dengan mempedomani pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diatas.



Perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJM-Nasional dan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, memuat gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu-isu strategis daerah, visi, misi tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dilakukan dengan cara melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, bottom-up dan top down dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 perlu diubah dengan Peraturan Daerah.

## 1. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup Jelas

### Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR :.254



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE



RENCANA  
PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH  
DAERAH

# RPJMD PERUBAHAN

KABUPATEN KONAWE  
TAHUN 2018-2023





## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dapat disusun. Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi Misi Bupati-Wakil Bupati, dengan tujuan dan sasaran, strategi serta arah kebijakan, program pembangunan disertai pendanaan yang bersifat indikatif dan indikator pencapaian pembangunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD Perubahan) ini merupakan tahapan dalam perencanaan dimana karena adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe melakukan perubahan pada Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe tahun 2018-2023. RPJMD Perubahan ini merumuskan tantangan serta strategi kebijakan dan target yang akan diambil untuk menjawab permasalahan dalam lima tahun kedepan.

Penyusunan Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 selain berdasarkan RPJPD Kabupaten Konawe juga berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe ini menjadi pedoman/acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan SKPD Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah Kabupaten Konawe yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan dokumen ini. Terima kasih disampaikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Konawe atas kontribusi baik dalam kegiatan konsultasi publik, musrenbang maupun dalam pembahasan ranperda RPJMD Perubahan ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Pimpinan SKPD dan stakeholder yang telah memberikan masukan/data dalam penyusunan dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 ini. Oleh karena keterbatasan sumber daya manusia maka penyusunan Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe ini tidak luput dari kesalahan ataupun kekeliruan, sehingga sangat dibutuhkan saran dan masukan yang berguna untuk penyempurnaan.

Semoga melalui Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 ini, Visi Bupati-Wakil Bupati periode 2018-2023 yaitu “Konawe yang Maju dan Mandiri Tahun 2023” dapat tercapai dengan dukungan dari semua pihak dan penyertaan Tuhan. Amin.

  
NIP.19810321 200903 2 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Daftar Isi</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Grafik</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I</b>	 <b>I-1</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3. Keterkaitan Antar Dokumen	I-8
1.4. Maksud dan Tujuan	I-10
1.5. Sistematika Penulisan	I-11
 <b>BAB II</b>	 <b>II-1</b>
<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.1.1 Aspek Geografi	II-2
2.1.2 Aspek Demografi	II-31
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-35
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-37
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-46
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-62
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-64
2.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-65
2.3.2 Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	II-87
2.3.3 Fokus Urusan Pilihan	II-112
2.3.4 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	II-118
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-123
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-124
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-128
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-133
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-134
 <b>BAB III</b>	 <b>III-1</b>
<b>GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.2 Neraca Daerah	III-5
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-10
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-11
3.2.2 Analisis Pembiayaan	III-19
3.3. Kerangka Pendanaan	III-21
3.3.1 Proyeksi Pendapatan	III-22
3.3.2 Proyeksi Belanja	III-27
3.3.3 Pembiayaan Daerah	III-32
3.3.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-34
 <b>BAB IV</b>	 <b>IV-1</b>
<b>PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2. Isu Strategis	IV-10
4.2.1 Sustainable Development Goals (SDGs)	IV-10
4.2.2 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	IV-12
4.2.3 Isu Strategis Nasional	IV-15

	4.2.4 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara	IV-18
	4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Konawe	IV-25
<b>BAB V</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>V-1</b>
	5.1 Visi	V-1
	5.2 Misi	V-2
	5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	V-7
	5.4 Indikator Kinerja SKPD Berdasarkan Sasaran Pembangunan Daerah	V-10
<b>BAB VI</b>	<b>STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>VI-1</b>
	6.1 Grand Strategy	VI-2
	6.2 Strategi	VI-8
	6.3 Arah Kebijakan	VI-31
	6.4 Program Pembangunan Daerah	VI-33
<b>BAB VII</b>	<b>KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>VII-1</b>
	7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	VII-1
	7.2 Program Perangkat Daerah	VII-3
<b>BAB VIII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>VIII-1</b>
<b>BAB IX</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>IX-1</b>
	9.1 Kaidah Pelaksanaan	IX-1

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah Daratan Kabupaten Konawe Menurut Wilayah Administrasi Kecamatan Tahun 2020 II-4
Tabel 2.2	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) II-5
Tabel 2.3	Potensi Irigasi II-8
Tabel 2.4	Desa Yang Dilalui DAS Konawehea II-10
Tabel 2.5	Sub DAS Lahambuti II-12
Tabel 2.6	Klasifikasi Jenis Tanah dan Persebarannya II-13
Tabel 2.7	Penggunaan Lahan Kabupaten Konawe II-16
Tabel 2.8	Kawasan Budidaya Menurut Arahan RTRW Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034 II-18
Tabel 2.9	Kawasan Rawan Bencana II-30
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Perjenis Kelamin Dan Kepala Keluarga Kabupaten Konawe Tahun 2020 II-32
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Dan distribusi Kepadatan Penduduk Kabupaten Konawe Tahun 2020 II-34
Tabel 2.12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Tahun 2019-2020 II-37
Tabel 2.13	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen ),2017-2020 II-39
Tabel 2.14	Laju Rill PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-2020 II-42
Tabel 2.15	PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp),2016-2020 II-43
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Perbandingan sex Ratio II-49
Tabel 2.17	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Konawe Tahun 2020 II-55
Tabel 2.18	Jumlah Tenaga Kesehatan Tiap Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Konawe II-57
Tabel 2.19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Konawe Tahu 2013-2017 II-61
Tabel 2.20	Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya Dikabupaten Konawe Tahun 2017-2020 II-63
Tabel 2.21	Jumlah Cagar Budaya yang di Lestarikan di Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 II-63
Tabel 2.22	Rincian Jumlah Lapangan Olah raga Menurut Jenis Olah raga di Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 II-64
Tabel 2.23	Perkembangan APK Jenjang SD/MI/Paket A dan Jenjang SMP/MTs/Paket B Tahun 2017-2020 II-66
Tabel 2.24	Perkembangan APM Jenjang SD/MI/Paket A dan Jenjang SMP/MTs/Paket B II-69
Tabel 2.25	Perkembangan AL Jenjang SD/MI/Paket A dan Jenjang SMP/MTS/Paket B II-70
Tabel 2.26	Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Konawe Tahun Ajaran 2019/2020 II-72
Tabel 2.27	Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV II-74
Tabel 2.28	Indikator Kinerja Capaian Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun 2017-2020 II-79
Tabel 2.29	Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten dan Jalan Provinsi Tahun 2017-2020 II-81
Tabel 2.30	Perkembangan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 II-83
Tabel 2.31	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Koanwe Tahun 2017-2020 II-86
Tabel 2.32	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial di Kabupaten II-87

#### Konawe Tahun 2017-2020

Tabel 2.33	Persentase Pencari Kerja Yang di Tempatkan di Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020	II-89
Tabel 2.34	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah dan di Lembaga Swasta Tahun 2017-2020	II-90
Tabel 2.35	TPAK Perempuan di Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020	II-91
Tabel 2.36	Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2017-2020 (Kg)	II-92
Tabel 2.37	Capaian Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2020	II-93
Tabel 2.38	Capaian Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2017-2020	II-96
Tabel 2.39	Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2013-2017	II-97
Tabel 2.40	Capaian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2020	II-98
Tabel 2.41	Capaian Urusan Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2017-2020	II-102
Tabel 2.42	Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2020	II-103
Tabel 2.43	Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Tahun 2017-2020	II-104
Tabel 2.44	Capaian Urusan Penanaman Modal Tahun 2017-2020	II-106
Tabel 2.45	Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah raga Tahun 2017-2020	II-108
Tabel 2.46	Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah raga Tahun 2017-2020	II-110
Tabel 2.47	Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2017-2020	II-112
Tabel 2.48	Capaian Urusan Kearsipan Tahun 2017-2020	II-112
Tabel 2.49	Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2020	II-114
Tabel 2.50	Capaian Urusan Pariwisata Tahun 2017-2020	II-114
Tabel 2.51	Capaian Urusan Pertanian Tahun 2017-2020	II-115
Tabel 2.52	Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tahun 2017-2020	II-117
Tabel 2.53	Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tahun 2017-2020	II-118
Tabel 2.54	Capaian Urusan Perencanaan Tahun 2017-2020	II-120
Tabel 2.55	Capaian Urusan Keuangan Tahun 2017-2020	II-121
Tabel 2.56	Capaian Urusan Kepegawaian Tahun 2017-2020	II-122
Tabel 2.57	Capaian Urusan Pengawasan, Tahun 2017-2020	II-122
Tabel 2.58	Capaian Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2017-2020	II-123
Tabel 2.59	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Konawe, Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)	II-125
Tabel 2.60	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Konawe, 2013-2017 (Juta Rupiah)	II-126
Tabel 2.61	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Konawe, 2013-2017 (Persen)	II-127
Tabel 2.62	Panjang Jalan menurut Pemerintah yang Berwenang, Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Konawe (kilometer), 2017	II-130
Tabel 2.63	Banyaknya Jembatan Menurut Jenis Konstruksi di Kabupaten Konawe, 2017	II-131
Tabel 2.64	Penggunaan dan Penutupan Lahan Kota Unaha Tahun 2017	II-132
Tabel 2.65	Banyaknya Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia di Kabupaten Konawe, 2012 – 2017	II-123
Tabel 2.66	Jumlah Kriminalitas yang Terjadi di Kabupaten Konawe, 2016 – 2017	II-124
Tabel 2.67	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Konawe, 2017	II-124
Tabel 2.68	Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Tahun 2013-	II-136



	2017	
Tabel 3.1	Realisasi APBD Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017	III-3
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2014-2017	III-6
Tabel 3.3	Surplus/(Defisit) Anggaran Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 No Uraian Tahun	III-20
Tabel 3.4	Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017	III-20
Tabel 3.5	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Tahun 2013- 2017 No. Uraian Tahun	III-21
Tabel 3.6	Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019-2023	III-25
Tabel 3.7	Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019-2023	III-26
Tabel 3.8	Proyeksi Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019-2020 (Peraturan dalam negeri No.13 Tahun 2006)	III-30
Tabel 3.9	Proyeksi Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2023 (Peraturan Pemerintah Tahun 2019)	III-31
Tabel 3.10	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019-2023	III-33
Tabel 3.11	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Untuk Mendanai Pembangunan Daerah kabupaten Konawe Tahun 2019-2023	III-35
Tabel 4.1	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Pembagian Urusan	IV-2
Tabel 4.2	Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023	IV-18
Tabel 4.3	Isu-isu Strategis Berdasarkan Pembagian Urusan	IV-26
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023	V-10
Tabel 6.1	Tabel Rumusan Strategi Terhadap Sasaran Pembangunan Pada Misi-1	VI-9
Tabel 6.2	Tabel Rumusan Strategi Terhadap Sasaran Pembangunan Pada Misi-2	VI-14
Tabel 6.3	Tabel Rumusan Strategi Terhadap Sasaran Pembangunan Pada Misi-3	VI-20
Tabel 6.4	Tabel Rumusan Strategi Terhadap Sasaran Pembangunan Pada Misi-4	VI-22
Tabel 6.5	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023	VI-23
Tabel 6.6	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023	VI-33
Tabel 6.7	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023	VI-34
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 (Permendagri 13 Tahun 2006)	VII-1
Tabel 7.2	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023 (Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019)	VII-2
Tabel 7.3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023	VII-4
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Tahun 2018- 2023	VIII-4

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	I-9
Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen RPJMD dan Dokumen KLHS	I-8
Gambar 2.1 Letak Geografis Kabupaten Konawe	II-2
Gambar 2.2 Ringkasan Gambaran Geografis Kabupaten Konawe	II-7
Gambar 2.3 Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Kondisi Geografis Kabupaten Konawe	II-29
Gambar 6.1 Skema Keterkaitan Program-Program Unggulan Gemilang	VI-4

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017-2020 II-33
Grafik 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 II-39
Grafik 2.3	Perkembangan Inflasi Kabupaten Konawe Terhadap Inflasi Nasional, 2018-2019 II-45
Grafik 2.4	Angka Kemiskinan Kabupaten Konawe, Tahun 2018-2020 II-47
Grafik 2.5	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab. Konawe Tahun 2018-2019 II-48
Grafik 2.6	Tingkat Keparahan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Konawe II-48
Grafik 2.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Konawe II-50
Grafik 2.8	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2017-2020 II-51
Grafik 2.9	Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 II-53
Grafik 2.10	Penurunan Balita Gizi Buruk Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 II-54
Grafik 2.11	Perkembangan Partisipasi PAUD Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 II-66
Grafik 2.12	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A di kabupaten konawe Tahun 2017 s/d 2020 II-67
Grafik 2.13	Angka Partisipasi (APK) SMP/MTS/Paket B Di Kabupaten Konawe II-68
Grafik 2.14	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Di kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020 II-69
Grafik 2.15	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Di kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020 II-70
Grafik 2.16	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A Di Kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020 II-71
Grafik 2.17	Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts/Paket B Di Kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020 II-71
Grafik 2.18	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV A Di Kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020 II-73
Grafik 2.19	Presentase Kewenangan Jalan Tahun 2013-2027 II-129
Grafik 3.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe Tahun 2013-2018 (Dalam Jutaan) III-13
Grafik 3.2	Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 (Dalam Jutaan) III-14
Grafik 3.3	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 (Dalam jutaan) III-15
Grafik 3.4	Proporsi Komponen Pendapatan dari Total Pendapatan Daerah Tahun 2017 III-16
Grafik 3.5	Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 (Dalam Jutaan Rupiah) III-17
Grafik 3.6	Pertumbuhan Belanja Langsung Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 (Dalam jutaan rupiah) III-18
Grafik 3.7	Persentase Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 III-19

# BAB I. PENDAHULUAN



## 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Konawe yang dahulu dikenal dengan nama Kabupaten Kendari merupakan sebuah imperium wilayah daratan terluas dijazirah Sulawesi bagian tenggara. Sejak dibentuk menjadi sebuah daerah administratif melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Kabupaten Konawe terus berbenah melakukan pembangunan. Dari masa-kemasa dibawah kepemimpinan beberapa kepala daerah telah dilakukan upaya-upaya secara masif dan terstruktur pembangunan disegala bidang, baik pembangunan dibidang ekonomi dan infrastruktur maupun pembangunan dibidang sosial.

Secara kultural Kabupaten Konawe berada pada posisi yang sangat strategis dimana daerah ini merupakan pusat perkembangan peradaban kebudayaan tolaki yang menjadi etnis asli yang mendiami daratan Sulawesi Tenggara. Sikap keterbukaan masyarakat lokal daerah (tolaki) ini telah mampu berakulturasi dengan masyarakat lainnya seperti bugis, jawa, bali dan lainnya sehingga Kabupaten Konawe saat ini menjadi sebuah kekuatan sosial yang sangat mumpuni dalam mengisi pembangunan di berbagai bidang. Kekuatan kultural yang dimiliki daerah ini menjadikannya secara politis dan sosial dalam wilayah daratan regional Sulawesi Tenggara menjadi sangat strategis dimata daerah-daerah lainnya. Pun demikian perannya selama ini dalam upaya membuka isolasi dan ketertinggalan pembangunan dibeberapa dekade yang lalu telah secara nyata dilakukan. Upaya-upaya tersebut dapat dilihat dari serangkaian pemekaran wilayah yang dilakukan sejak tahun 1997 dimana saat itu Pemerintah Kabupaten Kendari (Konawe) memekarkan Kota Kendari menjadi daerah otonom baru, selanjutnya pada tahun 2003 kembali dilakukan pemekaran wilayah Kabupaten Konawe Selatan, kemudian pada tahun 2007 dilakukan pemekaran wilayah Kabupaten Konawe Utara, hingga terakhir pada tahun 2013 kembali dilakukan pemekaran wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan. 4 (empat) kali melakukan pemekaran wilayah tidak berarti menghilangkan hegemoni daerah ini sebagai daerah administratif tertua di Sulawesi Tenggara. Ini terbukti dengan

perannya secara regional memberikan kontribusi pembangunan pada sektor pertanian dalam arti luas di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Peran dan posisi strategis yang dimiliki Kabupaten Konawe menjadi energi tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Konawe untuk terus berkontribusi positif bagi pembangunan di Sulawesi Tenggara. 2 (dua) dekade terakhir sejak bergulirnya reformasi yang ditandai dengan pendelegasian kewenangan yang cukup luas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah telah memberikan ruang bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk secara mandiri mendesign dan melaksanakan kegiatan pembangunan diwilayahnya secara makro dan mikro berdasarkan kewenangan urusan yang dimilikinya. Demikian juga Pemerintah Kabupaten Konawe menerima pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat dengan melakukan upaya-upaya pembangunan yang terencana berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun mulai dari rencana jangka panjang hingga rencana tahunan.

Penegasan peran pemerintah daerah dalam mengelola secara mandiri pemerintahannya dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Regulasi tersebut memberikan batasan sentralisasi kewenangan pemerintah pusat dan desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau yang lebih familiar dikenal dengan istilah otonomi daerah. Balutan otonomi daerah ini memberikan kekuatan tersendiri bagi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang benar-benar memberikan ruang kreasi dan inovasi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menggali potensi yang dimilikinya. Untuk semakin mendukung peran otonomi daerah tersebut, ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang telah mengatur skala waktu perencanaan pembangunan menjadi 3 (tiga) bagian : 1) perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun) produk dokumennya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang; 2) perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) produk dokumennya Rencana Pembangunan Jangka Menengah; 3) dan perencanaan pembangunan tahunan (1 tahun) produk dokumennya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Namun demikian, walaupun regulasi secara jelas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan/otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam

penyusunan perencanaan pembangunan, daerah harus memperhatikan perencanaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga perencanaan daerah yang disusun dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Perencanaan daerah pada prosesnya diarahkan agar senantiasa memiliki korelasi dan sinergi dengan perencanaan nasional. Serta didalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kewenangan yang diberikan baik dalam hal pengelolaan sumber daya alam maupun dalam pengelolaan tata pemerintahan. Olehnya itu, selain dalam rangka menyelesaikan permasalahan di daerah masing-masing, tujuan pembangunan daerah juga harus diarahkan untuk mendukung penyelesaian isu-isu nasional. Sehingga substansi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan terintegrasinya seluruh perencanaan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dapat terlaksana.

Kabupaten Konawe sebagai salah satu daerah otonom telah menerjemahkan amanat Undang-Undang tersebut kedalam sistem perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Aktualisasi amanat Undang-Undang tersebut ditandai dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025. Rencana pembangunan jangka panjang tersebut selanjutnya menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan perencanaan jangka menengah yang dibagi dalam 4 tahapan. Tahapan rencana pembangunan 5 tahun pertama telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2003-2008, Tahapan rencana pembangunan 5 tahun kedua telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2008-2013 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2008-2013, Tahapan rencana pembangunan 5 tahun ketiga telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2013-2018 regulasinya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2013-2018, Tahapan rencana pembangunan 5 tahun keempat akan dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023.

Sejalan dengan hal diatas Kabupaten Konawe pada tanggal 27 Juni 2018 adalah merupakan salah satu daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak untuk masa bhakti periode 2018-2023. Dalam prosesnya telah terpilih



**Kery Saiful Konggoasa dan Gusli Topan Sabara, ST., MM** sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Konawe periode 2018-2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dokumen RPJMD. Olehnya itu, Pemerintah Kabupaten Konawe berkomitmen memastikan bahwa seluruh tahapan penyusunan RPJMD dilaksanakan secara terstruktur dan menyeluruh sesuai dengan tahapan-tahapannya. Sehingga dengan demikian RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 nantinya adalah sebuah produk perencanaan yang menjadi bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat penjabaran visi, misi dan program kepala daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah. Didalam penyusunannya dilakukan melalui metode dan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up*.

Dalam perjalanannya RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 yang pada tahun 2021 ini memasuki tahun ketiga pelaksanaannya dipandang perlu dilakukan revisi, mengingat terdapat perubahan-perubahan mendasar yang perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian kembali. Beberapa alasan yang mendasari Pemerintah Kabupaten Konawe melakukan perubahan-perubahan tersebut yakni sebagai berikut :

1. Penyesuaian terhadap perubahan regulasi :
  - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Penyesuaian terhadap kondisi faktual yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan :

- Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berpotensi besar mempengaruhi target dan pencapaian daerah baik secara makro maupun secara sektoral;
- Penyesuaian terhadap target pendapatan daerah yang perlu dirasionalisasikan kembali mengingat dari hasil evaluasi dalam 2 (dua) tahun terakhir target pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksikan sangat optimis tidak mencapai target sesuai yang direncanakan sehingga hal ini juga akan mempengaruhi kebijakan belanja daerah.
- Perubahan formulasi kebijakan prioritas daerah yang dirumuskan untuk mengangkat kinerja sektor-sektor potensial dalam rangka mendukung tercapainya pertumbuhan indikator makro daerah bergerak ke arah yang positif.

Berdasarkan periodisasi tahapan RPJPD Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025, saat ini Kabupaten Konawe berada pada Periode 2018-2023 yang merupakan periode ke IV pelaksanaan RPJMD Kabupaten Konawe. Sesuai yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025 pada tahap ini bahwa penekanan pembangunan diarahkan pada pembangunan yang berporos pada kesejahteraan melalui peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan kualitas kesehatan; peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; dan pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah; pada tahap ini juga target pertumbuhan perekonomian daerah diproyeksikan pada level 7,5 sampai dengan 10 persen; keunggulan komparatif pada sektor pertanian dalam arti luas diarahkan untuk menciptakan nilai tambah pada setiap sub sektor pendukungnya sehingga tercipta tatanan perekonomian yang kompetitif dan berdaya saing melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustri.

Sebagai bagian dari kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 senantiasa akan disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya revisi dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 menjadi instrumen pokok bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah Kabupaten Konawe dalam menyusun revisi dokumen Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD. Dan selanjutnya revisi dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-

2023 ini apabila sudah ditetapkan akan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2022-2023.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Teknokratis Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan regulasi berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 88);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe;

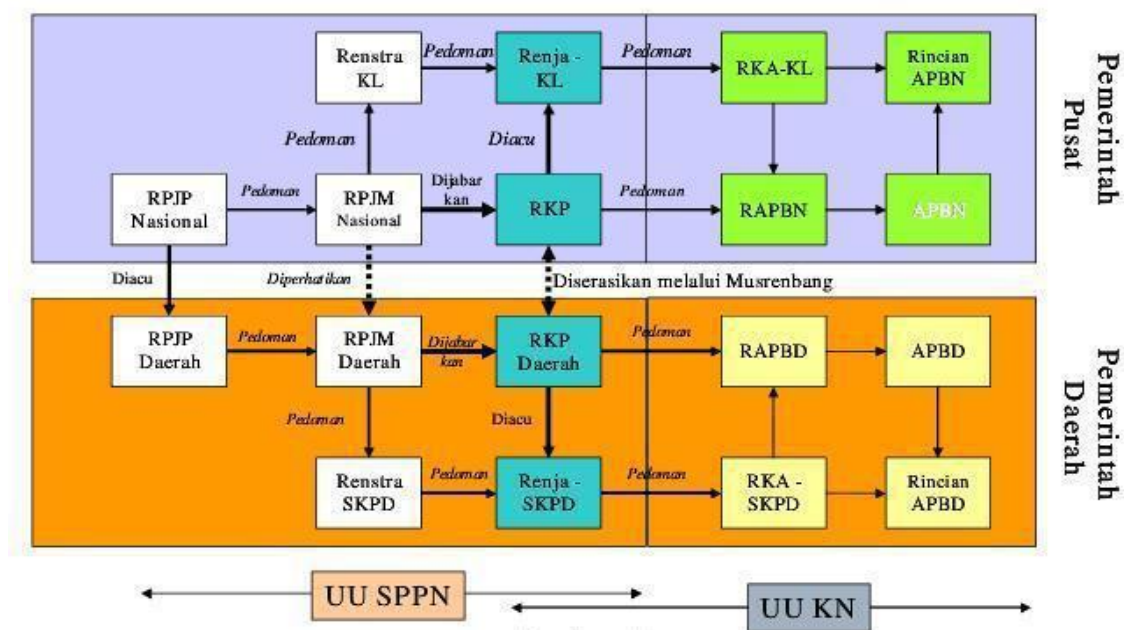
### **1.3 Keterkaitan Antar Dokumen**

Dalam kaitan dengan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 nantinya merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, khususnya dalam menjalankan agenda berkelanjutan pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025, serta keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi OPD untuk penyusunan Rencana Strategi (Renstra) SKPD. Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe yang selanjutnya akan akan dijadikan acuan oleh OPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Selanjutnya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Sedangkan Renja OPD akan menjadi pedoman bagi penyusunan RKA-OPD.

RPJMD merupakan dokumen strategis yang juga merupakan alat koneksi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimana dalam status keberadaannya, penyusunan RPJMD harus memperhatikan RPJMN. Sedangkan RKPD sebagai dokumen yang menjabarkan RPJMD setiap tahunnya memiliki kedudukan yang strategis dalam mendukung pencapaian nasional, dimana antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) akan diserasikan dengan RKPD melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional.

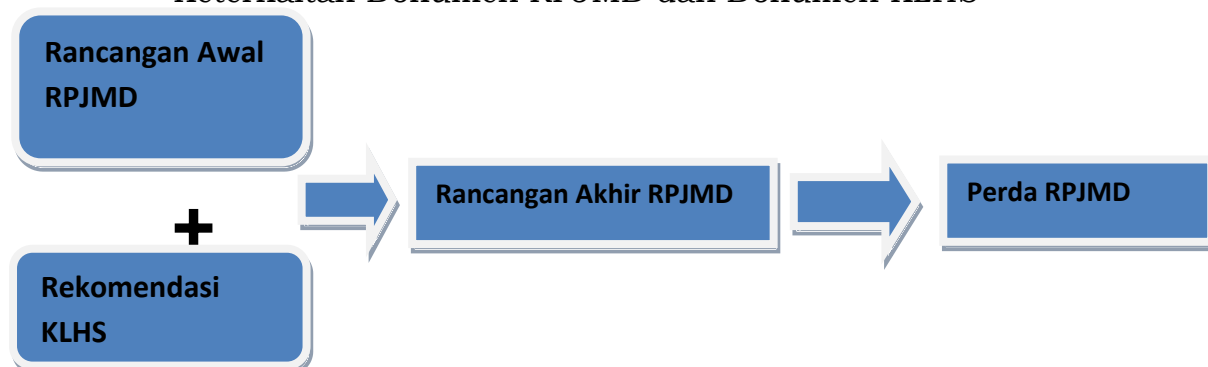
Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Konawe 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam hubungannya dengan sistem perencanaan pembangunan nasional maupun dengan sistem keuangan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1  
Keterkaitan Dokumen Perencanaan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Disamping itu pula sangat perlu diperhatikan keterkaitan antara dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan Rancangan Awal RPJMD agar kebijakan-kebijakan pembangunan berkelanjutan benar-benar termuat didalam dokumen RPJMD yang ada.

Gambar 1.2  
Keterkaitan Dokumen RPJMD dan Dokumen KLHS





#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menyesuaikan Regulasi Peraturan yang ada, berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan pembangunan dan capaiannya serta permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir serta penetapan target yang lebih tepat. Selain itu adanya *Pandemic Covid-19* ikut mempengaruhi kebijakan fiskal dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Konawe. Dokumen hasil perubahan RPJMD ini nantinya menjadi konsensus yang memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2018-2023.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 adalah :

1. Perubahan Substansi RPJMD;
2. Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe setiap tahunnya;
3. Sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Perubahan Rencana Strategi (Renstra) masing-masing OPD;
4. Sebagai pedoman bagi OPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD yang penyusunannya simultan dengan RKPD;
5. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan sisa periode pembangunan jangka menengah di Kabupaten Konawe;
6. Sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe selama kurun waktu tahun 2018-2023.
7. Sebagai acuan dalam mengukur dan mengevaluasi progres pencapaian pembangunan, berikut dengan kinerja tahunan setiap OPD pada lingkup pemerintah Kabupaten Konawe.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan tentang latar belakang perencanaan pembangunan daerah, mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD.

### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Pada bagian ini berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya baik yang berskala daerah maupun nasional yang relevan beserta penjelasannya dan keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan keuangan.

### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

## **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bagian ini menjelaskan dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan

wilayah rawan bencana. Penjelasan dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi yang dimiliki daerah.

Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dipaparkan pada bab ini.

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

## 2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

### **BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut:

#### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, dijelaskan gambaran kinerja keuangan daerah.

##### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Penyajian hasil analisis disertai dengan grafik, gambar, atau tabel.

##### **3.1.2. Neraca Daerah**

Bagian ini menguraikan perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

#### **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

##### **3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

Dalam bagian ini diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja.

##### **3.2.2. Analisis Pembiayaan**

Dalam bagian ini diuraikan mengenai analisis pembiayaan.

#### **3.3. Kerangka Pendanaan**

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kerangka pendanaan dari hasil analisis.

##### **3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Dalam bagian ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data. Bagian ini juga menguraikan mengenai analisis pendapatan dan belanja periodik yang wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas utama.

##### **3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Dalam bagian ini diuraikan mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

#### **BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Penyajian analisis ini harus menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

##### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Pada bagian ini disajikan permasalahan pembangunan berdasarkan hasil analisis terhadap setiap urusan pemerintahan daerah. Penjabaran permasalahan pembangunan secara deskriptif dengan melihat permasalahan yang paling mengemuka sesuai hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya.

##### **4.2. Isu Strategis**

Pada bagian ini ditampilkan isu strategis berdasarkan permasalahan pembangunan yang terungkap pada sub bab sebelumnya.

#### **BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

##### **5.1 Visi**

Pada bagian ini menampilkan penjelasan visi pembangunanan Bupati dan wakil Bupati Konawe Periode 2018-2023.

##### **5.2 Misi**

Pada bagian ini menampilkan penjelasan misi pembangunanan Bupati dan wakil Bupati Konawe Periode 2018-2023.

##### **5.3 Tujuan dan Sasaran**

Pada bagian ini menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada akhir periode masa jabatan.

#### **BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

#### **BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra OPD beserta indikator kinerja, pagu indikatif, perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

## **BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

## **BAB IX. PENUTUP/KAIDAH PELAKSANAAN**

Pada bab ini berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023.



## BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Penekanan pada penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 adalah bagaimana menciptakan rencana pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan arah RPJPD Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025. Pembangunan yang berkelanjutan perlu memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan prestasi yang telah dicapai serta dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan itu sendiri. Olehnya itu, yang tidak kalah pentingnya adalah sangat perlu untuk menganalisis capaian pembangunan daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan perolehan data dan informasinya.

Data dan informasi yang akurat dan akuntabel akan menentukan kualitas dokumen perencanaan yang disusun. Dimana dengan data dan informasi tersebut akan membantu *stakeholder* perencanaan dalam menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Analisis data dan informasi pada beberapa aspek tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh dari kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya sekurang-kurangnya selama setahun terakhir dalam rangka mengidentifikasi sasaran prioritas yang belum tercapai, permasalahan yang harus diatasi dan isu-isu penting untuk segera ditangani dalam rancangan RPJMD yang akan disusun.

Analisis ilmiah terhadap fenomena yang telah terjadi dan akan terjadi tidak dapat dilakukan jika instrumen analisis seperti data dan informasi tidak tersedia dengan lengkap. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dan menjadi hal mutlak untuk dianalisis adalah mengenai gambaran umum kondisi daerah serta capaian kinerja pemerintah. Karena ketersediaan data dan informasi mengenai 2 (dua) aspek tersebut merupakan salah satu indikator utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Secara umum ruang lingkup pada bagian ini menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Konawe. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang akan dianalisis

meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Analisis capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada bagian ini juga memperhatikan rumusan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

## **2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Untuk menemukan informasi mengenai kondisi keruangan, keragaman ruang, aktifitas dan interaksi yang terjadi didalamnya maka perlu dilakukan analisis terhadap aspek geografi dan demografi. Aspek-aspek keruangan dan keragaman muka bumi tersebut meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakatnya.

Aspek geografi dan demografi yang disajikan dalam Revisi RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 ini memuat informasi yang disajikan dengan melihat perkembangan hingga tahun 2020. Diharapkan dengan menampilkan informasi terbaru ini, menjadi rujukan bagi seluruh stakeholder merumuskan kembali kebijakan pembangunan pada sisa periode RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023.

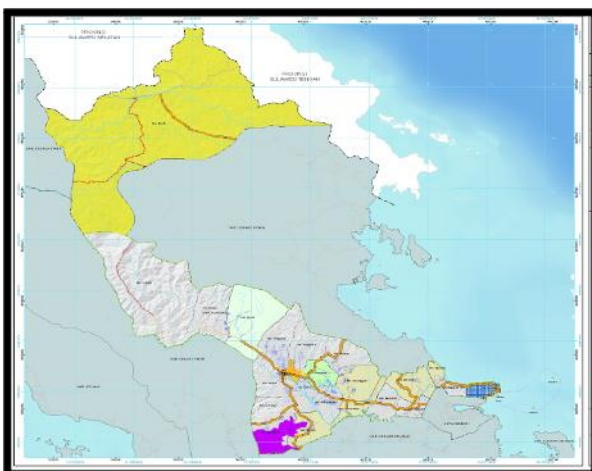
### **2.1.1 Aspek Geografi**

Penyajian informasi mengenai aspek geografi memperhatikan kondisi keruangan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.

#### **a) Letak Geografis dan Batas Administrasi Daerah**

Secara Geografis Kabupaten Konawe berada di bagian selatan garis khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 2°.45' dan 4°15' lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara 121°15' dan 123°30' bujur Timur, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Letak Geografis Kabupaten Konawe.



**Posisi Geostrategis,** Kabupaten Konawe terletak pada posisi sangat strategis karena : (1). Kabupaten Konawe merupakan imperium berkembangnya kebudayaan tolaki; (2). Kabupaten Konawe berada tepat ditengah wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Posisi ini menempatkan wilayah Kabupaten Konawe sebagai penghubung antar wilayah daratan di Sulawesi Tenggara.

Batas-batas wilayah Kabupaten Konawe sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Konawe Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda, Laut Maluku dan Kota Kendari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka;

Ditinjau dari aspek geostrategis, posisi Kabupaten Konawe berada ditengah-tengah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara dimana Kabupaten Konawe di kelilingi oleh 6 (enam) wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Kabupaten Konawe Utara, Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara. Disamping itu Kabupaten Konawe juga berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dilihat dari sisi ekonomi, posisi ini sangat menguntungkan bagi Kabupaten Konawe. Karena akses transportasi darat yang menghubungkan wilayah-wilayah tersebut berada pada wilayah Kabupaten Konawe. Sehingga sebagai daerah penghubung wilayah-wilayah tersebut, Kabupaten Konawe memiliki potensi yang cukup besar sebagai wilayah penyangga yang dapat memberikan pelayanan jasa dan penyuplai komoditi pangan, mengingat Kabupaten Konawe merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian yang sangat besar utamanya pertanian dibidang pangan. Dengan asumsi semakin besarnya volume arus barang dan jasa, maupun volume kendaraan dan manusia yang melewati jalur utama transportasi darat tersebut, maka di Kabupaten Konawe juga sangat berpotensi berkembangnya sektor jasa dan pariwisata utamanya perhotelan, restoran (rumah makan) dan jasa-jasa lainnya yang dapat dikembangkan.

#### **b) Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Secara Administratif**

Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe adalah sekitar 5.781,08 km<sup>2</sup> atau 10,87 persen dari luas daratan Sulawesi Tenggara, sedangkan luas wilayah perairan laut 1.960 Km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai sekitar 295 KM. Secara administratif Kabupaten Konawe terdiri dari 29 wilayah kecamatan, 291 Desa dan 57 Kelurahan.

Tabel 2.1  
Luas Wilayah Daratan Kabupaten Konawe  
Menurut Wilayah Administrasi Kecamatan, Tahun 2020.

Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kabupaten
1	2	3	4
Soropia	Toronipa	61,73	1,07
Lalongasumeeto	Nii Tanasa	40,78	0,71
Sampara	Sampara	52,67	0,91
Bondoala	Laosu	23,85	0,41
Besulutu	Besulutu	111,26	1,92
Kapoiata	Kapoiata	45,42	0,79
Anggalomoare	Tabanggele	7,33	0, 13
Morosi	Besu	109,5	1,89
Lambuya	Lambuya	78,39	1,36
Uepai	Uepai	118,76	2,05
Puriala	Watundehoa	268,78	4,65
Onembute	Onembute	99, 13	1,71
Pondidaha	Pondidaha	156,28	2,70
Wonggeduku	Puuduria	101,96	1,76
Amonggedo	Amonggedo Baru	123,75	2, 14
Wonggeduku Barat	Puday	11,80	0,20
Wawotobi	Wawotobi	67,68	1, 17
Meluhu	Meluhu	141,06	2,44
Konawe	Tawanga	17,82	0,31
Anggotoa	Nario Indah	65,97	1,14
Unaaha	Puunaha	33,75	0,58
Anggaberu	Andabia	75,01	1,30
Abuki	Abuki	187,49	3,24
Latoma	Waworaha	936,34	16,20
Tongauna	Tongauna	181,69	3,14
Asinua	Ambondia	298,72	5,17
Padangguni	Padangguni	151,35	2,62
Tongauna Utara	Puundombi	24,23	0,42
Routa	Routa	2.158,58	37,86
<b>Konawe</b>	<b>Unaaha</b>	5.781,08	100.00

Sumber : Kabupaten Konawe Dalam Angka Tahun 2021

### c) Topografi

Topografi daratan Kabupaten Konawe pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Selain itu terdapat pula pulau-pulau kecil yakni Pulau Bokori, Pulau Saponda Laut dan Pulau Saponda

Darat. Dengan kondisi geografis Kabupaten Konawe yang heterogen dan masing-masing wilayah yang memiliki karakteristik berbeda memungkinkan berkembangnya sektor pertanian dalam arti luas. Diwilayah daratan subsektor pertanian tanaman pangan, subsektor peternakan dan subsektor perkebunan dapat menjadi sektor andalan bagi perekonomian masyarakat, sedangkan diwilayah laut dan garis pantai dimanfaatkan untuk pengembangan subsektor perikanan dan pengembangan pariwisata.

Tabel 2.2  
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL)

Kode	Kecamatan	Tinggi DPL (m)
(1)	(2)	(3)
7403090	Soropia	1 8
7403091	Lalonggasumeeto	1 6
7403100	Sampara	2 8
7403101	Bondoala	1 1
7403102	Besulutu	8 5
7403103	Kapoiala	1 0
7403104	Anggalomoare	2 8
7403105	Morosi	1 1
7403130	Lambuya	11 0
7403131	Uepai	10 3
7403132	Puriala	11 3
7403133	Onembute	11 5
7403140	Pondidaha	2 6
7403141	Wonggeduku	3 4
7403142	Amonggedo	4



Kode	Kecamatan	Tinggi DPL (m)
(1)	(2)	(3)
		8
7403143	Wonggeduku Barat	3
		4
7403150	Wawotobi	3
		5
7403151	Meluhu	5
		6
7403152	Konawe	4
		4
7403170	Unaaha	5
		6
7403171	Anggaberi	8
		1
7403180	Abuki	14
		3
7403181	Latoma	17
		2
7403182	Tongauna	6
		4
7403183	Asinua	10
		9
7403184	Padangguni	14
		3
	Tongauna Utara	6
		4
7403193	Routa	36
		9

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018*

Keadaan topografis Kabupaten Konawe berada pada garis ketinggian antara 10 – 400 meter diatas permukaan laut dan kemiringan antara 1,8 – 90 derajat dengan permukaan tanah pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian, pertambangan dan industri.

**Gambar 2.2 Ringkasan Gambaran Geografis Kabupaten Konawe**

## KABUPATEN KONAWE

### Luas Wilayah

**5781,08 Kilometer Persegi (578.108 Hektar)**

Terletak di bagian selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 02°45' dan 04°15' Lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara 121°15' dan 123°30' Bujur Timur

Batas-batas wilayah Kabupaten Konawe sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Konawe Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan Laut Maluku;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur;

Kabupaten Konawe mempunyai beberapa sungai besar yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian, irigasi dan pembangkit tenaga listrik seperti Sungai Konaweheha dan Sungai Lahumbuti. Sedangkan Sungai Lapoa sekarang termasuk wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Sungai Lasolo; Kokapi; Toreo; Andumowu; dan Sungai Molawe menjadi bagian wilayah Kabupaten Konawe Utara. Sungai Konaweheha mempunyai debit air kurang lebih 200 meter kubik per detik. Dari sana telah dibangun bendungan air Wawotobi yang mampu mengairi sawah seluas kurang lebih 18.000 hektar. Selain sungai-sungai yang telah disebutkan di atas terdapat pula Rawa Aopa yang sangat potensial untuk usaha perikanan darat.

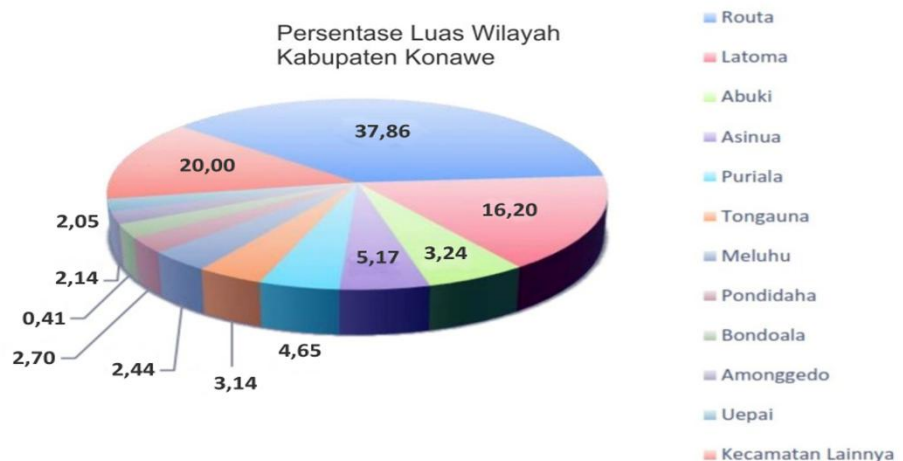
**UNAAHA**  
Sebagai Ibu Kota  
Kabupaten Konawe  
dan Menjadi  
Pusat Pemerintahan



Kabupaten Konawe  
Terdiri dari 29 Kecamatan,  
291 Desa dan 57 Kelurahan

- 1 Kecamatan Unaaha
- 2 Kecamatan Wawotobi
- 3 Kecamatan Abuki
- 4 Kecamatan Lambuya
- 5 Kecamatan Pondidaha
- 6 Kecamatan Sampara
- 7 Kecamatan Soropia
- 8 Kecamatan Konawe
- 9 Kecamatan Kapoiala
- 10 Kecamatan Asinua
- 11 Kecamatan Uepai
- 12 Kecamatan Wonggeduku
- 13 Kecamatan Tongauna
- 14 Kecamatan Latoma
- 15 Kecamatan Besulutu
- 16 Kecamatan Lalonggasumeeto
- 17 Kecamatan Bondoala
- 18 Kecamatan Wonggeduku Barat
- 19 Kecamatan Puriala
- 20 Kecamatan Anggaberri
- 21 Kecamatan Amonggedo
- 22 Kecamatan Meluhu
- 23 Kecamatan Anggalomoare
- 24 Kecamatan Morosi
- 25 Kecamatan Padangguni
- 26 Kecamatan Onembute
- 27 Kecamatan Routa
- 28 Kecamatan Tongauna Utara
- 29 Kecamatan Anggotoa

**Persentase Luas Wilayah  
Kabupaten Konawe**



#### d) Hidrologi

Kabupaten Konawe mempunyai beberapa sungai besar yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian, irigasi dan pembangkit tenaga listrik seperti Sungai Konawehea, Sungai Lalindu dan Sungai Lahumbuti. Dua sungai telah dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Konawe sebagai sumber irigasi sawah dimana untuk Sungai Konawehea yang memiliki debit air cukup besar yakni  $\pm 200 \text{ M}^3/\text{detik}$  telah dibangun Bendung Wawotobi yang mampu mengairi sawah seluas  $\pm 18.000$  Hektar dan Sungai Lahumbuti telah dibangun Bendung Walay. Sementara untuk Sungai Lalindu masih belum termanfaatkan. Selain itu terdapat pula Rawa Aopa yang potensial untuk pengembangan usaha perikanan darat.

Disamping sungai-sungai besar terdapat potensi sungai-sungai kecil lainnya yang saat ini juga sudah dimanfaatkan untuk pengairan sawah. Dibawah ini merupakan wilayah-wilayah kecamatan yang memanfaatkan potensi hidrologi berdasarkan pembagian luas lahan sawah fungsional yang berasal dari irigasi dan non irigasi.

Tabel 2.3  
Potensi Irigasi

No.	Kecamatan	Irigasi (Hektar/Ha)	Non Irigasi (Hektar/Ha)	Jumlah (Hektar/Ha)
1	2	3	4	5
1	Soropia	-	-	-
2	Lalonggasumeeto	-	-	-
3	Sampara	-	-	-
4	Bondoala	607	2.749	3.356
5	Besulutu	-	55	55
6	Kapoiata	97	419	516
7	Anggalomoare	30	-	30
8	Morosi	-	-	-
9	Lambuya	2.487	513	3.000
10	Uepai	2.639	-	2.639
11	Puriala	2.394	-	2.394
12	Onembute	1.183	68	1.251
13	Pondidaha	2.048	-	2.048
14	Wonggeduku	3.153	-	3.153
15	Amonggedo	2.637	-	2.637
16	Wonggeduku Barat	2.521	-	2.521
17	Wawotobi	2.270	-	2.270

No.	Kecamatan	Irigasi (Hektar/Ha)	Non Irigasi (Hektar/Ha)	Jumlah (Hektar/Ha)
1	2	3	4	5
18	Meluhu	1.320	-	1.320
19	Konawe	361	-	361
20	Unaaha	766	-	766
21	Anggaberu	1.055	35	1.090
22	Abuki	1.822	377	2.1
23	Latoma	102	-	102
24	Tongauna	5.305	-	5.305
25	Asinua	681	335	1.016
26	Padangguni	2.225	69	2.294
27	Tongauna Utara	-	-	-
28	Routa	182	-	182
29	Anggotoa			
	<b>Jumlah/ Total</b>	<b>35.885 Ha</b>	<b>4.620 Ha</b>	<b>40.505 Ha</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman

Di Sulawesi Tenggara ada satu saja DAS besar yaitu DAS Konawe yang menjadi wilayah kegiatan PTLPB. Tetapi, PTLPB adalah aktif di bagian DAS Konawe yang jatuh didalam Kabupaten Konawe dibagian kiri (utara) Sungai Konawe. Di wilayah ini ada 3 wilayah tangkapan air yaitu:

- Wilayah tangkapan air Sungai Latoma dan Sungai Ambekaire. Wilayah ini masuk Kecamatan Latoma;
- Wilayah tangkapan air Sungai Asinua. Separuh wilayah tangkapan air Asinua masuk Kecamatan Latoma dan sebagian masuk Kecamatan Asinua;
- Wilayah tangkapan air Sungai Lahumbuti yang mencakupi Kecamatan-Kecamatan : Abuki, Tongauna, Unaaha, Konawe, Anggaberu, Wawotobi, Meluhu, Amonggedo, Wonggeduku dan Pondidaha (Kecamatan-Kecamatan pada tahun 2009). Wilayah tangkapan air Sungai Lahumbuti dibagi 3 wilayah kegiatan PTLPB yaitu :
  - Lahumbuti Hulu (Kecamatan Abuki dan Tongauna);
  - Lahumbuti Tengah (Kecamatan Unaaha, Konawe, Wawotobi, Anggaberu, dan Meluhu); dan
  - Lahumbuti Hilir (Kecamatan Wonggeduku, Pondidaha dan Amonggedo)

Adapun desa yang dilalui oleh DAS Konawe yaitu :

Tabel 2.4  
Desa yang di lalui DAS Konaweha

No	Kecamatan	Desa	Luasan (Ha)
1	Abuki	Kumapo	388,29
2	Abuki	Walay	624,71
3	Abuki	Epeea	1032,86
4	Abuki	Sambeani	477,57
5	Abuki	Punggaluku	370,61
6	Abuki	Abuki	8788,71
7	Abuki	Asolu	1160,04
8	Abuki	Arubia	535,36
9	Abuki	Kasuwura	955,63
10	Anggalomoare	Anggalomoare	180,26
11	Anggalomoare	Galun	123,94
12	Anggalomoare	Puusangi	359,21
13	Anggalomoare	Tabanggele	266,47
14	Asinua	Lasada	2137,16
15	Asinua	Awua Jaya	667,10
16	Asinua	Asinua Jaya	2546,73
17	Asinua	Ambondia	1701,27
18	Asinua	Angohi	2437,26
19	Besulutu	Ranomolua	720,66
20	Besulutu	Besulutu	1543,48
21	Besulutu	Silea	664,79
22	Besulutu	Laloumera	1117,84
23	Besulutu	Lawonua	934,16
24	Bondoala	Pebunooha Dalam	233,90
25	Bondoala	Pebunooha	355,74
26	Bondoala	Rumbia	430,27
27	Bondoala	Diolo	701,66
28	Bondoala	L A O S U	457,47
29	Bondoala	Lalonggaluku	116,12
30	Bondoala	Rambu Kongga	97,55
31	Kapoi	Lamendora	253,50
32	Kapoi	Kapoi Ala	428,25
33	Kapoi	Sambaraasi	242,87
34	Kapoi	Lalimbue	58,34
35	Kapoi	Muara Sampara	236,06
36	Kapoi	Ulu Lalimbue	422,85
37	Kapoi	Kapoi Baru	527,50
38	Kapoi	Labotoy Jaya	50,63



No	Kecamatan	Desa	Luasan (Ha)
39	Kapoiala	Lalonggomuno	126,38
40	Konawe	Konawe	154,93
41	Konawe	Sanggona	219,01
42	Konawe	Hudoa	353,09
43	Konawe	Uelawu	617,80
44	Konawe	Uete	83,34
45	Konawe	Wonua Mbae	227,51
46	Konawe	Asoniwowo	81,83
47	Lambuya	Tanggobu	990,00
48	Lambuya	Waworaha	366,35
49	Lambuya	Watarema	1306,45
50	Latoma	Ambekaeri Utama	2158,84
51	Latoma	Latoma Jaya	2074,49
52	Latoma	Lalowata	628,19
53	Latoma	Wowalatoma	4725,81
54	Latoma	Ambesaua	692,16
55	Morosi	Mendikonu	699,23
56	Morosi	Wonua Morini	422,78
57	Morosi	B E S U	308,98
58	Morosi	P A K U	311,37
59	Pondidaha	Belatu	401,22
60	Pondidaha	Ambu Ulanu	1132,95
61	Pondidaha	Amesiu	974,18
62	Pondidaha	Laloika	214,52
63	Pondidaha	Sulemandara	411,98
64	Pondidaha	Wawolahambuti	293,64
65	Pondidaha	Wonua Monapa	1238,23
66	Puriala	Poanaha	663,39
67	Puriala	Watandehoa	830,57
68	Puriala	Watusa	1307,30
69	Sampara	Pohara	108,52
70	Sampara	Andepali	291,89
71	Sampara	Wawolimbue	438,67
72	Sampara	Sampara	89,61
73	Sampara	Andadowi	584,15
74	Sampara	Polua	772,47
75	Sampara	Rawua	245,41
76	Sampara	Bao-Bao	161,13
77	Sampara	Andaroa	311,90
78	Tongauna	Puosu	342,02
79	Tongauna	Mataiwoi	650,01

No	Kecamatan	Desa	Luasan (Ha)
80	Tongauna	Tongauna	632,74
81	Tongauna	Asao	635,15
82	Tongauna	Lalonggowuna	319,84
83	Tongauna	Momea	372,41
84	Tongauna	Andeposandu	316,43
85	Uepai	Matahoalu	153,48
86	Uepai	Tawamelewe	102,94
87	Uepai	Uepai	391,74
88	Uepai	Ameroro	250,40
89	Uepai	R A W U A	1830,18
90	Uepai	Anggopiu	169,23
91	Uepai	Kasaeda	87,52
92	Uepai	Tanggondipo	258,13
93	Uepai	Moorehe	3990,84
94	Uepai	Anggawo	1998,69
95	Uepai	Puuroda Jaya	323,21
96	Uepai	Panggulawu	310,14
97	Unaaha	Puunaaha	422,45
98	Unaaha	Arombu	133,66
99	Unaaha	Latoma	114,94
100	Unaaha	Ambekairi	326,99
101	Unaaha	Tuoy	524,02
102	Wonggeduku	Dawi-Dawi	364,49
103	Wonggeduku	Bendewuta	2103,07
104	Wonggeduku Barat	Linonggasai	633,39
105	Wonggeduku Barat	Teteona	228,64
106	Wonggeduku Barat	Ambuwui	193,09
<b>Jumlah</b>			<b>79.546,91</b>

Sumber : Penelitian UHO, 2017

Sedangkan untuk DAS Lahambuti terbagi menjadi 10 Sub DAS, yaitu :

Tabel 2.5  
SUB DAS Lahambuti

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Luas (Ha)
1	Abuki	78,16	7.816
2	Anggaberri	86,52	8.652
3	Anggoro	106	10.600
4	Anggotoa	27,38	2.738
5	Benua	108,1	10.810

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Luas (Ha)
6	Lahumbuti Hilir	169,9	16.990
7	Lahumbuti Hulu	148,6	14.860
8	Lalowatu	111,7	11.170
9	Meluhu	85,45	8.545
10	Watawata	30,14	3.014
<b>Total</b>		<b>951,95 Km2</b>	<b>95195 Ha</b>

#### e) Geologi

Klasifikasi jenis tanah yang tersebar di Kabupaten Konawe berdasarkan wilayah administrasi Kecamatan yakni meliputi :

Tabel 2.6

Klasifikasi Jenis Tanah dan Persebarannya

No.	Jenis Tanah	Wilayah Persebaran	Karakteristik tanah
1	2	3	4
1.	Aluvial	Abuki, Padangguni, Tongauna Utara, Tongauna, Unaaha, Anggaberu, Konawe, Wawatobi, Meluhu, Anggotoa, Wonggeduku Barat, Wonggeduku, Lambuya, Uepai, Puriala, Onembute, Pondidaha, Bondoala.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur biasanya yang terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan dibagian hilir karena dibawa dari hulu;</li> <li>- Tanah ini sangat cocok untuk pertanian baik pertanian padi maupun palawija seperti jagung, tembakau dan jenis tanaman lainnya karena teksturnya yang lembut dan mudah digarap sehingga tidak perlu membutuhkan</li> </ul>

No.	Jenis Tanah	Wilayah Persebaran	Karakteristik tanah
1	2	3	4
			kerja yang keras untuk mencangkulnya;
2.	Gleisol	Abuki, Padangguni, Bondoala	- Tanah basah
3.	Kambisol	Besolutu, Sampara, Morosi, Bondoala, Pondidaha, Wawotobi, Unaaha.	- Tanah kambisol merupakan tanah yang mempunyai horizon B kambik dan horizon A umbrik atau molik, tidak terdapat gejala hidromorfik.
4.	Litosol	Soropia, Lalonggasumeeto, Tongauna, Abuki, Latoma, Asinua	- Jenis tanah yang berbatu-batu dengan lapisan tanah yang tidak terlalu tebal. - Mempunyai penampang yang besar, berbentuk kerikil, pasir, dan bebatuan kecil.
5.	Mediteran	Sampara, Morosi, Bondoala, Besolutu, Puriala, Abuki.	- Tidak memiliki unsur hara, sehingga tanah jenis ini tidak subur. - Sangat mudah untuk dilalui air. - Terbentuk dari pelapukan batuan kapur atau batu kapur yang sudah hancur. - Tanah ini hanya berkontribusi sedikit dalam bidang pertanian. - Merupakan tanah yang sangat cocok untuk pertumbuhan pohon jati.
6.	Organosol	Sampara, Besolutu,	- Tanah Organosol

No.	Jenis Tanah	Wilayah Persebaran	Karakteristik tanah
1	2	3	4
		Bondoala, Pondidaha, Puriala, Lambuya, Wonggeduku, Pondidaha, Wawatobi, Unaaha	merupakan tanah yang lembab dan sangat banyak mengandung bahan organik.
7.	Regosol	Bondoala, Lambuya, Wonggeduku, Wawatobi, Tonggauna, Abuki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai butiran-butiran kasar.</li> <li>- Peka terhadap erosi.</li> <li>- Kaya unsur hara.</li> <li>- Mampu mempunyai air yang tinggi.</li> </ul>

*Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Konawe Tahun 2014-2030*

#### **f) Oceanografi**

Kabupaten Konawe memiliki perairan ± 1.960 Km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai sekitar 50,72 KM dan 10 pulau kecil dengan potensi yang cukup besar untuk hasil perikanan laut dan budidaya rumput laut. Disamping itu panorama laut dan pantai yang cukup memikat hati dapat pula dikembangkan sebagai objek pariwisata. Tercatat saat ini terdapat 3 (destinasi) wisata pantai yang sangat familiar di Sulawesi Tenggara yakni Pantai Toronipa dan Pantai Bokori (Pulau Bokori) di Kecamatan Soropia dan Pantai Batu Gong di Kecamatan Lalonggasumeeto.

Beberapa jenis ikan dari perairan laut Kabupaten Konawe diantaranya seperti Cakalang, Tongkol, Ikan Teri, Ikan Layang, Udang dan lain-lain. Sedangkan untuk hasil laut lainnya seperti Teripang, Jamping-Jamping, Lola, Mutiara dan Agar-agar/Rumput laut.



### g) **Klimatologi**

Di Kabupaten Konawe dikenal dua musim yaitu musim penghujan (bulan November sampai dengan Maret) dan sekitar bulan April terjadi Pancaroba, Agustus sampai Oktober terjadi musim kemarau. Namun melihat fenomena yang ada bahwa sebagai akibat kondisi alam yang sering tidak menentu maka keadaan musim juga sering menyimpang dari kebiasaan. Pola Curah hujan tahunan di Kabupaten Konawe :

- 1) Antara 0 – 1.500 mm terdapat dibagian selatan (Kecamatan Puriala, Kecamatan Lambuya, Kecamatan Onembute) dan sedikit bagian tengah (Kecamatan Unaaha);
- 2) Antara 1.500 mm – 1.900 mm meliputi Kecamatan Lambuya, Kecamatan Soropia, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kecamatan Bondoala, Kecamatan Sampara, Kecamatan Wawotobi, dan sebagian Kecamatan Unaaha;
- 3) lebih dari 1900 mm terdapat dibagian tengah.

### h) **Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan di Kabupaten Konawe diperuntukan untuk lahan sawah, lahan bangunan dan halaman sekitarnya, tegal/kebun/ladang/huma, padang rumput, tambak/kolam/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan rakyat, hutan negara, perkebunan, lahan yang sementara tidak diusahakan dan lain sebagainya.

Tabel 2.7

Penggunaan Lahan Kabupaten Konawe

<b>No.</b>	<b>Penggunaan lahan</b>	<b>2017</b>	<b>(%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Tanah sawah	36.295	6,26
2.	Pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya	13.627	2,35
3.	Tegal/kebun	17.601	3,04
4.	Ladang/Huma	15.515	2,68
5.	Padang rumput	39.964	6,89
6.	Rawa yang tidak ditanami	-	-
7.	Tambak, kolam, tebat, empang	-	-
8.	Lahan yang sementara tidak	51.814	8,94
9.	diusahakan	22.450	3,87
10.	Lahan tanaman kayu-kayuan hutan	339.25	58,50
11.	rakyat	43.375	7,48
12.	Hutan negara	-	-
	Perkebunan		
	Lainnya		
	Jumlah	<b>579.894</b>	<b>100</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018*

**i) Daya Dukung Lahan**

Berdasarkan kajian KLHS RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 disimpulkan bahwa pada periode 2018-2023 disimpulkan bahwa kemampuan daya dukung lahan pangan, ketersediaan dan kebutuhan pangan beras, serta ambang batas penduduk terhadap pemenuhan kebutuhan pangan beras dan status daya dukung pangan beras di Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa status daya dukung pangan beras cukup tersedia, namun pada tingkat kecamatan terdapat beberapa kecamatan yang rawan pangan dengan status daya dukung pangan sudah melewati ketersediaan pangan beras. Wilayah Kecamatan yang dimaksud yakni Soropia, Lalonggasumeeto, Sampara, Besulutu, Anggalomoare, Unaaha, Tongauna Utara dan Routa. Olehnya itu wilayah-wilayah tersebut akan menjadi prioritas penanganan kebijakan bidang ketahanan pangan.

Sementara untuk daya tampung ternak sapi dengan sistem padang penggembalaan di Kabupaten Konawe yang sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan pakan ternak sapi yaitu sebanyak 7.743 ekor lebih tinggi dibanding dengan jumlah ternak yang ada saat ini yaitu sebanyak 24.661 ekor ternak sapi. Hal ini menunjukkan ketersediaan lahan untuk padang penggembalaan semakin terbatas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pakan ternak secara layak. Status daya dukung tampung ternak yang terbatas ini, ditunjukkan oleh sebagian besar kecamatan yakni 27 kecamatan sudah melewati daya tampung ternak sapi dan hanya ada 2 kecamatan yang belum melewati daya tampung ternak sapi dengan sistem penggembalaan yakni Kecamatan Lalonggasumeeto dan Kecamatan Soropia. Oleh karena itu, dalam rangka mensukseskan **“program sejuta sapi”** akan diformulasikan langkah startegis guna menunjang ketersediaan pakan ternak diwilayah Kabupaten Konawe.

Untuk status daya dukung sumber daya air, diketahui bahwa sebagian besar wilayah kecamatan rentan mengalami defisit ketersediaan air bagi penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Olehnya itu kedepan perlu dilakukan intervensi kebijakan seperti a) mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya air; b) meningkatkan teknologi pengolahan air bagi penduduk; c) menyediakan sumber-sumber air yang layak dengan memperhatikan ambang batas ketersediaan air terhadap jumlah penduduk disetiap wilayah kecamatan.

#### j) **Potensi Pengembangan Wilayah**

Gambaran mengenai eksisting geografis Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa daerah ini memiliki potensi yang sangat besar diberbagai sektor ekonomi. Letak geostrategis Kabupaten Konawe di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sangat menguntungkan karena Kabupaten Konawe menjadi urat nadi aktifitas lalu lintas peredaran barang dan jasa baik antar daerah maupun lintas daerah provinsi.

Disamping itu keunggulan komparatif daerah ini terletak pada sumber daya alam yang dimilikinya. Struktur geologi tanah, potensi oceanografi, topografi wilayah, potensi hidrologi didukung dengan klimataolgi wilayah serta penggunaan lahan yang ada hingga kini menjadi perpaduan sumber daya yang sangat mumpuni untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi terutama dibidang pertanian dalam arti luas.

Hingga saat ini potensi-potensi tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Konawe namun masih perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi yang ada tersebut sehingga masyarakat dapat menerima manfaat yang maksimal atas sumber daya yang dimiliki daerah ini.

Pengembangan wilayah Kabupaten Konawe kedepan tidak terlepas dari arahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034. Dimana arah pemanfaatan ruang di Kabupaten Konawe secara detail telah dipaparkan dalam dokumen tersebut. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan kedepan adalah mengidentifikasi kembali aktifitas penggunaan dan pemanfaatan ruang yang ada saat ini. Selain untuk memastikan ketaatan masyarakat dalam pemanfaatan ruang, hal ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai hambatan dan tantangan masyarakat dalam memanfaatkan potensi ruang yang ada.

Tabel 2.8  
Kawasan Budidaya Menurut Arahan RTRW Kabupaten Konawe Tahun  
2014-2034

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	2	3
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	
	a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ditetapkan seluas 91.355,08 Ha	Kecamatan Abuki, Rوتا, Latoma, Lambuya, Unaaha,

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	2	3
		Wawotobi, Pondidaha
	b. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) ditetapkan seluas 51.188,84 Ha	Kecamatan Abuki, Routa, Latoma, Lambuya, Unaaha, Wawotobi, Pondidaha dan Sampara
	c. Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) ditetapkan seluas 3.787,79 Ha	Kecamatan Pondidaha, Latoma, Abuki, dan Lambuya
2	Rencana Kawasan Hutan Rakyat	Kecamatan Abuki, Latoma dan Lambuya
3	Kawasan Peruntukan Pertanian	
	a. Kawasan Peruntukan tanaman Pangan	Kecamatan Tongauna, Abuki, Wonggeduku, Amonggedo, Uepai, Wawotobi, Lambuya, Pondidaha, Meluhu, Bondoala, Onembute Puriala, Asinua, Unaaha, Anggaber, Konawe Latoma
	b. Kawasan Peruntukan hortikultura	Kecamatan Anggaber, Uepai dan Abuki
	c. Kawasan peruntukan perkebunan	
	Tanaman perkebunan dengan komoditi unggulan meliputi kakao, jambu mete, lada, kopi, kelapa, kelapa sawit, cengkeh dan sagu	Kecamatan Tongauna, Abuki, Wonggeduku, Uepai, Wawotobi, Lambuya, Pondidaha, Meluhu, Bondoala, Onembute, Puriala, Asinua Unaaha, Anggaber, Konawe, Latoma, Kapoiala, Routa

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	2	3
		dan Sampara
	d. Kawasan peruntukan peternakan	
	1) Ternak besar	
	➤ Ternak sapi	Kecamatan Uepai, Puriala, Amonggedo, Wawotoni Abuki, dan Tongauna
	➤ Ternak Kerbau	Kecamatan Uepai, Puriala, Wonggeduku, Abuki, Latoma, dan Tongauna
	➤ Ternak Kuda	Kecamatan Pondidaha dan Unaaha
	2) Ternak kecil	
	➤ Ternak Kambing	Setiap Kecamatan
	➤ Ternak babi	Kecamatan Lambuya , Uepai, Onembute, Pondidaha, Wonggeduku, Amonggedo, Abuki dan Tongauna
	➤ Ternak Unggas	Setiap Kecamatan
4	Kawasan Peruntukan Perikanan	
	a. Kawasan peruntukan Perikanan tangkap	
	1) Kawasan Peruntukan perikanan tangkap	Perairan laut di kecamatan Soropia dan Lalonggasumeeto
	2) Sarana dan prasarana perikanan tangkap	
	➤ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	
	PPI Rapambinopaka	Kecamatan Lalonggasumeeto
	➤ Rencana PPI	Kecamatan Kapoiala

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	2	3
	b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan	
	1) Budidaya perikanan	
	➤ Budidaya perikanan air tawar	Kecamatan Lambuya, Uepai, Puriala, Pondidaha Wonggeduku, Amonggedo, Wawotobi, Meluhu, Konawe, Unaaha, Anggaber, Abuki, Tongauna, Sampara, Onembute, Besulutu, dan Latoma
	➤ Budidaya perikanan air payau	Kecamatan Soropia, Bondoala, dan Kapoiala
	➤ Budidaya perikanan laut	Kecamatan Lalonggasumeeto kecamatan Soropia
	2) Sarana dan prasarana perikanan budidaya	
	➤ Balai Benih Ikan (BBI) Abeli Sawah	Kecamatan Sampara
	➤ Usaha Penerbitan Rakyat (UPR) dan Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT)	Kecamatan Unaaha, Anggaber, Konawe, Wawotobi, Wonggeduku, Abuki, Lambuya, Uepai, Puriala, Meluhu, Onembute, Besulutu, Latoma, Amonggedo, Pondidaha, Tongauna, Sampara, Lalonggasumeeto dan Soropia
	c. Kawasan pengolahan perikanan	Kecamatan Lalonggasumeeto



No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	2	3
		kecamatan Soropia
	d. Rencana kawasan minapolitan	Kecamatan Lalonggasumeto kecamatan Soropia
	e. Kawasan pulau-pulau kecil	
	1) Pulau berpenghuni	Pulau Saponda Darat di Kecamatan Soropia
	2) Pulau tidak berpenghuni	Pulau Bokori, Pulau Dangedangea dan Pulau Saponda Laut di Kecamatan Soropia
5	Kawasan Peruntukan Pertambangan	
	Rencana WP	
	a. Rencana Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)	
	1) Mineral logam	
	Nikel Laterit, besi, kromit, kobalt dan emas	Kecamatan Routa, Puriala, Pondidaha, Amonggedo Besulutu dan Latoma
	2) Mineral bukan logam	
	➤ Pasir kuarsa	Kecamatan Meluhu
	➤ Batu setengah permata	Kecamatan Pondidaha Kecamatan Puriala
	➤ Mika	Kecamatan Latoma Kecamatan Asinua
	➤ Kuarsit	Kecamatan Latoma Kecamatan Asinua
	➤ Asbes	Kecamatan Routa
	➤ Talk	Kecamatan Routa
	➤ Oker	Kecamatan Routa
	➤ Rijang	Kecamatan Routa
	➤ Grafit	Kecamatan Sampara
	➤ Endapan Fosfat	Kecamatan Latoma Kecamatan Routa
	3) Mineral batuan	
	➤ Marmer	Kecamatan Latoma

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	2	3
	➤ Batu sabak	Kecamatan Latoma Kecamatan Asinua
	➤ Batu gamping	Kecamatan Routa Kecamatan Pongidaha
	➤ Peridotit	Kecamatan Routa Kecamatan Puriala Kecamatan Pongidaha
	➤ Genes	Kecamatan Latoma
	➤ Lempung dan Pasir batu	Setiap Kecamatan
	b. Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	Lokasi dilakukannya kegiatan tambang rakyat yang memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
	➤ Penambangan pasir dan batu	Kecamatan Unaaha, Konawe, Sampara, Bondoala, Kapoiala, Uepai, Besulutu, dan Pongidaha
	➤ penambangan tanah liat	Kecamatan Pongidaha, Besulutu, Onembute, dan Puriala
	c. Rencana Wilayah Pencadangan Negara (WPN)	
	Kawasan lindung dengan cadangan berupa tambang berupa nikel	Kecamatan Routa, Puriala, dan Pongidaha
	6 Kawasan Peruntukan Industri	
	a. Kawasan Peruntukan Industri Mikro, kecil dan Menengah	
	1) Industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	
	a) Industri pengolahan kedelai	
	➤ Industri minuman sari kedelai	Kecamatan Unaaha

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	2	3
	➤ Pembuatan tahu dan tempe	Kecamatan Lambuya, Uepai, Wawotobi, Unaaha dan Tongauna
	b) Industri Pengolahan Sagu	Kecamatan Unaaha, dan Sampara
	c) Industri Pengolahan padi	Kecamatan sampara, Amonggedo, Pondidaha, Wonggeduku, Meluhu, Anggaberu, Unaaha, Konawe, Wawotobi, Laambuya, Abuki, dan Asinua
	2) Industri pengolahan hasil perkebunan	
	a) Industri pengolahan kakao	
	Pengeringan Kakao	Kecamatan Unaaha dan Wawotobi
	b) Industri Pengolahan Kopi	
	Penggilingan kopi dan kopi bubuk	Kecamatan Unaaha, Sampara, dan Amonggedo
	c) Industri Pengolahan Kelapa	
	Pembuatan minyak Kelapa	Kecamatan Tongauna, Kapoiala, Latoma, Wawotobi, dan Lambuya
	3) Industri pengolahan hasil laut dan perikanan	
	a) Industri Pengolahan rumput laut	
	Pengeringan rumput laut	Kecamatan Kapoiala, Lalonggasumeeto, dan Soropia
	b) Industri makanan olahan ikan	
	Pembuatan abon ikan	Kecamatan Sampara
	c) Industri pembekuan ikan	Kecamatan soropia

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	2	3
	d) Industri Pembuatan garam	Kecamatan Lalonggasumeeto
	4) Industri pemanfaatan hasil hutan	
	a) Industri Penggergajian kayu dan kayu olahan	Kecamatan Unaaha, Sampara, onembute, lambuya, Uepai, Wonggeduku, Kapoiala, Bondoala, Konawe, Wawotobi, Abuki, Routa, Amonggedo, Besulutu, Tongauna, dan Lalonggasumeeto
	b) Industri mabel kayu	Kecamatan Unaaha, Wawotobi, Konawe, dan Pondidaha
	c) Industri pengawetan dan pengolahan rotan	Kecamatan Unaaha, Uepai, Latoma, puriala, soropia, onembute, Anggaberu, Sampara, Tongauna, Abuki, Konawe, Routa, Besulutu, Amonggedo dan lambuya
	5) Industri pemanfaatan hasil pertambangan	
	a) Pengolahan batu pecah (Split)	
	b) Pengolahan/pengambilan pasir dan kerikil	
	➤ Pengolahan/pengambilan Pasir dan kerikil	
	➤ Pembuatan paving block	
	➤ Pembuatan batako, cincin, sumur/gorong-gorong dan aneka	

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	2	3
	ubin	
	c) Industri pengolahan tanah liat	
	Pembuatan batu bata merah dan gerabah	Kecamatan Pondidaha, Onembute, dan besulutu
	d) Pengolahan batu kapur	
	6) Industri pengolahan hasil Peternakan	
	a) Industri penggilingan daging	
	b) Industri ternak unggas	
	c) Industri ternak sapi potong	
	b. Kawasan peruntukan industri besar	
	1) Rencana kawasan industri rotan dan kayu	Kecamatan Anggaberu
	2) Rencana kawasan industri	Kecamatan Puriala, Pondidaha, Bondoala, Kapoiala, dan Amonggedo
7	Kawasan Peruntukan Pariwisata	
	a. Kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari	
	➤ Pantai Bokori	Kecamatan Soropia
	➤ Pantai Toronipa	Kecamatan Soropia
	➤ Gugusan pulau – pulau	Pulau Bokori, Pulau Saponda Darat dan Pulau Saponda Laut di kecamatan soropia
	➤ Pantai Batu Gong	Kecamatan Kapoiala
	➤ Taman wisata perairan pada Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara	Perairan pesisir Kabupaten Konawe

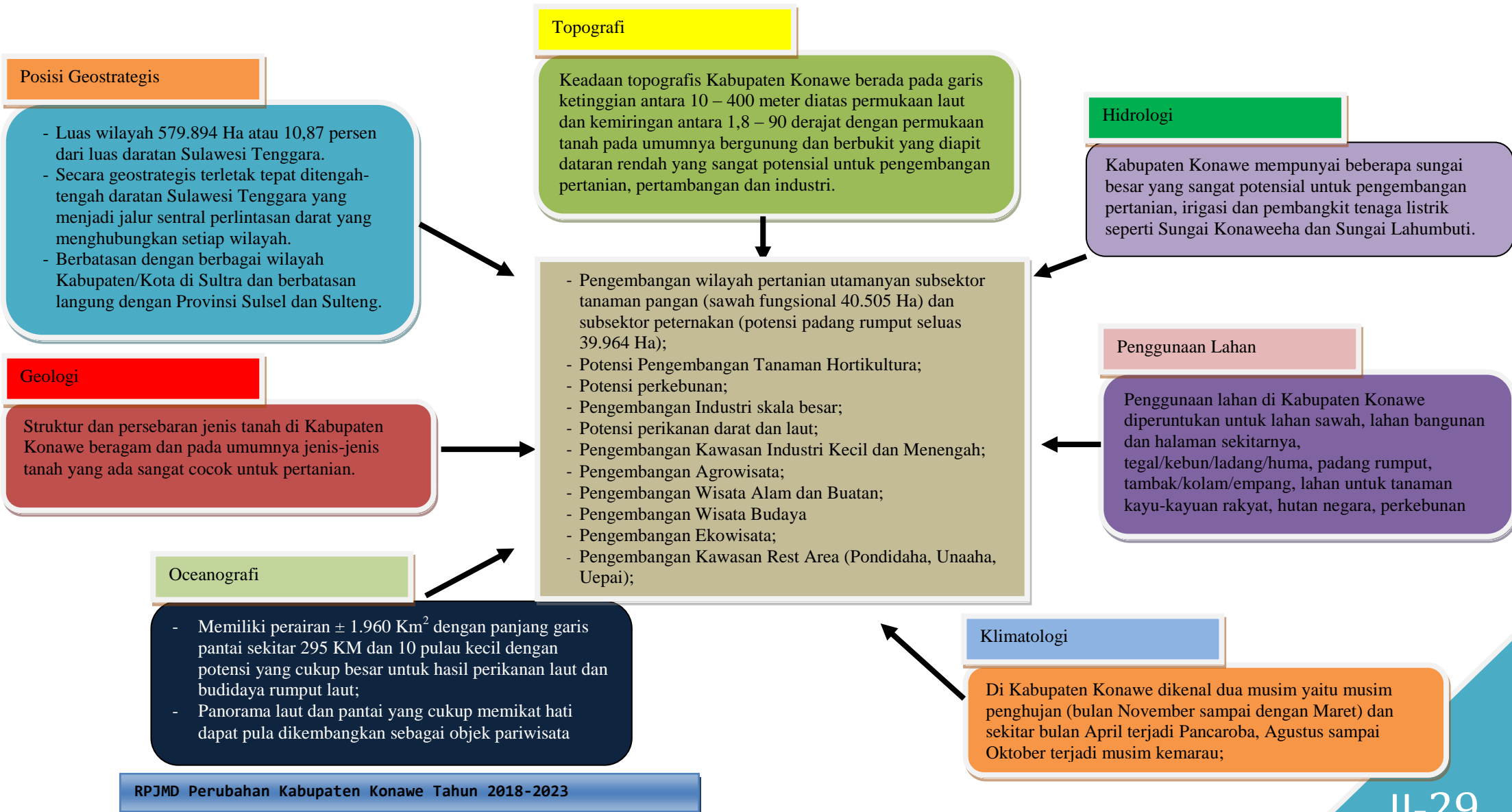
No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	2	3
	b. Kawasan peruntukan pariwisata Alam pegunungan/hutan	
	➤ Air Terjun Larowiu	Kecamatan Meluhu
	➤ Air Terjun Anawai	Kecamatan Sampara
	➤ Air Terjun Kumapodahu	Kecamatan Anggaberu
	➤ Air Terjun Rukuo	Kecamatan Lambuya
	c. Kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya	
	1) Wisata Sejarah	
	Benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya	Kawasan cagar budaya
	2) Kehidupan adat, tradisi masyarakat dan aktifitas budaya yang khas serta kesenian	
	Pesta adat, pesta panen, atraksi tarian dan musik tradisional	Kabupaten Konawe
	3) Atraksi seni budaya tari dan upacara adat	Kabupaten Konawe
	d. Kawasan wisata buatan	
	➤ Kolam Air Panas Sonai	Kecamatan Lambuya
	➤ Lapangan MTQ	Kecamatan Unaaha
	➤ Rencana taman kota dan alun-alun	Kecamatan Unaaha
8	Kawasan peruntukan permukiman	
	a. Kawasan permukiman perkotaan	Kawasan Perkotaan Unaaha
		Setiap ibukota kecamatan
	b. Kawasan permukiman perdesaan	
	1) Kawasan permukiman perdesaan	Setiap Kecamatan
	2) Kawasan permukiman Transmigrasi	
	➤ Permukiman transmigrasi eksisting	Kecamatan Pongidaha, Wawotobi, Wonggeduku, Meluhu, Unaaha, Lambuya,



No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	2	3
		Uepai, Puriala, Onembute, Amonggedo, Tongauna, dan Abuki
	➤ Rencana permukiman Transmigrasi	Kecamatan Asinua, Rوتا, Latora dan Amonggedo
	3) Permukiman pantai	Kecamatan Kapoiala, Soropia, Bondoala dan Lalonggasummeto
9	Kawasan peruntukan lainnya	
	a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	
	1) Kawasan latihan militer Anggota	Kecamatan Wawotobi
	2) Kepolisian Resort (Polres)	Kecamatan Unaaha
	3) Komando Distrik Militer (Kodim)	Kecamatan Unaaha
	4) Polsek dan koramil	Setiap Kecamatan
	b. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan	Kompleks perkantoran di Kecamatan Unaaha

Sumber : RTRW Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034

**Gambar 2.3 Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Kondisi Geografis Kabupaten Konawe**



**k) Wilayah Rawan Bencana**

Disamping memperhatikan potensi pengembangan wilayah, sangat penting untuk memperhatikan wilayah-wilayah yang rawan terhadap kejadian bencana alam. Sehingga dalam pengambilan kebijakan dapat dipertimbangkan aspek kewaspadaan terhadap kejadian bencana alam yang mungkin terjadi. Untuk daerah-daerah rawan bencana berdasarkan kajian RTRW Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034 telah dipetakan potensi terjadinya kerawanan bencana berdasarkan klasifikasi potensi sumber bencana.

Tabel 2.9  
Kawasan Rawan Bencana

No.	Kawasan Rawan Bencana	Lokasi
1	2	3
I.	Kawasan Rawan Bencana Alam	
	a. Kawasan rawan tanah longsor	Desa Abeli Sawa dan Galu Kecamatan Sampara
		Desa Diolo Kecamatan Bondoala
	b. Kawasan rawan banjir	Desa Waworaha Kecamatan Lambuya
		Desa Diolo dan Kelurahan Laosu di kecamatan Bondoala
		Desa Rawua Kecamatan Sampara
		Desa Inolobu, Palarahi, Inalahambuti dan Anggota di Kecamatan Wawotobi
		Desa Uelawu Kecamatan Konawe
		Desa Rawua Kecamatan Uepai
	c. Kawasan rawan angin puting beliung	Kecamatan Wonggeduku, Puriala dan Tongauna

No.	Kawasan Rawan Bencana	Lokasi
1	2	3
II.	Kawasan Lindung Geologi	
	a. Kawasan rawan bencana alam Geologi	
	1) Kawasan rawan gempa bumi	
	Titik kejadian gempa bumi yang pernah terjadi	Wilayah laut di Kecamatan Lalonggasumeeto, Soropia dan Kapoiala
	2) Kawasan rawan gerakan tanah	
	➤ Zona kerentanan tinggi	Kecamatan Routa
	➤ Zona kerentanan rendah	Setiap Kecamatan
	➤ Zona kerentanan sangat rendah	Kecamatan Onembute, Kecamatan Puriala
	3) Kawasan rawan tsunami	Pesisir pantai di sebagian Kecamatan Kapoiala
		Pesisir pantai di seluruh Kecamatan Lalonggasumeeto dan Soropia
	4) Kawasan rawan abrasi	Pesisir pantai di kecamatan Kapoiala, Lalonggasumeeto dan Soropia

Sumber : RTRW Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034

### 2.1.2 Aspek Demografi

Penyajian informasi mengenai aspek demografi memperhatikan kondisi perkembangan kependudukan yang meliputi struktur kependudukan menurut jenis kelamin dan menurut kelompok umur, distribusi kependudukan per wilayah kecamatan.

#### a) Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Konawe dapat dikategorikan masih dapat terkendali ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah setiap tahunnya rata-rata hanya mencapai 1,14% per tahun. Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 251.285 jiwa, pada tahun 2018 bertambah menjadi 257.196 jiwa, kemudian pada tahun 2019 bertambah sebanyak 258.807 jiwa, dan pada tahun 2020 sebanyak 259.946 jiwa.

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Penduduk Per Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga**  
**Kabupaten Konawe Tahun 2020**

NO	KECAMATAN	LAKI -LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	KEPALA KELUARGA
1	2	3	4	5	6
1	LAMBUYA	4,085	3,749	7,834	2,398
2	UNAAHA	12,860	12,809	25,669	7,717
3	WAWOTOBI	8,450	8,216	16,666	4,024
4	PONDIDAHA	6,842	6,396	13,238	4,012
5	SAMPARA	4,803	4,558	9,361	2,845
6	ABUKI	4,390	4,231	8,621	2,632
7	SOROPIA	4,806	4,621	9,427	2,890
8	TONGGAUNA	5,137	4,692	9,829	5,477
9	LATOMA	1,655	1,417	3,072	882
10	PURIALA	4,866	4,557	9,423	2,851
11	UEPAI	7,626	7,068	14,694	4,542
12	WONGGEDUKU	7,305	6,849	14,154	4,384
13	BESULUTU	4,496	4,228	8,724	2,629
14	BONDOALA	2,892	2,588	5,480	1,691
15	ROUTA	1,891	1,573	3,464	968
16	ANGGABERI	6,681	3,459	10,140	2,156
17	MELUHU	2,908	2,698	5,606	1,802
18	AMONGGEDO	5,711	5,278	10,989	3,497
19	ASINUA	1,633	1,426	3,059	911
20	KONAWA	4,921	4,730	9,651	2,910

NO	KECAMATAN	LAKI -LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	KEPALA KELUARGA
1	2	3	4	5	6
21	KAPOILA	3,521	2,818	6,339	2,243
22	LALONGGASU MEETO	2,738	2,671	5,409	1,696
23	ONEMBUTE	3,782	3,534	7,316	2,316
24	PADANGGUNI	4,669	4,365	9,034	2,805
25	MOROSI	3,526	3,041	6,567	2,117
26	ANGGALOMOARE	2,5	2,406	5,005	1,483
27	WONGGEDUKU BARAT	4,686	4,414	9,100	2,687
28	ANGGOTOA	2,932	2,9	5,931	2,117
29	TONGGAUNA UTARA	3,214	2,930	6,144	2,802
<b>JUMLAH</b>		<b>135,625</b>	<b>124,321</b>	<b>259,946</b>	<b>81,484</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*

**Grafik 2.1**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017-2020**



*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*



**b) Kepadatan Penduduk dan Persebaran Jumlah Penduduk Per Wilayah Kecamatan**

Kepadatan penduduk Kabupaten Konawe hingga tahun 2017 tercatat hanya mencapai 42,39 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Unaaha dengan kepadatan sebesar 910,25 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Rوتا sebesar 1,4 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Ditinjau dari sisi persebaran dan perkembangan penduduk per Kecamatan telah terbentuk polarisasi yang cenderung sama dari tahun ke tahun dimana terdapat beberapa wilayah kecamatan yang sejak beberapa tahun lalu memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dibanding dengan wilayah kecamatan lainnya. Polarisasi ini terbentuk mengikuti tingkat keterjangkauan wilayah. Pada wilayah-wilayah Kecamatan terpencil kecenderungan jumlah penduduknya lebih kecil dan perkembangannyapun juga tidak berlangsung signifikan. Sebaliknya wilayah-wilayah Kecamatan berpenduduk cukup besar berada pada jalur sentral wilayah Kabupaten Konawe. Perkembangan jumlah penduduknya juga relatif lebih tinggi dibanding dengan wilayah-wilayah kecamatan terpencil.

Tabel 2.11

Jumlah Penduduk dan Distribusi Kepadatan Penduduk Kabupaten Konawe Tahun 2020

NO	KECAMATAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE PENDUDUK	LUAS WILAYAH (KM2)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LAMBUYA	4085	3749	7834	3,01	9,85	79,57
2	UNAHAHA	12860	12809	25669	9,87	2,82	910,25
3	WAWOTOB	8450	8216	16666	6,41	10,26	162,42
4	PONDIDAHA	6842	6396	13238	5,09	11,02	120,14
5	SAMPARA	4803	4558	9361	3,60	4,55	205,92
6	ABUKI	4390	4231	8621	3,32	16,48	52,31
7	SOROPIA	4806	4621	9427	3,63	5,12	184,19
8	TONGGAUNA	5137	4692	9829	3,78	22,12	44,44
9	LATOMA	1655	1417	3072	1,18	94,91	3,24
10	PURIALA	4866	4557	9423	3,62	13,63	69,15
11	UEPAI	7626	7068	14694	5,65	19,52	75,29
12	WONGGEDUKU	7305	6849	14154	5,44	6,53	216,82
13	BESULUTU	4496	4228	8724	3,36	9,60	90,88

NO	KECAMATAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE PENDUDUK	LUAS WILAYAH (KM2)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2)
1	2	3	4	5	6	7	8
14	BONDOALA	2892	2588	5480	2,11	4,60	119,13
15	ROUTA	1891	1573	3464	1,33	246,98	1,40
16	ANGGABERI	6681	3459	10140	3,90	9,92	102,27
17	MELUHU	2908	2698	5606	2,16	11,06	50,71
18	AMONGGEDO	5711	5278	10989	4,23	17,12	64,18
19	ASINUA	1633	1426	3059	1,18	34,12	8,97
20	KONAWA	4921	4730	9651	3,71	-	-
21	KAPOILA	3521	2818	6339	2,44	3,55	178,61
22	LALONGGASU MEETO	2738	2671	5409	2,08	3,22	168,19
23	ONEMBUTE	3782	3534	7316	2,81	14,57	50,22
24	PADANGGUNI	4669	4365	9034	3,48	22,01	41,04
25	MOROSI	3526	3041	6567	2,53	11,86	55,36
26	ANGGALOMOARE	25	2406	5005	1,93	1,92	261,22
27	WONGGEDUKU BARAT	4686	4414	9100	3,50	3,50	260,00
28	ANGGOTOA	2932	29	5931	2,28	-	-
29	TONGGAUNA UTARA	3214	2930	6144	2,36	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>135625</b>	<b>124321</b>	<b>2546</b>	<b>100</b>	<b>613,21</b>	<b>42,39</b>

Sumber : Diolah dari data Bagian Pemerintahan Umum dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada dasarnya segala muara dari proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan yakni bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kondisi ideal masyarakat yang berada pada tataran kesejahteraan saat ini menjadi idaman setiap pemerintahan. Upaya mencapai kesejahteraan tidak dapat dilakukan sekejap namun membutuhkan proses yang menuntut ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam secara berkelanjutan.

Olehnya itu, dalam proses perencanaan pembangunan analisis mengenai aspek kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implikasi kebijakan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis ini akan memberikan informasi kepada

pemerintah mengenai capaian kinerja pelaksanaan pemerintahan pada setiap unit kerja pemerintah daerah.

Ruang lingkup analisis mengenai aspek kajian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe meliputi fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kondisi umum fokus kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe dapat dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi; PDRB per kapita; dan laju inflasi.

#### a. Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu factor yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan Ekonomi suatu Wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu Wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan Masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan factor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan factor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan Masyarakat meningkat, sebab Masyarakat pemilik factor produksi. Pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.12

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Tahun 2019-2020

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun%
1	Kabupaten Konawe (%)	11,84%	6,42%	Turun 0,14%
2	Provinsi Sultra (%)	6,50%	-0,65%	Turun 7,15%
3	Peringkat Provinsi	1	1	Tetap

**Sumber Dokumen : BPS Sultra, BPS Konawe**

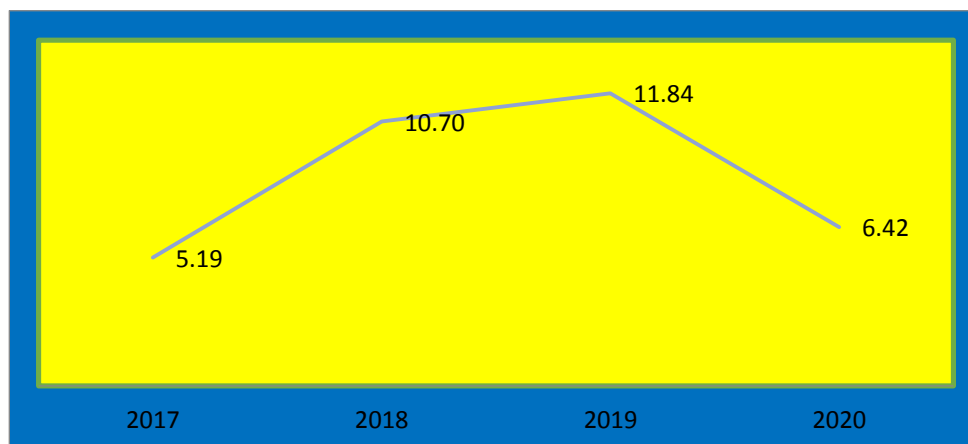
Selama kurun waktu tahun 2018 – Tahun 2020 perekonomian Kabupaten Konawe Mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tersebut dapat mencapai 9,65%. pada periode tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe sebesar 10,70% dan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe sebesar 11,84% dan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe masih tumbuh positif ditengah Pandemi Covid- 19 yakni sebesar 6,42%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Konawe menempati urutan pertama dari laju pertumbuhan kabupaten/kota lainnya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian ini merupakan hal yang sangat

baik jika dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengalami perlambatan pertumbuhan hingga ke level minus. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Konawe menjaga momentum pertumbuhan tetap positif ini dikarenakan strategi Pemerintah Kabupaten Konawe mendorong agar masyarakat tetap memiliki produktifitas dari berbagai sektor usaha yang ada. Dalam menghadapi ancaman resesi perekonomian yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Konawe memang tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi resiko penyebaran Covid-19 yakni dengan melakukan blocking terhadap kluster wilayah yang terindikasi terdapat kasus Covid-19, sehingga masyarakat pada wilayah lainnya masih tetap dapat beraktifitas dengan tentunya tetap mematuhi protokol Kesehatan. Strategi ini cukup berhasil sehingga masyarakat masih tetap beraktifitas dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Disamping itu kehadiran investasi besar pada Kawasan Industri Konawe (KIK) Morosi memang menjadi salah satu factor utama terjagannya momentum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe dalam 3 (tiga) tahun terakhir tetap mengalami pertumbuhan yang positif.

Kinerja perekonomian daerah yang menunjukkan perkembangan yang sangat baik ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui serangkaian kebijakan penganggaran yang diarahkan untuk terus merangsang geliat pembangunan ekonomi disektor-sektor unggulan. Diperkirakan kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang akan terus berada pada momentum positif mengingat terus berkembangnya investasi di Kabupaten Konawe.

**Grafik 2.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020**



Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2020*

Pada periode tahun 2013-2017 struktur perekonomian Kabupaten Konawe masih didominasi oleh peran sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Namun kecenderungan tersebut mulai bergeser pada periode 2017-2020. Dimana ini peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mulai disusul dengan meningkatnya peran sektor industri pengolahan. Hal ini tidak terlepas dari beroperasinya Kawasan Industri Konawe (KIK) Morosi yang memberikan kontribusi kenaikan produksi yang cukup signifikan. Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang sangat positif mengingat selama ini perekonomian Kabupaten Konawe praktis hanya mengandalkan sektor primer. Dengan berkembang pesatnya sektor usaha manufaktur ini artinya struktur perekonomian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe tidak lagi bersifat semu karena pertumbuhannya telah ditopang sektor sekunder.

Tabel 2.13  
Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-2020

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,46	28,53	26,53	24,85
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalan	13,50	12,75	11,82	10,00
<b>C</b>	Industri Pengolahan	5,00	11,10	16,72	24,00
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,03	0,03



No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,09	0,08
<b>F</b>	Konstruksi	13,86	13,42	12,92	11,63
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,15	10,84	10,44	9,33
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	1,14	1,12	1,06	0,95
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,54	0,52	0,50	0,45
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	0,83	0,79	0,73	0,72
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,86	1,72	1,62	1,54
<b>L</b>	Real Estat	2,33	2,1	1,91	1,77
<b>MN</b>	Jasa Perusahaan	0,16	0,15	0,14	0,13
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,48	8,7	7,97	7,32
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	5,88	5,6	5,14	4,89
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,45	1,38	1,33	1,36
<b>R,S,T,U</b>	Jasa Lainnya	1,23	1,14	1,04	0,96
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2021*

Berdasarkan data diatas secara keseluruhan kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe masih dapat dikatakan sangat baik. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang sangat baik ini merupakan indikator keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya. Keberhasilan ini memiliki nilai tersendiri karena pemerintah Kabupaten Konawe dapat mendorong peran sektor sekunder dalam kontribusi pembentukan PDRB. Sebab diketahui bahwa dengan berkembangnya sektor sekunder berarti telah memicu terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun demikian keberhasilan ini juga menyisahkan problematika baru dimana potensi tenaga kerja di Kabupaten Konawe masih pada taraf skill menengah kebawah sehingga belum dapat bersaing dengan tenaga

kerja yang memiliki skill tinggi dalam perusahaan. Olehnya itu, dalam periode ini pemerintah Kabuapten Konawe mendorong penyiapan tenaga kerja dengan skill tinggi melalui pembukaan Politeknik Pertambangan dalam rangka memastikan tersedianya tenaga kerja yang mumpuni dibidangnya dan dapat menempati posisi-posisi strategis kedepannya.

Namun yang perlu diperhatikan bahwa upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut tetap memperhatikan basis utama potensi ekonomi Kabupaten Konawe yakni sektor pertanian dalam arti luas, mengingat keunggulan komparatif Kabupaten Konawe adalah terletak pada keunggulan sumber daya alam yang dimilikinya terutama untuk pengembangan pertanian dalam arti luas. Pengembangan sektor pertanian pada subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan merupakan potensi terbesar wilayah Kabupaten Konawe yang harus terus digali mengingat secara geostrategis, wilayah ini menjadi penyokong kebutuhan pangan bagi daerah-daerah disekitarnya. Peran vital tersebut akan terus ditingkatkan hingga dapat memberikan kontribusi tidak saja dalam skala regional sulawesi maupun dapat berperan hingga skala nasional.

Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas menjadi cukup vital karena mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Konawe menggantungkan hidupnya pada aktifitas sektor tersebut. Untuk menjamin peningkatan kesejahteraan para petani maka pemerintah harus dapat memastikan, kedepan rata-rata pendapatan perkapita para petani dapat mencapai level yang memuaskan. Data dibawah ini menunjukan bahwa kecenderungan share pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (pertanian dalam arti luas) masih mengalami penurunan pertumbuhan. Tercatat pada tahun 2017 tumbuh sebesar 4,42%. Selanjutnya pada tahun 2018 pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (pertanian dalam arti luas) menurun 4,02%. Demikian pula pada tahun 2019 hanya dapat tumbuh sebesar 3,78% dan selanjutnya pada tahun 2020 hanya dapat tumbuh sebesar 0,28%. Informasi ini cukup menguatkan argumentasi diatas bahwa perlu adanya langkah khusus untuk meningkatkan sumbangsih pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian dalam arti luas.

Tabel 2.14  
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-  
2020

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,42	4,02	3,78	00,28
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	6,64	5,61	4,17	-6,83
<b>C</b>	Industri Pengolahan	8,13	,34	67,91	48,94
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	6,14	1,91	5,43	1,11
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	5,73	2,79	-2,00
<b>F</b>	Konstruksi	4,92	6,32	6,79	-3,02
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,95	7,21	8,07	-4,55
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	6,41	8,69	6,97	-5,42
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,76	7,47	6,72	4,16
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	9,52	8,25	6,46	8,02
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,41	2,18	6,4	3,24
<b>L</b>	Real Estat	4,41	2,67	3,31	0,18
<b>MN</b>	Jasa Perusahaan	6,76	5,86	4,94	-3,73
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,04	0,36	2,79	-2,09
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	3,02	7,49	4,06	2,06
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,26	6,77	8,3	8,02
<b>R,S,T,U</b>	Jasa Lainnya	2,41	5,73	3,93	-3,85
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2021*

Dapat disimpulkan, bahwa kedepan pemerintah mesti benar-benar melihat peluang terbesar yang dimiliki oleh daerah ini untuk berupaya mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang

diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh agar tercipta ketahanan ekonomi yang kokoh di Kabupaten Konawe.

#### **b. PDRB Per Kapita**

Selama empat tahun terakhir, nilai PDRB Perkapita Kabupaten Konawe atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. PDRB Perkapita Kabupaten Konawe tahun 2016 sebesar 6.655,64 miliar rupiah; tahun 2017 sebesar 7.233,62 miliar rupiah atau meningkat ; tahun 2018 sebesar 8.286,26 miliar rupiah; pada tahun 2019 sebesar 9.514,36 rupiah, dan pada tahun 2020 sebesar 10.303,73. Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan di setiap tahunnya.

Kenaikan PDRB Perkapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB Perkapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama lima tahun terakhir, PDRB Perkapita atas dasar harga konstan 2010 senantiasa mengalami peningkatan. Nilai PDRB Perkapita sebesar 5.300,57 miliar rupiah pada tahun 2016 dan selanjutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 yakni sebesar 7.348,39 miliar rupiah.

Sementara dari sisi PDRB atas dasar harga berlaku juga mengalami kenaikan. Dimana Nilai PDRB Perkapita pada tahun 2016 sebesar 27,95 juta rupiah mengalami perkembangan yang cukup signifikan hingga mencapai 39,63 juta rupiah pada tahun 2020.

Tabel 2.15  
PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2016-2020

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>1</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Nilai PDRB (juta rupiah)</b>					
Atas Dasar Harga Berlaku	6.655.640	7.233.640	8.286.260	9.514.360	10.303.730
Atas Dasar Harga Konstan	5.300.570	5.576.950	6.173.940	6.904.790	7.348.390
<b>PDRB Perkapita (ribu rupiah)</b>					
Atas Dasar Harga Berlaku	27.957,00	29.606,75	32.340,79	36.762,38	39.637,96
Atas Dasar Harga Konstan	22.265,03	22.826,04	24.096,53	26.679,30	28.268,91
Jumlah Penduduk (orang)	238.067,00	244.324,00	256.217,00	258.807,00	259.946,00

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018*

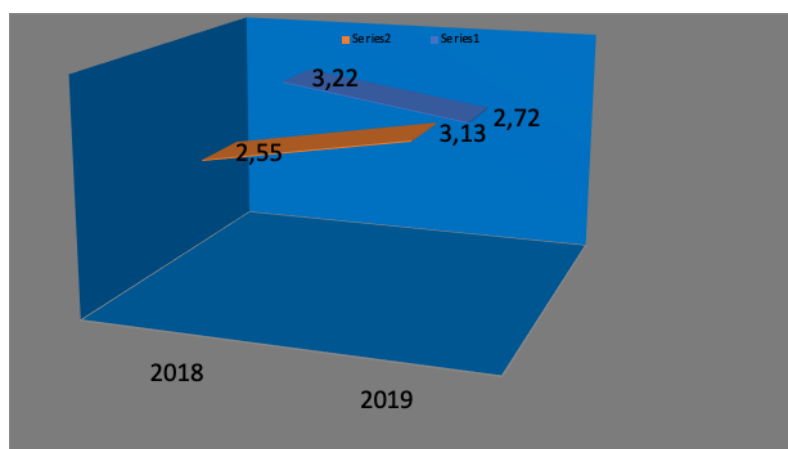
Momentum peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Konawe tahun 2016-2020 ini merupakan kinerja yang cukup menggembirakan. Sebab ditengah-tengah resesi perekonomian global dan pandemic Covid-19 yang hingga saat ini masih berdampak di Indonesia, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Konawe masih dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional. Kesempatan untuk terus meningkatkan ketahanan perekonomian Kabupaten Konawe masih sangat terbuka lebar mengingat potensi yang dimiliki daerah ini. Pemerintah harus memastikan agar bahwa potensi-potensi lokal yang selama ini belum termanfaatkan dengan maksimal harus terus digali terutama pada basic sector ekonomi Kabupaten Konawe.

### **c. Laju Inflasi**

Analisis mengenai inflasi daerah Kabupaten Konawe masih merujuk inflasi yang terjadi di Kota Kendari. Hal ini didasari atas rilis pada website BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini dikarenakan inflasi di Kabupaten Konawe dipengaruhi inflasi di wilayah Kota Kendari. Letak wilayah yang berdampingan membuat aktifitas ekonomi masyarakat Kabupaten Konawe utamanya dalam proses interaksi perdagangan barang dan jasa didominasi dengan interaksi dengan wilayah Kota Kendari.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Konawe juga mengalami fluktuasi. Tercatat pada tahun 2018 inflasi Kabupaten Konawe masih lebih rendah jika dibandingkan inflasi nasional yakni sebesar 2,55% untuk inflasi di Kabupaten Konawe dan 3,13% untuk inflasi nasional. Sedangkan untuk tahun 2019 inflasi Kabupaten Konawe sebesar 3,22% lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 2,72%. Secara umum informasi diatas menunjukkan bahwa inflasi Kabupaten Konawe antara tahun 2018 dan 2019 mengalami fluktuasi jika dibandingkan dengan rata-rata inflasi nasional. Inflasi yang tidak terkendali secara umum biasanya akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan daya saing perekonomian suatu wilayah. Olehnya itu, Pemerintah Kabupaten Konawe mesti terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam melakukan kontrol dan kendali terhadap perkembangan inflasi di Kabupaten Konawe.

**Grafik 2.3**  
**Perkembangan Inflasi Kabupaten Konawe Terhadap Inflasi**  
**Nasional, 2018-2019**



Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2021*

Inflasi Kabupaten Konawe pada tahun 2018 masih dibawah rata-rata inflasi nasional. Kecuali pada tahun 2019 lebih tinggi dari pada inflasi nasional. Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup baik mengingat kenaikan inflasi yang tidak terkendali akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan suatu daerah. Inflasi yang tidak terkendali secara umum biasanya akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan daya saing perekonomian suatu wilayah. Olehnya itu, Pemerintah Kabupaten Konawe mesti terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam melakukan kontrol dan kendali terhadap perkembangan inflasi di Kabupaten Konawe.

Dalam hal upaya pengendalian inflasi daerah pemerintah pusat sebenarnya telah menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di wilayah masing-masing. Saat ini organisasi TPID Kabupaten Konawe belum berfungsi sebagaimana mestinya dalam melakukan tugas-tugasnya memastikan harga-harga bahan pokok dapat terkendali. Kondisi ini perlu dipaparkan untuk memulai langkah pengendalian inflasi yang terorganisir pada lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe. Mengingat pengendalian inflasi daerah merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial**

Sejak awal disadari pembangunan sosial masyarakat memang bukanlah hal yang mudah karena pembangunan sosial mencakup ruang lingkup yang sangat luas dan dimensi yang senantiasa bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Maka antisipasi penanganan sosial masyarakat merupakan tindakan yang sifatnya harus strategis, sistematis, responsif, komprehensif dan berkesinambungan.

Disadari bahwa problematika sosial yang semakin kompleks dewasa ini merupakan epicentrum segala potensi masalah yang timbul. Olehnya itu, dibutuhkan kesepahaman dan komitmen bersama setiap pemangku kepentingan untuk mengelola permasalahan sosial yang ada. Yang tidak kalah pentingnya penyelesaian problema sosial perlu didasari dengan informasi yang jelas sehingga pada tataran pengambilan kebijakan dapat dihasilkan kebijakan yang benar-benar tepat sasaran sesuai dengan fakta yang ada.

Dalam kajian ini fokus kesejahteraan sosial dititik beratkan pada analisis kinerja pembangunan dibidang sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, kontribusi sektoral perekonomian daerah dan pertumbuhan industri. Aspek-aspek tersebut dianggap dapat mengungkap informasi terhadap sejauh mana kondisi kesejahteraan sosial di Kabupaten Konawe.

#### **a. Sosial**

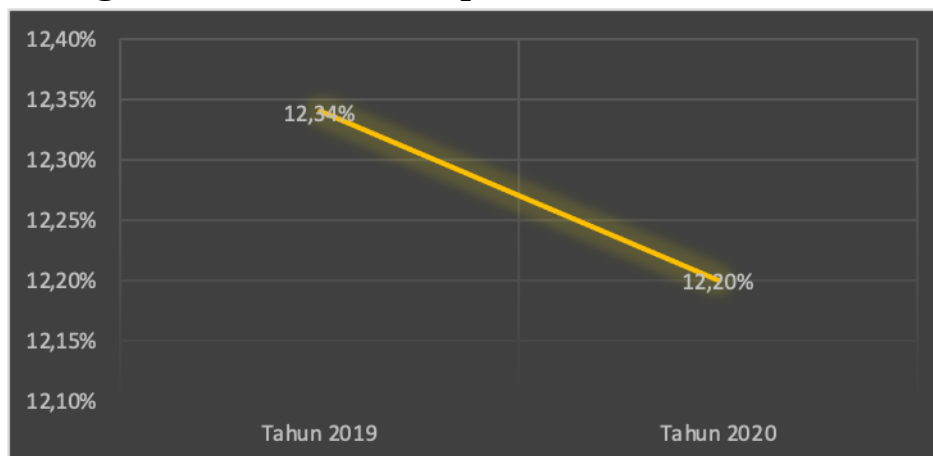
Membahas kondisi sosial, maka akan senantiasa bersinggungan dengan pengukuran kemiskinan. Pengukuran kemiskinan yang tangguh dipercaya akan menjadi instrumen dalam pengambilan kebijakan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, analisis mengenai kemiskinan di Kabupaten Konawe menggunakan data BPS Kabupaten Konawe.

Persentase Penduduk miskin Kabupaten Konawe Pada Tahun 2018 sebesar 12,34% kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga menjadi 12,00% dan diharapkan pada tahun 2021 dapat turun hingga dibawah angka 11%. Persentase Penduduk miskin Kabupaten Konawe masih di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara dan Rata-rata nasional. Sehingga dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang hal ini masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Konawe dalam rangka menekan angka kemiskinan. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe dalam menekan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari kebijakan pengalokasian belanja daerah yang diarahkan untuk menyediakan akses jalan dan jembatan



yang memadai sehingga aktifitas social dan ekonomi masyarakat menjadi lancar. Selain itu pula Pemerintah Kabupaten Konawe dalam APBD tahun 2019 dan tahun 2020 meningkatkan stimulan belanja untuk 3 (tiga) OPD yakni Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Stimulan belanja ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan produktifitas dari sector usaha pertanian dalam arti luas.

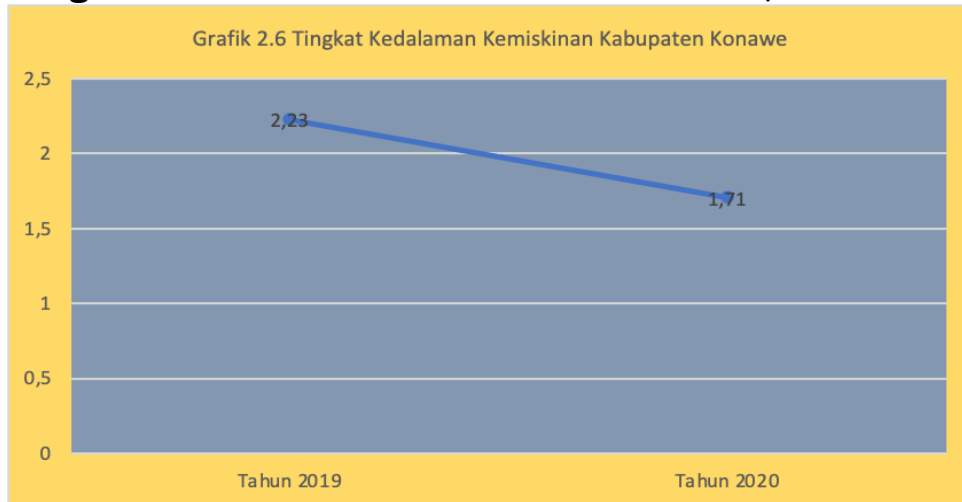
**Grafik 2.4**  
**Angka Kemiskinan Kabupaten Konawe, 2019-2020**



*Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2020*

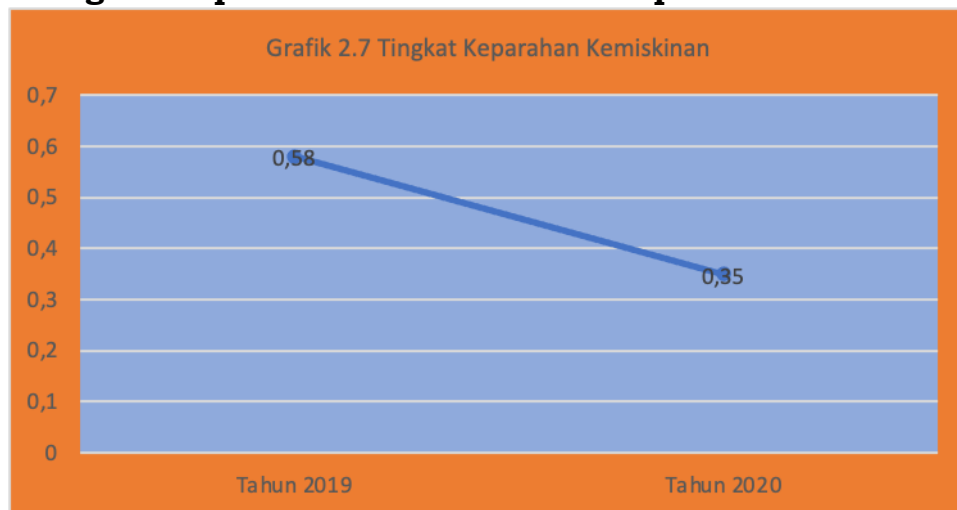
Pada tahun 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Konawe adalah 2,23 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,71. Data ini menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Konawe terus mengalami penurunan yang berarti bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

**Grafik 2.5**  
**Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab Konawe, 2019-2020**



*Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2020*

**Grafik 2.6**  
**Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Konawe**



*Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2020*

Dalam kajian ini fokus kesejahteraan sosial dititik beratkan pada analisis kinerja pembangunan dibidang sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, yang capaiannya tergambar melalui penurunan angka kemiskinan dan peningkatan IPM daerah. Aspek-aspek tersebut dianggap dapat mengungkap informasi terhadap sejauh mana kondisi kesejahteraan sosial di Kabupaten Konawe.

Parameter mengenai kondisi sosial juga dapat diketahui melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM sendiri merupakan perbandingan dari angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah wilayah adalah wilayah maju, berkembang atau wilayah terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (Knowledge), dan standar hidup layak (decent standar of living). Sesuai dengan UNDP tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

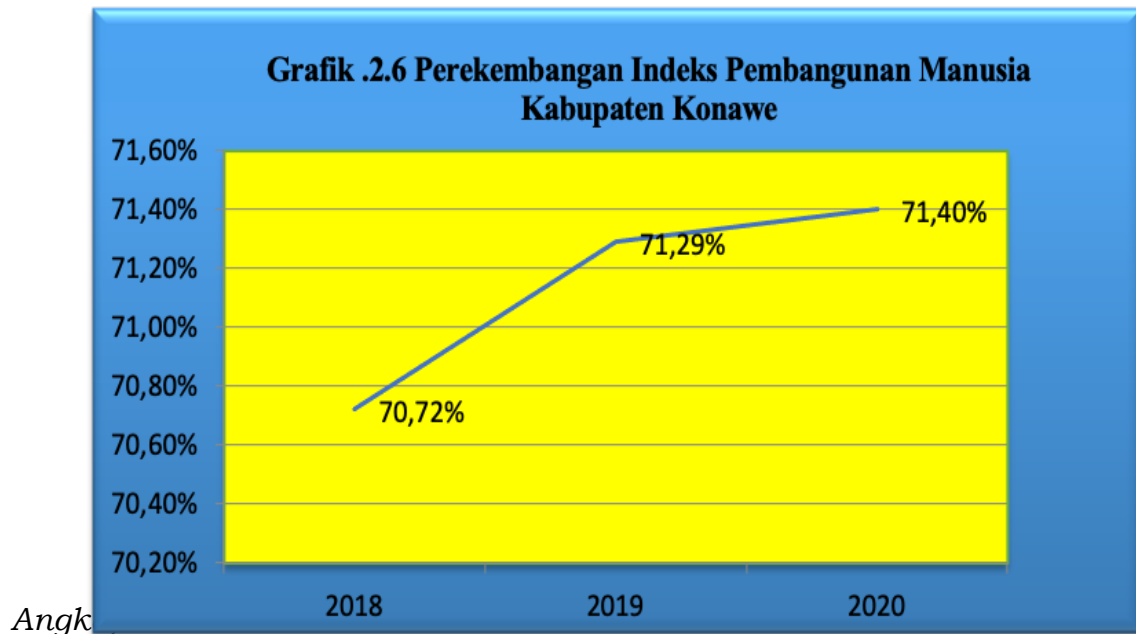
- a. Rendah ( < 60 )
- b. Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$  )
- c. Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$  )
- d. Sangat Tinggi ( >80 )

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Konawe Tahun 2020 adalah sebesar 71,29 poin dengan kategori Tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.16**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Perbandingan Sex Ratio**

No	IPM	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Konawe	70,72	71,29	71,4	Naik 0,57 Poin
2	Provinsi Sultra	70,61	71,2	71,45	Naik 0,25 Poin
3	Indonesia/Nasional	71,39	71,92	71,94	Naik 0,02 Poin
4	Peringkat Provinsi	4	4		-
5	Peringkat Nasional	173	165		Naik 92 peringkat

**Grafik 2.7**  
**Perekembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Konawe**



**b. Pendidikan**

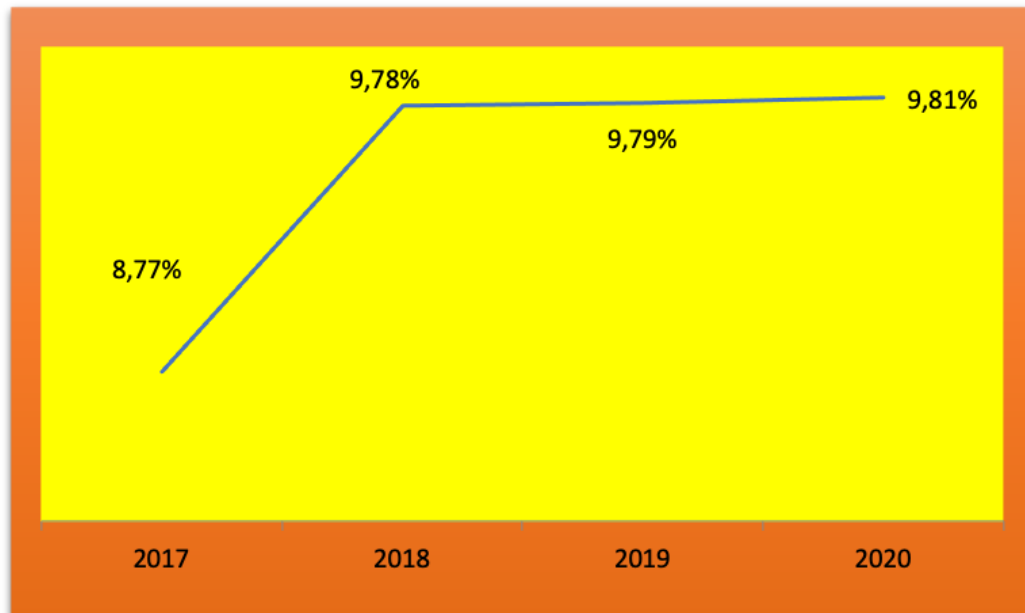
Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan memiliki kompetensi sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Dalam era globalisasi orientasi pembangunan manusia diarahkan untuk menciptakan manusia-manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tangguh. Pendidikan formal maupun non formal merupakan alat dalam menentukan kualitas dan kapasitas SDM. Pembentukan karakter dan kepribadian bangsa juga bergantung pada pendidikan dan budaya yang terbentuk dalam setiap interaksi sosial masyarakat. Olehnya itu aspek pendidikan merupakan bagian yang harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang terbentuk dalam masyarakat tersebut kedalam situasi dan karakter masyarakat yang positif. Dengan menciptakan karakter manusia yang positif maka dapat dipastikan bahwa peluang maju dan berkembangnya suatu daerah akan semakin terbuka. Kompetisi yang dinamis dan sehat akan turut memberikan ruang bagi suatu wilayah untuk dapat berkembang dalam iklim yang kondusif. Sehingga “pendidikan yang berkualitas” menjadi kata kunci untuk menciptakan sumber daya yang kompeten.

Secara umum pembangunan pendidikan di Kabupaten Konawe relatif terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persentase penduduk yang melek huruf. Angka melek

huruf penduduk dewasa (15 tahun keatas) pada tahun 2017 sebesar 98,65 persen, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi ,46 persen dan pada tahun 2019 meningkat menjadi ,45 persen, dan pada tahun 2020 meingkat menjadi ,53 persen

**Grafik 2.8**

**Perkembangan Angka Melek Huruf, Tahun 2017-2020**



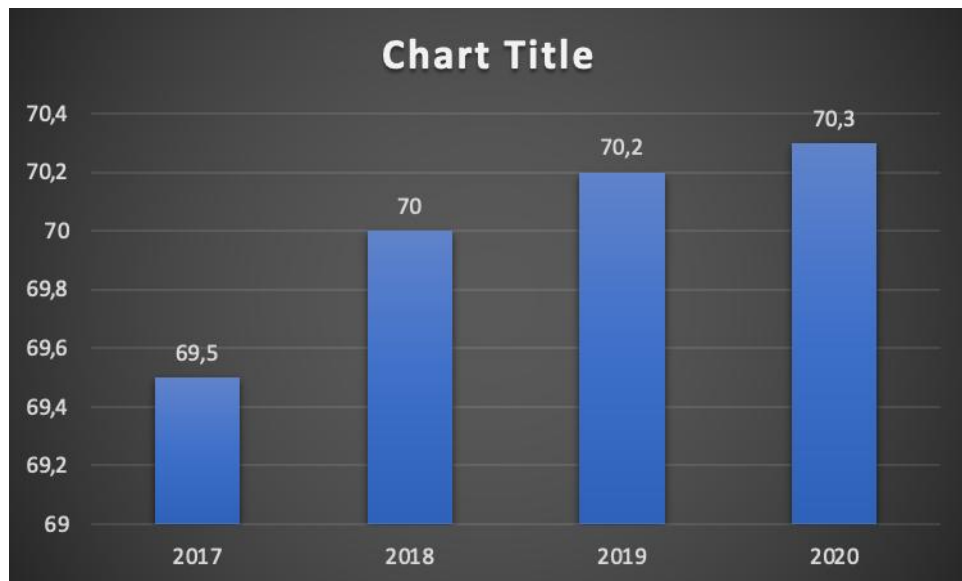
Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2021*

### **c. Kesehatan**

Pembangunan sosial dibidang kesehatan pada periode 2017-2020 menjadi konsen Pemerintah Kabupaten Konawe. Hal ini dapat dilihat dari serangkaian terobosan konkrit yang dijalankan oleh pemerintah. Pada periode tersebut Pemerintah Kabupaten Konawe melaksanakan beberapa program unggulan diantaranya program satu desa satu perawat, pengadaan kendaraan operasional bagi tenaga kesehatan dipelosok-pelosok dan yang tidak kalah pentingnya Pemerintah Kabupaten Konawe berhasil membangun Rumah Sakit Umum Kabupaten yang jauh lebih representatif dan diproyeksikan menjadi RS Rujukan bagi daerah-daerah sekitarnya.

Terobosan pembangunan dibidang kesehatan ini sejalan dengan pencapaian keberhasilan pembangunan yang dapat dilihat dari serangkaian indikator makro bidang kesehatan. Dimana secara konsisten pemerintah Kabupaten Konawe dapat meningkatkan angka usia harapan hidup. Pada tahun 2017 rata-rata usia harapan hidup di Kabupaten Konawe baru mencapai 69,5 tahun. pada tahun 2018 masih tetap 70,0, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 70,2 tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 70,3.

**Grafik 2.9**  
**Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Konawe, Tahun**  
**2017-2020**

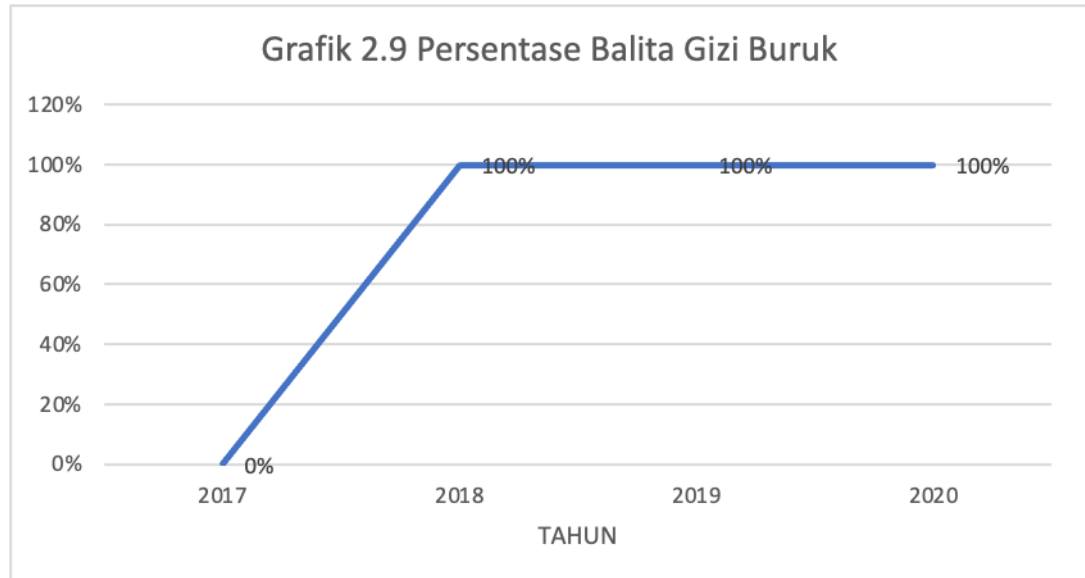


Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018*

Sementara persentase balita gizi buruk pada tahun 2017 tidak terjadi kasus gizi buruk, pada tahun 2018 mencapai sebesar 100%, kemudian pada tahun 2019 capaiannya masih sama yakni sebesar 100% selanjutnya pada tahun 2020 capaiannya masih sama dari tahun sebelumnya yakni 100%.



**Grafik 2.10**  
**Penurunan Balita Gizi Buruk Kabupaten Konawe, Tahun 2017-2020**



*Sumber : Diolah dari data BPS Kab. Konawe Dan Dinkes Kabupaten Konawe*

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam upaya menekan angka balita gizi buruk di Kabupaten Konawe tidak lepas dari upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah melalui program-program yang bertujuan mencegah terjadinya kasus gizi buruk. Program-program rutin pemerintah yakni diantaranya program pemberian makanan tambahan bagi anak usia balita. Program ini dilaksanakan pada seluruh wilayah kecamatan dengan menitik beratkan sasaran program pada wilayah-wilayah yang selama ini dianggap rentan terhadap kasus gizi buruk. Yang terpenting dalam pelaksanaan program-program pembangunan dibidang kesehatan yakni sustainability (kesinambungan) agar momentum keberhasilan pembangunan tersebut dapat dijaga dan ditingkatkan.

Menciptakan masyarakat yang sehat tidak dapat dilakukan dengan cara yang instan melainkan dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan sehingga strategi-strategi yang dilakukan sejak awal dapat terintegrasi dengan tindakan masa depan. Upaya tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe yang terus melakukan langkah konkrit dengan berupaya meningkatkan fasilitas kesehatan. Hingga pada tahun 2020 total Puskesmas di Kabupaten Konawe telah berjumlah 28 unit, Puskesmas Pembantu berjumlah 50 unit, Posyandu berjumlah 356 unit dan Polindes berjumlah 75 unit. Pemenuhan Puskesmas pada setiap

wilayah kecamatan merupakan hal harus dilakukan namun tidak sampai berhenti pada langkah tersebut saja. Kedepan perlu diupayakan dan difasilitasi peningkatan status beberapa Puskesmas agar dapat menjadi Puskesmas Rawat Inap.

Tabel 2.17  
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Konawe Tahun 2020

No.	Kecamatan	Puskesmas	Poskesdes	Polindes	Posbindu
1	2	3	4	5	6
1	Soropia	Puskesmas Soropia	5	0	3
2	Lalonggasumeeto	Puskesmas L.sumeeto	4	0	11
3	Sampara	Puskesmas Sampara	2	0	15
4	Bondoala	Puskesmas Laosu	1	0	2
5	Besulutu	Puskesmas Besulutu	9	0	0
6	Kapoiala	Puskesmas Kapoiala	7	0	7
7	Anggalomoare	Puskesmas Anggalomoare	1	0	1
8	Morosi	Puskesmas Morosi	4	0	8
9	Lambuya	Puskesmas Lambuya	6	0	6
10	Uepai	Puskesmas Uepai	5	0	13
11	Puriala	Puskesmas Puriala	0	0	3
12	Onembute	Puskesmas Onembute	4	0	12
13	Pondidaha	Puskesmas Pondidaha	0	0	11
14	Wonggeduku	Puskesmas Wonggeduku	4	0	5
15	Wonggeduku Barat	Puskesmas W. Barat	0	0	15
16	Amonggedo	Puskesmas Amonggedo	6	0	10
17	Wawotobi	Puskesmas Wawotobi	1	0	5
18	Meluhu	Puskesmas Ahuhu	6	0	9
19	Konawe	Puskesmas Tawanga	1	1	12
20	Unaaha	Puskesmas Unaaha	0	0	4
21	Anggaberu	Puskesmas Anggaberu	0	0	3
22	Abuki	Puskesmas Abuki	2	0	12
23	Latoma	Puskesmas Latoma	3	0	13
24	Tongauna	Puskesmas Tongauna	5	4	0
25	Asinua	Puskesmas Asinua	0	0	5
26	Padanguni	Puskesmas Alosika	9	0	4
27	Tongauna Utara	Puskesmas Tongauna	1	0	0

No.	Kecamatan	Puskesmas	Poskesdes	Polindes	Posbindu
1	2	3	4	5	6
		Utara			
28	Routa	Puskesmas Routa	1	0	0
29	Anggoota	-	0	0	0
	<b>Kabupaten Konawe</b>		87	5	189

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018*

Sementara itu disadari bahwa pemenuhan fasilitas kesehatan tidak saja perlu dilakukan dari sisi penyediaan infrastruktur namun juga sangat diperlukan pemenuhan tenaga kesehatan yang memadai yang dapat melayani masyarakat secara menyeluruh. Perkembangan ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Konawe hingga tahun 2020 tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.18  
Jumlah Tenaga Kesehatan Tiap Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Konawe

No.	Unit Kerja	Dokter		Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Bidan	Perawat	Perawat Gigi	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker	Tenaga Kesmas	Tenaga Kesling	Tenaga Gizi
		Spesialis	Umum										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Puskesmas Soropia	0	1	1	0	15	15	-	1	-	-	-	-
2	Puskesmas Lalonggasumeeto	0	2	1	0	12	19	1	-	-	3	-	-
3	Puskesmas Sampara	0	1	1	0	15	9	-	-	1	3	-	-
4	Puskesmas Laosu	0	1	1	0	21	1	-	1	-	3	-	-
5	Puskesmas Besulutu	0	0	1	0	12	3	-	1	-	1	-	-
6	Puskesmas Kapoila	0	1	1	0	11	6	1	-	-	2	-	-
7	Puskesmas Lambuya	0	0	0	0	16	21	1	1	1	8	-	-
8	Puskesmas Onembute	0	0	0	0	12	3	2	1	-	1	-	-
9	Puskesmas Uepai	0	0	0	0	16	28	1	1	1	1	-	-
10	Puskesmas Puriala	0	0	0	0	39	19	1	2	-	4	-	-
11	Puskesmas Pondidaha	0	2	1	0	30	18	1	1	-	-	-	-
12	Puskesmas	0	1	1	0	19	13	1	1	-	3	-	-

No.	Unit Kerja	Dokter		Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Bidan	Perawat	Perawat Gigi	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker	Tenaga Kesmas	Tenaga Kesling	Tenaga Gizi
		Spesialis	Umum										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Amonggedo Baru												
13	Puskesmas Wonggeduku	0	1	0	0	20	30	-	1	-	5	-	-
14	Puskesmas Wawotobi	0	2	1	0	31	27	-	-	-	4	-	-
15	Puskesmas Tawanga	0	2	1	0	19	21	-	1	-	-	-	-
16	Puskesmas Unaaha	0	2	0	0	17	25	-	-	-	-	-	-
17	Puskesmas Ahuhu	0	1	0	0	33	39	1	2	-	12	-	-
18	Puskesmas Anggaberu	0	1	0	0	15	15	1	-	1	1	-	-
19	Puskesmas Abuki	0	1	1	0	20	13	-	-	-	2	-	-
20	Puskesmas Alosika	0	0	0	0	8	11	1	-	1	1	-	-
21	Puskesmas Tongauna	0	1	0	0	21	19	1	2	-	3	-	-
22	Puskesmas Asinua	0	0	0	0	39	32	-	-	-	1	-	-
23	Puskesmas Rوتا	0	0	0	0	7	8	-	-	-	1	-	-
24	Puskesmas Morosi	0	1	1	0	43	35	-	-	1	4	-	-

No.	Unit Kerja	Dokter		Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Bidan	Perawat	Perawat Gigi	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker	Tenaga Kesmas	Tenaga Kesling	Tenaga Gizi
		Spesialis	Umum										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Puskesmas Anggalomoare	0	1	1	0	19	30	-	-	-	-	-	-
26	Puskesmas Wonggeduku Barat	0	0	1	0	18	15	1	1	-	1	-	-
27	Puskesmas Latoma	0	0	0	0	16	8	-	-	-	-	-	-
28	BLUD RS Kab Konawe	27	15	4	-	62	233	3	19	14	37	2	4
	<b>Kabupaten Konawe</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>716</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>101</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018*

Layanan kesehatan yang maksimal dapat terwujud bila rasio ketersediaan tenaga medis juga dapat terpenuhi. Menyadari ini maka Pemerintah Kabupaten Konawe terus berupaya maksimal agar target pemenuhan tenaga medis disetiap wilayah dapat terwujud. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan akses yang mudah dan memadai bagi masyarakat dalam pemenuhan layanan kesehatan tingkat dasar.

#### **d. Ketenagakerjaan**

Pemerintah Kabupaten Konawe sangat menyadari bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Demikian pula dalam upaya pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Konawe dilakukan secara holistik dan komprehensif. Peningkatan kualitas pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan diarahkan dalam rangka menciptakan masyarakat yang memiliki daya saing yang kuat. Pencapaian pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan diyakini berkorelasi kuat terhadap terbentuknya karakter masyarakat yang kompeten dan kompetitif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah usia kerja pada tahun 2013 hingga tahun 2017 yang terus bertambah yang juga diiringi dengan peningkatan persentase penduduk usia kerja yang bekerja. Meskipun terlihat terjadi fluktuasi namun jika dibandingkan dengan tahun awal perencanaan (tahun 2013) dimana persentase penduduk usia kerja yang bekerja sebesar 94,97% dapat meningkat pada tahun 2017 hingga 98,06%.

Demikian pula dengan tingkat pengangguran terbuka yang cenderung menurun seiring dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja. Tercatat pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,03% dan pada tahun 2017 dapat turun menjadi 1,94%. (*Lihat Tabel 2.15*)

Meskipun demikian masih perlu dicermati lebih mendalam sebab jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Kabupaten Konawe yang masih cukup tinggi, maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang kian meningkat tidak berbanding dengan penurunan angka kemiskinan. Mesti dilakukan penelitian secara empiris mengenai keadaan sesungguhnya struktur sosial dan ekonomi Kabupaten Konawe sehingga diperoleh kesimpulan yang valid mengenai keterkaitan antara angka kemiskinan yang penurunannya cenderung melambat dengan TPAK yang cenderung meningkat cukup baik.

Kesimpulan awal yang bisa ditarik, keadaan ini bisa saja terjadi akibat dari upah kerja yang belum layak sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat. Ditambah lagi dengan inflasi harga bahan yang tidak diikuti dengan kenaikan upah kerja setiap tahunnya. Olehnya itu kedepan diperlukan kebijakan pemerintah yang dapat menjamin kualitas upah para pekerja agar dapat memenuhi unsur kelayakan dalam memenuhi kebutuhan pokok para pekerja.



Tabel 2.19

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017

Kegiatan	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Bekerja	65.662	35.962	<b>101.624</b>	70.412	42.531	<b>112.943</b>	58.825	24.306	<b>83.131</b>	58.825	24.306	<b>83.131</b>	71.200	43.024	<b>114.224</b>
Tidak Bekerja (Pengangguran Terbuka)	3.064	2.313	<b>5.377</b>	3.462	1.798	<b>5.260</b>	6.296	3.660	<b>9.956</b>	6.296	3.660	<b>9.956</b>	798	1.462	<b>2.260</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68.726</b>	<b>38.275</b>	<b>107.001</b>	<b>73.874</b>	<b>44.329</b>	<b>118.203</b>	<b>65.121</b>	<b>27.966</b>	<b>93.087</b>	<b>65.121</b>	<b>27.966</b>	<b>93.087</b>	<b>71.8</b>	<b>44.486</b>	<b>116.484</b>
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61,37%	33,61%	<b>94,97%</b>	59,57%	35,98%	<b>95,55%</b>	63,19%	26,11%	<b>89,30%</b>	63,19%	26,11%	<b>89,30%</b>	61,12%	36,94%	<b>98,06%</b>
Tingkat Pengangguran	2,86%	2,16%	<b>5,03%</b>	2,93%	1,52%	<b>4,45%</b>	6,76%	3,93%	<b>10,70%</b>	6,76%	3,93%	<b>10,70%</b>	0,69%	1,26%	<b>1,94%</b>

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018*

### **2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Produk seni dan budaya merupakan cerminan identitas dan jati diri suatu bangsa. Produk kesenian dan kebudayaan adalah kearifan lokal yang harus senantiasa dijaga dan dipertahankan eksistensinya. Demikian halnya Kabupaten Konawe yang merupakan wilayah dengan pengaruh kebudayaan tolaki yang sangat kental, berkembang dalam tataran kearifan lokal suku tolaki. Produk kesenian dan kebudayaan yang tercipta dikalangan masyarakat tolaki hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat lokal Kabupaten Konawe. Beberapa cagar budaya yang menjadi saksi berkembangnya peradaban tolaki pun masih dapat ditemukan, hingga produk kebudayaan yang ditandai dengan simbol-simbol adat masih melekat kuat dalam aktifitas sosial masyarakat Kabupaten Konawe.

Aspek lain yang dapat menunjukkan jati diri dan eksistensi suatu daerah yakni terletak pada prestasi-prestasi yang ditorehkannya dalam kancah nasional maupun internasional. Olahraga yang menjadi salah satu ukuran prestasi suatu daerah menjadi salah satu fokus dalam analisis ini. Pemerintah Kabupaten Konawe ingin memastikan bahwa pembangunan di era moderen saat ini harus senantiasa diiringi dengan komitmen untuk tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur kebudayaan yang telah berkembang selama ini. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Konawe juga ingin memastikan bahwa pembinaan terhadap potensi bibit-bibit dalam dunia olahraga dapat terfasilitasi dengan baik.

Sejauh ini kinerja pembangunan dibidang kesenian dan kebudayaan; dan bidang olahraga dapat dikatakan masih berjalan cukup baik. Ukuran yang menunjukkan itu dapat terlihat dari aktifitas/event kesenian dan kebudayaan yang mengangkat tema-tema kearifan lokal secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya, cagar budaya yang menjadi situs cagar budaya daerah masih terus dikembangkan dan dijaga kelestariannya, sementara untuk pembangunan dibidang olahraga masih terdapat cabang olahraga binaan pemerintah, yang beberapa cabang olahraga tersebut sudah mampu berkiprah diajang nasional dan internasional.

#### ***a. Jumlah Event Kesenian dan Kebudayaan***

Untuk senantiasa menjaga eksistensi kearifan lokal, Pemerintah Kabupaten Konawe setiap tahunnya menyelenggarakan event kesenian dan kebudayaan tolaki yang juga dijadikan sebagai event wisata budaya. Pada tahun 2017 dilaksanakan 8 (delapan) kali event seni dan budaya, kemudian pada tahun 2018 diadakan 1 (satu) kali event seni

dan budaya. Selanjutnya pada tahun 2019 ditingkatkan intensitasnya sebanyak 3 (tiga) kali pelaksanaan event seni dan budaya. Sedangkan pada tahun 2020 event seni dan budaya tidak dilaksan.

Tabel 2.20  
Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya di Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	8	1	3	-

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Konawe

#### **b. Cagar Budaya yang Dilestarikan**

Perhatian pemerintah Kabupaten Konawe terhadap kelestarian cagar budaya sangat besar. Hal ini dapat dilihat melalui upaya pemerintah dalam merevitalisasi kawasan cagar budaya Makam Raja Lakidende, dimana pada kawasan tersebut telah dibangun Museum Budaya Tolaki yang akan menjadi pusat wisata budaya sekaligus akan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat khususnya bagi generasi muda. Berbagai fasilitas pada kawasan cagar budaya Makam Raja Lakidende akan terus ditingkatkan hingga menjadi kawasan wisata budaya yang benar-benar representatif.

Tabel 2.21  
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Konawe, Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
<b>Jumlah Cagar Budaya</b>	13	19	24	24

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Konawe

Hingga tahun 2020 cagar budaya yang berhasil diidentifikasi dan saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Konawe yakni terdapat 24 (dua puluh empat) cagar budaya. Kondisi ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah cagar budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe pada tahun 2017. Artinya bahwa sepanjang periode tahun 2017 hingga tahun 2020 Pemerintah

Kabupaten Konawe telah berhasil mengidentifikasi dan melakukan tindakan perlindungan terhadap 11 (sebelas) cagar budaya yang ada.

### **c. Jumlah Lapangan Olahraga**

Pembinaan olahraga di Kabupaten Konawe difokuskan pada beberapa cabang olahraga seperti Badminton, Atletik dan Taekwondo. Hasil pembinaan dari beberapa cabang olahraga tersebut telah mengorbitkan atlet yang dapat berkiprah di kancah nasional dan internasional. Pembinaan ini secara terus menerus akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe sambil melihat potensi-potensi cabang olahraga lainnya.

Sementara untuk fasilitas lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Konawe pada tahun 2017 tercatat sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) lapangan. Kemudian pada tahun 2018 fasilitas lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Konawe tercatat sebanyak 90 lapangan. (Lihat Tabel 2.20)

Tabel 2.22

Rincian Jumlah Lapangan Olahraga Menurut Jenis Olahraga di Kabupaten Konawe Tahun 2017 - 2020

No.	Jenis Lapangan	Jumlah			
		2017	2018	2019	2020
1	Lapangan Sepak Bola	30	30	-	-
2	Lapangan Basket	4	4	-	-
3	Lapangan Voli	28	28	-	-
4	Lapangan Bulu Tangkis	15	15	-	-
5	Lapangan Tennis	2	2	-	-
6	Lapangan Takraw	10	10	-	-
7	Lap. Atletik	-	1	-	-
8	Kolam Renang	3	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>92</b>	<b>90</b>	-	-

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Konawe

### **2.3 Aspek Pelayanan Umum**

Analisis terhadap aspek pelayanan umum pada dasarnya adalah penelaahan terhadap prestasi capaian pembangunan pada setiap urusan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan pembagian urusan pada organisasi perangkat daerah yang ada. Penelaahan terhadap aspek pelayanan umum dapat memberikan gambaran secara komprehensif (menyeluruh) mengenai keberhasilan ataupun kegagalan suatu perangkat unit organisasi perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Analisis pada bagian ini mengurai indikator capaian pembangunan daerah per urusan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

### **2.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

#### **1. Urusan Pendidikan**

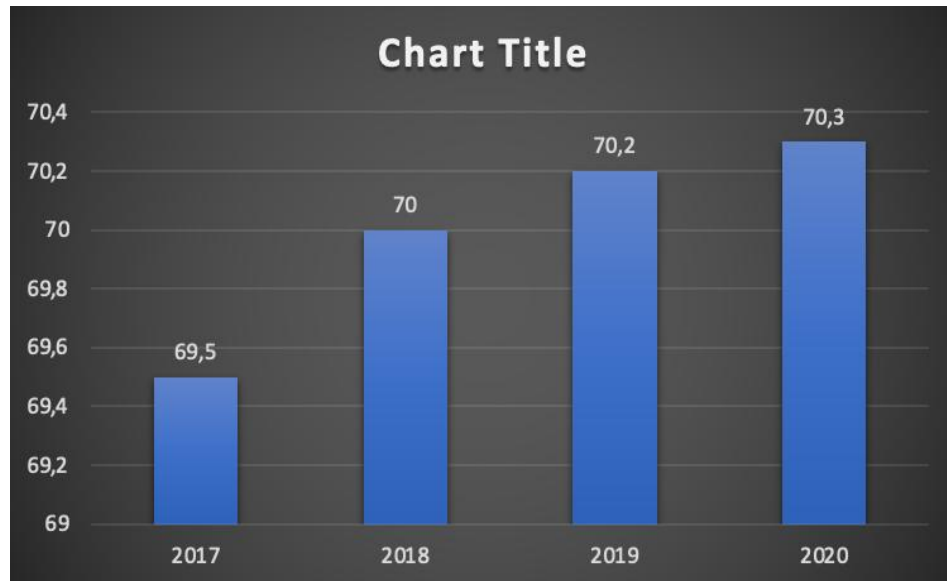
Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh ***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe***. Pelaksanaan pembangunan dibidang pendidikan di Kabupaten Konawe menunjukkan progres yang cukup menggembirakan. Serangkaian indikator yang digunakan dalam menilai capaian pembangunan pada bidang ini rata-rata menunjukkan perkembangan positif. Sasaran program-program pembangunan yang ingin dicapai pada periode lalu yakni meningkatnya partisipasi pendidikan dan meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun secara umum indikator-indikator pembangunan dibidang pendidikan menunjukkan perkembangan positif namun masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan terutama pemerataan layanan pendidikan untuk daerah-daerah terpencil seperti di Kecamatan Routa, Kecamatan Latoma dan Kecamatan Asinua. Capaian pelaksanaan program-program pembangunan tersebut tergambar dalam capaian indikator kinerja sasaran Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Angka Partisipasi Kasar (APK); Angka Partisipasi Murni (APM); Angka Partisipasi Sekolah (APS); Angka Kelulusan (AL); Angka Melanjutkan; Sekolah dalam kondisi baik; Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.

##### **a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Pada tahun 2017 partisipasi pada jenjang PAUD berada pada angka 39,12%. selanjutnya pada tahun 2018 meningkat menjadi 66,12%, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 95,97 %, dan hingga pada tahun 2020 dapat mencapai 96,49%. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 pencapaian akhir ditahun 2020 memperlihatkan bahwa eskalasi capaian partisipasi pada jenjang PAUD naik hingga lebih dari 100%. Keberhasilan ini didorong oleh kesadaran para orang tua siswa terhadap pendidikan anak usia dini yang diikuti dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe memberikan subsidi seragam sekolah bagi calon peserta didik usia PAUD.

Strategi yang dinilai cukup berhasil ini mesti terus dipertahankan dan ditingkatkan intensitasnya serta perlu diikuti dengan upaya penyediaan sarana dan prasarana PAUD yang memadai.

**Grafik 2.11**  
**Perkembangan Partisipasi PAUD Kabupaten Konawe, Tahun 2017-2020**



*Sumber : Diolah dari data BPS Kab. Konawe dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe*

**b) Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengukur persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah anak dalam usia 7-18 Tahun pada periode yang sama. Secara sederhana APK memberikan informasi mengenai tingkat partisipasi penduduk secara umum terhadap suatu tingkatan pendidikan tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang tersebut.

**Tabel 2.23**

**Perkembangan APK Jenjang SD/MI/Paket A dan Jenjang SMP/MTs/Paket B, Tahun 2017-2020**

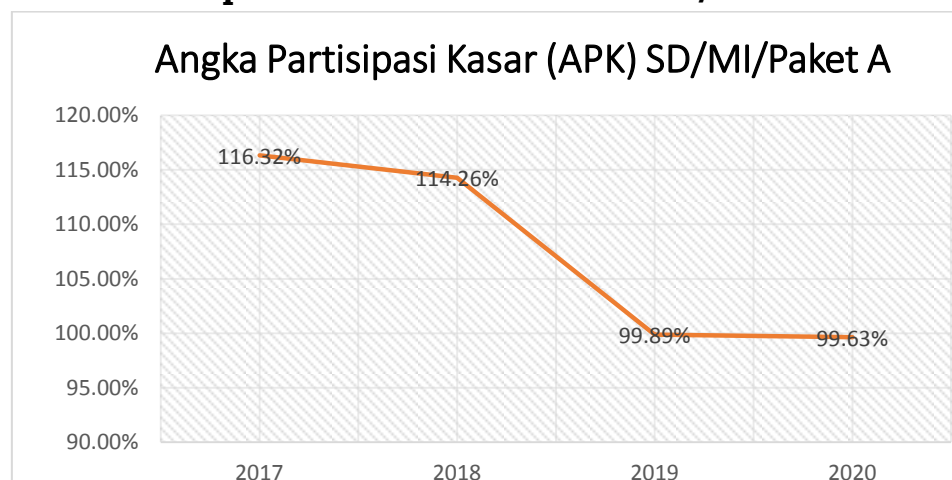
Angka Partisipasi Kasar (APK)	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	116,32%	114,26%	99,89%	99,63%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	78,85%	85,01%	76,70%	96,97%

*Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka*

- **APK Usia 7-12 Tahun (Jenjang SD/MI/Paket A).**
- Pada periode tahun 2017-2020 APK pada jenjang SD/MI secara berturut-turut mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2017 APK SD/MI sebesar 116,32%, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 114,26%, selanjutnya pada tahun 2019 Mengalami penurunan menjadi 99,89%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 99,63% Dapat disimpulkan bahwa sepanjang periode tersebut pendisiplinan usia masuk pada jenjang pendidikan pada SD/MI sudah mulai berjalan dengan baik. Tingginya APK tahun 2017 mengindikasikan pada saat itu masih cukup banyak calon siswa baru yang masuk pada jenjang usia SD/MI belum memenuhi syarat umur. Olehnya itu perlu didorong kedepan untuk mendisiplinkan proporsionalitas umur terhadap jenjang pendidikan yang akan ditempuh. Capain tahun 2017 perlu ditingkatkan dan dipertahankan untuk tetap mendorong pendidikan yang berkualitas.

**Grafik 2.12**

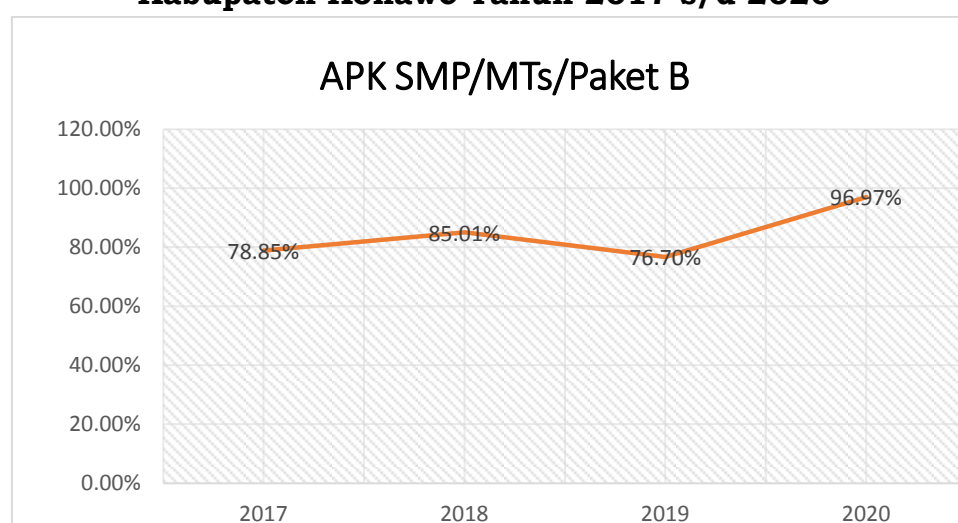
**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A di Kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020**





- **APK Usia 13-15 Tahun (Jenjang SMP/MTs/Paket B).**  
APK Usia 13-15 Tahun pada tahun 2017 sebesar 78,85% pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 85,01%, selanjutnya pada tahun 2019 turun menjadi 76,70%, kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 96,97% Capaian ini menggambarkan masih terdapat peserta didik yang tidak bersekolah pada jenjang usia 13-15 tahun. Hal ini akan menjadi perhatian dalam rangka memastikan seluruh peserta didik pada jenjang usia apapun dapat mengenyam pendidikan.

**Grafik 2.13**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B di**  
**Kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020**



**c) Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur persentase jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang usia tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang usia tersebut. APM digunakan sebagai alat ukur dalam menilai angka partisipasi murni usia sekolah pada jenjang pendidikan.

Tabel 2.24  
Perkembangan APM Jenjang SD/MI/Paket A dan Jenjang  
SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM)	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,67%	98,61%	99,89%	99,63%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	73,81%	87,07%	94,34%	96,67%

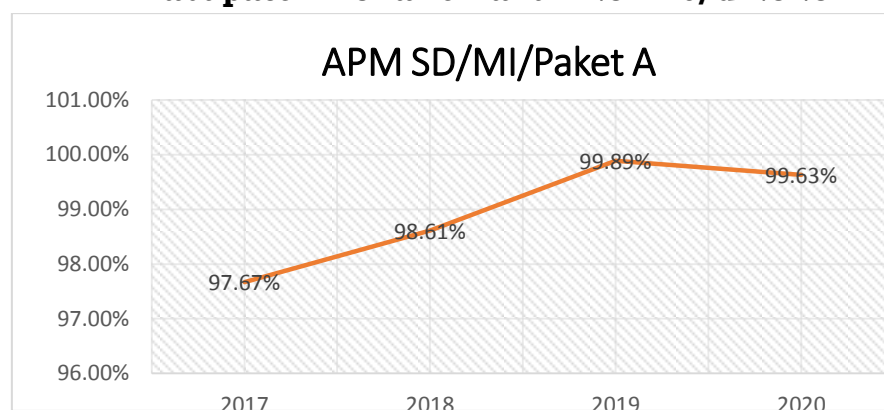
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe

➤ APM Usia 7-12 Tahun (Jenjang SD/MI/Paket A).

Tercatat APM pada tahun 2017 sebesar 97,67% kemudian pada tahun 2018 naik menjadi 98,61%, selanjutnya pada tahun 2019 naik menjadi 99,89% dan pada tahun 2020 sedikit menurun hingga 99,63%. APM usia 7-12 tahun masih perlu sedikit ditingkatkan agar mencapai kondisi ideal yakni benar-benar mendekati 100% atau bahkan dapat mencapai 100%.

**Grafik 2.14**

**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A di  
Kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020**



➤ APM Usia 13-15 Tahun (Jenjang SMP/MTs/Paket B).

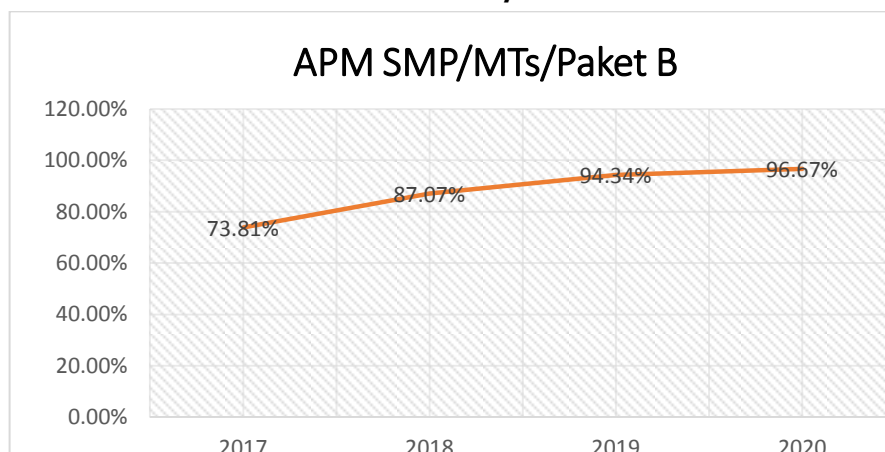
Angka Partisipasi Murni (APM) usia 13-15 tahun pada tahun 2017 mencapai 73,81%, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 87,07%, selanjutnya pada tahun 2019 meningkat menjadi 94,34%, kemudian pada dan pada tahun 2020 naik hingga 96,67%

Penurunan APM pada tahun 2020 kembali menunjukkan bahwa pembangunan dibidang pendidikan masih perlu dilakukan perbaikan. Perlu dilakukan telaah lebih

mendalam mengenai kondisi ini agar diperoleh kesimpulan yang komprehensif terkait kondisi yang ada.

**Grafik 2.15**

**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Konawe  
Tahun 2017 s/d 2020**



**d) Angka Kelulusan**

Angka Kelulusan (AL) pada jenjang usia SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Konawe mengalami penurunan. Secara detail diurai dibawah ini.

**Tabel 2.25**

**Perkembangan AL Jenjang SD/MI/Paket A dan Jenjang SMP/MTs/Paket B**

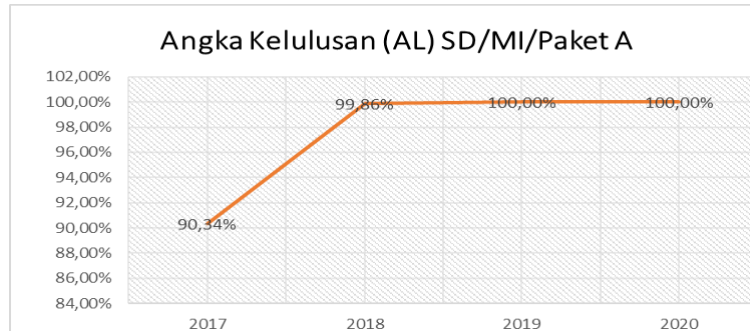
Angka Kelulusan (AL)	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	90,34%	99,86%	100,00%	100,00%
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B	90,21%	95,74%	100,00%	100,00%

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe*

➤ **AL usia 7-12 Tahun (Jenjang SD/MI/Paket A).**

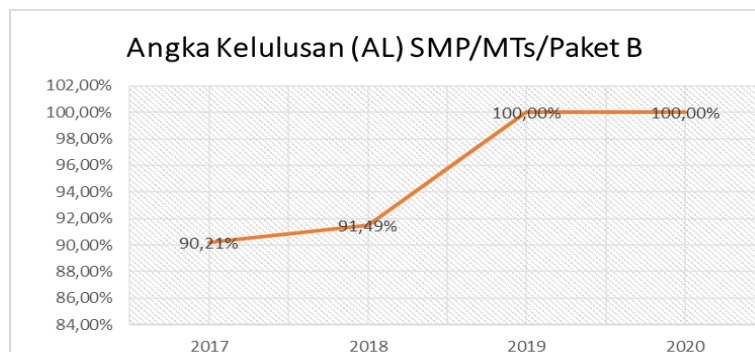
Angka Kelulusan (AL) usia 7-12 tahun pada tahun 2017 yaitu sebesar 90,34% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebesar 99,86%, dan mencapai 100% pada tahun 2019 hingga tahun 2020.

**Grafik 2.16**  
**Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A di Kabupaten Konawe**  
**Tahun 2017 s/d 2020**



- AL usia 13-15 Tahun (Jenjang SMP/MTs/Paket B).  
 Angka Kelulusan (AL) usia 7-12 tahun pada tahun 2017 yaitu sebesar 90,21% kemudian pada mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebesar 91,49%, dan mencapai 100% pada tahun 2019 hingga tahun 2020.  
 100% pada tahun 2019 hingga tahun 2020.

**Grafik 2.17**  
**Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Konawe**  
**Tahun 2017 s/d 2020**



**a) Jumlah Gedung SD dan Gedung SMP**

Perkembangan jumlah gedung SD dan gedung SMP hingga tahun 2017 terdapat pada tabel dibawah ini. Secara umum gedung sekolah yang ada sudah memenuhi kebutuhan penduduk, namun permasalahan yang ada lebih kepada ketersediaan tenaga pendidik dipelosok-pelosok wilayah. Seiring dengan hal tersebut dalam 2 (dua) tahun terakhir ini persoalan tersebut sudah mulai dapat ditangani dengan penempatan Guru garis depan yang ditugaskan pada pelosok-pelosok wilayah Kabupaten Konawe.

Tabel 2.26

Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Konawe, Tahun Ajaran 2019/2020

No	Kecamatan	Sekolah Dasar			Sekolah Menengah Pertama		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Soropia	12	0	12	4	0	4
2	Lalonggasumeeto	7	0	7	1	0	1
3	Sampara	10	0	10	3	0	3
4	Bondoala	5	0	5	1	0	1
5	Besulutu	9	0	9	3	0	3
6	Kapoiala	7	0	7	3	0	3
7	Anggalomoare	5	0	5	2	0	2
8	Morosi	8	0	8	3	0	3
9	Lambuya	7	0	7	2	0	2
10	Uepai	19	1	20	2	0	2
11	Puriala	13	0	13	2	0	2
12	Onembute	6	0	6	2	0	2
13	Pondidaha	9	0	9	2	0	2
14	Wonggeduku	10	0	10	2	0	2
15	Wonggeduku Barat	11	0	11	2	0	2
16	Amonggedo	11	0	11	3	0	3
17	Wawotobi	21	1	22	3	0	3
18	Meluhu	7	0	7	2	0	2
19	Konawe	12	0	12	2	0	2
20	Unaaha	17	2	19	3	1	4
21	Anggaberu	7	1	8	2	1	3
22	Abuki	9	0	9	2	0	2
23	Latoma	9	0	9	2	0	2
24	Tongauna	11	0	11	2	1	3
25	Asinua	7	0	7	2	0	2
26	Padangguni	10	0	10	2	0	2
27	Tongauna Utara	7	0	7	1	0	1

No	Kecamatan	Sekolah Dasar			Sekolah Menengah Pertama		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Routa	5	0	5	2	0	2
	<b>Kabupaten Konawe</b>	<b>271</b>	<b>5</b>	<b>276</b>	<b>62</b>	<b>3</b>	<b>65</b>

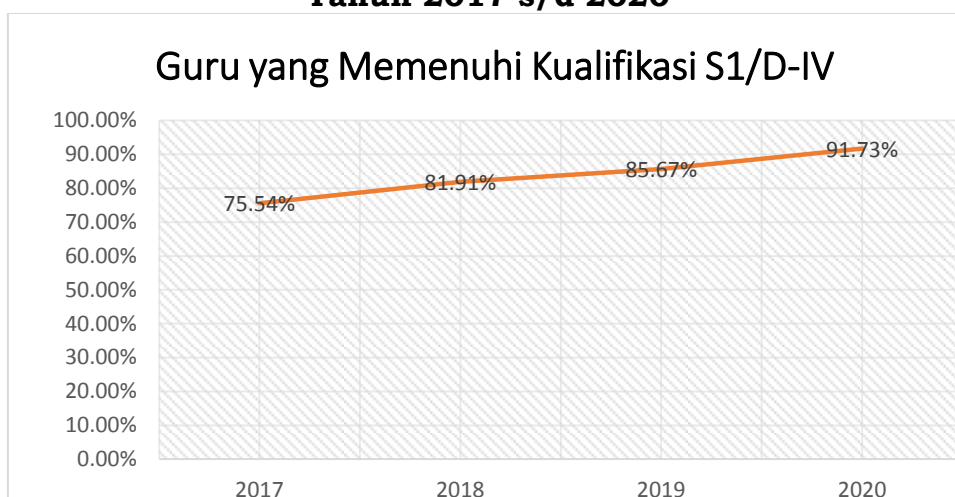
Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka*

#### **b) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

Selain memperhatikan ketersediaan sarana pendidikan Pemerintah Kabupaten Konawe juga ingin memastikan kualitas tenaga pendidik yang kompeten melalui peningkatan kualifikasi pendidikan guru agar peserta didik yang dihasilkan juga berkualitas. Komitmen tersebut dapat dilihat dari peningkatan kualitas guru yang ditunjukkan pada peningkatan kualifikasi pendidikan, dimana pada tahun 2017 guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV baru mencapai 75,54% dari total guru yang ada, namun secara berturut-turut hingga tahun 2020, guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sudah mencapai 91,73% dari total guru sebanyak 3.253. Artinya bahwa telah terdapat 2.684 guru yang telah berijazah S1/D-IV dan masih tersisa 869 guru yang belum berijazah S1/D-IV. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya mandiri para guru yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Konawe melalui penyediaan beasiswa bagi guru untuk melanjutkan studinya.

**Grafik 2.18**

**Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV A di Kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020**



**Tabel 2.27**

Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	75,54%	81,91%	85,67%	91,73%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe



## 2. **Urusan Kesehatan**

Urusan Kesehatan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh 2 (dua) OPD yakni **Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe; dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kabupaten Konawe**. Program-program pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Konawe pada periode 2018-2024 diarahkan pada upaya mendekatkan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Konawe secara konsisten mengalokasikan anggaran pembangunan dibidang kesehatan lebih dari 10% dari total belanja langsung pada APBD Kabupaten Konawe. Hal ini tidak saja hanya dalam rangka untuk memenuhi kewajiban mandatory sesuai ketentuan perundang-undangan tentang penganggaran APBD, namun Pemerintah Kabupaten Konawe benar-benar mengarahkan porsi belanja yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang prima. Dalam rangka meningkatkan dan menjangkau layanan kesehatan hingga ke pelosok, Pemerintah Kabupaten Konawe menjalankan program satu desa satu perawat, disamping itu Pemerintah juga mengalokasikan anggaran bagi insentif dokter dan tenaga medis lainnya di Rumah Sakit maupun di Puskesmas. Yang tidak kalah pentingnya pada periode ini Pemerintah Kabupaten Konawe berhasil menjalin kerja sama dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai lembaga yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Konawe untuk membangun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe menjadi Rumah Sakit yang jauh lebih representatif. Efek dari pembangunan RSUD Kabupaten Konawe ini selain dalam rangka untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Konawe juga dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimaksimalkan melalui sektor kesehatan.

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan yakni sebagai berikut :

### **a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH**

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2020 cenderung menurun walaupun terjadi fluktuasi tetapi masih dapat diminimalisir. Pada tahun 2017 AKB yatiu sebesar 1/1000 KH, tahun 2018 masih tetap 1/1000 KH, pada tahun 2019 naik menjadi 2/1000 KH, dan tahun 2020 kembali meningkat menjadi 8/1000 KH. Pencapaian ini tidak

terlepas dari upaya pemerintah dalam memaksimalkan peran Bidan PTT yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Konawe.

**b) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH**

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung menurun walaupun terjadi fluktuasi dan dapat diantisipasi dengan memberikan peran kepada Bidan PTT dalam melakukan pertolongan persalinan. Selain itu pula mulai tingginya kesadaran masyarakat Kabupaten Konawe untuk menghindari resiko dalam proses persalinan juga semakin meningkat menjadi salah satu pemicu semakin menurunnya AKI.

**c) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani :**

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2017 sebesar 89,63%, pada tahun 2018 meningkat menjadi 92 23%, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 93,61% dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 95,45% Pencapaian ini didorong melalui pelaksanaan beberapa kegiatan seperti pemberian insentif bagi bidan, penyuluhan kepada masyarakat, pelatihan bagi peningkatan profesionalisme para bidan, penyediaan buku KIA dan kegiatan lainnya.

**d) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan :**

Pencapaian indikator ini ditunjukkan melalui rasio cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang cukup signifikan yakni pada tahun 2017 sebesar 70,52%, pada tahun 2018 naik sebesar 90,77%, kemudian pada tahun 2019 mencapai 95,21% persen, selanjutnya pada tahun 2020 menjadi 97,28% Program ini didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan seperti Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu dan Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu.

**e) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) :**

Pencapaian Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) tahun 2017 sebesar 81,28%, pada tahun 2018 meningkat sebesar 82,68%, kemudian pada tahun 2019 mencapai 97,87%, dan pada tahun 2020 mencapai 100%.Peningkatan ini didorong melalui pelaksanaan kegiatan diantaranya peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan; melakukan peningkatan cakupan wilayah bagi pelayanan UCI didesa/kelurahan.

**f) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan :**

Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan pada Tahun 2017 hingga tahun 2020 mencapai 100%. Dari beberapa kasus gizi buruk yang terjadi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat diselesaikan oleh Pemerintah melalui penanganan terpadu yang tidak saja melibatkan Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD Unaaha.

**g) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA :**

Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun 2017 sebesar 79,31%, pada tahun 2018 meningkat sebesar 89,02%, kemudian pada tahun 2019 mencapai 100%, dan selanjutnya pada tahun 2020 mencapai 100%. Peningkatan kinerja yang sangat drastis ini diakibatkan penurunan penemuan penyakit TBC/BTA pada tahun 2020 yakni sebesar 329 kasus sementara penanganannya hanya pada 329 kasus, berbeda jauh dengan penemuan kasus ditahun-tahun sebelumnya.

**h) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD :**

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mencapai 100%. Kasus-kasus DBD yang terjadi dapat ditangani dengan baik. Ketanggapan terhadap kasus DBD yang terjadi merupakan kunci terselesaikannya kasus-kasus DBD yang terjadi.

**i) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin :**

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2017 baru mencapai 100%, pada tahun 2018 meningkat sebesar 100% kemudian pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2020 menetap sebesar 100%. Peningkatan ini adalah wujud dari komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu yang didukung melalui pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan Jaringannya.

**j) Cakupan Kunjungan Bayi :**

Cakupan kunjungan bayi pada periode 2017 hingga 2020 terbilang masih sangat baik dimana pada tahun 2017 sebesar

91,83% pada tahun 2018 meningkat sebesar 92,12%, kemudian pada tahun 2019 sebesar 93,65% dan pada tahun 2020 sebesar 100%. Capaian ini didorong melalui pelaksanaan kegiatan peningkatan imunisasi bagi bayi, penambahan posyandu di Desa/Kelurahan.

***k) Meningkatnya kuantitas dan ketersediaan obat :***

Pencapaian sasaran tersebut ditunjukkan dengan indikator peningkatan jumlah dan ketersediaan obat bagi pelayanan kepada pasien. Pada tahun 2017 hingga tahun 2020 persentase ketersediaan obat mencapai 100%. Dengan rincian realisasi pada tahun 2017 sebanyak 277 jenis, tahun 2018 sebanyak 288 jenis, tahun 2019 sebanyak 841 jenis, tahun dan pada tahun 2020 sebanyak 956 jenis.

***l) Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit Konawe :***

Pada tahun 207 nilai BOR (Bed Occupation Rate) sebesar 74,74%. selanjutnya pada tahun 2018 sebesar 82,36% dan pada Tahun 2019 nilai BOR (Bed Occupation Rate) mencapai 87,68% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 94,32%. Capaian ini didorong melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RS Konawe.

Tabel 2.28  
Indikator Kinerja Capaian Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun  
2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	7	4	5	6
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup	1/1.000 KH	1/1.000 KH	2/1.000 KH	8/1.000 KH
2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	1/100.000 KH	5/100.000 KH	1/100.000 KH	8/100.000 KH
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani	89,63%	92 23%	95,61%	97,21%
4	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	70,52%	90,77%	100,00%	100,00%
5	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	81,28%	82,68%	97,87%	100,00%
6	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	79,31%	89,02%	100,00%	100,00%
8	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	89,92%	100%	100%	100%
9	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	Cakupan kunjungan bayi	91,83%	92,12%	93,65%	100,00%
11	Meningkatnya kuantitas dan ketersediaan obat	100%	100%	100%	100%
12	Meningkatnya pelayanan rumah sakit	74,74%	82,36%	87,68%	94,32%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe; BLUD RSUD Kabupaten Konawe

### 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum; Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe**. Pada periode 2017-2020 penyelenggaraan kedua urusan tersebut

menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Konawe. Hal ini dapat dilihat dari proporsi alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada urusan tersebut. Pada periode ini pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dimaksimalkan.

Capaian pelaksanaan program pembangunan pada urusan ini tergambar dalam indikator-indikator dibawah ini :

**a) Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik :**

Tahun 2020 total panjang jalan Kabupaten sepanjang 784,48 KM. Hingga saat ini tercatat jalan dalam klasifikasi baik sepanjang 761,00 KM atau sekitar 97,01% dikategorikan dalam kondisi baik. jika dibandingkan dengan kondisi awal di tahun 2017 kondisi ini sudah cukup mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan mengingat saat itu proporsi jalan dalam kondisi baik hanya sebesar 45,03% dari total panjang jalan saat itu. Atau hanya terdapat 365,18 KM jalan dalam kondisi baik dari total panjang jalan saat itu sepanjang 810,98 KM. Artinya bahwa sepanjang periode tahun 2017 hingga tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Konawe telah berhasil memperbaiki jalan sepanjang 422,32 KM. Capaian ini tentunya didukung oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe dalam upaya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terutama dalam aktifitas ekonomi. Perbaikan jalan kabupaten inipun dititik beratkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi dan aktifitas sosial dan ekonomi yang tinggi.

Tabel 2.29  
Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten dan Jalan Provinsi, Tahun 2017-2020

Status Jalan	Tahun 2017					Tahun 2018					Tahun 2019					Tahun 2020				
	Rusak/Sedang		Baik		Total	Rusak/Sedang		Baik		Total	Rusak/Sedang		Baik		Total	Rusak/Sedang		Baik		Total
	KM	%	KM	%		KM	%	KM	%		KM	%	KM	%		KM	%	KM	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Jalan Kabupaten	445,8	54,97	365,18	45,03	810,98	402,9	50,05	408,08	49,95	810,98	49,98	6,16	761,00	93,84	810,98	23,48	2,99	761,00	97,01	784,48

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka*



**b) Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik :**

Hingga tahun 2020 panjang saluran drainasi yang terbangun di Kabupaten Konawe telah mencapai 148.101 meter. Dari data tersebut terdapat 88,18% saluran drainase dikategorikan dalam kondisi baik/tidak terjadi sumbatan. Atau terdapat 135.844 meter sudah atau masih dalam kondisi baik sedangkan sisanya sebanyak 8,28% atau sepanjang 12.257 meter masih dalam kondisi tidak berfungsi dengan baik. Persebaran drainase yang tidak berfungsi maksimal ini terdapat didalam Kota Unaaha dimana dibeberapa tempat terdapat kondisi menggenang.

**c) Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik :**

Pada tahun 2017 tercatat irigasi dalam kondisi baik sekitar 45,93 kemudia pada tahun 2020 total panjang irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe yaitu sepanjang 451.972 meter, dimana terdapat 249.368 meter yang tercatat dalam kondisi baik atau sekitar 55,17%. Peningkatan yang terjadi terlihat tidak begitu signifikan di karenakan hampir setiap tahunnya terdapat penambahan panjang jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Konawe. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian ini diantaranya adalah rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi dan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun serta pembangunan jaringan irigasi pada wilayah-wilayah potensial.

**4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe**. Capaian pelaksanaan program pembangunan pada urusan ini tergambar dalam indikator-indikator dibawah ini :

**a) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi :**

Perkembangan rumah tangga bersanitasi pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 hingga tahun 2018 persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 65,03%, pada tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 100% atau dari 61.275 rumah tinggal sudah bersanitasi. Hal ini menjadi capaian yang baik bagi pemerintah untuk mengurangi berkembangnya kawasan atau permukiman kumuh.

Tabel 2.30

Perkembangan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten  
Konawe  
Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Rumah Tinggal Bersanitasi	57,33%	65,03%	100,00%	100,00%

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka*

**b) Persentase Penduduk Berakses Air Minum :**

Hingga tahun 2020 tercatat telah terdapat sebanyak 51.620 rumah tangga yang sudah mendapatkan akses air minum yang layak. Jika dipersentasekan terhadap total jumlah rumah tangga sebanyak 56.064, maka persentase penduduk berakses air minum sebesar 92,07%. Kondisi ini masih perlu ditingkatkan agar dipastikan seluruh masyarakat Kabupaten Konawe memiliki akses air minum yang layak.

**c) Persentase Areal Kawasan Kumuh :**

Secara umum perkembangan kawasan kumuh di Kabupaten Konawe masih dapat terkendali hal ini dapat dilihat dari data perkembangan kawasan kumuh tahun 2017 hingga tahun 2020 tidak menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 dari total luas Kabupaten Konawe 579.894 ha tercatat terdapat 92,15 ha kawasan kumuh atau sebesar 0,02%. Persebaran wilayah kawasan kumuh terjadi di wilayah perkotaan.

**d) Rasio Rumah Ber-IMB :**

Rasio rumah ber-IMB di Kabupaten Konawe masih tergolong sangat rendah. Dari 56.064 total rumah yang ada, baru tercatat sebanyak 3.231 rumah yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau rasionya hanya mencapai 5,76%. Kedepan kondisi ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Konawe mengingat harus dipastikan ketaatan masyarakat terhadap kegiatan dalam mendirikan bangunan. Disamping itu memacu masyarakat dalam menaati ketentuan terhadap izin mendirikan bangunan dapat menjadi salah satu income pemerintah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**e) Persentase Rumah Layak Huni :**

Dari 58.402 rumah tinggal pada tahun 2020 terdapat 47.587 rumah yang dikategorikan sebagai rumah layak huni atau sebesar 81,48% rumah layak huni. Sisanya sebanyak 10.815 rumah tinggal dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni. Pemerintah Kabupaten Konawe pada periode 2017-2020 telah melakukan langkah-langkah strategis dalam menekan persoalan rumah tidak layak huni di Kabupaten Konawe diantaranya pendataan rumah tidak layak huni, dukungan dan fasilitasi terhadap bantuan stimulan rumah tidak layak huni dari pemerintah pusat, bedah rumah tidak layak huni pada lokasi kegiatan P2WKSS, bedah rumah pada lokasi kegiatan lomba desa dan kelurahan dan kegiatan lainnya. Data ini dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Konawe pada tahun-tahun mendatang untuk memformulasikan kebijakan dalam menangani persoalan-persoalan sosial seperti rumah tidak layak huni.

## 5. **Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh **Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe**. Penyelenggaraan urusan ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Konawe pada periode tahun 2013 hingga tahun 2017 berlangsung dalam kondisi cukup baik. Pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan ini dilaksanakan melalui dukungan pembiayaan APBD setiap tahunnya. Selain itu Pemerintah Kabupaten Konawe mendorong pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan dan aparat-aparat yang berwenang untuk secara bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya masing-masing.

### **a) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat :**

Peran petugas perlindungan (linmas) masyarakat pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dilingkup desa/kelurahan dianggap sangat memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman di desa/kelurahan. Olehnya itu pemerintah senantiasa berupaya memberikan perhatian kepada anggota linmas di desa/klurahan. Pada periode tahun 2017 hingga tahun 2020 cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) yang ada di Kabupaten Konawe mencapai 100% dari total jumlah desa/kelurahan yakni sebanyak 291 desa dan 58 kelurahan.

### **b) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota :**

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Konawe pada tahun 2017 masih berkisar pada ruang lingkup wilayah perkotaan yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yakni Kecamatan Unaaha; Kecamatan Wawotobi; Kecamatan Anggaberu, Kecamatan Tongauna, Kecamatan Konawe. Jangkauan pelayanan bencana kebakaran masih cukup sulit dikembangkan mengingat keterjangkauan antar wilayah yang cukup jauh. Sedangkan untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran di tahun 2018, 2019 dan 2020 sudah mencakup keseluruhan Kecamatan di Kabupaten Konawe.

Tabel 2.31  
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman,  
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten  
Konawe,  
Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	17,86%	100%	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe

## 6. Urusan Sosial

Urusan Sosial di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Sosial Kabupaten Konawe**. Penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Konawe dapat dikategorikan masih belum cukup maksimal. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang masih terbatas pada unit organisasi yang ada. langkah-langkah strategis dalam penanganan masalah-masalah sosial di Kabupaten Konawe belum dapat dirumuskan dengan baik sehingga dapat menghasilkan suatu program yang berkualitas yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan sosial. Persoalan mendasar dalam penyelenggaraan urusan sosial yakni kemampuan para aparatur dibidang sosial dalam menyediakan data dan informasi mengenai masalah-masalah sosial yang masih sangat terbatas. Pada periode mendatang penyelenggaraan urusan sosial akan menjadi perhatian ekstra bagi Pemerintah Kabupaten Konawe mengingat demikian kompleksnya permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan urusan ini.

### a) **Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial :**

Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial hingga tahun 2020 mencapai 17,08% atau sekitar 31.512 RUTA dan jiwa sedangkan total jumlah yang seharusnya memperoleh bantuan yaitu 184.451 RUTA dan Jiwa . Capaian ini tergolong mengalami peningkatan sejak tahun 2017 yang hanya mencapai 4,03% Fokus pemerintah dalam beberapa tahun kedepan pada

penyelesaian permasalahan-permasalahan kondisi sosial yang ada harus ditunjang dengan ketersediaan data yang valid.

**b) Persentase PMKS yang Tertangani :**

Sejalan dengan realisasi pencapaian PMKS yang mendapat bantuan, persentase PMKS yang tertangani dapat dikatakan mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2017 PMKS yang tertangani hanya sebesar 0,25%. Selanjutnya pada tahun 2019 PMKS yang tertangani sebesar 46%. Kemudian pada tahun 2020 PMKS yang tertangani sebesar 47,18 atau sekitar 184.451 RUTA dan jiwa yang tertangani dari total 386.666 RUTA dan Jiwa PMKS yang ada. Dalam fokus Pemerintah Kabupaten Konawe berupaya mengurangi angka kemiskinan pada tahun-tahun mendatang maka diperlukan langkah-langkah strategis yang benar-benar mumpuni untuk menyelesaikan permasalahan PMKS yang ada saat ini. Satuan kerja pada urusan ini akan didorong berkontribusi dengan mendesign upaya konkrit yang dapat diterjemahkan kedalam program dan kegiatan secara berkesinambungan agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat benar-benar keluar dari permasalahan sosial yang dihadapinya.

Tabel 2.32  
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial di  
Kabupaten Konawe,  
Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	4,03%	-	16,79%	17,08%
2	Persentase PMKS yang Tertangani	0,25%	-	46%	47,18%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Konawe

### 2.3.2 Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

#### 1. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe**. Penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Kabupaten Konawe pada periode tahun 2017-2020, diarahkan pada upaya mendorong meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan perlindungan bagi pekerja. Capaian penyelenggaraan urusan ini tergambar dalam indikator-indikator dibawah ini :

**a) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan :**

Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan pada tahun 2017 capaian persentase pencari kerja yang ditempatkan semakin menurun yakni hanya sebesar 4,78% atau hanya terdapat 211 pencari kerja yang berhasil ditempatkan dari total 4.415 pencari kerja yang ada. Pada tahun 2018 persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 60,98% atau terdapat 2.430 pencari kerja yang ditempatkan dari total 3.985 pencari kerja yang ada. Kondisi tahun 2019 yakni sebesar 81,82%. Kemudian pada tahun 2020 capaian persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar ,17% atau terdapat 8315 pencari kerja yang berhasil ditempatkan dari total 8385 pencari kerja yang ada. Selanjutnya pada OPD teknis agar melakukan pengawasan terkait keberadaan pencari kerja yang ada. Dibuatkan regulasi agar perusahaan mempersyaratkan setiap calon pencari kerja memiliki kartu pencari kerja.



Tabel 2.33  
 Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Konawe,  
 Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Pencari kerja yang ditempatkan	4,78%	60,98%	81,82%	,17%

Sumber : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe

**b) Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek :**

Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek hingga pada tahun 2020 baru sebesar 66,22%, atau baru sekitar 9697 pekerja/buruh dari total 14.644 pekerja/buruh yang ada. Kedepan Pemerintah Kabupaten Konawe akan mendorong perusahaan-perusahaan yang ada agar memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan pada para pekerja/buruh. Upaya ini akan didorong melalui peningkatan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan agar dapat memfasilitasi para pekerjanya mendapatkan program jamsostek. Upaya lain seperti pemberian punishment dapat dilakukan jika perusahaan-perusahaan yang ada tidak menunjukkan kesungguhan dan langkah konkrit dalam usaha memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja/buruhnya.

**2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe**. Kesetaraan gender dalam pergaulan sosial masyarakat Kabupaten Konawe ditunjukkan dengan berbagai peran perempuan dalam lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Kaum perempuan di Kabupaten Konawe telah mampu mengambil peran dan berkontribusi positif bagi pembangunan. Dalam pergaulan sosial bermasyarakat hampir tidak ditemukan kejadian ataupun peristiwa-peristiwa diskriminatif terhadap kaum perempuan di Kabupaten Konawe. Pemerintah daerah demikian tanggap terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Konawe.

Capaian pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Konawe tergambar pada capaian indikator-indikator pembangunan dibawah ini :

**a) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah :**

Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah diperoleh dari perbandingan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintah dibandingkan dengan total pekerja perempuan yang ada. Di Kabupaten Konawe dari tahun 2017 hingga tahun 2020 persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah berkisar antara 6%-7%. Pada tahun 2017 persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah sebesar 7,52%, selanjutnya pada tahun 2018 sebesar 7,25%, tahun 2019 sebesar 7,40%, kemudian pada tahun 2020 sebesar 7,44%. (Lihat tabel 2.30)

**b) Persentase partisipasi perempuan di lembaga Swasta :**

Sementara untu persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta diperoleh dari perbandingan jumlah pekerja perempuan dilembaga swasta dibandingkan dengan total pekerja perempuan yang ada. Di Kabupaten Konawe jumlah pekerja perempuan dilembaga swasta lebih mendominasi. Tercatat pada tahun 2017 persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta sebesar 92,48%, selanjutnya pada tahun 2018 sebesar 92,75% dan tahun 2019 sebesar 92,60%, kemudian pada tahun 2020 sebesar 92,56%. (Lihat tabel 2.30)

Tabel 2.34

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan di Lembaga Swasta, Tahun 2017-2020

Kegiatan	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	7,52%	7,25%	7,40%	7,44%
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	92,48%	92,75%	92,60%	92,56%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe

**c) Rasio KDRT :**

Kasus KDRT yang terungkap di Kabupaten Konawe pada tahun 2017 yakni sebanyak 27 kasus. Jika dibandingkan dengan total rumah tangga yang ada pada tahun 2017 yakni sebesar 54.606 rumah tangga. Maka rasio KDRT yang terjadi di Kabupaten

Konawe sebesar 0,05%. Perlu dilakukan identifikasi lebih mendalam mengenai kecenderungan yang paling dominan mengenai motif yang memicu peristiwa KDRT yang terjadi agar kedepan dapat diketahui langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe dalam rangka menekan rasio KDRT.

**d) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan :**

Partisipasi angkatan kerja perempuan tergolong cukup tinggi. Pada periode tahun 2017-2020 TPAK perempuan rata-rata mencapai 90%. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2017 TPAK perempuan mencapai 96,71% atau terdapat 43.024 perempuan yang bekerja dari total 44.486 perempuan usia produktif. Pada tahun 2018 TPAK perempuan sebesar 96,71% atau terdapat 43.024 perempuan yang bekerja dari total 44.486 perempuan usia produktif. Kemudian pada tahun 2019 TPAK perempuan sebesar 96,28% atau terdapat 42.137 perempuan yang bekerja dari total 43.767 perempuan usia produktif. Selanjutnya pada tahun 2020 TPAK perempuan sebesar 93,41% atau terdapat 40.938 perempuan yang bekerja dari total 43.825 perempuan usia produktif.

Tabel 2.35

TPAK Perempuan di Kabupaten Konawe, Tahun 2017-2020

Kegiatan	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Bekerja	43.024	43.024	42.137	40.938
Perempuan Tidak Bekerja (Pengangguran Terbuka)	1.462	1.462	1.630	2.887
<b>TOTAL</b>	<b>44.486</b>	<b>44.486</b>	<b>43.767</b>	<b>43.825</b>
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	96,71%	96,71%	96,28%	93,41%
Tingkat iPengangguran Perempuan	3,29%	3,29%	3,72%	6,59%

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Konawe dalam Angka

### 3. Urusan Pangan

Urusan Pangan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Ketahanan Pangan**. Ketersediaan pangan bagi masyarakat harus dipastikan guna menghindarkan masyarakat dari kerawanan pangan. Secara umum dalam 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah

Kabupaten Konawe dapat menjaga keamanan pangan masyarakatnya.

**a) Ketersediaan Pangan Utama**

Ketersediaan pangan utama dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat terpenuhi. Pencapaian ini didorong melalui pelaksanaan kegiatan diantaranya Penanganan Daerah Rawan Pangan; Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan; Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat; Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); Penanganan Keamanan Pangan Segar dan kegiatan lainnya. Rata-rata ketersediaan pangan setiap tahun dapat dilihat terjadi pada data dibawah ini.

Tabel 2.36

Ketersediaan Pangan Utama, Tahun 2017-2020 (Kg)

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Pangan Utama	-	39.034.861	38.374.000	37.794.000

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe

#### 4. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe**. Keberhasilan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Konawe ditandai dengan penerimaan Piala Adipura secara berturut-turut pada tahun 2016 dan tahun 2017. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen stakeholder dalam menghadirkan suasana lingkungan yang asri dan tertata. Capaian pembangunan pada periode 2013 hingga tahun 2017 tergambar pada capaian indikator dibawah ini :

##### a) Volume Sampah yang Tertangani

Capaian volume sampah tertangani pada tahun 2017 hingga tahun 2020 secara detail dapat dilihat dari data yang tersaji pada tabel 2.33. Capaian ini didorong oleh pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penanganan dan Pengelolaan Persampahan; Pengadaan Sarana dan Parasarana Pengumpul Gas Landfil atau biogas; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolah Sampah dengan Prinsip 3R; Peningkatan jumlah personil petugas kebersihan dan kegiatan lainnya.

##### b) Cakupan areal pengelolaan persampahan

Cakupan areal pengelolaan persampahan pada tahun 2020 mencakup 5 Kecamatan ,hal ini telah melebihi target didalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2013-2018 sebanyak 4 kecamatan. Artinya kinerja ini mencapai 125 persen. Pencapaian ini didukung oleh kegiatan peningkatan intensitas pelaksanaan pembersihan Kota Unaaha. + Kecamatan Anggalomoare

Tabel 2.37

Capaian Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup, Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Persentase jumlah sampah yang tertangani	63,53%	73,08	73,79	77,31
2	Cakupan Areal Pengelolaan Persampahan	5 Kec	5 Kec	5 Kec	5 Kec
3	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
4	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten	Tidak ada	1 Dok	3 Dok	2 Dok
6	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	IK= 80, PLJ=1,03 (cemar ringan)	80	80	80
7	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	89,4 (sangat baik)	86,34	86,34	91,12
8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	76	76	76	76
9	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100 Jenis Izin	100 Jenis Izin	Tidak ada	100 Jenis Izin
10	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
12	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
13	Penetapan hak MHA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
14	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Adipura	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
15	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh	5 Pengaduan	5 Pengaduan	2 Pengaduan	3 Pengaduan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani				
16	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	5 Pengaduan	5 Pengaduan	2 Pengaduan	3 Pengaduan
17	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	1,50%	1,50%	1,60%	1,60%
18	Persentase cakupan area pelayanan	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%
19	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	1 TPA	1 TPA	1 TPA	1 TPA
20	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
21	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe

## 5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe**. Pelaksanaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil ditandai dengan pencapaian indikator dibawah ini.

### a) Rasio Penduduk yang Memiliki KTP

Perkembangan Rasio penduduk atau Capaian Realisasi Pelayanan yang ber-KTP dari tahun ketahun pencapaian tahun 2017 rasio penduduk yang ber-KTP hanya mencapai 92,02% atau dari 172.023 penduduk wajib ber-KTP baru terdapat 158.293 yang telah memiliki KTP. Selanjutnya hingga tahun



2018 rasio penduduk yang memiliki KTP telah mencapai 96.66% atau dari 176.400 penduduk wajib ber-KTP sudah terdapat 170.502 yang telah memiliki KTP. Selanjutnya hingga tahun 2019 rasio penduduk yang memiliki KTP telah mencapai 88.89% atau dari 176.610 penduduk wajib ber-KTP sudah terdapat 156.983 yang telah memiliki KTP. Selanjutnya hingga tahun 2020, Terjadi Penurunan rasio penduduk yang memiliki KTP yaitu sebesar 80.65% atau dari 201.311 penduduk yang wajib ber-KTP sudah terdapat 162.353 yang telah memiliki KTP.

**b) Rasio Bayi ber Akte Kelahiran**

Rasio bayi ber akte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi yang sudah memiliki akte kelahiran dengan jumlah seluruh bayi yang ada. Hingga tahun 2020 terjadi peningkatan rasio bayi berakte kelahiran yaitu mencapai 80,70% .

Tabel 2.38

Capaian Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,  
Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	92,02%	96,66%	88.89%	80.65%
2	Rasio bayi berakte kelahiran	73.00%	82,67%	76.82%	80.70%
3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe

**6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe**. Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat desa diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan desa dan peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dalam pembangunan.

**a) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik**

Selama periode 2017 hingga tahun 2020 terus dilakukan peningkatan terhadap Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa. Pada tahun 2017 baru terdapat 90,72% sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik atau terdapat 218 sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik dari total 291 desa yang ada. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik telah mencapai 100%.

**b) Jumlah Kelompok Binaan Bumdes**

Total Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang telah terbentuk sampai pada tahun 2017 adalah sebanyak 132 Bumdes dari total 291 Desa. Pada tahun 2018 tidak terdapat Bumdes yang terbentuk namun pada tahun 2019 dan 2020 Bumdes yang terbentuk mengalami peningkatan yaitu 50 Bumdes sehingga total Bumdes yang terbentuk hingga tahun 2020 yaitu 232 Bumdes dari total 294 Desa. Pembentukan Bumdes ini terus didorong dalam rangka menggerakkan kemandirian ekonomi masyarakat didesa.

**c) Persentase PKK Aktif**

Selama periode tahun 2017 hingga tahun 2020 terus dilakukan pembinaan terhadap PKK didesa. Pelaksanaan kegiatan ini didorong melalui kerjasama pembinaan bersama dengan pemerintah diwilayah kecamatan.

**d) Persentase Posyandu Aktif**

Pelayanan posyandu didesa dilakukan melalui koordinasi dengan Puskesmas diwilayah kecamatan dan aparat kader kesehatan didesa. Pelaksanaan Posyandu ini dilakukan secara bergilir diwilayah desa/kelurahan. Saat ini telah dilakukan pembinaan secara aktif pada 353 posyandu yang ada.

Tabel 2.39

Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa,  
Tahun 2013-2017

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	90,72	100	100	100
2	Jumlah kelompok binaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	100	0	100	100
3	Persentase PKK aktif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
4	Persentase Posyandu aktif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe

## 7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe**. Meskipun isu ledakan penduduk belum mengemuka di Kabupaten Konawe namun isu sentral terkait penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yakni yang berkaitan dengan upaya menyadarkan masyarakat terkait penggunaan KB dan isu-isu lainnya seperti dalam rangka menekan angka kelahiran diusia remaja.

### a) Prevalensi Peserta KB Aktif

Prevalensi KB aktif merupakan perbandingan antara peserta program KB aktif dengan pasangan usia subur. Dari data prevalensi KB aktif menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun angka prevalensi KB aktif semakin meningkat.

Tabel 2.40

Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  
Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Total Fertility Rate (TFR)	-	-	2,3	2,3
2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1	1	1

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	-	-	-
6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	1	1	1	1
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,74	0,77	0,80	0,83
8	Ratio Akseptor KB	26,42%	27,65%	27,85	27,92
9	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	73,58%	73,72	73,76	73,81
10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	479,65	-	1,87	1,86
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	3,34%	3,64%	4,25%	4,52%
12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	18,17%	18,57%	19,35%	19,50%
13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	74,26%	74,37%	74,82%	75,23%
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	47,55%	47,70%	48,25%	48,58%
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	3,90%	4,15%	4,87%	4,90%
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	2,27%	2,47%	2,68%	2,92%
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	4,39%	4,50%	4,85%	5,15%
18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Ada	Ada	Ada	Ada
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	-	-	-	-
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	186,76%	187,15%	187,85%	187,90%
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	73,98%	74,13%	74,78%	75,23%

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	34,23%	5,25	-	-
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	100%
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	76,47%	76,87%	77,13%	77,25%
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	50%	50,45%	50,69%	51,13%
26	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	-	-	-	-
27	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	0,12%	0,17%	0,37%	0,65%
28	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	-	-	-	-
29	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,03	0,03	0,03	0,03

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Konawe

## 8. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe**. Capaian pembangunan urusan perhubungan tergambar dari beberapa indikator dibawah ini.

### a) Cakupan pengelolaan dan pemeliharaan terminal

Pengelolaan dan pemeliharaan terminal hingga tahun 2020 yakni sebanyak 3 terminal. Capaian ini didukung melalui kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan terminal pada UPTD Terminal Wawotobi, Terminal Asinua dan Terminal Rahabangga.

### b) Persentase kendaraan wajib uji kir

Peningkatan persentase wajib uji kir pada Tahun 2017 yakni 2.300 unit pada Tahun 2018 sebesar 1.442 unit. Selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 2.615 unit dan pada tahun 2020. 0 unit, jadi total kendaraan terdapat 6.357 kendaraan yang memiliki uji KIR dan pada tahun tersebut. Peningkatan ini didorong melalui pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya.

### c) Ruas jalan yang memiliki rambu lalu lintas

Rambu lalu lintas yang terpasang sebanyak 3 buah. Capaian ini didukung melalui kegiatan Pengadaan dan Pemasangan APIL, Rambu-rambu Lalu Lintas

Tabel 2.41

Capaian Urusan Pembangunan Urusan Perhubungan, Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	8.926	6.228	10.944	5.605
2	Jumlah uji kir angkutan umum	2.300	1.442	2.615	0
3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3	3	3	3
4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	17,48%	10,96%	19,87%	0,00%

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
5	Ruas jalan yang memiliki rambu lalu lintas	3	3	3	3
6	Rasio jalan yang memiliki rambu lalu lintas	545,5	545,5	545,5	545,5

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe

## 9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe**. Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika untuk saat ini baru difokuskan pada upaya pemenuhan aksesibilitas masyarakat terhadap akses telekomunikasi. Pada periode mendatang fokus urusan komunikasi dan informatika perlu diperluas cakupannya mengingat pada era digital saat ini dituntut kemudahan akses informasi untuk semakin memperlancar aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat.

### a) Cakupan Layanan Telekomunikasi

Dari total luas wilayah Kabupaten Konawe seluas 579.894 Ha, wilayah yang sudah tercoverage layanan telekomunikasi adalah sebesar 60,30% dan sisanya yaitu 39,70% belum terjangkau layanan telekomunikasi seluler.

### b) Website Milik Pemda

Website milik Pemerintah Kabupaten Konawe telah dibuat sejak tahun 2015 dengan alamat [www.konawekab.go.id](http://www.konawekab.go.id). Website ini digunakan sebagai portal Pemerintah Kabupaten Konawe dalam mempublikasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Selain itu portal ini memuat informasi tentang aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan aktifitas masyarakat lainnya.

Tabel 2.42

Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika, Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1.	Cakupan layanan Telekomunikasi	40,96%	52,00%	53,25%	60,30%
2.	Website milik Pemda	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe

## 10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe**. Fokus urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yakni



mendorong meningkatnya peran serta koperasi dalam penguatan perekonomian rakyat.

**a) Persentase Koperasi Aktif**

Jumlah koperasi aktif hingga pada tahun 2020 sebanyak 306 dari 306 jumlah seluruh koperasi atau persentasenya mencapai 100%. Capaian kinerja ini didorong melalui pelaksanaan kegiatan diantaranya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD; Revitalisasi Koperasi di 29 Kecamatan; Pengembangan Keanggotaan Koperasi Melalui Peningkatan Kerjasama Koperasi; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dibidang Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi; Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengelola KSP/USP Koperasi; Pelatihan Penyusunan Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi; Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Pengelola Koperasi; Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan Bagi Koperasi dan kegiatan lainnya.

Tabel 2.43

Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tahun 2017 - 2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Persentase koperasi aktif	75,50%	75,75%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe

## 11. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe**. Kabupaten Konawe yang memiliki sumber daya alam yang besar menjadi magnet tersendiri bagi para investor untuk masuk menanamkan investasinya di daerah ini. Potensi yang dimiliki ini benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah dengan memberikan ruang bagi para pemilik modal berinvestasi di Kabupaten Konawe. Bersamaan dengan itu dalam RPJMN 2014-2019 Kabupaten Konawe ditetapkan sebagai salah satu pusat pengembangan kawasan industri diluar pulau Jawa. Maka sejak tahun 2014 hingga saat ini Kawasan Industri Konawe

(KIK) yang terletak di Kecamatan Morosi mulai disentuh oleh investasi asing. Dan hingga saat ini dampak atas investasi yang ada sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, diantaranya terbukanya lapangan pekerjaan.

**a) Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)**

Pada tahun 2017 tercatat nilai Realisasi PMDN mencapai 435,03%. Kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan Nilai Realisasi PMDN mencapai -58,90%. Kenaikan Nilai Realisasi PMDN terjadi pada tahun 2019 hingga tahun 2020 yaitu mencapai 7,32% pada tahun 2019 dan 544,14% pada tahun 2020.

**b) Jumlah Investor Skala Nasional**

Jumlah investor skala nasional pada tahun 2017 mencapai 632 investor.

**c) Nilai Investasi Berskala Nasional**

Pada tahun 2020 tercatat nilai investasi berskala nasional yang ditanamkan mencapai Rp. 36.323.777.853.551,-. Pencapaian ini didorong karena semakin berkembangnya Kawasan Industri Konawe (KIK) yang menarik investor untuk ikut berinvestasi di kawasan tersebut.

**d) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja diperusahaan dengan jumlah perusahaan yang ada disuatu wilayah. Pada tahun 2017 tercatat rasio daya serap tenaga kerja baru mencapai 6,41. Perbandingan ini diperoleh dari data jumlah tenaga kerja yang saat ini bekerja di 632 perusahaan adalah sebesar 4.091 tenaga kerja. Artinya bahwa rata-rata setiap perusahaan yang ada baru dapat mempekerjakan 6 tenaga kerja lokal yang berasal dari Kabupaten Konawe.

Tabel 2.44  
Capaian Urusan Penanaman Modal, Tahun 2013-2017

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal		Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	435,03%	- 58,90%	7,32%	544,14%
2.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	638	-	-	-
3.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)	7.536.196.048.734,00	4874	4.874.789.115.000,00	36.323.777.853.551,00
4.	Rasio daya serap tenaga kerja	6,41	-	-	-

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe

## 12. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Konawe**. Capaian keberhasilan pembinaan olah raga ditandai dengan lahirnya bibit atlit yang dapat berkiprah di kancah nasional dan kancah internasional. Beberapa cabang olahraga yang telah berhasil menembus prestasi nasional yakni cabang olah raga badminton dan cabang olah raga angkat berat. Secara umum capaian pembangunan urusan kepemudaan dan olah raga tergambar pada indikator dibawah :

### a) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Organisasi pemuda yang ada tercatat sebanyak 25 organisasi. Organisasi yang ada tersebut saat ini aktif dalam menjalankan

kegiatannya. Pembinaan organisasi kepemudaan dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Undang-undang Kepemudaan; Pembinaan Organisasi Kepemudaan; dan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan.

**b) Cakupan Pembinaan Olah Raga**

Cakupan pembinaan olah raga merupakan perbandingan antara jumlah olahraga yang dibina oleh pemerintah dan jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar. Pada tahun 2020 terdapat 5 cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan dari 40 cabang olah raga yang ada, atau capaiannya senilai 31.61%

**c) Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi**

Pada tahun 2020 tercatat pelatih yang sudah bersertifikasi sebanyak 20 orang dari total 50 jumlah pelatih yang ada atau capaiannya sudah mencapai 65,00%.

**d) Cakupan Pembinaan Atlet Muda**

Cakupan pembinaan atlet muda dilakukan dalam rangka menajring bibit-bibit olahragawan potensial. Tahun 2020 dari 80 jumlah atlet muda, terdapat 47 orang atlet muda yang dibina atau capainnya 82,14%.

**e) Jumlah Atlet Berprestasi**

Pelaksanaan pembinaan atlet yang dilakukan sudah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Tercatat terdapat 21 atlet yang sudah menunjukkan prestasinya baik di level provinsi, nasional maupun internasional yang tersebar pada beberapa cabang olahraga.

**f) Jumlah Prestasi Olahraga**

Jumlah prestasi olahraga yang dimaksudkan adalah jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun. Terdapat 3 (tiga) cabang olah raga yang berprestasi pada tahun 2020.

Tabel 2.45

Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	7	4	5	6
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100,00%	56.00%	75%	84%
2	Cakupan pembinaan olahraga	12,50%	15.17%	28,54%	31.61%
3	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	40,00%	50,00%	60,00%	65,00%
4	Cakupan pembinaan atlet muda	58,75%	67,00%	74.00%	82,14%

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	7	4	5	6
5	Jumlah atlet berprestasi	21 Orang	29 Orang	25 Orang	25 Orang
6	Jumlah prestasi olahraga	3 cabang	5 Cabor	5 Cabor	5 Cabor

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten  
Konawe

### 13. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe**. Urusan kebudayaan diselenggarakan dalam rangka memastikan agar masyarakat Kabupaten Konawe tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal. Capaian pembangunan pada urusan kebudayaan sebagai berikut :

#### a) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dilakukan secara berkala setiap tahun yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan momentum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Konawe.

#### b) Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan dikelola

Karya budaya yang direvitalisasi hingga tahun 2017 diantaranya kawasan cagar budaya Makam Raja Lakidende. Pada kawasan tersebut telah dibangun replika rumah adat dan telah dibangun pula museum budaya.

Tabel 2.46

Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3 Event	8 Event	3 Event	3 Event
2	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan dikelola	3	3	3	3

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Konawe

### 14. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe**. Capaian tergambar pada indikator dibawah :

#### a) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun cenderung mengalami peningkatan Pada tahun 2017 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 19,655 pengunjung sedangkan pada tahun 2020 meningkat dimana pengunjung perpustakaan sebanyak 19,950 pengunjung.

#### b) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Untuk jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2017 jumlah koleksi buku sebanyak 32,513 eksemplar sedangkan pada tahun 2020 jumlah buku yang ada sudah mencapai 39,000 eksemplar.



Tabel 2.47  
Capaian Urusan Perpustakaan, Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	19,655	19,703	19,870	19,950
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	32,513	38,243	38,243	39,000

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe

## 15. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe**. Capaian tergambar pada indikator dibawah :

### a) Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

Organisasi perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sudah mencapai 100%. Meskipun demikian pengelolaan arsip yang dilakukan masih bersifat manual. Kedepan perlu dilakukan upaya untuk mendorong sistem pengelolaan kearsipan yang berbasis IT.

Tabel 2.48  
Capaian Urusan Kearsipan, Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe

## 2.3.3 Fokus Urusan Pilihan

### 1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe**. Capaian penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

#### a) Produksi Perikanan

Produksi perikanan tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hingga tahun 2020 produksi perikanan 210.461,00 ton. Sementara target daerah pada tahun tersebut sebesar 160.194,74 ton.

**b) Konsumsi Ikan**

Konsumsi ikan pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dimana pada tahun 2017 nilai konsumsi ikan sebesar 2.191,67% sementara di tahun 2020 konsumsi ikan mencapai 23.59% dari target yang ditetapkan.

**c) Cakupan bina kelompok nelayan**

Pelaksanaan pembinaan pada kelompok nelayan hingga pada tahun 2020 belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian cakupan bina kelompok nelayan yang hanya mencapai 11,15% atau pembinaan kelompok nelayan dilaksanakan pada 4 kelompok nelayan dari 39 total kelompok nelayan yang ada.

Tabel 2.49  
Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan, Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Produksi perikanan	52.058,64	15.060,19	142.002,00	210.461,00
2	Konsumsi ikan	2191,67%	19,79%	21,10%	23,59%
3	Cakupan bina kelompok nelayan	10,26%	10,26%	10,26%	11,15%

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe

## 2. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Konawe**.

Penyelenggaraan urusan pariwisata dilaksanakan :

### a) Jumlah objek wisata yang dikelola pemerintah

Pada tahun 2017 hingga tahun 2020 pemerintah Kabupaten Konawe fokus pada pengelolaan 4 dan 6 objek wisata yakni Pantai Toronipa, Pantai Batu Gong, Pulau Bokori dan Wisata Air Panas Sonay. (Kumapodahu, RTH)

### b) Jumlah kunjungan wisata

Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2020 sebanyak 4,437 kunjungan .

Tabel 2.50  
Capaian Urusan Pariwisata, Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Objek Wisata yang dikelola	4 objek	4 objek	4 objek	6 objek
2	Kunjungan wisata	10,33%	12,503	13,152	4,437

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Konawe

## 3. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh (dua) OPD yakni **Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe; dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**. Dunia pertanian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktifitas ekonomi masyarakat Kabupaten Konawe. Sebagian besar lapangan pekerjaan saat ini terserap pada

dunia pertanian. Tidak heran jika Pemerintah Kabupaten Konawe memberikan perhatian ekstra terhadap penyelenggaraan urusan pertanian. Dalam mendukung kegiatan pertanian pemerintah senantiasa hadir dengan program-program yang bersifat menstimulasi aktifitas para petani. Masih terdapat banyak potensi-potensi pertanian yang belum termanfaatkan secara maksimal, diantaranya potensi peningkatan produksi padi dan pengembangan peternakan.

**a) Produktivitas padi per hektar**

Produktifitas pada per hektar dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami dinamika. Pada tahun 2017 produktifitas padi per hektar sebesar 4,34 ton/ha. pada tahun 2018 telah terjadi penurunan produktifitas padi sebesar 4,29 ton/ha. Dan ditahun-tahun berikutnya yakni 2019 hingga pada tahun 2020 produktifitas padi berturut-turut sebesar 4,37 ton/ha dan 66,47 ton perhektar

**b) Cakupan bina kelompok tani**

Pelaksanaan pembinaan kelompok tani telah dilaksanakan secara terpadu bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan. Intensitas dan aktifitas pembinaan kelompok tani dilaksanakan diseluruh wilayah kecamatan.dari tahun 2017 sampai 2020 memiliki capaian kinerja sebesar 100%

**c) Populasi ternak (sapi, kerbau, kambing)**

Populasi ternak dari tahun ketahun cenderung mengalami peningkatan dalam keberhasilan capaian pembangunan dibidang peternakan sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Kedepan potensi ini akan terus digali mengingat pengelolaan peternakan dapat menjadi pilihan masyarakat sebagai alternatif lain dalam aktifitas pertanian. Tahun 2017 populasi ternak baru mencapai 141563 ekor. Namun pada tahun 2020 populasi ternak telah mencapai 127966. ekor.

Tabel 2.51  
Capaian Urusan Pertanian, Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,34 Ton/Ha	4,29 Ton/Ha	4,37 Ton/Ha	66,47 Ton/Ha

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2.	Cakupan bina kelompok petani	100%	100%	100%	100%
3.	Populasi ternak (sapi, kerbau, kambing)	141.563 ekor	3892 ekor	111109 ekor	127966 ekor

*Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*

#### 4. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe**. Indikator capaian pembangunan urusan perdagangan yakni :

##### a) **Ekspor perdagangan bersih**

Nilai ekspor perdagangan pada tahun 2019 senilai -1.474,43

Tabel 2.52

Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tahun 2017 - 2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perdagangan	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Ekspor perdagangan bersih	US\$ 1.896.029,85	US\$ 431,425,231.33	-1.474,43	-

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe

#### 5. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe**. Fokus urusan perindustrian yakni mendorong berkembangnya Industri Kecil dan Menengah (IKM), meningkatkan produktifitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

##### b) **Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif**

Persentase UKM Non BPR/LKM yang aktif mencapai 100% pada tahun 2020.

##### c) **Persentase BPR/LKM Aktif**

Persentase BPR/LKM yang aktif juga mencapai 100% pada tahun 2020. Dimana dari 14 BPR/LKM yang ada, saat ini seluruhnya aktif dalam menjalankan kegiatannya.

##### d) **Persentase Usaha Mikro dan Kecil**

Pada tahun 2020 persentase usaha mikro dan kecil mencapai 100%. Pencapaian ini didorong dari terciptanya iklim usaha yang kondusif dan tersedianya ruang bagi para pelaku usaha mikro dan kecil dalam menjalankan usahanya.

Tabel 2.53  
Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tahun  
2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	100%	100%	100%	100%
2	Persentase BPR/LKM aktif	100%	100%	100%	100%
3	Persentase usaha mikro dan kecil	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe

## 6. Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe**. Penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Kabupaten Konawe pada periode tahun 2017-2020, diarahkan pada upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat transmigrasi. Capaian penyelenggaraan urusan ini tergambar dalam indikator-indikator dibawah ini :

### a) Cakupan pengawasan, pembinaan dan fasilitasi sarana dan prasarana ketransmigrasian.

Cakupan pengawasan, pembinaan dan fasilitasi sarana dan prasarana ketransmigrasian dilaksanakan pada seluruh pemukiman transmigrasi yang ada atau mencakup 100 persen wilayah transmigrasi yang ada. Pelaksanaannya didukung melalui kegiatan Peningkatan Usaha Di Kawasan Trasmigrasi; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi; Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi; Pengadaan Bibit Tanaman Produksi Pertanian dan Holtikultura; dan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian.

## 2.3.4 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

### 1. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konawe**. Proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan yang disusun berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD hingga RKPD. Disamping itu, untuk memastikan

konsistensi antara rencana dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dibangun sebuah instrumen yang berbasis IT.

**a) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025.

**b) Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA**

Pada periode 2017-2020 ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2020.

**c) Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe setiap tahunnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tentang RKPD. Demikian pula juga dalam perjalanannya terjadi penyesuaian-penyesuaian asumsi perencanaan yang tidak sesuai dengan proyeksi awal dilakukan perubahan terhadap RKPD dan dilegalisasi melalui Peraturan Bupati Tentang Perubahan RKPD.

**d) Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA**

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034. Secara teknis dokumen ini disusun dan dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**e) Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD**

Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD adalah perbandingan antara program jumlah program RKPD tahun berkenaan dengan jumlah program RKPD yang harus dilakukan pada tahun berkenaan. Hingga tahun 2020 persentase penjabaran konsisten program RPJMD kedalam RKPD mencapai 100%.



**f) Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD**

Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD dilaksanakan secara konsisten dari tahun ke tahun.

Tabel 2.54

Capaian Urusan Perencanaan, Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan	Capaian Kinerja (Tahun )			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	95,63%	68,22%	100,00%	100,00%
6	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bappeda Kabupaten Konawe

**2. Urusan Keuangan**

Urusan Keuangan dilaksanakan oleh 2 (dua) OPD yakni **Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe; Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe**. Secara umum pengelolaan keuangan daerah menunjukkan prestasi yang cukup menggembirakan dimana dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Konawe berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe. Indikator-indikator capaian pembangunan dibidang pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2.55  
Capaian Urusan Keuangan, Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Keuangan	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	Menunggu Penilaian
2	SILPA APBD	12.554.197.494,08	2.533.120.718,59	2.207.911.068,92	7.8.917.538,83
3	Persentase program / kegiatan yang tidak terlaksana	-	-	-	-
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	22,53%	-	26,31%	25,42%
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	27,57%	-	14,70%	22,77%
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	44,34% : 55,66%	37,94% : 62,06%	44,52% : 55,48%	51,47% : 48,53%
7	Realisasi PAD	92.264.834.624,97	112.274.800.702,93	97.048.691.451,16	185.926.906.760,63
8	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber : BPKAD Kabupaten Konawe

### 3. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh **Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Konawe**. Penyelenggaraan urusan kepegawaian diarahkan pada penataan sistem manajemen kepegawaian terutama pada pengurusan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pegawai. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan kepegawaian tergambar pada indikator-indikator dibawah ini.

Tabel 2.56  
Capaian Urusan Kepegawaian, Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kepegawaian	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	25,15%	25,41%	26,98%	27,33%

Sumber : BKD dan Diklat Kabupaten Konawe

#### 4. Urusan Pengawasan

Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh **Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe**. Penyelenggaraan urusan pengawasan sasarannya diarahkan pada peningkatan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan keuangan dalam rangka menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance* dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang akuntabel, transparan serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, peningkatan kapasitas lembaga dan aparatur pengawasan yang profesional, pembinaan sistem pertanggungjawaban keuangan yang baik pada seluruh OPD.

Tabel 2.57  
Capaian Urusan Pengawasan, Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengawasan	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Pengawasan Internal	61	-	-	-
2	Persentase tindak lanjut temuan	70,43%	71,49%	81%	81,04%
3	Jumlah temuan BPK	44	18	15	30

Sumber : Inspektorat Kabupaten Konawe

## 5. Urusan Administrasi Pemerintahan

Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan**. Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dilaksanakan dalam rangka mempermudah koordinasi proses penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.58

Capaian Urusan Administrasi Pemerintahan, Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Admin istrasi Pemerintahan	Capaian Kinerja (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Perda yang ditetapkan	-	23	4	16
2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrat program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Kemampuan daerah dalam memanfaatkan segala potensi ekonomi, potensi fisik maupun potensi sumber daya manusia yang dimilikinya merupakan aspek penting yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Diera kompetisi global Kabupaten Konawe tidak saja dituntut untuk dapat memanfaatkan

potensi yang dimilikinya namun juga dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah sekitarnya. Interaksi ekonomi yang terbentuk sejak lama dengan daerah-daerah sekitar hendaknya dijadikan peluang bagi pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang produktif dimana hasil-hasil produksi ekonomi diberbagai sektor dapat dimanfaatkan sebagai nilai jual yang berkualitas. Struktur ekonomi yang cenderung kondusif, kondisi wilayah dan infrastruktur yang memadai serta iklim investasi yang aman dan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai adalah modal berharga dalam pembangunan kedepan.

#### **2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, Pembentuk Barang Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan inventori (stok), ekspor dan impor serta Nilai Tukar Petani (NTP).

Masyarakat sebagai pelaku utama dalam interaksi ekonomi merupakan unsur penting yang dapat mengakumulasi semua sumber daya ekonomi maupun praktek-praktek ekonomi yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat itu sendiri. Di berbagai wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah ternyata tidak bisa dijadikan jaminan untuk menciptakan tatanan perekonomian yang produktif dan mandiri. Kondisi ketahanan ekonomi akan terbentuk manakala manusia sebagai pelaku utama dalam perekonomian memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Manusia atau masyarakat adalah kata kunci dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.

Masyarakat yang produktif akan menjadi masyarakat yang berdaya beli tinggi. Dari sisi ekonomi kemampuan daya beli yang tinggi merupakan prospek yang positif bagi perkembangan ekonomi karena arus barang dan jasa akan semakin lancar dan dapat secepatnya terserap di masyarakat. Daerah dengan masyarakat yang memiliki daya beli tinggi merupakan daerah yang memiliki kapasitas ekonomi yang cukup baik karena masyarakatnya mampu membeli kebutuhan-kebutuhannya. Dalam prakteknya pelaku ekonomi tidak saja hanya masyarakat ataupun rumah tangga semata. Namun pelaku ekonomi juga melibatkan peran swasta maupun pemerintah, sehingga dalam kajian ini perlu ditinjau perananan swasta dan pemerintah dalam

perekonomian melalui analisis terhadap kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Konawe telah banyak membawa perubahan, baik pada struktur ekonomi maupun perubahan pola permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dihasilkan produsen. Penawaran agregat oleh produsen tercermin dalam PDRB sektoral, sedangkan permintaan agregat terekam dalam PDRB pengeluaran.

Perekonomian Kabupaten Konawe sejak tahun 2015 menunjukkan trend perlambatan. Pada tahun 2015, ekonomi Kabupaten Konawe tumbuh 6,11%, melambat jika dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh 7,98%. Di tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe kembali melambat, yakni 5,53% (2016) dan 5,19% (2017). Pada tahun 2017, perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe dari sisi produksi disebabkan oleh perlambatan pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe yang melambat ditekan oleh pertumbuhan komponen Impor yang tumbuh cukup tinggi ditahun 2017. (BPS Konawe, PDRB Kab. Konawe Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017)

Tabel 2.59

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Konawe,  
2013-2017 (Juta Rupiah)

No.	Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsumsi Rumah Tangga	2.802.708,05	2.958.500,26	3.092.748,93	3.245.587,69	3.438.028,90
2.	Konsumsi LNPR	59.896,05	67.107,70	65.226,29	67.849,06	72.626,62
3.	Konsumsi Pemerintah	886.687,38	920.804,26	964.553,25	983.975,11	1.041.879,88
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.621.237,22	1.781.702,72	1.869.419,95	1.0.203,90	2.176.333,29
5.	Perubahan Inventori	36.970,00	47.160,59	41.430,80	41.108,04	165.866,35
6.	Ekspor	487.3,45	549.047,14	567.251,02	577.306,20	645.169,49
7.	Impor	1.511.327,95	1.590.964,77	1.577.885,01	1.605.458,70	1.964.158,82
	PDRB	4.894.673,87	5.509.917,19	6.103.266,10	6.655.749,05	7.231.385,88

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018*

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK 2010) atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran ADHK 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

Tabel 2.60

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten  
Konawe,  
2013-2017 (Juta Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Konsumsi Rumah Tangga	2.802.708,05	2.958.500,26	3.092.748,93	3.245.587,69	3.438.028,90
2	Konsumsi LNPRT	59.896,05	67.107,70	65.226,29	67.849,06	72.626,62
3	Konsumsi Pemerintah	886.687,38	920.804,26	964.553,25	983.975,11	1.041.879,88
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.621.237,22	1.781.702,72	1.869.419,95	1.0.203,90	2.176.333,29
5	Perubahan Inventori	36.970,00	47.160,59	41.430,80	41.108,04	165.866,35
6	Ekspor	487.3,45	549.047,14	567.251,02	577.306,20	645.169,49
7	Impor	1.511.327,95	1.590.964,77	1.577.885,01	1.605.458,70	1.964.158,8
	PDRB	4.383.570,20	4.733.357,90	5.022.745,23	5.300.571,31	5.575.745,71

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018*

Selanjutnya untuk menilai besarnya peran masing-masing komponen terhadap PDRB Pengeluaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.61  
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Konawe, 2013-2017 (Persen)

No.	Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsumsi Rumah Tangga	65,43	64,03	62,84	61,66	63,00
2.	Konsumsi LNPR	1,33	1,36	1,24	1,23	1,25
3.	Konsumsi Pemerintah	19,68	19,02	19,11	18,90	19,07
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,79	34,71	34,56	34,46	36,47
5.	Perubahan Inventori	0,82	1,18	0,88	0,62	1,91
6.	Ekspor	12,47	11,40	9,68	9,46	9,64
7.	Impor	33,52	31,70	28,31	26,33	31,35
	PDRB	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018*

Data diatas terlihat bahwa selama periode 2013-2017, PDRB Kabupaten Konawe, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) sebesar 63% pada tahun 2017. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 33-36%. Adapun kontribusi komponen ekspor selama periode 2013-2016 cenderung menurun namun meningkat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 kontribusi komponen ekspor hanya 9,64%. Di sisi lain, komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB berkontribusi relatif besar. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor). Meskipun kontribusi impor cukup besar, kontribusi komponen impor memiliki kecenderungan menurun selama periode 2013-2017. Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) selama empat tahun terakhir berada pada rentang 18 – 19 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB cukup besar. Di sisi lain, perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai impor (dalam kondisi “defisit” atau merugi).

Sementara kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) dari Tahun 2013-2018 berdasarkan hasil analisa hasil usaha tani mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana tahun Tahun 2014 : Rp. 1.320.183,- per bulan, Tahun 2015 : Rp. 1.774.717,- per bulan, Tahun



2016 : Rp. 1.802.017,- per bulan, Tahun 2017 : Rp. 1.840.417,- per bulan dan Tahun 2018 : Rp. 2.086.917,- per bulan.

#### **2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur yang memadai akan sangat mendukung aktifitas masyarakat dalam interaksi sosial maupun ekonominya. Fasilitas wilayah/Infrastruktur dapat dikatakan sebagai urat nadi dari segala proses interaksi yang terjadi ditengah masyarakat, dimana dengan infrastruktur yang memadai semakin memungkinkan jangkauan yang luas bagi masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Fasilitas wilayah merupakan daya dukung yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berbagai kegiatan ekonomi seringkali terhambat akibat akses sarana dan prasarana yang tidak memadai, yang pada akhirnya membuat arus barang dan jasa menjadi tidak lancar. Kondisi tersebut dipastikan memberikan implikasi negatif bagi kondisi sosial dan ekonomi secara umum.

Kajian ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur berada pada ruang lingkup yang sangat luas. Hampir semua sisi kehidupan memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai dalam kegiatannya. Infrastruktur yang memadai ini tidak saja di artikan dalam pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat seperti sekolah, sarana kesehatan maupun infrastruktur jalan. Namun di era globalisasi saat ini yang bergerak dalam dimensi yang sangat luas dan dinamis, menuntut pemerintah untuk dapat menyediakan segala fasilitas wilayah/infrastruktur memadai pada semua sisi kehidupan masyarakat. Ditambah lagi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dampaknya pada struktur kehidupan masyarakat yang akan semakin kompetitif dalam pemenuhan kebutuhan maupun gaya hidupnya. Kesemua itu merupakan akumulasi tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh pemerintah. Arus informasi yang begitu cepat dapat di akses turut memberikan ruang yang cukup luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengetahui hak-hak dasar yang menjadi kewajiban pemerintah dalam penanganannya.

Kondisi diatas merupakan cerminan dari kondisi umum yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Konawe. Olehnya itu, perubahan paradigma (*mindset*) pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembangunan harus segera dirubah seiring dengan pesatnya perkembangan informasi dimasyarakat. Pemerintah

dituntut untuk dapat menyediakan akses yang luas bagi masyarakat. Hal ini tidak lain untuk menciptakan daya saing yang tangguh dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Konawe agar masyarakat dapat tumbuh secara menyeluruh pada setiap wilayah. Ketangguhan dan daya saing wilayah bergantung pada ketersediaan akses yang memadai.

Analisis kinerja atas fasilitas infrastruktur wilayah di Kabupaten Konawe dilakukan terhadap indikator-indikator : panjang jalan menurut status jalan, banyaknya jembatan menurut jenis konstruksi, luas wilayah potensi sawah produktif, luas wilayah perkotaan, hotel dan penginapan, jumlah rumah makan.

Total panjang jalan yang ada sepanjang 1.056,56 KM yang terdiri dari 810,98 KM jalan kabupaten atau sebesar 76,76%, panjang jalan provinsi 154,58 KM atau sebesar 14,63% dan panjang jalan nasional sepanjang 91 KM atau sebesar 8,61%.

**Grafik 2.19**  
**Persentase Kewenangan Jalan, Tahun 2013-2017**



Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka*, 2018

Tabel 2.62  
Panjang Jalan menurut Pemerintah yang Berwenang, Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Konawe (kilometer), 2017

No.	Perincian	Negara	Propinsi	Kabupaten
1	2	3	4	5
1	Jenis Permukaan	91,00	154,58	837,12
	1.1 Diaspal	91,00	101,29	417,26
	1.2 Kerikil	0,00	53,29	378,45
	1.3 Tanah	0,00	0,00	15,27
	1.4 Tidak Diperinci	0,00	0,00	26,14
2	Kondisi Jalan	91,00	154,58	837,12
	2.1 B a i k	91,00	101,29	365,18
	2.2 Sedang	0,00	0,00	26,14
	2.3 Rusak	0,00	53,29	367,94
	2.4 Rusak Berat	0,00	0,00	77,86
3	Kelas Jalan	0,00	0,00	837,12
	3.1 Kelas I	91,00	101,29	0,00
	3.2 Kelas II	0,00	53,29	837,12
	3.3 Kelas III	0,00	0,00	0,00
	3.4 Kelas III A	0,00	0,00	0,00
	3.5 Kelas III B	0,00	0,00	0,00
	3.6 Kelas III C	0,00	0,00	0,00
	3.7 Tidak Diperinci	0,00	0,00	0,00

Sumber : Diolah dari Data Dinas PU dan Data BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018

Kondisi geografis yang banyak dialiri sungai, dimana sungai-sungai tersebut termasuk dalam simpul transportasi di Kabupaten Konawe menyebabkan cukup banyaknya jumlah jembatan di Kabupaten Konawe. Untuk kondisi sarana transportasi jembatan hingga tahun 2017 jumlah jembatan di Kabupaten Konawe sebanyak 257 buah. Terdiri dari 148 jembatan beton, 107 jembatan semi permanen dan 28 jembatan kayu. Dari jenis konstruksi jembatan tersebut diklasifikasikan kedalam kondisi baik, sedang dan rusak. Untuk jembatan konstruksi beton sebanyak 101 buah dalam kondisi baik dan 12 dalam kondisi rusak, sedangkan jembatan semi permanen 18 buah

dalam kondisi baik dan 86 buah dalam kondisi rusak, dan jembatan kayu 1 buah dalam kondisi baik dan 26 dalam kondisi rusak.

Tabel 2.63  
Banyaknya Jembatan Menurut Jenis Konstruksi di Kabupaten Konawe, 2017

No .	Jenis Konstruksi	Jenis Kondisinya			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	<b>Beton</b>				
	Banyak (Buah)	101	35	12	148
	Panjang (M)	798,60	317	133	1.248,60
II.	<b>Semi Permanen</b>				
	Banyak (Buah)	18	3	86	
	Panjang (M)	190,50	20,00	546,50	107757,00
III.	<b>Kayu</b>				
	Banyak (Buah)	1	1	26	
	Panjang (M)	6	14,50	172	28192,50

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018*

Sementara perlu juga diperhatikan mengenai kondisi Kota Unaaha. Total luas wilayah Kota Unaaha adalah 19.232 Ha. Terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yakni Kecamatan Tongauna 5.584 Ha atau 29,03 persen, Kecamatan Unaaha 3.375 Ha atau 17,55 persen, Kecamatan Anggaberu 5.691 atau 29,59 persen, Kecamatan Wawotobi 3.813 atau 19,83 persen, Kecamatan Konawe 769 atau 4,00 persen. Penggunaan dan penutupan lahan di Kota Unaaha dimanfaatkan untuk pemukiman, perkantoran, pendidikan, perdagangan dan jasa, hutan, tegalan, sawah semak dan lain-lain.

Tabel 2.64  
Penggunaan dan Penutupan Lahan Kota Unaaha Tahun 2017

No.	Jenis Pemanfaatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Permukiman	924	4,8
2.	Perkantoran	324	1,7
3.	Pendidikan	339	1,8
4.	Perdagangan dan Jasa	144	0,7
5.	Hutan	4.890	25,4
6.	Tegalan	6.909	35,9
7.	Sawah	2.361	12,3
8.	Semak	2.784	14,5
9.	Lain-lain	557	2,9
	Total Luas Kawasan Kota	19.232	100

Sumber : Tim Penyusun RKPP Kabupaten Konawe

Salah satu pendukung daya saing daerah adalah ketersediaan sarana penunjang dalam kegiatan perekonomian. Sarana penunjang yang dimaksud adalah fasilitas hotel/penginapan dan rumah makan/restoran. Pada tahun 2017 jumlah Hotel dan penginapan mencapai 14 unit, yang terdiri dari 163 unit kamar dan 229 tempat tidur. Sedangkan jumlah rumah makan sebanyak 51.

Tabel 2.65  
Banyaknya Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia di Kabupaten Konawe, 2012 – 2017

No.	Tahun	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur	Restoran Rumah Makan
1	2	3	4	5	6
1.	2012	11	102	162	41
2.	2013	11	102	162	46
3.	2014	11	102	162	46
4.	2015	11	148	.....	49
5.	2016	13	147	213	53
6.	2017	14	163	229	51

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018*

### **2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi**

Iklim investasi di Kabupaten Konawe dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor eksternal. Faktor eksternal, meliputi : 1) Situasi Politik Dalam Negeri; 2) Bencana Alam yang Timbul dan 3) Situasi Ekonomi Makro Nasional. Ketiga faktor eksternal tersebut sangat mempengaruhi kebijakan investasi di Kabupaten Konawe saat ini. Sedangkan faktor internal dapat dilihat dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan investor dalam mengurus proses perijinan termasuk bea pajak dan retribusi yang dikenakan dan akses terhadap bahan baku.

Tahun 2019 yang merupakan tahun politik di Indonesia yang diperkirakan akan sedikit mempengaruhi iklim investasi. Karena para pemilik modal cenderung akan menahan investasinya selama proses politik berjalan. Hal ini biasa dilakukan untuk memastikan investasi yang mereka tanam dalam jangka panjang dapat terlindungi. Namun dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan iklim persaingan usaha yang tinggi maka, peluang-peluang ekonomi di Kabupaten Konawe akan menjadi magnet tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya utamanya pada sektor pertambangan dan pertanian dalam arti luas yang masih menyimpan potensi yang besar. Faktor eksternal lainnya adalah bencana alam yang timbul. Bencana alam yang paling berpotensi melanda Kabupaten Konawe adalah banjir dan tanah longsor. Kondisi daratan Kabupaten Konawe yang dikelilingi oleh dua sungai besar yakni Sungai Konaweheha dan Sungai Lahambuti merupakan pemicu penyebab terjadinya banjir, sebab dengan curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan meluapnya kedua sungai tersebut. Para investor pada dibidang perkebunan akan mempertimbangkan kondisi yang cukup ekstrim ini. Sementara itu situasi ekonomi makro nasional juga akan mempengaruhi investasi. Setiap kebijakan pemerintah yang ditempuh akan sangat mempengaruhi kondisi didaerah. Jika secara makro pemerintah pusat dapat menstabilkan situasi ekonomi nasional maka secara bersamaan juga akan mempengaruhi investasi.

Faktor internal yang meliputi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan investor dalam mengurus proses perijinan termasuk bea pajak dan retribusi yang dikenakan dan akses terhadap bahan baku. Secara umum faktor internal tersebut tidak terlalu mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Konawe, karena situasi tersebut cenderung masih dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe. Kecuali angka kriminalitas pada tahun 2017 yang

menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016 terjadi 187 kasus dan pada tahun 2017 terjadi 372 kasus. Kasus kriminalitas didominasi oleh kasus pencurian kendaraan bermotor. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah, dengan senantiasa melakukan pembinaan sosial di tengah masyarakat agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Sehingga situasi keamanan yang kondusif memberikan jaminan bagi pemilik modal (investor) untuk menginvestasikan modalnya di Kabupaten Konawe.

Tabel 2.66

Jumlah Kriminalitas yang Terjadi di Kabupaten Konawe Konawe, 2016–2017

No.	Uraian	2016	2017
1	2	3	4
1	Jumlah Kriminalitas	187	372

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018*

#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah faktor penentu keberhasilan pembangunan. SDM yang handal dan kompeten akan memberi daya dukung bagi kualitas kerja yang dihasilkan. Analisis terhadap fokus sumber daya manusia pada kajian ini dilakukan terhadap jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan dan rasio ketergantungan.

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan menurut tingkat pendidikan pada tahun 2017 tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.67

Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Konawe, 2017

No.	Tingkat Pendidikan	Terdaftar			Ditempatkan		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SD Sederajat	63	17	80	3	2	5
2.	SMP Sederajat	62	26	88	9	3	12
3.	SMA Sederajat	823	197	1.020	41	18	59
4.	D.III/SARIMUD	34	191	225	51	46	97
5.	SARJANA	184	116	300	27	22	49
6.	S2	5	0	5	1	0	1
	<b>Jumlah</b>	<b>1,171</b>	<b>547</b>	<b>1,718</b>	<b>132</b>	<b>91</b>	<b>223</b>

Sumber : BPS Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018*

Sementara itu untuk mengetahui angka ketergantungan (dependency ratio) perlu diketahui jumlah penduduk menurut kelompok umur. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa angka dependency ratio Kabupaten Konawe pada tahun 2017 sebesar 58,02%. Angka ini diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk usia non produktif (usia 14 tahun kebawah ditambah dengan jumlah penduduk usia 64 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun).



**Tabel 2.68**  
**Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020**

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020		
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
1	Pertumbuhan PDRB	5,19%	7,44%	10,56%	11,61%	11,61%	
2	PDRB per kapita	-	1.901.759,00	2.061.358,00	2.300.682,00	2.300.682,00	
3	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	15,65%	13,48%	12,65%	11,65%	11,65%	
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,24%	70,24%	71,55%	73,73%	73,73%	
5	Angka melek huruf	98,65%	90,64%	92,98%	95,32%	95,32%	
6	Angka rata-rata lama sekolah	8,77 tahun	8,94 Tahun	8,64 Tahun	8,57 Tahun	8,57 Tahun	
7	Angka usia harapan hidup	69,52 Tahun	69,76 Tahun	69,9 Tahun	70,29 Tahun	70,29 Tahun	
8	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup	1/1.000 KH	1/1.000 KH	2/1.000 KH	8/1.000 KH	8/1.000 KH	
9	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran	1/100.000 KH	5/100.000 KH	1/100.000 KH	8/100.000 KH	8/100.000 KH	

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020		
1	2	4	5	6	7	8	9
	hidup						
10	Prevalensi Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Cakupan Desa Siaga Aktif	-	10%	20%	30%	30%	
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	98,06%	98,06%	98,40%	98,74%	98,74%	
13	Tingkat pengangguran terbuka	1,94%	1,94%	1,60%	1,26%	1,26%	
14	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	-	16.800	13.440	10.080	10.080	
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	-	Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	
16	Persentase PAD terhadap pendapatan	4,18%	4,18%	9,76%	11,44%	11,44%	
17	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
18	Penguatan cadangan pangan	-	1 Ton	2 Ton	10 Ton	10 Ton	
19	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	-	29,47%	32,18%	33,50%	33,50%	
20	Pertumbuhan Industri	-	0	598	705	705	

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020		
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>II</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>						
<b>1</b>	<b>Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita/tahun</b>	-	14.071.593,00	14.140.572,00	14.209.888,00	14.209.888,00	
<b>2</b>	<b>Nilai Tukar Petani (NTP)</b>	1.840.417,00	2.086.917,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
<b>3</b>	<b>Angka kriminalitas yang tertangani</b>	-	88,49%	92,49%	97,49%	97,49%	

**URUSAN PELAYANAN UMUM :**

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>						
1	Pendidikan						
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	39,12%	66,12%	95,97%	96,49%	96,49%	
1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	116,32%	114,26%	99,89%	99,63%	99,63%	
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	78,85%	85,01%	76,70%	96,97%	96,97%	
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,67%	98,61%	99,89%	99,63%	99,63%	
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	73,81%	87,07%	94,34%	96,67%	96,67%	
1.6	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	90,34%	99,86%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.7	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B	90,21%	91,49%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.8	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	75,54%	81,91%	85,67%	91,73%	91,73%	
2	Kesehatan						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup	1/1.000 KH	1/1.000 KH	2/1.000 KH	8/1.000 KH	8/1.000 KH	

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
2.2	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	1/100.000 KH	5/100.000 KH	1/100.000 KH	8/100.000 KH	8/100.000 KH	
2.3	Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani	89,63%	92 23%	95,61%	97,21%	97,21%	
2.4	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	70,52%	90,77%	100,00%	100,00%	100,00%	
2.5	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	81,28%	82,68%	97,87%	100,00%	100,00%	
2.6	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2.7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	79,31%	89,02%	100,00%	100,00%	100,00%	
2.8	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	89,92%	100%	100%	100%	100%	
2.9	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
2.10	Cakupan kunjungan bayi	91,83%	92,12%	93,65%	100,00%	100,00%	
2.11	Meningkatnya kuantitas dan ketersediaan obat	100%	100%	100%	100%	100%	
2.12	Meningkatnya pelayanan rumah sakit	74,74%	82,36%	87,68%	94,32%	94,32%	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	45,03	49,95	93,84	97,01	97,01	
3.2	Rumah Tinggal Bersanitasi	57,33%	65,03%	100,00%	100,00%	100,00%	
3.3	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	88,18%	88,18%	88,18%	88,18%	88,18%	
3.4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	45,93%	50,55%	53,17%	55,17%	55,17%	
3.5	Persentase penduduk berakses air minum	59,36%	75,72%	90,25%	92,07%	92,07%	
3.6	Persentase areal kawasan kumuh	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
4.1	Rasio rumah layak huni	-	71,48%	76,48%	81,48%	81,48%	

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
5.2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	17,86%	100%	100%	100%	100%	
5.3	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Sosial						
6.1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	4,03%	-	16,79%	17,08%	17,08%	
6.2	Persentase PMKS yang Tertangani	0,25%	-	46%	47,18%	47,18%	
<b>II</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>						
1	Tenaga Kerja						
1.1	Pencari kerja yang ditempatkan	4,78%	60,98%	81,82%	,17%	,17%	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	96,71%	96,71%	96,28%	93,41%	93,41%	
2.2	Tingkat iPengangguran	3,29%	3,29%	3,72%	6,59%	6,59%	

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
	Perempuan						
3	Pangan						
3.1	Ketersediaan Pangan Utama	-	39.034.861	38.374.000	37.794.000	37.794.000	
4	Pertanahan						
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	-	-	-	-	-	
5	Lingkungan Hidup						
5.1	Cakupan Areal Pengelolaan Persampahan	5 Kec	5 Kec	5 Kec	5 Kec	5 Kec	
5.2	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten	Tidak ada	1 Dok	3 Dok	2 Dok	2 Dok	
5.3	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	IK= 80, PLJ=1,03 (cemar ringan)	80	80	80	80	
5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	89,4 (sangat baik)	86,34	86,34	91,12	91,12	
5.5	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	76	76	76	76	76	
5.6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100 Jenis Izin	100 Jenis Izin	Tidak ada	100 Jenis Izin	100 Jenis Izin	



No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
	ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota						
5.7	Persentase jumlah sampah yang tertangani	63,53%	73,08	73,79	77,31	77,31	
5.8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Adipura	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
5.9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani (sama dengan 48)	5 Pengaduan	5 Pengaduan	2 Pengaduan	3 Pengaduan	3 Pengaduan	
5.10	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	1,50%	1,50%	1,60%	1,60%	1,60%	
5.11	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	1 TPA	1 TPA	1 TPA	1 TPA	1 TPA	

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
6.1	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	92,02%	96,66%	88.89%	80.65%	80.65%	
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	73.00%	82,67%	76.82%	80.70%	80.70%	
6.3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6.4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	90,72	100	100	100	100	
7.2	Jumlah kelompok binaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	100	0	100	100	100	
7.3	Persentase PKK aktif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
7.4	Persentase Posyandu aktif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	-	-	2,3	2,3	2,3	
8.2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
8.4	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1	1	1	1	
8.5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan	1	1	1	1	1	

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
	pendidikan kependudukan						
8.6	Rata-rata jumlah anak per keluarga (sama dengan 90)	0,74	0,77	0,8	0,83	0,83	
8.7	Ratio Akseptor KB	26,42%	27,65%	27,85	27,92	27,92	
8.8	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	73,58%	73,72	73,76	73.81	73.81	
8.9	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	479,65	-	1,87	1,86	1,86	
8.10	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	3,34%	3,64%	4,25%	4,52%	4,52%	
8.11	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	18,17%	18,57%	19,35%	19,50%	19,50%	
8.12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	74,26%	74,37%	74,82%	75,23%	75,23%	

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
8.13	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	47,55%	47,70%	48,25%	48,58%	48,58%	
8.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	3,90%	4,15%	4,87%	4,90%	4,90%	
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	2,27%	2,47%	2,68%	2,92%	2,92%	
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	4,39%	4,50%	4,85%	5,15%	5,15%	
8.17	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
8.18	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	186,76%	187,15%	187,85%	187,90%	187,90%	
8.19	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	73,98%	74,13%	74,78%	75,23%	75,23%	

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
	Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri						
8.20	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	34,23%	5,25	-	-	-	
8.21	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
8.22	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	76,47%	76,87%	77,13%	77,25%	77,25%	
8.23	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	50%	50,45%	50,69%	51,13%	51,13%	

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
8.24	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	-	-	-	-	-	
8.25	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	0,12%	0,17%	0,37%	0,65%	0,65%	
9	Perhubungan						
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	8.926	6.228	10.944	5.605	5.605	
9.2	Jumlah uji kir angkutan umum	2.300	1.442	2.615	0	0	
9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3	3	3	3	3	
9.4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	17,48%	10,96%	19,87%	0,00%	0,00%	
9.5	Ruas jalan yang memiliki rambu lalu lintas	3	3	3	3	3	
9.6	Rasio jalan yang memiliki rambu lalu lintas	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5	
10	Komunikasi dan Informatika						

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
10.1	Cakupan layanan Telekomunikasi	40,96%	52,00%	53,25%	60,30%	60,30%	
10.2	Website milik Pemda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
11.1	Persentase koperasi aktif	75,50%	75,75%	100,00%	100,00%	100,00%	
11.2	Persentase usaha mikro dan kecil	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Penanaman Modal						
12.1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)	7.536.196.048.734,00	4874	4.874.789.115.000,00	36.323.777.853.551,00	36.323.777.853.551,00	
12.2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	638	-	-	-	-	
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	6,41	-	-	-	-	
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	435,03%	-58,90%	7,32%	544,14%	544,14%	
13	Kepemudaan dan Olah Raga						
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100,00%	56,00%	75%	84%	84%	
13.2	Cakupan pembinaan olahraga	12,50%	15,17%	28,54%	31,61%	31,61%	
13.3	Cakupan pelatih yang	40,00%	50,00%	60,00%	65,00%	65,00%	



No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
	bersertifikasi						
13.4	Cakupan pembinaan atlet muda	58,75%	67,00%	74,00%	82,14%	82,14%	
13.5	Jumlah atlet berprestasi	21 Orang	29 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	
13.6	Jumlah prestasi olahraga	3 cabang	5 Cabor	5 Cabor	5 Cabor	5 Cabor	
14	<b>Kebudayaan</b>						
14.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3 Event	8 Event	3 Event	3 Event	3 Event	
14.2	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan dikelola	3	3	3	3	3	
14.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	13	19	24	24	24	
15	<b>Perpustakaan</b>						
15.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	19.655	19.703	1987	15	15	
15.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	33	38	38	39	39	
16	<b>Kearsipan</b>						
16.1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
	secara baku						
<b>III</b>	<b>Urusan Pilihan</b>						
<b>1</b>	<b>Pariwisata</b>						
1.1	Jumlah Objek Wisata yang dikeloal	4 objek	4 objek	4 objek	6 objek	6 objek	
1.2	Kunjungan wisata	10.326	12.503	13.152	4.437	4.437	
<b>2</b>	<b>Pertanian</b>						
2.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,34 Ton/Ha	4,29 Ton/Ha	4,37 Ton/Ha	66,47 Ton/Ha	66,47 Ton/Ha	
2.2	Populasi ternak (sapi, kerbau, kambing)	141.563 ekor	3.892 ekor	111.109 ekor	127.966 ekor	127.966 ekor	
2.3	Cakupan bina kelompok petani	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>3</b>	<b>Perdagangan</b>						
3.1	Ekspor perdagangan bersih	US\$ 1.896.029,85	US\$ 431,425,231.33	-1474,43	-	-	
<b>4</b>	<b>Perindustrian</b>						
4.1	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	100%	100%	100%	100%	100%	
4.2	Persentase BPR/LKM aktif	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>5</b>	<b>Transmigrasi</b>						
5.1	Cakupan pengawasan, pembinaan dan	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
	fasilitasi sarana dan prasarana ketransmigrasian						
6	Kelautan dan Perikanan						
6.1	Produksi perikanan	52.058,64	15.060,19	142.002	210.461	210.461	
6.2	Konsumsi ikan	-	19.79%	21.10%	23.59%	23.59%	
6.3	Cakupan bina kelompok nelayan	10,26%	10,26%	10,26%	11,15%	11,15%	
<b>IV</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>						
1	Perencanaan Pembangunan						
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
1.3	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
1.5	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	95,63%	68,22%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.6	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2	Keuangan						
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	Menunggu Penilaian	Menunggu Penilaian	
2.2	SILPA APBD	12.554.197.494,08	2.533.120.718,59	2.207.911.068,92	7.8.917.538,83	7.8.917.538,83	
2.3	Persentase program / kegiatan yang tidak terlaksana	-	-	-	-	-	
2.4	Persentase belanja pendidikan (20%)	22,53%	-	26,31%	25,42%	25,42%	
2.5	Persentase belanja kesehatan (10%)	27,57%	-	14,70%	22,77%	22,77%	
2.6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	44,34% : 55,66%	37,94% : 62,06%	44,52% : 55,48%	51,47% : 48,53%	51,47% : 48,53%	
2.7	Realisasi PAD	92.264.834.624,97	112.274.800.702,93	97.048.691.451,16	185.926.906.760,63	185.926.906.760,63	
2.8	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
3	Kepegawaian serta						

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
	pendidikan dan pelatihan						
3.1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	25,15%	25,41%	26,98%	27,33%	27,33%	
4	Penelitian dan pengembangan						
4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Pengawasan						
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	70,43%	71,49%	81%	81,04%	81,04%	
5.2	Jumlah temuan BPK	44	18	15	30	30	
6	Sekretariat Dewan						
6.1	Jumlah Perda yang ditetapkan	-	23	4	16	16	
6.2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Tahun)					OPD Penanggung jawab
		2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	4	5	6	7	8	9
	maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)						
6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setoran DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	



Pemberian kewenangan yang cukup luas pada daerah menuntut adanya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan konsep *money follow functions* yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Namun pada perkembangannya konsep *money follow functions* ini berkembang menjadi konsep *money follow programme* yang menitik beratkan pada anggaran yang berbasis prioritas kebutuhan masyarakat.

Konsep kebijakan makro pengelolaan keuangan daerah yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 diarahkan agar memenuhi norma dan prinsip anggaran sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunannya :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah : merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan;

2. Disiplin Anggaran : program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
3. Keadilan Anggaran : pendapatan pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan;
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran : dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas Anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

### **3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk dapat memproyeksi pertumbuhan pendapatan kedepan. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah.

#### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Bagian ini menjelaskan perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditinjau berdasarkan realisasi dalam APBD selama



kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir antara tahun 2013-2017. Gambaran realisasi APBD Kabupaten Tahun 2013-2017 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1  
Realisasi APBD Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun (Rp)					Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>868.956.443.915,74</b>	<b>868.658.599.258,82</b>	<b>1.076.320.162.257,23</b>	<b>1.174.856.947.156</b>	<b>1.209.196.332.474,97</b>	<b>8,99</b>
<b>1</b>	<b>Pedapatan Asli Daerah</b>	<b>23.644.409.990,68</b>	<b>33.215.438.796,82</b>	<b>56.039.769.874,43</b>	<b>57.702.177.562,48</b>	<b>50.528.399.183,97</b>	<b>24,93</b>
	1) Pajak Daerah	4.573.651.273,00	7.982.735.066,00	13.060.335.665,00	10.304.396.277	13.832.148.190	<b>37,82</b>
	2) Retribusi Daerah	3.417.007.750,00	2.590.296.520,00	14.519.330.269,00	7.325.074.811,00	2.487.743.618,00	<b>80,19</b>
	3) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	3.501.854.829,00	3.064.885.123,00	3.933.768.921,00	3.909.383.988,00	4.438.258.301,00	<b>7,19</b>
	4) lain-Lain PAD	12.151.896.138,68	19.577.522.081,82	24.526.335.019,43	36.163.322.486,48	29.770.249.074,97	<b>29,04</b>
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan :</b>	<b>712.809.058.327,00</b>	<b>696.199.698.550,00</b>	<b>804.039.030.498,00</b>	<b>939.157.887.752,00</b>	<b>855.575.073.942,00</b>	<b>5,27</b>
	1) Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak	31.520.344.327,00	27.265.712.550,00	28.261.280.498,00	18.036.669.866,00	15.295.751.894,00	<b>-15,31</b>
	2) DAU	613.042.674.000,00	584.033.036.000,00	639.180.850.000,00	690.044.912.000,00	677.923.042.000,00	<b>2,73</b>
	3) DAK	68.246.040.000	84.900.950.000	136.596.900.000	231.076.305.886	162.356.280.048	<b>31,18</b>
<b>3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :</b>	<b>132.502.975.598,06</b>	<b>139.243.461.918,00</b>	<b>216.241.362.144,80</b>	<b>177.996.881.840,00</b>	<b>303.092.859.349,00</b>	<b>28,24</b>
	1) Pendapatan Hibah		-	15.571.920.000,00	2.219.353.510,00	0,00	
	3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	13.547.866.376,00	14.841.114.986	16.788.501.627	24.423.849.598	23.837.359.903	<b>16,44</b>
	4) Dana Penyesuaian dan otonomi daerah	99.846.274.000	102.163.851.000	113.739.739.000	0	52.010.057.000	<b>-28,78</b>
	5) Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	8.479.668.000	5.235.000.000	5.640.882.000	5.280.000.000	1.038.882.000	<b>-29,31</b>
	6) Pendapatan lainnya	10.629.167.222	17.003.495.932	64.500.319.518	146.073.678.732,00	226.206.560.446,00	<b>141,4</b>
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>835.665.384.184</b>	<b>872.483.693.119,92</b>	<b>1.051.693.541.232,65</b>	<b>1.189.502.020.486,00</b>	<b>1.372.847.129.851,00</b>	<b>13,37%</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung :</b>	<b>485.250.545.710,17</b>	<b>505.670.345.482,92</b>	<b>574.504.040.491,65</b>	<b>661.895.029.498,00</b>	<b>764.160.085.300,00</b>	<b>12,12%</b>
	1) Belanja Pegawai	440.689.407.436,00	465.089.810.629,00	318.127.279.955,00	491.133.095.496,00	457.421.432.671,00	<b>5,36%</b>
	2) Belanja Bunga	38.948.003,17	19.678.045,92	13.619.431,65	8.637.710,00	4.658.591.447,00	<b>24764,20%</b>
	4) Belanja Hibah	40.480.274.105,00	10.875.000.000,00	4.500.000.000,00	706.560.000,00	25.005.068.250,00	<b>805,73%</b>

No.	Uraian	Tahun (Rp)					Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
	5) Belanja Bantuan Sosial	4.041.916.166,00	3.228.750.000,00	906.500.000,00	430.500.000,00	6.260.502.000,00	<b>302,42%</b>
	7) Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa.	-	26.012.106.808,00	90.709.447.392,00	162.388.676.292,00	269.014.909.932,00	<b>131,13%</b>
	8) Belanja Tidak Terduga	-	445.000.000,00	899.019.000,00	868.520.000,00	1.799.581.000,00	<b>68,61%</b>
<b>2</b>	<b>Belanja langsung :</b>	<b>350.414.838.474,00</b>	<b>366.813.347.637,00</b>	<b>477.189.500.741,00</b>	<b>527.606.990.988,00</b>	<b>608.687.044.551,00</b>	<b>15,18%</b>
	1) Belanja Pegawai	33.415.345.674,00	35.971.036.697,00	31.440.481.657,00	23.334.631.394,00	29.541.487.784,00	<b>-1,03%</b>
	2) Belanja Barang dan Jasa	159.734.416.065,00	187.928.636.745,00	240.674.398.653,00	233.014.499.191,00	287.634.319.340,00	<b>16,49%</b>
	3) Belanja Modal	157.265.076.735,00	142.913.674.195,00	205.074.620.431,00	271.257.860.403,00	291.511.237.427,00	<b>18,53%</b>
<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>50.833.563.952</b>	<b>20.135.426.581</b>	<b>7.935.859.713</b>	<b>59.567.938.965</b>	<b>166.369.592.894</b>	<b>177,23</b>
	1) Penerimaan Pembiayaan Daerah	31.701.063.952,18	19.595.426.581,32	7.665.859.712,84	59.057.082.464,63	157.023.786.026,11	<b>184,3%</b>
	2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah	19.132.500.000	540.000.000	270.000.000	510.856.500	9.345.806.867,40	<b>417,87%</b>

*Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe*

### **3.1.2 Neraca Daerah**

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2014-2017, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Konawe mencapai 7,78%. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Konawe dalam kurun waktu mulai tahun 2016 dengan rata-rata sebesar 14.761,75%, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari tahun 2013-2017 mengalami cenderung mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode mendatang selama kurun waktu tertentu akan terdapat kewajiban jangka panjang yang harus dibayarkan pemerintah kepada pihak ketiga.

Tabel 3.2  
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2014-2017

U R A I A N	Catatan	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>ASET</b>	<b>5.5.1</b>					
ASET LANCAR	5.5.1.1					
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1.1	3.569.130.269,84	19.536.136.159,63	32.161.860.669,39	927.119.514,36	138,29%
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.2	4.814.770,00	19.801.995,00	44.040.000,00	59.425.000,00	156,20%
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.3	412.108.748,00	795.330.061,00	866.731.379,00	826.724.114,00	32,45%
Kas di BLUD	5.5.1.1.4	3.851.281.457,00	5.152.690.131,00	4.970.760.560,00	6.863.833.945,00	22,78%
Kas di Bendahara FKTP	5.5.1.1.5	-	212.719.855,00	4.173.947,00	1.636.235,00	-79,42%
Kas di Bendahara BOS	5.5.1.1.6			361.650.589,00	5.818.580.015,00	1508,90%
Kas Lainnya		79.050.582,00	12.949.924,00	0,00	0,00	-91,81%
Piutang Pendapatan	5.5.1.1.7	13.565.842.268,16	13.869.908.385,34	22.701.502.141,34	25.137.767.099,14	25,55%
Piutang Lainnya	5.5.1.1.8	687.864.250,76	1.671.138.374,76	2.710.418.696,17	1.797.291.109,83	57,15%
Penyisihan Piutang	5.5.1.1.9	-	-1.077.680.988,16	-1.016.822.409,95	-1.314.308.959,39	11,80%
Beban Dibayar Dimuka	5.5.1.1.10	-	41.199.516,13	0,00	0,00	-100,00%
Persediaan	5.5.1.1.11	5.540.096.959,00	5.705.242.184,00	5.683.327.333,00	10.224.759.819,00	27,50%
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>27.710.189.304,76</b>	<b>45.939.435.597,70</b>	<b>68.487.642.904,95</b>	<b>50.342.827.891,94</b>	<b>29,46%</b>

U R A I A N	Catatan	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.5.1.2					
Investasi Non Permanen				0,00	0,00	
Pinjaman Angsuran Berjangka		-	-	0,00	0,00	
Investasi Non Permanen-Dana Bergulir	5.5.1.2.1	2.188.623.488,00	115.145.247,30	96.075.921,50	0,00	-70,43%
Investasi Permanen				0,00	0,00	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.1.2.2			18.111.594.496,64	20.713.643.031,14	14,37%
Insvestasi Permanen Lainnya		15.842.500.000,00	15.621.401.984,05	0,00	0,00	-50,70%
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		<b>18.031.123.488,00</b>	<b>15.736.547.231,35</b>	<b>18.207.670.418,14</b>	<b>20.713.643.031,14</b>	<b>5,58%</b>
ASET TETAP	5.5.1.3					
Tanah	5.5.1.3.1	102.400.409.668,00	104.421.794.668,00	102.978.850.258,00	175.863.166.683,00	23,79%
Peralatan dan Mesin	5.5.1.3.2	226.114.942.342,00	283.645.355.830,00	302.039.486.309,00	294.788.912.176,00	9,84%
Gedung dan Bangunan	5.5.1.3.3	436.397.831.893,00	555.234.458.507,00	544.630.687.682,00	599.981.983.105,00	11,83%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.1.3.4	447.124.454.429,00	499.827.522.591,00	677.278.986.193,00	827.173.141.833,00	23,14%
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.3.5	18.208.580.339,00	20.094.562.051,00	37.671.201.303,00	47.139.053.873,00	40,99%
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.5.1.3.6	7.461.838.100,00	3.318.776.660,00	35.107.491.800,00	155.802.425.081,00	415,37%
Akumulasi Penyusutan	5.5.1.3.7	-	(410.430.318.314,00)	(514.866.779.334,00)	(568.989.993.055,00)	17,98%
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>1.237.708.056.771,00</b>	<b>1.056.112.151.993,00</b>	<b>1.184.839.924.211,00</b>	<b>1.531.758.689.696,00</b>	<b>20,73%</b>
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan		-	-	-	-	

U R A I A N	Catatan	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>		-	-	-	-	
ASET LAINNYA	5.5.1.4					
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-	-	-	
Tagihan Jangka Panjang	5.5.1.4.1	48.816.486.036,00	46.917.358.747,00	48.949.247.526,28	48.821.008.287,30	0,06%
Kemitraaan Dengan Pihak Ketiga	5.5.1.4.2	1.261.260.000,00	1.261.260.000,00	1.261.260.000,00	1.261.260.000,00	0,00%
Aset Tak Berwujud	5.5.1.4.3		4.795.122.000,00	2.436.035.907,00	2.276.046.736,00	-27,88%
Aset Lain-Lain	5.5.1.4.4	121.564.883.721,38	125.420.012.267,84	183.488.325.991,84	121.196.096.648,84	5,17%
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>171.642.629.757,38</b>	<b>178.393.753.014,84</b>	<b>236.134.869.425,12</b>	<b>173.554.411.672,14</b>	<b>3,27%</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>1.455.091.999.321,14</b>	<b>1.296.181.887.836,89</b>	<b>1.507.670.106.959,21</b>	<b>1.776.369.572.291,22</b>	<b>7,74%</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	5.5.2					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.5.2.1					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.2.1.1	404.941.717,20	192.980.050,00	1.072.185.610,28	1.455.952.867,28	146,35%
Utang Bunga	5.5.2.1.2	-		108.077.105,00	1.211.232.562,00	1020,71%
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.2.1.3	-		0,00	11.820.119.326,00	0,00%
Pendapatan Diterima Dimuka			53.939.657,65	0,00	0,00	-100,00%
Utang Beban	5.5.2.1.4		281.026.227,00	248.156.109,00	308.925.591,00	6,40%
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.1.5	19.885.237.206,40	12.639.748.033,40	32.160.011.367,54	91.107.458.310,78	100,43%

U R A I A N	Catatan	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
Utang BLUD	5.5.2.1.6	1.783.319.087,18	1.548.500.623,12	2.030.687.267,59	1.915.016.869,96	4,09%
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>22.073.498.010,78</b>	<b>14.716.194.591,17</b>	<b>35.619.117.459,41</b>	<b>107.818.705.527,02</b>	103,80%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.5.2.2					
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.2.2.1	89.094.186,54	76.284.495,54	33.624.528.165,54	141.841.425.756,54	14761,75%
Utang Jangka Panjang Lainnya				0,00		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>89.094.186,54</b>	<b>76.284.495,54</b>	<b>33.624.528.165,54</b>	<b>141.841.425.756,54</b>	14761,75%
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>22.162.592.197,32</b>	<b>14.792.479.086,71</b>	<b>69.243.645.624,95</b>	<b>249.660.131.283,56</b>	
<b>EKUITAS</b>	5.5.3					
EKUITAS	5.5.3.1	<b>22.340.780.570,40</b>		1.438.426.461.334,26	1.526.709.441.007,66	
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>1.507.670.106.959,21</b>	<b>14.792.479.086,71</b>	<b>1.507.670.106.959,21</b>	<b>1.776.369.572.291,22</b>	14761,75%

*Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe*



### **3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Tujuan pemberian kewenangan yang sangat luas kepada daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah untuk menciptakan kemandirian bagi daerah yang dilandasi akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan kondisi nyata kemandirian daerah, maka perlu upaya-upaya dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya tersebut harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek perencanaan, Daerah sangat membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas tinggi, bervisi strategik dan mampu berpikir strategik, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah.

Pemerintah Kabupaten Konawe telah berupaya memenuhi kriteria-kriteria diatas agar tercipta aparatur daerah yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diemban. Revitalisasi peran aparatur daerah dalam pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan daerah telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Dimana dalam 3 (tiga) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Konawe dapat memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peningkatan prestasi pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan diberikannya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Konawe Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017. Ini merupakan gambaran konkrit bahwa adanya progres peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah.

### **3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran**

#### ***Proporsi Pendapatan Daerah***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 285, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah guna memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai hakikat pemerintahan.

Adapun uraian setiap komponen-komponen pendapatan daerah di Kabupaten Konawe meliputi :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)** yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah.
- b) Dana Perimbangan**, yang terdiri dari Bagi hasil Pajak, Bagi hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan daerah lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Lain-lain Daerah yang Sah ini juga diluar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten konawe, karena pengalokasiannya tergantung dari Pemerintah Pusat.

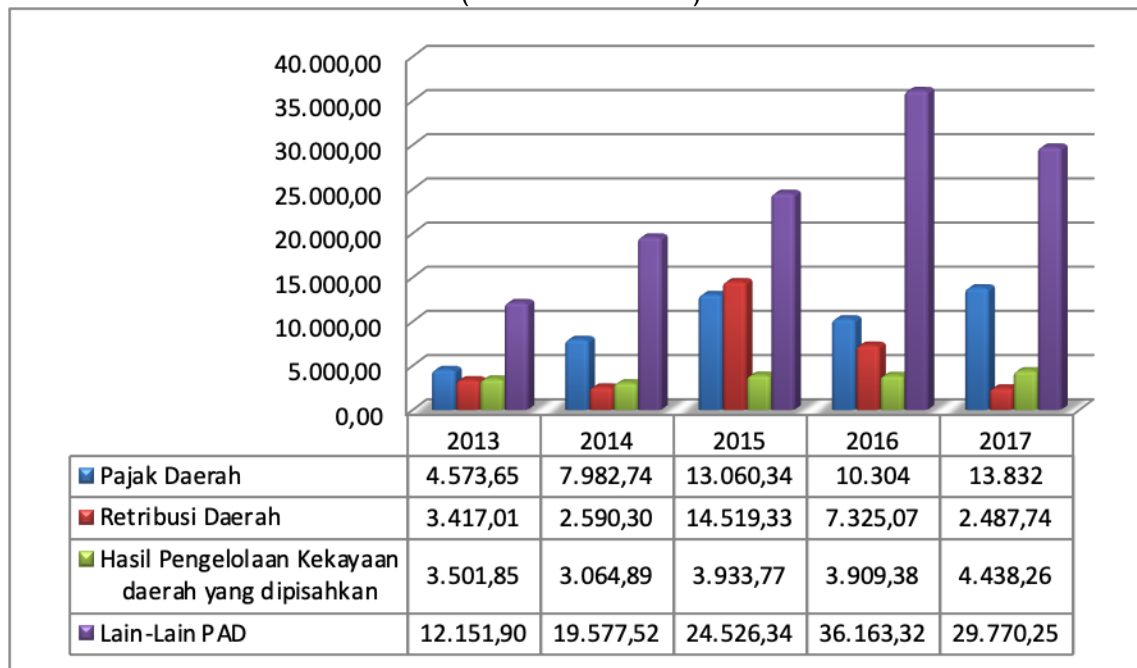
Otonomi fiskal yang diberikan kepada daerah dimaksudkan agar daerah dapat mandiri dalam memperoleh dan mengelola potensi pendapatan yang dimilikinya, utamanya dari pendapatan daerah dari komponen PAD. Daerah diberikan peluang untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pengelolaannya, sehingga daerah memiliki kondisi fiskal yang baik dan dapat mendukung kinerja pemerintah pusat.

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Disamping berasal dari sumber-sumber pendapatan di atas, pembangunan di daerah didukung dengan dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana dekosentrasi dan dana tugas pembantuan yang disalurkan melalui Kementerian dan Provinsi.

Secara umum dalam 5 (lima) tahun terakhir kebijakan keuangan dibidang pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparat pengelola pendapatan daerah serta kemampuan dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam mewujudkan hal tersebut dilakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kesinambungan program/kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan memperhatikan aspek kepentingan umum.

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa secara umum rata-rata pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir tumbuh sebesar 8,99%. Jika dicermati lebih dalam, bahwa pertumbuhan komponen-komponen pembentuk pendapatan daerah tidak tumbuh secara merata.

Grafik 3.1  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe Tahun  
2013-2018  
(Dalam Jutaan)



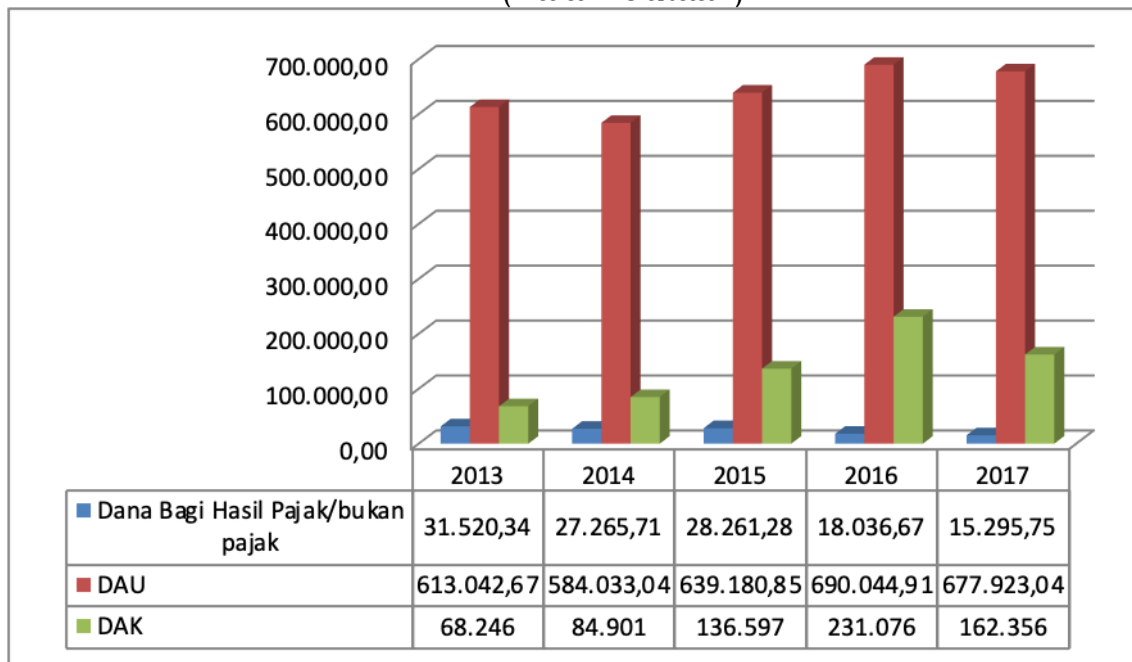
*Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe*

Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh 24,93%, namun pertumbuhan tersebut cenderung berfluktuatif, dimana setiap tahunnya tidak terjadi konsistensi pertumbuhan pada komponen-komponennya. Pajak Daerah tumbuh cukup signifikan dan konsisten dalam 5 tahun terakhir sebesar 37,82%. Sementara Retribusi Daerah yang tumbuh sebesar 80,99 persen, cenderung mengalami fluktuatif pertumbuhan yang sangat signifikan dimana dalam 3 tahun terakhir kontribusinya berada pada tren penurunan. Dapat dilihat pada tahun 2015 kinerja Retribusi Daerah mencapai Rp. 14.519.330.269,- namun pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni masing-masing Rp. 7.325.074.811,- dan Rp. 2.487.743.618,-. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam 5 tahun terakhir tumbuh cukup konstan yaitu sebesar 7,19%. Sementara dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi dalam 5 tahun terakhir yakni tumbuh rata-rata 29,04%.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa strategi intensifikasi pajak yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor PAD sudah cukup baik. Olehnya itu dalam pembangunan 5 tahun kedepan strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak bisa ditingkatkan dengan program dan kegiatan yang lebih efektif agar penerimaan daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat, sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe memiliki kemandirian dari sisi fiskal dapat.

Grafik 3.2

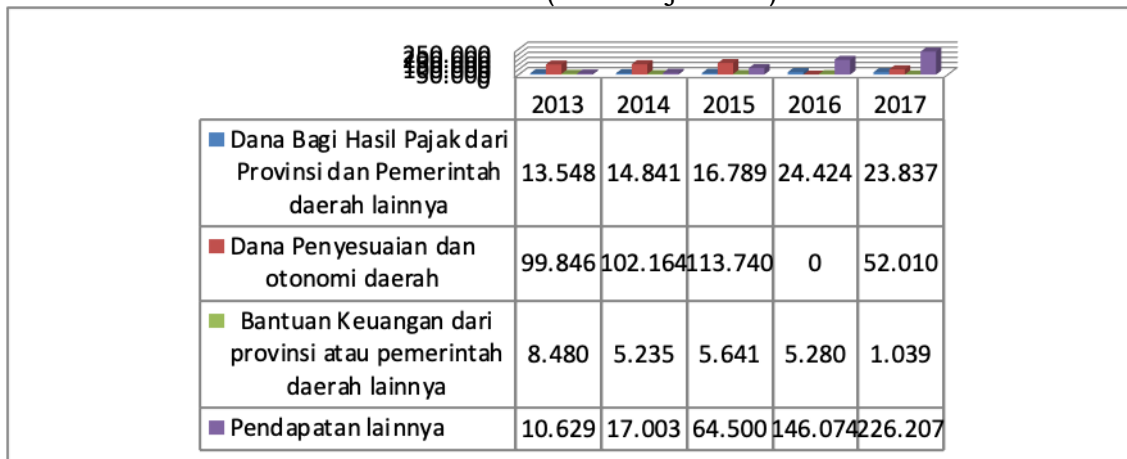
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017  
(Dalam Jutaan)



Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe

Komponen Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK secara konsisten dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Total pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah 5,27%. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak mengalami penurunan rata-rata 15,31%. Dana Alokasi Umum (DAU) dalam 5 tahun terakhir dapat tumbuh sebesar 2,73%. Sementara DAK juga tumbuh sebesar 31,18%.

Grafik 3.3  
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Konawe  
Tahun  
2013-2017 (Dalam jutaan)



*Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe*

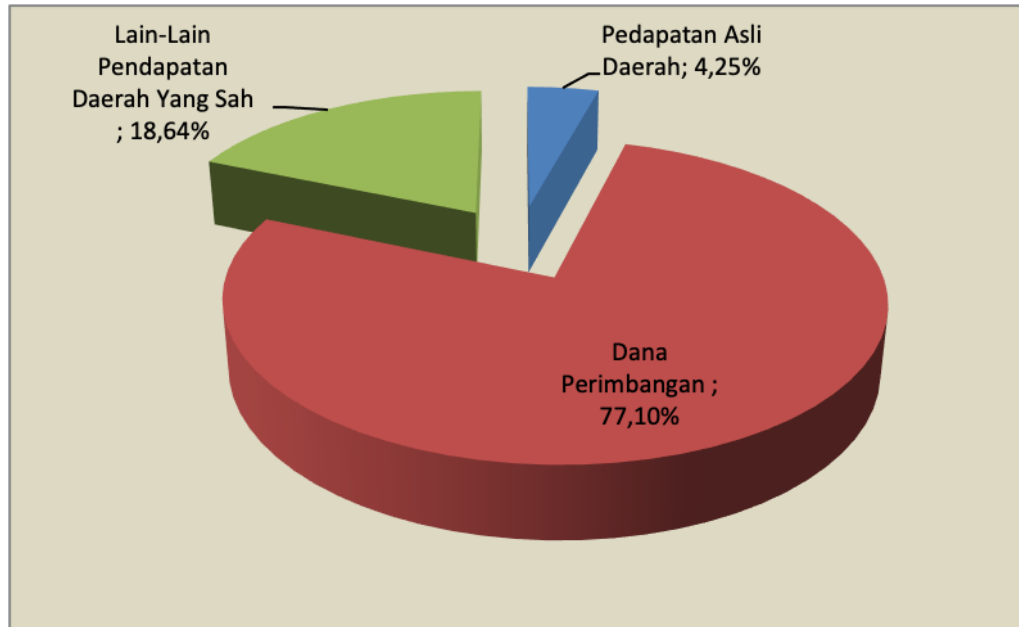
Realisasi Pendapatan dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam 5 tahun terakhir rata-rata tumbuh sebesar 28,84%. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya cenderung mengalami peningkatan, dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 16,44%. Sementara untuk Dana Penyesuaian Otonomi Khusus mengalami penurunan sebesar 28,78%. Sedangkan Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya juga mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 29,31%. Pos Pendapatan Lainnya tumbuh rata-rata 141,14 persen.

Sementara jika ditinjau dari persentase kontribusi masing-masing komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah setiap tahunnya, data menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana perimbangan masih sangat besar. Rata-rata antara tahun 2013-2017 dana perimbangan mendominasi persentase besarnya pendapatan di Kabupaten Konawe. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Konawe masih tergolong sebagai daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah. Peran PAD terhadap total pendapatan daerah hanya mencapai 4,25%, sedangkan peran Dana Perimbangan mencapai 77,10%, sementara peran pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 18,64%. Melihat kondisi tersebut perlu ada langkah-langkah konkrit dari pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah agar pemerintah daerah tidak selamanya tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sebab meskipun setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Konawe mendapatkan alokasi Dana Perimbangan dari pemerintah pusat namun besarnya tidak dapat dipastikan karena pengalokasian

dana perimbangan khususnya komponen DAU dan DAK diberikan berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan.

Grafik 3.4

Proporsi Komponen Pendapatan dari Total Pendapatan Daerah Tahun 2017



Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe

### **Proporsi Belanja Daerah**

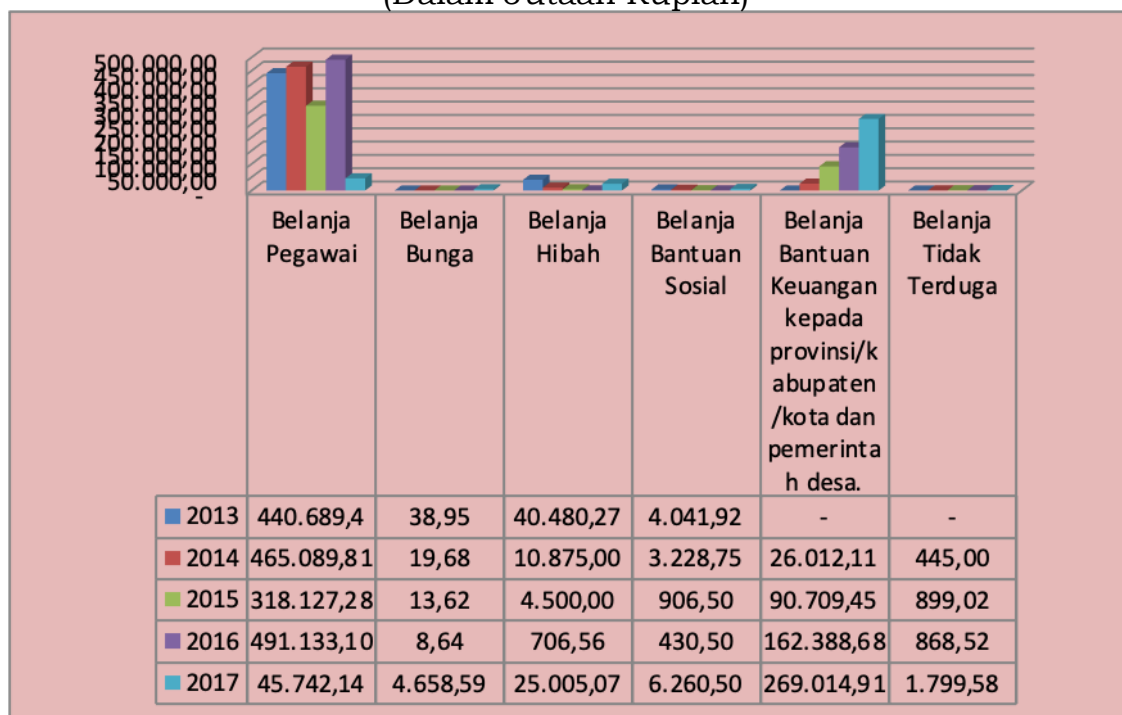
Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Dalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 arah kebijakan umum pengelolaan belanja daerah diarah pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun kedepan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan belanja daerah digunakan sebagai instrumen pencapaian visi sesuai dengan prioritas pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dukungan bagi pembiayaan program dan kegiatan serta kepentingan pelayanan umum dengan tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang lebih memihak pada kepentingan publik, disamping penyelenggaraan pemerintah daerah.

Secara spesifik kebijakan belanja daerah Kabupaten Konawe tahun 2013-2018 diarahkan untuk memenuhi hal-hal berikut :

- Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal melalui peningkatan investasi, perdagangan dan pelayanan jasa yang berorientasi pada produktifitas.
- Mendorong terpenuhinya akses pelayanan publik yang mudah dan terjangkau.
- Meningkatkan kelancaran mobilitas internal dan eksternal wilayah dan menciptakan kenyamanan beraktifitas bagi masyarakat.
- Meningkatkan kemandirian masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan.

Grafik 3.5  
Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Konawe Tahun  
2013-2017  
(Dalam Jutaan Rupiah)



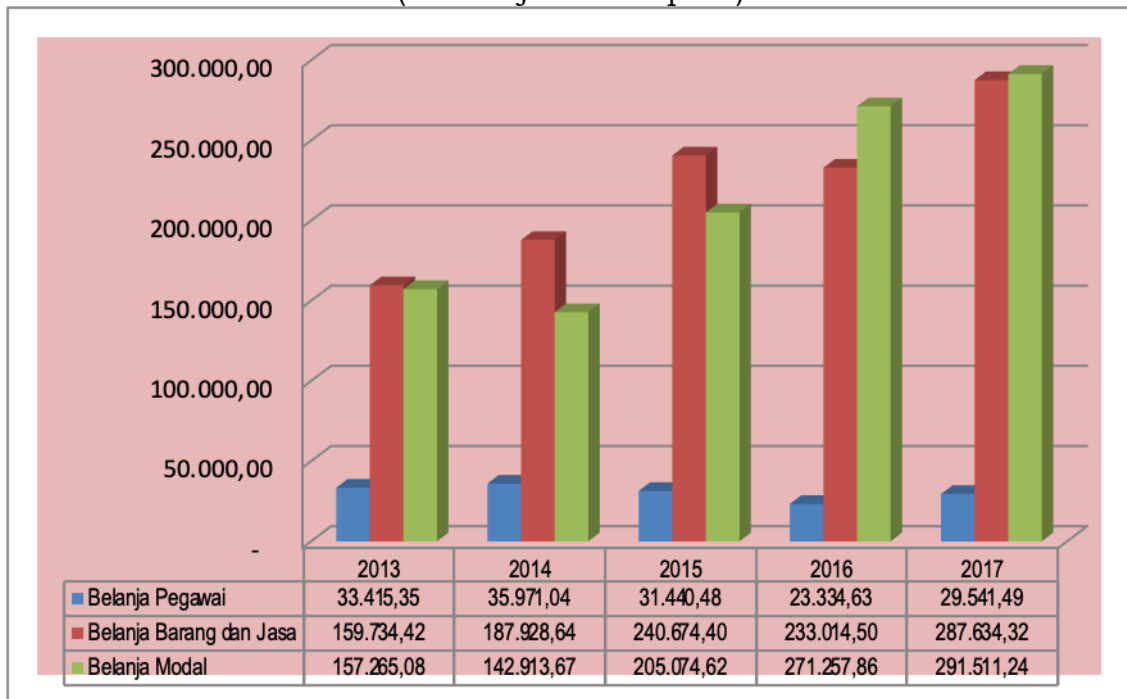
*Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe*

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas, rata-rata pertumbuhan belanja daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 13,37%. Dimana secara umum perkembangan belanja daerah mengalami peningkatan yang diikuti dengan peningkatan belanja pada setiap komponennya. Dari sisi belanja tidak langsung dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan belanja rata-rata sebesar 12,12%. Persentase kenaikan pos-pos pada belanja tidak langsung secara umum mengalami fluktuasi peningkatan, kecuali belanja pegawai yang meningkat dengan persentase yang cenderung tetap. Peningkatan signifikan pada pos belanja bunga, hal ini terjadi sejak tahun 2017 dimana Pemerintah Kabupaten Konawe sudah mulai membayar bunga



pinjaman terhadap PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atas pembiayaan pembangunan Rumah Sakit Unaaha. Komponen lainnya yang mengalami peningkatan cukup signifikan terjadi pada komponen hibah dimana ini terjadi karena pada tahun 2017 mulai dilaksanakan tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2018-2023 yang mengakibatkan hibah kepada penyelenggara Pilkada meningkat.

Grafik 3.6  
Pertumbuhan Belanja Langsung Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017  
(Dalam jutaan rupiah)



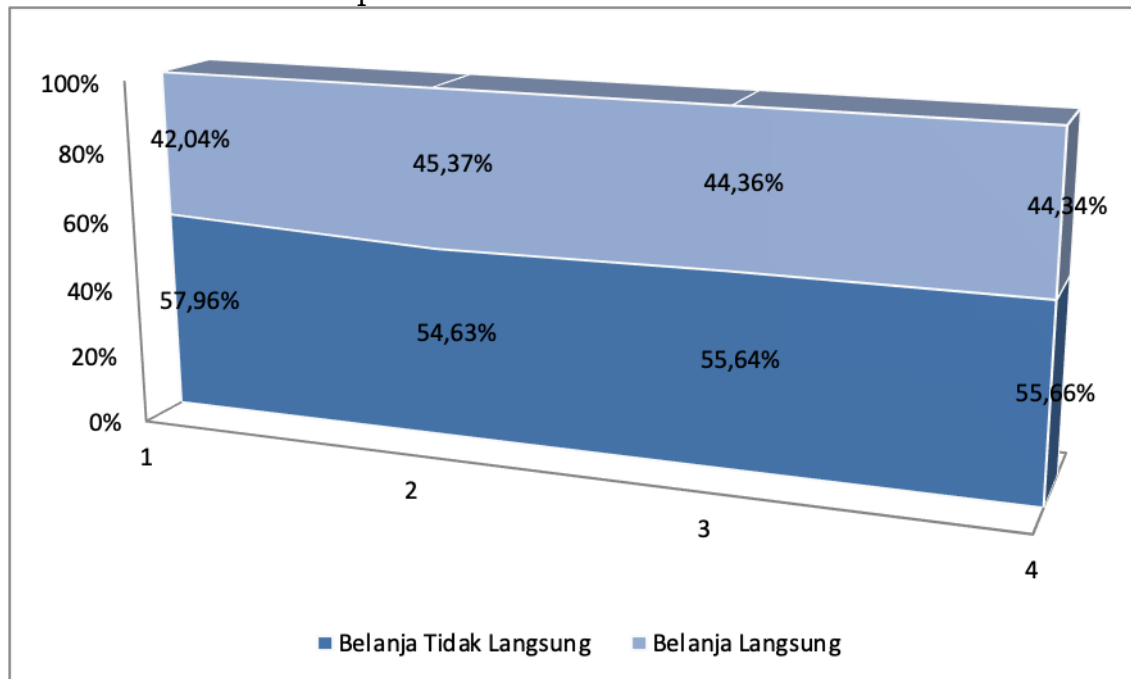
*Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe*

Dari sisi belanja langsung rata-rata tumbuh 15,18% dalam 5 tahun terakhir. Pos belanja pegawai mulai ditekan dengan turun sebesar 1,03%. Sementara untuk pos belanja barang dan jasa dan belanja modal naik masing-masing dengan rata-rata 16,49% dan 18,53%. Jika dilihat kecenderungan tersebut, maka hal ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe menginvestasikan pembiayaan daerah kepada aspek fisik infrastruktur dan ekonomi daerah, dimana kebijakan ini dapat tercermin terhadap proporsi belanja modal yang kian cenderung mulai lebih tinggi dibanding dengan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Aspek lain dari belanja daerah Kabupaten Konawe yang perlu dicermati dalam 5 tahun terakhir ini adalah porsi tidak langsung yang selalu lebih besar dari pada porsi belanja langsung, dimana rata-rata

porsi belanja tidak langsung adalah 56,21% sedangkan belanja langsung sebesar 43,79%. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Konawe yang cukup besar menjadi penyebab besarnya porsi belanja tidak langsung setiap tahunnya.

Grafik 3.7  
Persentase Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung  
Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017



*Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe*

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat melalui tabel 3.3 dibawah ini. Untuk mendapatkan gambaran surplus/defisit riil daerah maka diperhitungkan selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah serta realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang merupakan pengeluaran daerah seperti penyertaan modal, pembayaran pokok hutang dan pemberian pinjaman daerah.

Kondisi riil keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam 5 tahun cenderung berfluktuatif. Selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi riil belanja menunjukkan bahwa pada tahun 2014, 2016 dan 2017 terjadi defisit riil anggaran masing-masing sebesar Rp. 4.365.093.861,10; Rp. 15.155.929.830,00 dan Rp. 172.996.604.243,43. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2015 mengalami surplus riil anggaran masing-masing sebesar Rp. 14.158.559.731,57 dan Rp. 24.356.621.024,58.

Tabel 3.3  
Surplus/(Defisit) Anggaran Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Realisasi pendapatan daerah	868.956.443.915,74	868.658.599.258,82	1.076.320.162.257,23	1.174.856.947.156	1.209.196.332.474,97
2.	Realisasi belanja daerah	835.665.384.184	872.483.693.119,92	1.051.693.541.232,65	1.189.502.020.486,00	1.372.847.129.851,00
3.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	19.132.500.000	540.000.000	270.000.000	510.856.500	9.345.806.867,40
A = 1-2-3	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.158.559.731,57	4.365.093.861,10	24.356.621.024,58	15.155.929.830,00	172.996.604.243,43

*Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe*

Defisit riil anggaran yang terjadi ditutupi dengan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan, piutang daerah. Komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4  
Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Lalu	31.334.544.412,18	19.518.066.577,32	7.564.876.020,84	25.382.549.464,63	36.931.340.945,11
2	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	33.599.100.000,00	120.062.445.081,00
3	Penerimaan TP dan TGR	-	-	-	-	-
4	penerimaan Kembali investasi daerah	366.519.540,00	77.360.004,00	100.983.692,00	75.433.000,00	30.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	31.701.063.952,18	19.595.426.581,32	7.665.859.712,84	59.057.082.464,63	157.023.786.026,11

*Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe*

Dari tabel diatas terlihat penutupan defisit riil anggaran tahun 2013 sd. 2018 terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Investasi Daerah. Sementara untuk penerimaan dari sektor TPTGR yang selama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penerimaan belum memberikan hasil maksimal.

Tabel 3.5  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Tahun  
2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Surplus/(Defisit) Anggaran Tahun Berkenaan	14.158.559.73 1,57	4.365.093.861, 10	24.356.621.02 4,58	15.155.929.830, 00	172.996.604.24 3,43
2	Total Penerimaan Pembiayaan Daerah	31.701.063.95 2,18	19.595.426.58 1,32	7.665.859.712, 84	59.057.082.464, 63	157.023.786.02 6,11
		5.859.623.683, 75	5.230.332.720, 22	2.022.480.737, 42	43.901.152.634, 63	15.972.818.217, 32

*Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe*

Defisit riil yang terjadi pada tahun 2014, tahun 2016 dan tahun 2017 ditutupi oleh realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun yang sama. Namun pada tahun 2017 defisit riil tidak dapat sepenuhnya ditutupi oleh komponen penerimaan daerah sehingga tersisa defisit sebesar Rp. 15.972.818.217,32.

Sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut apabila dianalisis lebih mendalam berasal dari terjadinya pelampauan realisasi penerimaan daerah. Disamping itu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran juga berasal dari terjadinya realisasi Belanja Daerah dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkan pada tahun yang bersangkutan.

### 3.3 Kerangka Pendanaan

Penyusunan proyeksi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Konawe selama lima tahun kedepan tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi yang diperoleh berdasarkan analisis data historis keuangan daerah beberapa tahun sebelumnya berupa *trend* pertumbuhan pendapatan, belanja serta pembiayaan; proyeksi sumber-sumber pendapatan lainnya yang masih berpotensi; prediksi kondisi makro ekonomi kedepan; prediksi belanja-belanja wajib serta yang direncanakan yang akan terjadi selama lima tahun kedepan.

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan proyeksi keuangan daerah yang akan dikelola Pemerintah Kabupaten Konawe selama lima tahun kedepan tahun anggaran 2019 s.d 2023 yang meliputi : proyeksi pendapatan daerah, proyeksi belanja yang harus dilakukan pemerintah daerah, yang meliputi belanja tidak langsung maupun pembelanjaan langsung, serta proyeksi penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dalam rangka menutup surplus maupun defisit anggaran yang direncanakan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka terjadi perubahan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif berlaku sejak tahun 2021. Dengan demikian penyajian

proyeksi kerangka pendanaan daerah pada periode tahun 2018-2023 dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni proyeksi kerangka pendanaan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 masih menggunakan struktur Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 menggunakan struktur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **3.3.1 Proyeksi Pendapatan**

Proyeksi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan didasarkan pada trend pertumbuhan realisasi pendapatan dalam 5 (lima) tahun terakhir dan pertimbangan terhadap perkembangan kondisi ekonomi global, nasional maupun regional.

Meskipun data historis menunjukkan bahwa secara umum pendapatan daerah mengalami peningkatan pada hampir setiap komponennya namun perlu diperhatikan bahwa trend pertumbuhan tersebut tidak dapat digeneralisasi secara keseluruhan mengingat bahwa trend pertumbuhan cenderung terpusat pada item-item pendapatan tertentu saja, sementara item-item tertentu cenderung mengalami penurunan.

Pendapatan Daerah secara keseluruhan diproyeksikan setiap tahunnya tumbuh rata-rata sebesar 8%-10% setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pendapatan Daerah diproyeksikan dapat mencapai Rp. 1.378.866.975.539,00 dan diperkirakan dapat mencapai sebesar Rp. 1.695.619.430.550,05 pada tahun 2023. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10% tiap tahunnya.

#### **3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pertumbuhan PAD pada periode 2019-2023 diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 8%-10%. Pemerintah Kabupaten Konawe mendorong agar proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah pada periode mendatang dapat lebih berperan. Pertumbuhan komponen-komponen PAD sebagai berikut :

##### **a) Pajak Daerah :**

Pajak daerah diperkirakan tumbuh sebesar 9%-10% asumsi ini didasari atas strategi intensifikasi pajak yang konkritnya dilaksanakan melalui :

- 1) Kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak;
- 2) Tersedianya aplikasi yang host to Host dengan DPMPTSP;
- 3) Pendataan potensi objek/subjek pajak baru (rumah kost);
- 4) Penyesuaian tarif melalui perbup;
- 5) Pemutakhiran data objek/subjek pajak;
- 6) Penambahan titik penerangan jalan umum;
- 7) Komitmen camat, lurah dan kepala desa terkait penyelesaian piutang PBB-P2;
- 8) Penyesuaian NJOP;
- 9) Iklim investasi (Perkebunan sawit dan Pertambangan);
- 10) Peningkatan Anggaran Kegiatan Fisik;

**b) Retribusi Daerah :**

Retribusi daerah diperkirakan tumbuh sebesar 10%-11% asumsi ini didasari atas strategi intensifikasi pajak yang konkritnya dilaksanakan melalui penyesuaian tarif.

**c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan tumbuh sebesar 10%.

**d) Lain-lain PAD yang sah :**

Lain-lain PAD yang sah diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 10%-11%. Asumsi ini didasari atas peningkatan aktifitas BLUD RSUD.

**3.3.1.2 Dana Perimbangan**

Pertumbuhan Komponen dana perimbangan pada periode 2019-2023 diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 3%-10%. Proyeksi pertumbuhan dana perimbangan diperkirakan tidak akan terjadi signifikan mengingat tren pertumbuhan dalam 5 (lima) tahun terakhir juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tidak terlepas bahwa kebijakan dana perimbangan merupakan kebijakan pemerintah pusat yang proporsinya sudah ditetapkan melalui formulasi yang ditetapkan melalui peraturan menteri keuangan. Pertumbuhan komponen-komponen dana perimbangan sebagai berikut :

**a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak :**

Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diperkirakan tumbuh sebesar 10% dengan asumsi bahwa terjadi peningkatan dari bagi hasil pajak pada aktifitas di Kawasan Industri Konawe (KIK).

**b) Dana Alokasi Umum :**

Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan rata-rata tumbuh sebesar 10% setiap tahunnya. Asumsi ini atas penerimaan PPPK dan eskalasi kenaikan gaji ASN setiap tahunnya.

**c) Dana Alokasi Khusus :**

Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan rata-rata tumbuh sebesar 10% setiap tahunnya.

**3.3.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada periode 2019-2023 diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 10%-50%. Dengan asumsi bahwa terjadi pertumbuhan pada beberapa komponen-komponen penting didalamnya.

**a) Pendapatan Hibah:**

Pendapatan hibah merupakan jenis pendapatan baru yang diperkirakan tidak akan mengalami peningkatan signifikan.

**b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya**

DBH Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan akan mengalami peningkatan mengingat potensi pajak air permukaan yang terdapat pada KIK Morosi cukup besar sehingga diproyeksikan dapat naik sebesar 10%-15%.

**c) Dana Penyesuaian dan otonomi daerah :**

Dana penyesuaian dan otonomi daerah diperkirakan dapat tumbuh sebesar 10% dengan asumsi Pemerintah Kabupaten Konawe dapat terus meningkatkan prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**d) Pendapatan Lainnya**

Pendapatan lainnya diproyeksikan mampu naik rata-rata sebesar 10% setiap tahunnya dengan asumsi bahwa alokasi dana desa dari pemerintah setiap tahunnya meningkat. Proyeksi kenaikan terhadap komponen dana desa sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah dalam menentukan alokasi dana desa berdasarkan indikator luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan indeks kemiskinan geografis yang kecenderungannya setiap tahun formulanya berubah.

Tabel 3.6  
Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe

No.	Uraian	Tahun (Rp)		Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		2019	2020	
1	2	4	5	6
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.383.871.479.428,06</b>	<b>1.395.930.946.446</b>	<b>0,87</b>
<b>1</b>	<b>Pedapatan Asli Daerah</b>	<b>102.752.473.655,50</b>	<b>113.027.721.021,05</b>	<b>10,00</b>
	1) Pajak Daerah	14.467.000.000,00	15.913.700.000,00	<b>10,00</b>
	2) Retribusi Daerah	18.445.900.000,00	20.290.490.000,00	<b>10,00</b>
	3) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	3.280.000.000,00	3.608.000.000,00	<b>10,00</b>
	4) lain-Lain PAD	66.559.573.655,50	73.215.531.021,05	<b>10,00</b>
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan :</b>	<b>1.072.491.765.403,00</b>	<b>1.091.014.577.335,78</b>	<b>1,73</b>
	1) Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak	26.869.046.311,00	27.540.772.468,78	<b>2,50</b>
	2) DAU	714.043.431.000,00	731.894.516.775,00	<b>2,50</b>
	3) DAK	331.579.288.092,00	331.579.288.092,00	-
<b>3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :</b>	<b>208.627.240.369,56</b>	<b>191.888.648.089,00</b>	<b>(8,02)</b>
	1) Pendapatan Hibah	38.863.380.093	38.863.380.093	-
	2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	31.455.022.046,00	35.924.622.996,00	<b>14,21</b>
	3) Dana Penyesuaian dan otonomi daerah	32.825.418.000,00	67.100.645.000,00	<b>104,42</b>
	4) Pendapatan lainnya	105.483.420.230,56	50.000.000.000,00	<b>(52,60)</b>

Sumber : Diolah dari BPKAD, BP2RD, BLUD RSUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Tabel 3.7  
Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2023

NO.	URAIAN		TAHUN (Rp)			PERTUMBUHAN RATA-RATA (%)
			2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>1.378.866.975.539,00</b>	<b>1.546.227.632.539,26</b>	<b>1.695.619.430.550,05</b>	<b>10</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>120.539.362.614,69</b>	<b>135.169.887.008,60</b>	<b>148.229.589.236,26</b>	<b>10</b>
	a)	Pajak Daerah	15.361.684.284,75	17.226.216.266,54	18.890.560.743,91	10
	b)	Retribusi Daerah	21.975.267.916,40	24.642.526.862,69	27.023.412.650,83	10
	c)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.907.582.647,95	4.381.867.412,79	4.805.230.077,94	10
	d)	Lain-lain PAD yang Sah	79.294.827.765,58	88.919.276.466,58	97.510.385.763,57	10
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>1.207.412.741.514,66</b>	<b>1.353.963.056.574,16</b>	<b>1.484.778.837.643,61</b>	<b>10</b>
	a)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.173.878.916.652,31	1.316.359.047.234,08	1.443.541.643.609,69	10
	b)	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.533.824.862,35	37.604.009.340,08	41.237.194.033,91	10
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		<b>50.914.871.409,66</b>	<b>57.094.688.956,50</b>	<b>62.611.003.670,19</b>	<b>10</b>
	a)	Pendapatan Hibah	15.119.909.935,13	16.955.096.436,37	18.593.246.142,65	10
	b)	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.794.961.474,53	40.139.592.520,13	44.017.757.527,54	10

*Sumber : Diolah dari BPKAD, BP2RD, BLUD RSUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*

### 3.3.2 Proyeksi Belanja

Proyeksi belanja daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan didasarkan pada prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya dan mempertimbangkan belanja-belanja wajib daerah yang terkait kewajiban mandatory perundang-undangan.

Belanja Daerah diproyeksikan setiap tahunnya tumbuh sebesar 7-10% setiap tahunnya. Pada tahun 2019 Belanja Daerah diproyeksikan dapat mencapai Rp. **1.269.656.875.757,76-** dan pada tahun 2023 diproyeksikan dapat mencapai sebesar Rp. **1.670.764.215.555,13,-**.

#### 3.3.2.1 Proyeksi Belanja Tidak Langsung

Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung pada periode 2019-2023 diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 8%-10%. Dalam rangka mendukung proporsi anggaran yang berkualitas yang bertujuan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah tahun 2018-2023, maka Pemerintah Kabupaten Konawe pada periode mendatang akan berupaya menekan pertumbuhan belanja tidak langsung agar tersedia ruang yang cukup bagi pemerintah dalam memanfaatkan anggaran yang ada untuk mendukung terlaksananya program-program pembangunan daerah.

##### a) Belanja Pegawai :

Pada komponen belanja pegawai mengkomodir gaji dan tunjangan ASN se-Kabupaten Konawe dan rencana pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang akan direalisasikan mulai tahun 2022. Pertumbuhan belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan terakhir pemerintah pusat terhadap kenaikan gaji ASN sebesar 5-10% dan penerimaan P3K Tahun 2021. Olehnya itu, proyeksi pertumbuhan belanja pegawai pada tahun 2019-2023 yakni sebesar 5%-10% setiap tahunnya.

##### b) Belanja Bunga :

Komponen belanja bunga secara berturut-turut diperkirakan akan mengalami penurunan dengan rata-rata penurunannya sebesar 20%. Hal ini terjadi akibat beban bunga terhadap pinjaman Pemerintah Kabupaten Konawe kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kian tahun akan mengalami penurunan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

##### c) Belanja Hibah :

Belanja hibah yang paling mendesak yakni hibah kepada pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang harus segera diselesaikan pada tahun 2019. Olehnya itu komponen belanja hibah pada tahun 2019 lebih tinggi dibanding dengan tahun-tahun mendatang. Komponen belanja hibah selepas tahun 2019 difokuskan pada hibah pada PAUD Swasta (DAK non fisik), ormas dan bantuan parpol dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada tentang ketentuan pengalokasian hibah. Rata-rata pertumbuhan belanja hibah diproyeksikan meningkat sebesar 7,5%-10%.

**d) Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa :**

Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa diperkirakan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 7,5%-10%. Diperkirakan transfer pemerintah pusat berupa dana desa akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD murni diperkirakan dapat diwujudkan pelaksanaannya yang mengamanatkan agar 10% dari total DBH dan DAU dialokasikan ke ADD. Hal ini mengingat beban belanja pegawai yang demikian besar sehingga cukup sulit memenuhi ketentuan mandatory tersebut. Untuk mewujudkan penganggaran yang berkualitas maka kedepan Pemerintah Kabupaten Konawe akan mendorong pembelanjaan dana desa agar lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dengan mempertimbangkan potensi local yang dimiliki oleh masing-masing desa yang ada yang terkonsentrasi pada 2 (dua) program utama pembangunan daerah 2018-2023. Belanja ADD akan diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan aparatur desa melalui peningkatan insentif bagi aparat desa.

**e) Belanja Tidak Terduga :**

Untuk belanja tidak terduga direncanakan akan mengalami peningkatan sebesar 7,5%-10%.

**3.3.2.2 Proyeksi Belanja Langsung**

Proyeksi pertumbuhan Belanja Langsung pada periode 2019-2023 diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 9%-10%. Kebijakan ini didorong untuk lebih mencapai kualitas belanja yang efektif yang bertujuan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

**a) Belanja Pegawai :**

Komponen belanja pegawai direncanakan setiap tahunnya akan mengalami kenaikan sebesar 7,5%-10%. Hal ini disebabkan rencana Pemerintah Kabupaten Konawe memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepada Aparatus Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe yang direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2020. Asumsi ini memperhatikan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila skenario proyeksi PAD dapat mencapai target maka realisasi TPP akan segera dilaksanakan.

**b) Belanja Barang dan Jasa :**

Belanja barang dan jasa diproyeksikan setiap tahunnya tumbuh rata-rata sebesar 10%. Hal ini mempertimbangkan factor inflasi yang akan terjadi.

**c) Belanja Modal :**

Pemerintah Kabupaten Konawe menyadari bahwa dengan semakin meningkatnya belanja modal maka akan mempengaruhi kualitas belanja daerah. Sebab belanja modal yang akan didorong adalah belanja yang bersifat penyediaan infrastruktur dasar serta sarana

dan prasarana lainnya yang mendukung aktifitas social dan ekonomi masyarakat Kabupaten Konawe. Sehingga pada periode mendatang belanja modal diproyeksikan akan tumbuh sebesar 10% setiap tahunnya.

Tabel 3.8  
 Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019-2020  
 (Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006)

No.	Uraian	Tahun (Rp)		Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		2019	2020	
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA</b>	<b>1.269.656.875.757,76</b>	<b>1.375.979.947.970,31</b>	<b>8,37</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>780.866.569.043,58</b>	<b>839.431.561.721,84</b>	<b>7,50</b>
	Belanja Pegawai	453.362.459.908,09	487.364.644.401,19	<b>7,50</b>
	Belanja Bunga	9.210.082.826,49	9.900.839.038,48	<b>7,50</b>
	Belanja Hibah	9.000.000.000,00	9.675.000.000,00	<b>7,50</b>
	Belanja Bantuan Sosial	982800000	1.056.510.000,00	<b>7,50</b>
	Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa.	303.311.226.309,00	326.059.568.282,18	<b>7,50</b>
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.375.000.000,00	<b>7,50</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>488.790.306.714,19</b>	<b>536.548.386.248,47</b>	<b>9,77</b>
	Belanja Pegawai	44.838.045.485,42	48.200.898.896,82	<b>7,50</b>
	Belanja Barang dan Jasa	302.947.755.421,22	333.242.530.963,34	<b>10,00</b>
	Belanja Modal	141.004.505.807,55	155.104.956.388,31	<b>10,00</b>

*Sumber : Diolah dari BPKAD, BP2RD, BLUD RSUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*

Tabel 3.9  
Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2023

NO.	URAIAN		TAHUN (Rp)			PERTUMBUHAN RATA-RATA (%)
			2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6
	<b>BELANJA</b>		<b>1.354.708.362.328,00</b>	<b>1.521.720.718.436,30</b>	<b>1.670.764.215.555,13</b>	<b>10</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>870.625.507.457,45</b>	<b>977.958.732.328,50</b>	<b>1.073.743.975.795,46</b>	<b>10</b>
	a)	Belanja Pegawai	534.603.811.507,90	600.511.312.064,69	659.327.824.796,08	10
	b)	Belanja Barang dan Jasa	272.585.831.958,94	306.190.999.907,39	336.180.587.917,60	10
	c)	Belanja Bunga	9.883.059.792,27	11.101.471.922,42	12.188.795.094,43	10
	d)	Belanja Hibah	52.498.191.406,37	58.970.319.933,82	64.746.112.168,67	10
	e)	Belanja Bantuan Sosial	1.054.612.791,96	1.184.628.500,19	1.300.655.818,68	10
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>154.702.828.645,56</b>	<b>173.775.039.777,64</b>	<b>190.795.271.760,18</b>	<b>10</b>
	a)	Belanja Modal Tanah	2.197.109.983,25	2.467.976.042,06	2.709.699.622,25	10
	b)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.558.471.493,81	30.955.959.383,39	33.987.911.559,16	10
	c)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.755.946.422,67	61.506.417.503,61	67.530.605.417,28	10
	d)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.804.200.841,88	75.040.015.494,53	82.389.738.868,64	10
	e)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.387.099.903,94	3.804.671.354,05	4.177.316.292,86	10
<b>3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		<b>3.905.973.303,56</b>	<b>4.387.512.963,66</b>	<b>4.817.243.772,89</b>	<b>10</b>
	a)	Belanja Tidak Terduga	3.905.973.303,56	4.387.512.963,66	4.817.243.772,89	10
<b>4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>		<b>325.474.052.921,43</b>	<b>365.599.433.366,50</b>	<b>401.407.724.226,60</b>	<b>10</b>
	a)	Belanja Bantuan Keuangan	325.474.052.921,43	365.599.433.366,50	401.407.724.226,60	10

*Sumber : Diolah dari BPKAD, BP2RD, BLUD RSUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*

### **3.3.3 Pembiayaan Daerah**

Komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk komponen pembiayaan diperkirakan akan naik sebesar 99,06% sedangkan komponen pengeluaran pembiayaan tidak mengalami kenaikan sebab didalamnya hanya terdapat beban terhadap pembayaran pokok utang ke No. SMI.

Tabel 3.10  
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>-114.214.603.670,30</b>	<b>-19.950.998.475,69</b>	<b>-24.158.613.211,00</b>	<b>-24.506.914.102,96</b>	<b>-24.855.214.994,92</b>
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>8.030.000.000,00</b>	<b>18.729.392.524,31</b>	<b>12.521.777.789,00</b>	<b>12.173.476.897,04</b>	<b>11.825.176.005,08</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	8.000.000.000,00	18.689.392.524,31	12.471.777.789,00	12.123.476.897,04	11.775.176.005,08
	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah*	30.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>122.244.603.670,30</b>	<b>38.680.391.000,00</b>	<b>36.680.391.000,00</b>	<b>36.680.391.000,00</b>	<b>36.680.391.000,00</b>
	Penyertaan Modal Investasi					
	Penyertaan Modal Investasi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Pembayaran Pokok Utang	121.244.603.670,30	37.680.391.000,00	35.680.391.000,00	35.680.391.000,00	35.680.391.000,00

*Sumber : Diolah dari BPKAD, BP2RD, BLUD*



#### **3.3.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Kapasitas riil, kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan prioritas-prioritas belanja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah terurai dalam perhitungan kerangka pendanaan dibawah ini.

Tabel 3.11  
Kapabilitas Riil Kemampuan Keuangan Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019-2020

No.	Uraian	Tahun (Rp)	
		2019	2020
1	2	4	5
I.	Pendapatan Daerah	1.383.871.479.428,06	1.395.930.946.446,00
II.	Pencairan Dana Cadangan	-	-
III.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	8.000.000.000,00	18.729.392.524,31
	<b>Dikurangi :</b>		
I.	Belanja Tidak Langsung	780.866.569.043,58	839.431.561.721,84
II.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	122.244.603.670,30	38.680.391.000,00
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah	488.760.306.714,18	536.548.386.248,47

Sumber : Diolah dari BPKAD, BP2RD, BLUD

Tabel 3.12  
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2023

No.	Uraian	Tahun (Rp)		
		2021	2022	2023
1	2	4	5	5
I.	Pendapatan Daerah	1.378.866.975.539,00	1.546.227.632.539,26	1.695.619.430.550,05
II.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
III.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	12.471.777.789,00	12.123.476.897,04	11.775.176.005,08
	<b>Dikurangi :</b>			
I.	Belanja Gaji	523.916.992.731,28	563.210.767.186,13	605.451.574.725,08
II.	Belanja Tidak Terduga	3.905.973.303,56	4.387.512.963,66	4.817.243.772,89
III.	Belanja Bantuan Keuangan	325.474.052.921,43	365.599.433.366,50	401.407.724.226,60
IV.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	36.680.391.000,00	36.680.391.000,00	36.680.391.000,00
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah	501.361.343.371,73	588.473.004.920,01	659.037.672.830,56

Berdasarkan proyeksi terhadap kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan maka dapat direncanakan penggunaan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai prioritas belanja pembangunan daerah setiap tahunnya.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dari tahun 2019 hingga tahun 2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,31% setiap tahunnya. Pada tahun 2019 kapasitas riil kemampuan keuangan daerah mendanai pembangunan diperkirakan dapat mencapai Rp. 488.760.306.714,18, tahun 2020 diperkirakan naik menjadi Rp. 536.548.386.248,47 selanjutnya tahun 2021 diperkirakan menjadi Rp. 501.361.343.371,73 kemudian tahun 2022 diperkirakan naik menjadi Rp. 588.473.004.920,01 dan pada tahun 2023 diperkirakan naik menjadi Rp. 659.037.672.830,56.

Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah diharapkan dapat lebih dari yang diproyeksikan mengingat peluang penerimaan dari seluruh sektor pendapatan daerah dapat terjadi dengan asumsi bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe dapat melakukan inovasi dan kreatifitas dalam hal upaya menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah.

Rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah diproyeksikan terhadap prioritas belanja daerah yang dibagi dalam beberapa kriteria prioritas belanja. Jenis prioritas belanja dikelompokkan sebagai berikut :

1. Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar. Prioritas I ini ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah diproporsikan minimal 42 persen.
2. Prioritas II direncanakan diproporsikan minimal sebesar 40 persen. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah, jika dalam pemenuhan pokok visi dan misi ini masuk kategori urusan wajib pelayanan dasar maka dikelompokkan dalam prioritas I.
3. Prioritas III direncanakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang bersifat rutinitas administrasi OPD, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan. Prioritas III diproporsikan minimal sebesar 18%.

Berdasarkan Proyeksi tersebut dan kondisi saat ini, dengan adanya Pandemi *Covid-19* mengharuskan setiap penggunaan anggaran lebih terarah dan bijak dalam pencegahan dan penanganan pandemi tersebut. Selain pengutamaan alokasi anggaran pada pelayanan dasar, Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Daerah termaksud pengamanan sosial terhadap masyarakat Kabupaten Konawe. Olehnya itu rencana anggaran yang difokuskan pada hal tersebut dengan tetapi memperhatikan Rencana Penggunaan

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe  
Tahun 2019-2023.

Tabel 3.12  
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah	488.760.306.714,18	536.548.386.248,47	501.361.343.371,73	588.473.004.920,01	659.037.672.830,56
I.	Prioritas I	205.279.328.819,96	225.350.322.224,36	210.571.764.216,12	247.158.662.066,40	276.795.822.588,83
II.	Prioritas II	195.504.122.685,67	214.619.354.499,39	200.544.537.348,69	235.389.201.968,01	263.615.069.132,23
III.	Prioritas III	87.976.855.208,55	96.578.709.524,72	90.245.041.806,91	105.925.140.885,60	118.626.781.109,50

Sumber : Bappeda Kabupaten Konawe

## **BAB IV. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**



Penelaahan terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis perlu dilakukan secara terpadu guna mendapatkan gambaran dan kesimpulan yang komprehensif terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang terjadi. Perumusan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah mempertimbangkan dampak jangka panjang yang akan terjadi apabila permasalahan dan isu strategis tersebut tidak segera ditangani. Olehnya itu, perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis ini menjadi tahapan mendasar pada proses perumusan langkah-langkah strategik yang akan dilakukan kedepan.

### **4.1 Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan visi dan misi kepala daerah terpilih dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Kabupaten Konawe.

Permasalahan pembangunan diperlukan dalam proses penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, yang selanjutnya akan menjadi input utama dalam perumusan tujuan dan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diketahui dari informasi pada gambaran umum daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya yang tergambar pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka permasalahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Konawe yang berhubungan dengan penerjemahan visi dan misi adalahditampilkan pada tabulasi dibawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Pembagian Urusan**

No.	Urusan	Permasalahan
<b>I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>		
1.	Pendidikan	<p>a. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana PAUD secara menyeluruh seperti gedung, alat-alat peraga, buku-buku pembelajaran dan tenaga pengajar.</p> <p>b. Belum meratanya distribusi pembangunan sarana dan prasarana sekolah disemua jenjang pendidikan.</p> <p>c. Masih tingginya angka putus sekolah (siswa tidak bersekolah) dijenjang pendidikan menengah.</p> <p>d. Masih perlunya peningkatan kompetensi guru disemua jenjang pendidikan.</p> <p>e. Belum tersedianya tunjangan yang memadai bagi guru-guru yang bertugas diwilayah terpencil.</p>
2.	Kesehatan	<p>a. Masih kurangnya tenaga medis di daerah-daerah terpencil utamanya perawat.</p> <p>b. Akses pelayanan kesehatan yang bermutu belum sepenuhnya menjangkau keluarga miskin dan daerah terpencil.</p> <p>c. Meningkatnya penemuan kasus TBC BTA.</p> <p>d. Masih kurangnya ketersediaan fasilitas rumah bagi para medis yang bertugas di daerah-daerah terluar.</p> <p>e. Mulai munculnya penyakit HIV/AIDS.</p> <p>f. Sistem dan alur pelayanan medis di RSUD belum terkoneksi IT.</p>
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>a. Jalan dan jembatan pada daerah-daerah strategis yang masih perlu pembenahan.</p> <p>c. Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur yang memadai di wilayah pedesaan.</p> <p>d. Belum optimalnya pembangunan drainase, sehingga pada musim penghujan masih sering ditemukan genangan air dipemukiman penduduk.</p> <p>e. Ketidakmampuan OPD menyediakan data-data pembangunan yang valid.</p>



No.	Urusan	Permasalahan
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Masih cukup tingginya persentase rumah tidak layak huni.
		b. Kondisi sanitasi yang belum optimal pada pemukiman penduduk.
		c. Ketidakmampuan OPD menyediakan data-data pembangunan yang valid.
		d. Masih rendahnya rasio rumah ber – IMB
		e. Masih terdapat permukiman kumuh diwilayah pesisir.
		f. Kondisi sanitasi yang belum optimal pada pemukiman penduduk.
		g. Masih perlunya peningkatan akses air minum yang layak bagi rumah tangga
		h. Masih terdapat permukiman kumuh diwilayah Perkotaan.
		i. Masih rendahnya rumah yang ber-IMB
		j. Masih cukup tingginya persentase rumah tidak layak huni.
5.	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	a. Belum optimalnya peran personil Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah dan melakukan pengamanan terhadap lingkungan perkantoran Pemda.
		b. Belum tersedianya armada pemadam kebakaran yang memadai sehingga terdapat beberapa kasus-kasus kebakaran yang masih dalam jangkauan pelayanan tidak dapat ditanggulangi.
6.	Sosial	a. Masih cukup tingginya PMKS dan belum optimlanya penanganan terhadap PMKS
		b. Masih sangat lemahnya ketersediaan data mengenai PMKS.
		c. Ketidakmampuan organisasi merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan Tupoksinya.
		d. Belum optimalnya penyaluran bantuan sosial terhadap PMKS

No.	Urusan	Permasalahan
<b>I. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>		
1.	Tenaga Kerja	a. Belum intensifnya pembinaan terhadap para pencari kerja. Akibatnya rendahnya pencari kerja yang ditempatkan melalui peran dan pembinaan pemerintah.
		b. Fasilitas bagi pembinaan ketenagakerjaan yang masih sangat minim.
		c. Masih rendahnya keterampilan tenaga kerja.
		d. Lemahnya pengawasan terhadap perusahaan. Utamanya dalam memfasilitasi hak-hak tenaga kerja.
		e. Kegiatan pembinaan ketenagakerjaan belum sepenuhnya optimal dilakukan dan tidak berorientasi pada kebutuhan pasar.
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Maraknya kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan yang belum terdeteksi.
		b. Pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender (PUG) dan perlindungan anak belum merata.
		c. Belum optimalnya perumusan program-program pembangunan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan/kelompok usaha perempuan.
		d. Belum terintegrasinya sistem pembangunan yang berbasis hak anak
		e. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, terlihat dari melambatnya capaian persentase perempuan di lembaga pemerintah, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Perempuan
3.	Pangan	a. Masih terdapat daerah rawan pangan, utamanya pada wilayah-wilayah pesisir.
		b. Pembinaan intensifikasi dan ekstensifikasi pangan yang belum berjalan maksimal.
		c. Inflasi harga kebutuhan pangan yang mulai tidak terkendali.

No.	Urusan	Permasalahan
		d. Belum ada regulasi ketahanan pangan untuk mengamankan pola pangan dan gizi masyarakat Kabupaten Konawe.
4.	Lingkungan Hidup	a. Sampah disetiap TPS yang selalu bertumpuk hingga keluar dari areal pembuangan. b. Sarana TPS yang masih kurang dan tidak memadai. c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. d. Belum optimalnya penataan kawasan taman kota dan penataan estetika Kota Unaaha.
5.	Kependudukan dan Catatan Sipil	a. Tidak berjalannya pelayanan perekaman e-KTP di Pemerintah Kecamatan. b. Sarana pendukung pelayanan yang masih belum memenuhi standar pelayanan yang baik. c. Penegakan tertib administrasi yang belum maksimal.
6.	Urusan pemberdayaan masyarakat desa	a. Masih rendahnya kapasitas dan daya saing ekonomi masyarakat desa. b. Belum termanfaatkannya potensi lokal desa. c. Kelembagaan Bumdes yang belum maksimal.
7.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Pemahaman masyarakat akan keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera masih rendah. b. Kurang optimalnya penyelenggaraan kegiatan advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KB.
8.	Urusan Perhubungan	a. Kurangnya kesadaran sopir mobil angkutan mematuhi jalur trayek yang telah ditetapkan. b. Tidak berfungsinya terminal yang dibangun. c. Kurangnya sarana aparatur dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian lalu lintas. d. Masih rendahnya pengawasan dan pelaksanaan terhadap uji KIR kendaraan. e. Kurangnya ketersediaan data mengenai penyelenggaraan urusan perhubungan
9.	Komunikasi dan Informasi	a. Belum tersedianya aplikasi e-government yang terintegrasi.

No.	Urusan	Permasalahan
		b. Kapasitas SDM aparatur teknis yang belum memadai.
10.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	a. Akses dan jaringan permodalan bagi koperasi dan UKM masih rendah.
		b. Belum adanya upaya aparat dalam menjembatani potensi Koperasi dan UKM dengan lembaga permodalan.
		c. Perumusan program dan kegiatan pembangunan dibidang Koperasi dan UKM belum memenuhi aspek substantif.
11.	Urusan Penanaman Modal	a. Kapasitas kelembagaan yang mewadahi dan memfasilitasi pelayanan penanaman modal daerah belum optimal.
		b. Belum tersedianya akses, sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan.
		c. Masih terbatasnya akses publik mengenai informasi investasi di Kabupaten Konawe.
12.	Kepemudaan dan Olahraga	a. Masih terbatasnya fasilitas olahraga untuk cabang olahraga unggulan.
		b. Pembinaan olahraga belum optimal, terkesan tidak adanya pembinaan olahraga yang fokus dan berkelanjutan.
		c. Belum terarahnya pembinaan kepemudaan, cenderung bersifat insidensial.
13.	Kebudayaan	a. Memudarnya pemahaman nilai-nilai budaya generasi muda Kabupaten Konawe.
		b. Masih kurangnya kelompok sanggar seni dan budaya.
		c. Belum termanfaatkannya Museum Budaya Tolaki di kawasan Koburuuha.
		d. Tidak adanya inovasi untuk kegiatan-kegiatan pengembangan dan pelestarian kebudayaan, ini terlihat dari pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya yang cenderung berulang.
14.	Perpustakaan	a. Masih belum maksimalnya pemanfaatan taman baca bagi masyarakat.
		b. Mulai menurunnya minat baca dikalangan masyarakat.
15.	Kearsipan	a. Belum optimalnya pendokumentasian arsip secara

No.	Urusan	Permasalahan
		digital.
		b. Lemahnya koordinasi antar organisasi pemerintah daerah dalam hal pengamanan arsip dan dokumentasi daerah.
<b>II. URUSAN PILIHAN</b>		
1.	Kelautan dan Perikanan	a. Belum optimalnya pengelolaan perikanan darat. b. Rendahnya fasilitas umum bagi masyarakat pesisir. c. Masih rendahnya taraf ekonomi para nelayan. d. Akses pemasaran hasil perikanan yang belum tersedia optimal. e. Belum optimalnya pengelolaan sarana pendukung seperti TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan lain-lain.
2.	Pariwisata	a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pariwisata yang ada. b. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata didaerah. c. Masih rendahnya inovasi dan kreatifitas perencanaan dibidang pariwisata. d. Rendahnya kesadaran masyarakat disekitar kawasan pariwisata sehingga cenderung kondisi pariwisata tidak terkelola dengan baik. e. Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat disekitar wisata.
3.	Pertanian	a. Penguasaan dan akses teknologi pertanian yang masih cukup lemah. b. Infrastruktur pertanian terbatas, sementara potensi pertanian cukup luas. c. Kelembagaan petani belum berfungsi secara maksimal. d. Belum adanya upaya dalam strategi memberi nilai tambah pada komoditi hasil pertanian dalam arti luas. e. Belum termanfaatkannya potensi peternakan. f. Belum maksimalnya produksi padi.
4.	Perdagangan	a. Belum adanya upaya dalam menjembatani kerjasama perdagangan komoditi lokal baik antar

No.	Urusan	Permasalahan
		pemerintah maupun dengan pihak swasta.
		b. Masih rendahnya kapasitas aparatur.
		c. Belum maksimalnya pengawasan terhadap perdagangan lokal dalam rangka pengendalian inflasi.
5.	Perindustrian	a. Masih kurangnya koordinasi antar sektor terutama koordinasi dengan pihak BANK sehingga perkembangan sektor industri belum optimal.
		b. Kurangnya tenaga profesional para pelaku industri kecil dan menengah.
		c. Kurangnya inovasi dan kreatifitas perencanaan untuk memacu berkembangnya sektor industri.
6.	Transmigrasi	a. Potensi transmigrasi yang masih perlu dikembangkan.
		b. Fasilitas pendukung ekonomi masyarakat transmigrasi yang perlu ditingkatkan.
<b>III. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>		
1.	Perencanaan Pembangunan	a. Kurangnya komitmen para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.
		b. Kurangnya kemampuan aparatur perencana. dimana jumlah staf yang profesional tidak berimbang dengan volume pekerjaan yang ada.
		c. Belum tersedianya aparat perencana yang telah mengikuti diklat fungsional perencana.
		d. Kurangnya kesadaran OPD dalam koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
2.	Kepegawaian	a. Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat masih cukup rendah
		b. Sistem pengembangan karier staf belum sepenuhnya mengacu pada kapasitas dan prestasi kerja ( <i>the right man, on the right place</i> ).
3.	Keuangan	a. Belum terpadunya koordinasi dengan perencanaan pembangunan daerah
		b. Belum terlaksananya perencanaan anggaran yang baik sehingga mengakibatkan potensi terjadinya

No.	Urusan	Permasalahan
		defisit anggaran.
		c. Sumber-sumber pendapatan daerah belum tereksplorasi secara optimal.
4.	Pengawasan	a. Aparat pengawas internal yang masih kurang.
		b. Persentase tindak lanjut temuan yang masih belum optimal dilaksanakan.
		c. Masih rendahnya kapabilitas APIP
5.	Administrasi Pemerintahan	a. Belum terdokumentasinya penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dengan baik.
		b. Belum adanya pendelgasian kewenangan yang jelas pada pemerintah kecamatan.
		c. Penerapan pelayanan prima maupun SPM belum dilakukan secara optimal.
		d. Terdapatnya perangkat daerah yang tidak mampu menjabarkan orientasi tugasnya kedalam program pembangunan.
6.	Urusan Lainnya	a. Belum optimalnya pengawasan orang asing/tenaga kerja asing maupun lembaga asing
		b. Menurunnya kesadaran terhadap wawasan kebangsaan, nasionalisme dan bela negara dimasyarakat
		c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam politik
		d. Masih rendahnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan terhadap masyarakat
		e. Belum optimalnya pembinaan LSM, Ormas dan OKP guna meningkatkan peran sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
		f. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas aparatur BPBD yang relatif belum mendukung seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD
		g. Potensi ancaman baru belum terpetakan dengan baik
		h. Tingkat kesadaran masyarakat yang relatif rendah.

No.	Urusan	Permasalahan
		i. Lemahnya daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba
		j. Belum terjalinnya kerjasama kemitraan yang sinergi dan harmonis dengan aparat penegak hukum lainnya
		k. Rendahnya SDM organisasi yang sesuai kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

## 4.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di sub bab di atas, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Di samping harus mampu menciptakan peluang, sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam periode pembangunan tahun 2018-2023, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari situasi global yang berdampak terhadap pembangunan daerah, isu nasional, isu regional Sulawesi Tenggara, dan lain-lain yang berdampak langsung pada pembangunan Kabupaten Konawe selama lima tahun kedepan, antara lain:

### 4.2.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals atau yang lebih familiar dikenal dengan SDGs merupakan konsensus bersama yang telah disepakati dunia pada tanggal 25 september 2015, dimana negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Perumusan SDGs ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pembangunan pemerintah daerah diseluruh dunia terkait dampak dan isu urbanisasi berkelanjutan. Forum tersebut berkomitmen untuk berkontribusi secara proaktif terhadap kemitraan global antara lembaga internasional, pemerintah nasional, masyarakat, pihak swasta dan pemerintah daerah. Adapun 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut yakni :

1. Tanpa Kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.



2. Tanpa Kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang.
5. Kesetaraan Gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi Kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas. Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi Terhadap Iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan Bawah Laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah.

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

#### **4.2.2 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)**

Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC), Indonesia dan sembilan anggota ASEAN lainnya memasuki persaingan yang sangat ketat di bidang ekonomi. Pada dasarnya, MEA merupakan wadah yang sangat penting bagi kemajuan negara-negara ASEAN dalam mewujudkan kesejahteraan sehingga keberadaannya harus disikapi dengan positif. Dan diharapkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bisa berkompetisi dan bisa menempatkan ASEAN masuk ke dalam pasar terbesar di dunia.

Diharapkan terbentuknya pasar tunggal tersebut mendorong negara-negara di ASEAN untuk mencapai stabilitas dan kemajuan ekonomi yang kuat dalam menghadapi arus persaingan secara global. Meskipun adanya MEA sampai sekarang masih menjadi pro dan kontra, perdebatan tersebut cenderung mempertanyakan kesiapan negara-negara anggota dalam menghadapi iklim ekonomi baru di wilayah Asia Tenggara. Dalam menunjang tujuan MEA tersebut, setidaknya ada empat fokus utama yang dijalankan pada era pasar bebas ini sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

Sebagai masyarakat yang dinamis, sudah selayaknya kita harus bisa melihat lebih banyak dampak positif dari adanya pasar bebas Asia Tenggara atau MEA. *ASEAN Economic Community* atau MEA secara garis besar terfokus dalam empat hal, yaitu:

1. MEA sebagai pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang difungsikan sebagai sebuah kawasan kesatuan pasar dan basis produksi. Terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi tersebut akan menghilangkan batasan terhadap arus barang, investasi, modal, jasa, dan tenaga profesional antarnegara di Asia Tenggara.

2. MEA berorientasi untuk membentuk kawasan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dengan kebijakan-kebijakan, perlindungan konsumen, dan berbagai macam perjanjian untuk saling menciptakan kondisi ekonomi yang adil.
3. Menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki daya saing tinggi serta ditunjang dengan kemudahan dalam mendapatkan modal.
4. MEA terintegrasi dengan perekonomian global sehingga jangkauan pasar yang diraih negara-negara di kawasan Asia Tenggara jauh lebih optimal.

Dengan demikian, negara peserta ditantang untuk bersaing secara ketat satu sama lain. Pasar bebas harus disadari betul kondisinya agar terus bisa mengembangkan kemampuan dalam mengikuti persaingan di bidang apa pun. Banyak peluang yang bisa diambil dari MEA seperti yang dijabarkan berikut ini.

### **Beberapa Sektor yang Menjadi Peluang bagi Indonesia dalam MEA**

Sebenarnya adanya MEA memberi peluang bagi Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara. Total jumlah penduduk Indonesia hampir 40% dari total keseluruhan penduduk ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar ASEAN jika didukung dengan produktivitas yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang potensial.

Tentu saja hal tersebut sejalan dengan *ASEAN Economic Community Blueprint* yang intinya adalah MEA sangat diperlukan dalam mengurangi kesenjangan antarnegara ASEAN. MEA juga dapat digunakan sebagai jembatan dalam membangun rantai suplai makanan dan bisa menjadi perantara untuk melakukan kegiatan ekspor-impor dengan negara-negara non-ASEAN.

Kesempatan baik tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengurangi hambatan perdagangan. Dengan tidak adanya hambatan di bidang perdagangan, Indonesia mampu meningkatkan kegiatan ekspor-impor sehingga bisa meningkatkan *gross domestic product* (GDP) atau produk domestik bruto (PDB). Karena itu, Indonesia sanggup

berkompetisi dengan produk-produk unggulannya di perikanan, pertanian, dan perkebunan.

Selain sektor jasa dan sumber daya alam, Pemerintah juga fokus dalam mengembangkan sektor investasi dan SDM. Di sektor investasi, mengingat potensi yang dimiliki Indonesia cukup besar maka diprediksi akan sangat mudah untuk meningkatkan masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI). Masuknya FDI ini bakal mampu memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan SDM.

Indonesia sangat mungkin memposisikan diri sebagai negara tujuan investor karena tingkat kebutuhan akan barang dan jasa yang tinggi serta jumlah populasinya yang tinggi juga. Di bidang ini banyak sekali para pengusaha yang melirik investasi, termasuk properti. Sebagai lahan investasi yang sangat potensial, masyarakat Indonesia bisa mengambil kesempatan emas tersebut untuk memanfaatkan aliran modal asing.

Dilihat dari aspek ketenagakerjaan Indonesia juga memiliki kesempatan yang sangat besar karena dengan jumlah populasi yang dimiliki akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja apalagi jika mereka sudah memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Dengan begitu, tenaga kerja Indonesia bisa mengisi kekosongan-kekosongan posisi yang ada di luar negeri. Ini juga menjadi kabar baik bagi para wirausaha karena mereka akan lebih mudah dalam mencari tenaga kerja yang lebih berkompeten dari berbagai negara di wilayah Asia Tenggara.

➤ Tantangan Bidang Perdagangan Barang dan Jasa

Arus perdagangan bebas entah itu barang maupun jasa akan memunculkan *competition risk*. Artinya, selain menjadi negara pengekspor, Indonesia juga menjadi sasaran empuk eksportir dari negara lain. Hal ini mengakibatkan munculnya produk-produk luar yang beragam dalam jumlah banyak ke Indonesia. Hal ini perlu diwaspadai jika produk-produk yang datang dari luar negeri memiliki kualitas yang lebih bagus. Industri lokal pun akan terancam akibat hal tersebut. Efek besar yang ditimbulkan adalah adanya defisit neraca perdagangan.

➤ Tantangan Bidang Investasi

Pada sektor ini, Indonesia terbilang memiliki risiko yang sangat tinggi karena adanya *exploitation risk*.Sebabnya, Indonesia kurang memiliki aturan dan regulasi yang ketat sehingga sektor-sektor riil semisal pertambangan mudah saja dikelola negara asing.Untuk yang satu ini, tentunya tidak banyak yang bisa diperbuat masyarakat.Padahal, Pemerintah memiliki kekuasaan penuh untuk mencegah adanya eksploitasi alam yang dilakukan perusahaan-perusahaan asing.

➤ Tantangan Bidang Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan Indonesia memiliki tantangan yang luar biasa.Kalau dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara tetangga, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia.Seperti halnya yang dilansir *Republika*, pada 2013, Indonesia masih berada di peringkat ke-4 dalam hal pendidikan dan produktivitas yang dimiliki.Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki posisi yang aman dalam hal ini.Mengingat standar upah yang berlaku di Indonesia masih tergolong kecil sehingga tenaga kerja asing masih enggan untuk bekerja di sini.Malah sebaliknya, tenaga kerja Indonesia lebih memiliki peluang untuk bekerja di luar negeri untuk mendapatkan gaji yang lebih layak.

➤ Tantangan Bidang UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sasaran dan fokus Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam menciptakan stabilitas dan perkembangan ekonomi di wilayah regional ASEAN.UMKM Indonesia memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama tentang kualitas barang yang dihasilkan.Kebanyakan kualitas produk UKM Indonesia belum memenuhi standar.Hal itu disebabkan beberapa faktor.Pertama, biaya produksi dalam negeri yang sangat mahal sehingga tidak mampu menciptakan efisiensi produksi.Kedua, kurangnya pengetahuan para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam menghasilkan barang ataupun jasa yang berkualitas.Kedua hal tersebut sangat berkaitan dan perlu sesegera mungkin diupayakan solusinya, baik oleh Pemerintah maupun pelaku usaha sendiri.

#### 4.2.3 Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional yang diangkat yang berkaitan dengan kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap kondisi daerah. Kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Konawe yakni berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan regulasi tersebut ditetapkan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM yang dilaksanakan oleh Kabupaten yakni terdiri dari.

- SPM Pendidikan :
  - Pendidikan anak usia dini;
  - Pendidikan dasar;
  - Pendidikan kesetaraan;
- SPM Kesehatan :
  - Pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - Pelayanan kesehatan balita;
  - Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
  - Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
- SPM Pekerjaan Umum :
  - Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan

- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- SPM Perumahan Rakyat :
  - Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
  - Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat :
  - Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - Pelayanan informasi rawan bencana;
  - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
  - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- SPM Sosial :
  - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  - Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
  - Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
  - Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
  - Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan tahapan :

1. Pengumpulan data;  
 Pengumpulan data dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;  
 Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan



- untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;  
Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
  4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.  
Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

#### 4.2.4 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara

Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara yang dirumuskan dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023**

No.	Sub Bidang / Isu Strategis
1	<p>Kemiskinan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Pendapatan masyarakat masih sangat rendah</li> <li>- Minimnya akses usaha kecil dan menengah</li> <li>- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat miskin usia produktif</li> <li>- Belum adanya UPTD terkait penanganan lansia dan disabilitas</li> <li>- Belum adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas dan kapasitas PSKS</li> <li>- Peran dunia usaha dalam bentuk CSR belum maksimal dalam penanganan kesejahteraan social</li> </ul>
2	<p>Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas relevansi pendidikan dan skill tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja</li> <li>- Belum optimalnya pembinaan produktivitas kerja kepada tenaga kerja maupun perusahaan</li> <li>- Penggunaan tenaga kerja asing tidak sesuai dengan IMTA (Izin Memperkejakan Tenaga Asing)</li> <li>- Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja</li> </ul>



No.	Sub Bidang / Isu Strategis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum optimal</li> <li>- Kurangnya program jaminan sosial dan kesehatan tenaga kerja di usaha UKM dan perusahaan menengah</li> <li>- Belum optimalnya teknis pemeriksaan, penyidikan dan penindakan pelanggaran norma ketenagakerjaan diperusahaan</li> </ul>
3	Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya terupdatenya data-data potensi destinasi wisata</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya dokumen perancangan dan pengembangan kawasan Pariwisata Prioritas</li> <li>- Minimnya Fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi</li> <li>- Konektivitas antar destinasi wisata yang belum terhubung dengan baik</li> <li>- Destinasi wisata belum didukung oleh tata kelola destinasi yang baik</li> <li>- Belum optimalnya pembentukan desa wisata &amp; kelompok sadar wisata</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersusunnya profil investasi pariwisata, regulasi kemudahan investasi &amp; insentif investasi daerah</li> <li>- Koordinasi, sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung kepariwisataan</li> </ul>
4	Peningkatan Investasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beban perpajakan yang memberatkan investor/pelaku usaha</li> <li>- Regulasi terkait penanaman modal saling tumpang tindih</li> <li>- Jalur birokrasi yang panjang</li> <li>- Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama, perijinan dan investasi</li> </ul>
5	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi manajemen Koperasi &amp; UMKM</li> <li>- Peningkatan SDM Koperasi &amp; UMKM</li> <li>- Terbatasnya akses Permodalan Koperasi &amp; UMKM</li> <li>- Terbatasnya akses kemitraan dan jaringan usaha Koperasi &amp; UMKM</li> <li>- Terbatasnya akses Permodalan Koperasi &amp; UMKM</li> <li>- Rendahnya pengetahuan teknologi dan informasi bagi Koperasi &amp; UMKM</li> </ul>

No.	Sub Bidang / Isu Strategis
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan akses perizinan bagi UMKM</li> <li>- Koperasi masih terkendala untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat</li> </ul>
	Pertanian <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian</li> <li>- Sarana dan prasarana tanaman pangan masih belum memadai</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani</li> <li>- Populasi ternak masih rendah sehingga impor daging masih tinggi</li> <li>- Penyediaan sumber-sumber perbibitan ternak dan penanganan penyakit menular pada ternak</li> <li>- Peningkatan sumberdaya manusia bidang pertanian dan peternakan</li> </ul>

## B. BIDANG SOSIAL BUDAYA

No	Sub Bidang / Isu Strategis
1	Pendidikan dan Kebudayaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai</li> <li>- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah</li> <li>- Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan pendidikan agama, pendidikan kewargaan dan pendidikan karakter untuk mendukung Revolusi Mental;</li> <li>- Peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan;</li> <li>- Penguatan tata kelola Pendidikan</li> <li>- Masih terdapat jenis kearifan budaya dan tradisi lokal yang belum terdaftar ditingkat nasional</li> <li>- Rendahnya peran masyarakat dalam melestarikan budaya dan tradisi lokal</li> </ul>
2	Kesehatan dan Gizi Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia;</li> <li>- Percepatan perbaikan status gizi masyarakat;</li> </ul>

No	Sub Bidang / Isu Strategis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;</li> <li>- Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas;</li> <li>- Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan;</li> <li>- Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan;</li> <li>- Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan manajemen, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi kesehatan;</li> <li>- Pengembangan dan peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan;</li> <li>- Pengembangan jaminan kesehatan nasional</li> <li>- Peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat</li> </ul>
3	<p>Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan</li> <li>- Partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan belum maksimal</li> <li>- Kurangnya pemahaman, komitmen dan keterampilan para pelaku pembangunan dalam pengintegrasian perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan</li> <li>- Belum tersedianya data terpilah disemua bidang pembangunan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan</li> <li>- Belum efektifnya kelembagaan PUG/PPRG dan pemberdayaan perempuan</li> <li>- Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan</li> <li>- Belum efektifnya kelembagaan perlindungan anak.</li> </ul>
4	<p>Kependudukan dan Keluarga Berencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana dan pembangunan keluarga</li> <li>- Penguatan data dan informasi kependudukan dan KB</li> </ul>

No	Sub Bidang / Isu Strategis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan prevalensi pemakaian kontrasepsi (Contraceptive prevalence rate/CPR)</li> </ul>
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan fungsi kelembagaan desa</li> <li>- Peningkatan SDM Aparat Desa</li> <li>- Peningkatan kesejahteraan Aparat Desa</li> <li>- Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa</li> <li>- Peran serta masyarakat dalam pembangunan berkurang</li> <li>-</li> </ul>

### C. INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

No	Sub Bidang / Isu Strategis
1	Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya jaringan infrastruktur pada dan menuju kawasan strategis</li> <li>- Belum teredainya Regulasi standar kualitas pembangunan jalan</li> <li>- Rendahnya Kualitas Jalan</li> <li>- Belum optimalnya pengelolaan Sumber daya air permukaan dan pengelolaan irigasi</li> <li>- Jaringan irigasi banyak yang rusak</li> <li>- Belum optimalnya pengelolaan daerah Irigasi</li> <li>- Peningkatan SDM tenaga Kontruksi yang berdaya saing</li> <li>- Peningkatan Upah tenaga kontruksi yang bersertifikasi</li> <li>- Sinkronisasi nilai budaya dan kearifan lokal dalam perencanaan</li> </ul>
2	Perumahan dan Permukiman <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan Rumah masyarakatan MPR</li> <li>- Perlunya Pengembangan sumber-sumber pendanaan</li> <li>- Perlu koordinasi dengan instansi terkait</li> <li>- Pentaan dan rehabilitasi kawasan kumuh serta revitalisasi kawasan situs</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi</li> </ul>

No	Sub Bidang / Isu Strategis
	- Koordinasi, regulasi dan penataan kawasan kumuh
3	Pertanahan - Belum tuntasnya sengketa pertanahan antara pemerintah daerah dengan masyarakat
4	Penataan Ruang - Belum ada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan strategis - Tumpang Tindih pemanfaatan Ruang - Koordinasi pemanfaatan ruang antar wilayah prov/kab/kota - Penataan Kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan
5	Ketersediaan Air Bersih dan Pengelolaan Sanitasi - Capaian sanitasi 69 % - Air Bersih 79 %
6	Perhubungan - Sarana prasarana transportasi yg kurang memadai - Koordinasi, pengembangan dan penataan trayek dan izin operasi - Minimnya fasilitas keselamatan - Terbatasnya kualitas sumber daya manusia - Rendahnya pengawasan dan pengendalian

#### **D. KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI**

No	Sub Bidang / Isu Strategis
1	Ketahanan Pangan - Peningkatan produksi pangan pokok - Perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat
2	Energi - Pembangunan infrastruktur/prasarana ketenagalistrikan belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan dari potensi energi lokal setempat - Peningkatan akses listrik desa

#### **E. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

No	Sub Bidang / Isu Strategis
1	Kelautan dan Perikanan - Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan;

No	Sub Bidang / Isu Strategis
	Percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim - (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan
2	Pertanian dan Peternakan Pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan - kesejahteraan petani Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal - yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan
	Pengembangan usaha sektor pertanian dan peternakan, - khususnya bagi petani kurang mampu - Penerapan teknologi di bidang pertanian dan peternakan Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pertanian dan - peternakan
3	Sumber Daya Mineral Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan - infrastruktur ketenagalistrikan Sulawesi Tenggara bagi masyarakat dan industri - Pemenuhan kebutuhan listrik desa secara menyeluruh Pemanfaatan dan pengembangan potensi energi baru terbarukan - sesuai potensi daerah - Peningkatan kontribusi PDRB sektor pertambangan
4	Kehutanan - Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan - Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan - Pengembangan hutan rakyat - Tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan - Optimalisasi konservasi hutan dan lahan
5	Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola - produksi dan konsumsi berkelanjutan - Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; dan Penanganan perubahan iklim serta peningkatan kualitas - informasi iklim dan kebencanaan

## **F. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH**

No	Sub Bidang / Isu Strategis
No	Sub Bidang / Isu Strategis
1	Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</li> <li>- Pembentukan lembaga perangkat daerah belum efektif ( belum tepat ukuran dan tepat fungsi)</li> <li>- Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik (sesuai UU No 25 /2009) masih Rendah</li> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan public</li> </ul>
	- Pengembangan dan penerapan e-government
2	Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas birokrasi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya SDM Pejabat Fungsional</li> <li>- Rendahnya tingkat kedisiplinan PNS</li> <li>- Belum optimalnya pelayanan pengelolaan kepegawaian</li> </ul>
3	Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</li> <li>- Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah</li> </ul>
4	Data dan Informasi Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik</li> <li>- Pembangunan infrastruktur data center</li> <li>- Keterbatasan kapasitas SDM pengelola informasi, Sarana dan prasarana komunikasi, serta belum adanya dorongan dan upaya secara optimal untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik</li> </ul>

#### 4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Konawe

Rancangan isu strategis Kabupaten Konawe mempertimbangkan kondisi faktual yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Analisis yang dilakukan selain melihat potensi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan pembagian urusan, yang paling mendasar yakni melihat isu-isu nasional dan regional Provinsi Sulawesi Tenggara yang sedang mengemuka. Perumusan rancangan isu-isu strategis daerah juga mempertimbangkan keterkaitan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023. Adapun isu-isu strategis Kabupaten Konawe dalam rumusan ini dibagi

menjadi 2 kategori yakni isu kondisi makro daerah dan isu-isu sektoral berdasarkan pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan.

**a) Isu Kondisi Makro Daerah :**

1. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dan tentunya berpotensi mempengaruhi kondisi perekonomian daerah.
2. Penurunan angka kemiskinan. Saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Konawe dapat dikatakan masih cukup tinggi dimana masih berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara dan rata-rata nasional. Angka kemiskinan pada tahun 2020 masih tercatat sebesar 12,20% masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara yakni 11,00%.
3. Peningkatan kualitas angkatan kerja. Kualitas angkatan kerja yang belum sesuai dengan spesifikasi lapangan kerja yang ada (tidak sesuai dengan kebutuhan pasar).
4. Upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tetap positif merupakan tantangan kedepan yang harus diperhatikan agar produktifitas daerah tetap terjaga.
5. Optimalisasi kontribusi pertumbuhan pada sektor usaha andalan (pertanian dalam arti luas).
6. Peningkatan aksesibilitas wilayah. Selama ini masih cukup rendahnya aksesibilitas pada wilayah-wilayah terpencil sehingga hal ini memicu kesenjangan social dan ekonomi antar masyarakat.
7. Kapasitas sumber daya manusia aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih cukup rendah sehingga peran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi belum berjalan maksimal.

**b) Isu-isu sektoral berdasarkan pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan tersaji pada tabel 4.3 dibawah ini :**

**Tabel 4.3**  
**Isu-isu Strategis Berdasarkan Pembagian Urusan**

No.	Urusan	Isu Strategis
<b>IV. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>		
1.	Pendidikan	a. Meningkatkan sarana dan prasarana PAUD secara menyeluruh seperti gedung, alat-alat peraga, buku-buku pembelajaran dan tenaga pengajar.



No.	Urusan	Isu Strategis
		b. Pemerataan distribusi pembangunan sarana dan prasarana sekolah disemua jenjang pendidikan. c. Pemerataan kompetensi guru disemua jenjang pendidikan. g. Penyediaan tunjangan yang memadai bagi guru-guru yang bertugas diwilayah terpencil.
2.	Kesehatan	a. Pemerataan tenaga medis di daerah-daerah terpencil utamanya perawat. b. Pemerataan layanan kesehatan yang bermutu bagi keluarga miskin. c. Menurunkan kasus TBC BTA.
		d. Menyediakan fasilitas rumah bagi para medis yang bertugas di daerah-daerah terluar. e. Menekan persebaran penyakit HIV/AIDS. f. Menyediakan pelayanan medis di RSUD yang berbasis IT.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Pembenahan jaringan jalan dan jembatan pada daerah-daerah strategis. c. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai di wilayah pedesaan. d. Mengoptimalkan pembangunan drainase.
		e. Mendorong OPD menyediakan data-data pembangunan yang valid. f. Pemanfaatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tepat sasaran.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Menurunkan persentase rumah tidak layak huni. b. Meningkatkan kualitas sanitasi. c. Pengentasan permukiman kumuh diwilayah pesisir.
5.	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	a. Optimalisasi peran personil Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah dan melakukan pengamanan terhadap lingkungan perkantoran Pemda. b. Menyediakan armada pemadam kebakaran yang memadai.
6.	Sosial	a. Menurunkan kasus PMKS.

No.	Urusan	Isu Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Menibgkiatkan sistem ketersediaan data mengenai PMKS.</li> <li>c. Meningkatkan penyaluran bantuan terhadap PMKS</li> <li>b. Mendorong organisasi dapat merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan Tupoksinya.</li> </ul>
<b>IV. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>		
1.	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan pembinaan terhadap para pencari kerja.</li> <li>b. Meningkatkan pembinaan ketenagakerjaan.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja.</li> <li>d. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Utamanya dalam memfasilitasi hak-hak tenaga kerja.</li> <li>e. Mendorong pembinaan ketenagakerjaan yang berorientasi pada kebutuhan pasar.</li> </ul>
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pengawasan, perlindungan dan pembinaan terhadap hak-hak perempuan dan anak.</li> <li>b. Meninbgkatkan Pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender (PUG) dan perlindungan anak.</li> <li>c. Mengoptimalkan perumusan program-program pembangunan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan/kelompok usaha perempuan.</li> <li>d. Pengintegrasian sistem pembangunan yang berbasis hak anak</li> </ul>
3.	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan ketahanan pangan utamanya pada wilayah-wilayah pesisir.</li> <li>b. Pembinaan intensifikasi dan ekstensifikasi pangan.</li> <li>c. Optimlisasi peran TPID.</li> </ul>
4.	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana persampahanyang memadai.</li> </ul>

No.	Urusan	Isu Strategis
		c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
		d. Optimalisasi penataan kawasan taman kota dan penataan estetika Kota Unaaha.
5.	Kependudukan dan Catatan Sipil	a. Mengoptimalkan pelayanan perekaman e-KTP di Pemerintah Kecamatan.
		b. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
		c. Penegakan tertib administrasi.
6.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	a. Meningkatkan kapasitas dan daya saing ekonomi masyarakat desa.
		b. Memanfaatkan termanfaatkannya potensi lokal desa.
		c. Memaksimalkan Kelembagaan Bumdes.
7.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Meningkatkan Pemahaman masyarakat Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
		b. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KB.
8.	Urusan Perhubungan	a. Meningkatkan kesadaran sopir mobil angkutan mematuhi jalur trayek yang telah ditetapkan.
		b. Mendorong fungsi terminal yang dibangun.
		c. Meningkatkan sarana aparatur dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
		d. Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan terhadap uji KIR kendaraan.
9.	Komunikasi dan Informasi	a. Penyediaan aplikasi e-government yang terintegrasi.
		b. Peningkatan SDM aparatur teknis.
10.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	a. Fasilitasi Akses dan jaringan permodalan bagi koperasi dan UKM masih rendah.
		b. Mendorong fasilitasi potensi Koperasi dan UKM dengan lembaga permodalan.
11.	Urusan Penanaman Modal	a. Penyediaan sarana dan prasarana layanan yang memadai..

No.	Urusan	Isu Strategis
		b. Masih terbatasnya akses publik mengenai informasi investasi di Kabupaten Konawe.
12.	Kepemudaan dan Olahraga	a. Meningkatkan fasilitas olahraga untuk cabang olahraga unggulan.
		b. Meningkatkan pembinaan olahraga.
		c. Meningkatkan pembinaan kepemudaan.
13.	Kebudayaan	a. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai budaya generasi muda Kabupaten Konawe.
		b. Mendorong inovasi untuk kegiatan-kegiatan pengembangan dan pelestarian kebudayaan.
14.	Perpustakaan	a. Memaksimalkan pemanfaatan taman baca bagi masyarakat.
		b. Membangkitkan kembali minat baca dikalangan masyarakat.
15.	Kearsipan	a. Mengoptimalkan pendokumentasian arsip secara digital.
		b. Meningkatkan koordinasi antar organisasi pemerintah daerah dalam hal pengamanan arsip dan dokumentasi daerah.
<b>V. URUSAN PILIHAN</b>		
1.	Kelautan dan Perikanan	a. Mengoptimalkan pengelolaan perikanan darat.
		b. Meningkatkan fasilitas umum bagi masyarakat pesisir.
		c. Meningkatkan taraf ekonomi para nelayan.
		d. Mengoptimalkan ketersediaan akses pemasaran hasil perikanan yang belum tersedia optimal.
		e. Mengoptimalkan pengelolaan sarana pendukung seperti TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan lain-lain.
2.	Pariwisata	a. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata yang ada.
		b. Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata di daerah.
		c. Meningkatkan inovasi dan kreatifitas perencanaan di bidang pariwisata.
		d. Meningkatkan kesadaran masyarakat disekitar kawasan pariwisata sehingga menjadikan kondisi pariwisata terkelola dengan baik.

No.	Urusan	Isu Strategis
		e. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar wisata.
3.	Pertanian	a. Meningkatkan penguasaan dan akses teknologi pertanian. b. Meningkatkan Infrastruktur pertanian, untuk pengelolaan segala potensi pertanian yang ada. c. Memperkuat fungsi kelembagaan petani menjadi lebih maksimal. d. Mengembangkan upaya dalam strategi memberi nilai tambah pada komoditi hasil pertanian dalam arti luas.
		e. Memanfaatkan segala potensi peternakan yang ada. f. Meningkatkan produksi padi.
4.	Perdagangan	a. Mengembangkan upaya dalam menjembatani kerjasama perdagangan komoditi lokal baik antar pemerintah maupun dengan pihak swasta. b. Meningkatkan kapasitas aparatur. c. Memaksimalkan pengawasan terhadap perdagangan lokal dalam rangka pengendalian inflasi.
5.	Perindustrian	a. Meningkatkan koordinasi antar sektor terutama koordinasi dengan pihak BANK sehingga perkembangan sektor indsutri menjadi optimal. b. Meningkatkan tenaga profesional para pelaku industri kecil dan menengah. c. Mengembangkan inovasi dan kreatifitas perencanaan untuk memacu berkembangnya sektor industri.
6.	Transmigrasi	a. Mengembangkan segala potensi transmigrasi. b. Meningkatkan fasilitas pendukung ekonomi masyarakat transmigrasi.
<b>VI. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>		
1.	Perencanaan Pembangunan	a. Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan

No.	Urusan	Isu Strategis
		pembangunan yang telah ditetapkan.
		b. Meningkatkan kemampuan aparatur perencana. Dimana jumlah staf yang profesional perlu ditingkatkan sehingga sesuai dengan volume pekerjaan yang ada.
		c. Meningkatkan ketersediaan aparat perencana yang telah mengikuti diklat fungsional perencana.
		d. Meningkatkan kesadaran OPD dalam koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
		e. Mengoptimalkan sinkronisasi dan konsistensi dokumen perencanaan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja OPD.
2.	Kepegawaian	a. Meningkatkan persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat
		b. Mengembangkan sistem pengembangan karier staf sehingga mengacu pada kapasitas dan prestasi kerja ( <i>the right man, on the right place</i> ).
3.	Keuangan	a. Meningkatkan keterpaduan koordinasi dengan perencanaan pembangunan daerah
		b. Terlaksananya perencanaan anggaran yang baik sehingga menghindari potensi terjadinya defisit anggaran.
		c. Mengeksplorasi secara optimal sumber-sumber pendapatan daerah.
4.	Pengawasan	a. Meningkatkan kapasitas aparat pengawas internal
		b. Menjadikan persentase tindak lanjut temuan yang menjadi lebih optimal dilaksanakan.
5.	Administrasi Pemerintahan	a. Terdokumentasinya dengan baik penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD.
		b. Adanya pendelegasian kewenangan yang jelas pada pemerintah kecamatan.
		c. Mengoptimalkan penerapan pelayanan prima maupun SPM.
		d. Meningkatkan peran perangkat daerah yang mampu menjabarkan orientasi tugasnya kedalam program pembangunan.

No.	Urusan	Isu Strategis
6.	Urusan Lainnya	a. Mengoptimalkan pengawasan orang asing/tenaga kerja asing maupun lembaga asing
		b. Meningkatkan kesadaran terhadap wawasan kebangsaan, nasionalisme dan bela negara dimasyarakat
		c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik
		d. Mendorong peningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan terhadap masyarakat
		e. Mengoptimalkan pembinaan LSM, Ormas dan OKP guna meningkatkan peran sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
		f. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur BPBD
		g. Mengidentifikasi potensi ancaman baru bencana alam
		h. Peningkatan edukasi bagi masyarakat tentang upaca mitigasi bencana
		i. Meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat
		j. Membangun kerjasama dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya
		k. Mendorong peningkatan SDM organisasi BNK agar memenuhi standar dan kualifikasi organisasi

# BAB V. VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN



Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Kabupaten Konawe dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran yang merujuk pada arah kebijakan RPJPD periode yang sama. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional yang harus dipedomani.

## 5.1 Visi

Visi Kabupaten Konawe merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan terwujud oleh **Bupati dan Wakil Bupati Konawe Bapak Kery Saiful Konggoasa dan Bapak Gusli Topan Sabara, ST., MM** dalam kurun waktu lima tahun yaitu periode 2018-2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi Bupati dan Wakil Bupati Konawe disebut sebagai Visi Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Dengan mempertimbangkan keterkaitan visi pembangunan nasional, visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan arah kebijakan periode ke IV RPJPD Konawe maka Visi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 adalah :

**“KONAWA YANG MAJU DAN MANDIRI TAHUN 2023”**

Untuk memaknai penjabaran visi tersebut maka perlu diketahui konsep dari setiap kata kunci pada rumusan visi tersebut.

### **MAJU**

Maju bermakna sebagai suatu kondisi dimana masyarakat Konawe berada pada tataran peradaban yang tinggi yang berlandaskan keimanan, moral, etika dan nilai-nilai kearifan budaya lokal yang selama ini hadir dan tumbuh berkembang bersama masyarakat.



Kemajuan pada masa mendatang dimaknai juga sebagai kondisi kesejahteraan yang tercipta dimana tersebut kesejahteraan yang hadir bersifat komprehensif dan berada pada seluruh tataran masyarakat Konawe.

### **Mandiri**

Dari segi bahasa mandiri berarti dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Mandiri pada konsep ini adalah keadaan dimana masyarakat Kabupaten Konawe secara ekonomi mampu menghidupi dirinya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Dalam pembangunan penting untuk menciptakan tatanan masyarakat yang mandiri yang dapat tumbuh dan berkembang karena disiplin dan komitmen yang dimilikinya. Kemandirian juga akan membentuk masyarakat Konawe yang berkarakter dan memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.

## **5.2 Misi**

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Konawe yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 disusunlah misi pembangunan Kabupaten dengan rumusan sebagai berikut :

- 1) MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE.
- 2) MENJADIKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBUDAYAAN SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE.
- 3) MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIC YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB.
- 4) MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL.

Rumusan misi ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi ini disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai

perwujudan visi Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023. Misi-misi ini selanjutnya akan dioperasionalkan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan dengan terlebih dahulu merumuskan sasaran dan tujuan sasaran pembangunan daerah pada setiap rumusan misi tersebut.

Penjabaran misi ini mengandung makna sebagai berikut :

#### MISI 1

MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kualitas SDM masyarakat Konawe yang memiliki daya saing yang tangguh ditengah kompetisi dan dinamika global yang semakin kompleks. Misi ini menegaskan bahwa cita-cita kedepan diharapkan masyarakat Konawe tidak saja kuat dari sisi daya saing ekonomi namun seiring dengan itu dapat tercipta masyarakat yang memiliki jiwa dan pemikiran yang sehat sehingga daya saing masyarakat dapat berlangsung secara berkesinambungan dan berdampak menyeluruh bagi generasi yang akan datang. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan bahwa basis pengembangan ekonomi masyarakat Konawe berasal dari potensi unggulan dan sumber lokal daya yang dimilikinya. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini potensi unggulan Kabupaten Konawe terletak pada sektor usaha pertanian dalam arti luas dan pada posisi geostrategis wilayah pada skala regional Sulawesi Tenggara.

Pembangunan pada aspek pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Konawe. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam membentuk SDM masyarakat Konawe yang sehat dan berkompetensi mumpuni dalam menghadapi tantangan dan kompetisi.

Disamping itu yang paling utama, misi ini akan mengeksplorasi potensi lokal yang dimiliki daerah ini yakni pengembangan peternakan dan peningkatan produktifitas padi sehingga kedepan Konawe dapat ter”branding” sebagai “**sentra ternak**” dan “**sentra beras**” nasional. Bersamaan dengan itu akan didorong pula industrialisasi kedua komoditi tersebut sehingga komoditi yang

dihasilkan dapat bernilai tambah bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Konawe. Untuk upaya tersebut diformulasikan **“Program Sejuta Ton Beras”** dan **“Program Sejuta Ekor Sapi”** sebagai program andalan daerah. Sementara untuk potensi perikanan budidaya yang cukup besar maka akan dilakukan pencetakan kolam budidaya untuk masyarakat yang memiliki potensi tersebut, untuk menegaskan upaya ini maka diformulasikan sebuah program yang dinamakan **“Program Seribu Kolam”**.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Konawe dalam memanfaatkan posisi geostrategis wilayahnya akan semakin mendorong pengembangan Kawasan Industri Konawe (KIK) yang telah menjadi *icon* investasi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian pula potensi-potensi lainnya yang dapat mengundang investasi daerah akan terus dikembangkan karena pemerintah sangat menyadari bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dibutuhkan instrumen investasi sebagai lokomotif penggerak perekonomian di Kabupaten Konawe.

Diharapkan jika seluruh komponen diatas berjalan sesuai dengan yang direncanakan akan semakin membuka akses lapangan kerja bagi masyarakat dan bersamaan dengan itu akan meningkatkan income perkapita masyarakat sehingga masyarakat berada pada taraf hidup yang berkualitas.

#### MISI 2

MENJADIKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBUDAYAAN SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE

Misi kedua ini akan menjadi salah satu pilar utama pembangunan mengingat infrastruktur, ekonomi, lingkungan hidup dan kebudayaan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam geliat pembangunan di Kabupaten Konawe. Dalam kaitannya dengan Misi I, Misi ke-II akan menjadi pendukung utama agar upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dapat terwujud. Harus dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur bersinergi dengan pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, pertanian dalam arti luas dan investasi.

Pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara masif dan terstruktur menitikberatkan pada peningkatan dan perbaikan akses infrastruktur pada lokasi-lokasi strategis sehingga dapat memberikan kelancaran masyarakat dalam beraktifitas. Pembangunan infrastruktur Kota Unaaha juga akan menjadi perhatian utama agar tercipta penataan kota yang asri dan nyaman. Mengikuti dinamika perkembangan masyarakat Konawe yang membutuhkan ruang-ruang publik, pemerintah akan mendorong perbaikan sarana-sarana publik yang dilengkapi fasilitas-fasilitas memadai. Untuk memastikan upaya tersebut dapat terimplementasi maka kedepan Pemerintah Kabupaten Konawe akan berupaya membangun koneksi dengan para investor terkait pemanfaatan aset strategis daerah seperti Pasar Wawotobi yang dapat ditingkatkan menjadi kawasan perdagangan modern (Mall). Selain Pasar Wawotobi terdapat pula aset Pemerintah Kabupaten Konawe yang cukup strategis dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi yakni Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Konawe yang berada di Kota Kendari yang dapat memberikan *feed back* penerimaan daerah jika aset tersebut dimanfaatkan dengan baik.

Sementara itu sektor ekonomi lainnya tetap akan didorong dalam rangka menciptakan *link* pembangunan yang terintegrasi. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pembukaan akses pasar yang layak dan peningkatan intensitas perdagangan dalam daerah serta upaya mendekatkan IKM, UKM dan UMKM dengan perbankan akan dilakukan agar terdapat ruang yang luas bagi masyarakat dalam berwirausaha. Demikian pula upaya menumbuhkembangkan industri kreatif dengan memanfaatkan posisi strategis Kabupaten Konawe sebagai jalur perlintasan utama yang melalui daratan Sulawesi Tenggara akan semakin dimaksimalkan melalui pengembangan Kawasan *Inolobunggadue Central Park (ICP)* dan Kawasan *rest area* diwilayah strategis dijalur utama perlintasan trans Sulawesi.

Selain fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur pemerintah Kabupaten Konawe juga ingin memastikan bahwa pembangunan dibidang lingkungan hidup dan kebudayaan akan menjadi salah satu pilar pembangunan kedepan. Aspek pengelolaan lingkungan hidup ini dianggap penting mengingat saat ini mulai menurunnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan eksistensi ekosistem lingkungannya.

Pembangunan dibidang kebudayaan akan senantiasa dilakukan dalam rangka menjaga eksistensi Konawe sebagai imperium berkembangnya kebudayaan Tolaki di jazirah Sulawesi Tenggara. Nilai-nilai dan kearifan budaya lokal akan senantiasa dibumikan melalui upaya pengenalan dan pembiasaan secara dini pengenalan budaya kepada para pelajar mulai dari tingkat PAUD/TK hingga SMP.

### MISI 3

MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIC YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB

Misi ke-III ini bermakna sebagai upaya pemerintah Kabupaten Konawe dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Disadari bahwa komponen utama yang sangat mempengaruhi kualitas pelayanan adalah SDM beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Dalam konteks misi ini Pemerintah Kabupaten Konawe akan membangun kesadaran para aparatur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan deskripsi tugas yang dimilikinya (*job orientid*). Transformasi mentalitas birokrasi ini akan terus dilanjutkan dalam rangka memantapkan sistem *good governance* yang sudah mulai terintis dalam beberapa tahun belakangan. Pemerintah sangat menyadari untuk merangsang *animo* para aparatur agar memiliki semangat dalam bertugas maka kedepan akan dialokasikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Konawe secara selektif sesuai dengan orientasi tugas yang dimilikinya. Penguatan SDM yang akan dilakukan tersebut dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkesinambungan dengan memperhatikan kapasitas kemampuan fiskal daerah.

Disamping itu untuk mewujudkan prinsip *exelent service* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, sarana dan prasarana aparatur juga akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Konawe terutama bagi sarana aparatur yang berkaitan langsung dengan kemudahan bagi pelayanan publik. Akan dipastikan bahwa publik dapat mengakses berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung

di Kabupaten Konawe. Sekaligus Pemerintah akan mendekatkan publik melalui peran informasi digital yang akan dikembangkan pada tahun-tahun mendatang.

#### MISI 4

### MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Sebagai respon atas kondisi sosial yang terjadi mengenai cukup tingginya angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Konawe. Maka dipandang sangat perlu untuk membuat rumusan secara khusus terkait misi pemerintah dalam menuntaskan persoalan sosial tersebut. Pemerintah perlu memastikan komitmen seriusnya untuk memberantas segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penuntasan kemiskinan. *Quick respon* pemerintah terhadap persoalan sosial yang ada akan dilakukan dengan langsung menyentuh substansi dan objek masyarakat yang teridentifikasi sebagai penyandang permasalahan sosial. Jaminan sosial yang diupayakan pemerintah hingga akhir periode tahun 2023 akan mengcover setidaknya 1/10 jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Konawe dengan kriteria bagi mereka yang rentan terhadap permasalahan sosial.

### 5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi RPJMD Kabupaten Konawe secara lebih detil, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun strategi pembangunan.

Untuk menjabarkan misi agar jelas wujudnya dalam periode 2018-2023 ditetapkan **tujuan pembangunan** sebagai berikut.

**Misi 1 : Menjadikan Sektor Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Serta Kawasan Industry Sebagai Program Utama Pembangunan Konawe**

Tujuan Misi 1 adalah :

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah.

***Tujuan 1 (Misi 1): Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)***

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
- 2) Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dijenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs.

***Tujuan 2 (Misi 1): Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah***

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya produktifitas daerah pada sektor-sektor unggulan sehingga menjadikan Konawe sentra produksi beras dan sentra produksi ternak.
- 2) Meningkatnya realisasi investasi daerah.

**Misi 2: Menjadikan Sektor Infrastruktur, Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Serta Kebudayaan Sebagai Program Pendukung Utama Pembangunan Konawe**

Tujuan Misi 2 adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Terwujudnya pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.
3. Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konawe.

***Tujuan 1 (Misi 2): Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat***

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya akses infrastruktur pada berbagai sektor dalam rangka mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat.
- 2) Tersedianya infrastruktur usaha mikro untuk membuka ruang usaha bagi masyarakat.



***Tujuan 2 (Misi 2): Terwujudnya pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup***

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Terjaganya kualitas lingkungan hidup.

***Tujuan 3 (Misi 2): Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konawe***

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Terimplementasinya nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai identitas masyarakat.

**Misi 3 : Menjadikan Pembangunan Birokrasi Yang Handal Dan Pelayanan Public Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel Sebagai Program Pendukung Wajib**

Tujuan Misi 3 adalah :

1. Terselenggaranya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe.

***Tujuan 1 (Misi 3): Terwujudnya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe***

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.
- 2) Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT).

**Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Program Jaminan Sosial**

Tujuan Misi 3 adalah :

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial.

***Tujuan 1 (Misi 4): Meningkatnya kesejahteraan sosial***

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Menurunnya jumlah penduduk miskin.



#### **5.4 Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Mempertimbangkan hal tersebut maka dirumuskan indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 yang selanjutnya akan menjadi landasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merumuskan turunan tujuan dan sasaran indikator pembangunan berdasarkan urusannya masing-masing.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan maka dapat dijabarkan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 berikut target pencapaiannya selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan keterkaitan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana tergambar pada tabel 5.1 dibawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan dan Indikator Kinerja**  
**Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023**

N O	MISI	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATO R KINERJA	SATU AN	KOND ISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM					
						TAHU N 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDI SI AKHIR
						TARG ET	TARGE T	TARGE T	TARGE T	TARGE T	TARGE T
1		2	3		5	6	8	10	12	14	16
I	MENJADI KAN SEKTOR KESEHAT AN, PENDIDIK AN, PERTANI AN, PETERNA KAN DAN PERIKAN AN SERTA KAWASA N	1. Meningkatkan 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangu nan Manusia	Indek s	70,72	71,25	72,50	73,61	74,72	75,00	75,00
		1.1 Meningkatkan .1 a kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,76	69,90	70,29	70,67	71,06	71,44	71,44
		1.1 Meningkatkan .2 a angka partisipasi pendidikan dijenjang pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	13,03	13,09	13,15	13,21	13,26	13,26
			Angka Rata-Rata Lama	Tahun	8,94	8,64	8,67	8,69	8,72	8,75	8,75

N O	MISI	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM					
						TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1		2	3		5	6	8	10	12	14	16
	INDUSTRI SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN	PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs	Sekolah								
		1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah	Nilai Produktifitas Daerah	Rp.	1.901.759,45	2.191.822,99	2.444.126,18	2.799.712,04	3.213.977,42	3.409.796,48	3.409.796,48
		1.2 Meningkatkan produktifitas daerah pada sektor-sektor unggulan sehingga	Pertumbuhan PDRB	%	7,44	10,56	11,61	11,89	12,73	13,09	13,09
			Produksi Padi	Ton	216.381,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00	1.150.000,00
			Populasi ternak sapi	Ekor	44.497	52.000	62.250	75.500	92.700	115.500	397.950
			Produksi perikanan	Ton	121.183	124.900	128.500	132.500	135.800	136.500	658.200

NO	MISI	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM					
						TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1		2	3		5	6	8	10	12	14	16
		menjadikan Konawe sentra produksi beras dan sentra produksi ternak									
		1.2 Meningkatkan .2 a realisasi investasi daerah	Realisasi Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PM A)	Rupiah	4.518.123.973.708	4.700.000.000.000	5.000.000.000.000	6.000.000.000.000	7.000.000.000.000	8.000.000.000.000	30.700.000.000.000

NO	MISI	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM					
						TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1		2	3		5	6	8	10	12	14	16
II	MENJADIKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBUDAYAAN SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG UTAMA PEMBANGUNAN	2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat	Partisipasi Angkatan Kerja	%	98,06	98,40	98,74	99,07	99,41	99,75	99,75
		2.1 Meningkatkan akses infrastruktur pada berbagai sektor dalam rangka	Indeks konektivitas wilayah	Indeks	0,897	0,931	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966

N O	MISI	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATO R KINERJA	SATU AN	KOND ISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM					
						TAHU N 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDI SI AKHIR
						TARGE T	TARGE T	TARGE T	TARGE T	TARGE T	TARGE T
1		2	3		5	6	8	10	12	14	16
	GUNAN KONAWAWE	mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat									
		2.1 Tersedianya .2 infsrstruktur usaha mikro untuk membuka ruang usaha bagi masyarakat	Pendapata n Per Kapita	Rp	1.901. 759,0 0	2.061. 358,0 0	2.300.6 82,00	2.574.2 33,00	2.901.9 33,00	3.281.9 76,00	3.281.9 76,00
		2. Terwujudnya 2 pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan	Persentase ketaatan terhadap pengelolaa n kawasan dan lingkungan	%	30,00	50,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00

N O	MISI	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM					
						TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1		2	3		5	6	8	10	12	14	16
		dan keberlanjutan lingkungan hidup									
		2.2 Terjaganya .1 kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Range	80,33	80,70	81,10	81,50	81,90	82,30	82,30
		2.3 Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konawe	Cakupan terjaganya eksistensi adat istiadat dan budaya dalam pergaulan masyarakat	Kec.	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
		2.3 Terimplemen .1 tasinya nilai-nilai	Cakupan impelentasi praktek-	Kec.	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00

NO	MISI	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM					
						TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1		2	3		5	6	8	10	12	14	16
		kearifan budaya lokal sebagai identitas masyarakat	praktek kearifan budaya pada aktifitas masyarakat								
II	MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIC YANG EFISIEN,	3. Terselenggaranya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe	Indeks Kepuasan Masyarakat	Status	Puas	Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas
		3.1 Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya	Penilaian SAKIP	Status	C	B	BB	BB	A	A	A
			Penilaian LPPD	Status	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi



NO	MISI	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM					
						TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1		2	3		5	6	8	10	12	14	16
	EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB	<p>aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik</p> <p>3.1 Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui</p>									
		.2	Opini BPK terhadap LK daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

NO	MISI	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM					
						TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1		2	3		5	6	8	10	12	14	16
		pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)									
I V	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL	4.1 Meningkatkan kesejahteraan sosial	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	KK	16.800,00	14.946,00	13.011,00	10.993,00	10.051,00	9.067,00	9.067,00
		4.1.1 Menurunnya jumlah penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	%	13,48	12,65	11,65	9,65	8,65	7,65	7,65
			Gini Ratio	%	0,373	0,370	0,367	0,362	0,362	0,358	0,358





Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sejalan dengan hal diatas, dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuntut pemerintah daerah untuk berfikir kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi pembangunan yang akan dilaksanakannya. Pemerintah perlu melakukan “*quantum*” berfikir yang diikuti dengan “*quantum*” tindakan untuk mencapai akselerasi pencapaian kesejahteraan secara cepat dan berkesinambungan. Perubahan lingkungan strategis yang senantiasa bergerak dinamis menuntut pemerintah daerah untuk meninggalkan pola pikir konvensional menuju ke *mindset* moderat yang berlandaskan nilai dan norma agama dan istiadat yang berkembang dimasyarakat. Pada periode tahun 2018-2023, konsep inilah yang menjadi landasan berfikir pemerintah Kabupaten Konawe kedepan, menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkualitas dengan tetap memelihara norma dan adat istiadat yang selama ini berkembang.

Berdasarkan pendekatan diatas maka sangat perlu untuk membuat sebuah *grand strategy* pembangunan untuk lebih “*membumikan*” program-program pembangunan daerah agar mudah diterjemahkan oleh seluruh *stakeholder* dan masyarakat Kabupaten Konawe. Grand strategy ini akan menjadi “*branding*” pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 yang senantiasa akan menjadi

tema sentral pada semua aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Selanjutnya *grand strategy* pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 tersebut akan diintegrasikan dengan *strategy* dan arah kebijakan pembangunan daerah agar *grand strategy* yang dirancang tersebut tidak saja hanya kuat dalam tataran retorika namun dapat terimplementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Konawe.

### 6.1 Grand Strategy

*Grand strategy* yang dirumuskan ini dimaksudkan untuk menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe kedalam formula sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, sehingga konsep yang dituangkan mudah diterjemahkan oleh seluruh stakeholder dan masyarakat luas. Merujuk visi dan misi serta tujuan utama Bupati dan Wakil Bupati Konawe terpilih **Kery Saiful Konggoasa** dan **Gusli Topan Sabara, ST., MM**, maka dirumuskanlah *grand strategy* pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2013-2018 kedalam konsep :



**“GERBANG MEMBANGUN MASYARAKAT MANDIRI,  
BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING”**

*Grand Strategy* **“GEMILANG”** selanjutnya secara garis besar akan diwujudkan melalui 4 (empat) prinsip dan pendekatan *strategy* yakni :

### **1. *Pertumbuhan;***

Strategi ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui upaya mendorong investasi dan penyertaan modal pemerintah melalui perusahaan daerah pada sektor-sektor strategis daerah serta pemanfaatan potensi unggulan daerah untuk mewujudkan daya saing yang handal.

### **2. *Pemerataan;***

Strategi ini menekankan pada peningkatan peran serta yang sebesar-besarnya oleh masyarakat dan seluruh stakeholder pada proses pembangunan dan juga untuk mengurangi ketimpangan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain atas potensi dan akses peluang ekonomi.

### **3. *Kemandirian;***

Strategi ini dalam rangka mewujudkan daya saing daerah yang memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah melalui inovasi dan kreasi terhadap potensi lokal daerah.

### **4. *Integratif;***

Strategi ini menekankan agar pembangunan dilaksanakan secara holistik menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat dan dapat dilaksanakan terintegrasi bersama seluruh stakeholder baik internal pemerintah maupun pihak eksternal pemerintah.

Dalam mewujudkan keempat prinsip dan pendekatan tersebut Pemerintah Kabupaten Konawe akan memanfaatkan 3 (tiga) pilar penopang daya ungkit pembangunan daerah yakni :

#### **1. *Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD);***

Dalam pengelolaan APBD pemerintah Kabupaten Konawe berkomitmen untuk memenuhi kewajiban mandatory dan selanjutnya fokus pada agenda dan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya.

#### **2. *Anggaran Pendapatan Belanda Negara (APBN) dan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara;***

Pemerintah Kabupaten Konawe akan memaksimalkan peran APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendorong pembiayaan bagi pembangunan daerah yang bersifat strategis dan sektoral. Peran APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara ini akan disinkronkan dan diintegrasikan dengan prioritas daerah melalui APBD Kabupaten Konawe.

### 3. Memaksimalkan peran investasi;

Pemerintah Kabupaten Konawe sangat menyadari bahwa untuk mewujudkan akselerasi pembangunan yang lebih cepat maka diperlukan peran swasta. Peran swasta dalam pembangunan dapat diwujudkan melalui penanaman investasi. Investasi dapat menjadi katalisator yang sangat mumpuni dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah.

Konsep “**GEMILANG**” ini secara etimologi dapat juga diartikan sebagai tujuan bersama pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Konawe sebagai daerah yang maju dan mandiri dari segala aspek, dimana masyarakatnya dalam keadaan sejahtera dan memiliki daya saing dan ketahanan ekonomi yang kuat.

*Grand strategy* **GEMILANG** selanjutnya diterjemahkan melalui program-program unggulan yang akan diinternalisasikan kedalam Rencana Strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe yang akan menjadi program wajib bagi setiap OPD yang memiliki keterkaitan dengan program-program unggulan tersebut. Program-program GEMILANG dirancang saling memiliki korelasi antar satu sama lain dan masing-masing memiliki peran dalam mendukung tercapai tujuan daerah serta memiliki daya dukung bagi pembangunan daerah. Sistematis kerja program-program unggulan GEMILANG terhubung seperti skema dibawah ini.

Gambar 6.1

Skema Keterkaitan Program-Program Unggulan Gemilang



Program-program unggulan **GEMILANG** dijabarkan sebagai berikut :

**A. Program Utama**

1. Pembangunan sektor kesehatan :
  - a) 1 desa/kelurahan 1 poskesdes 1 dokter 2 bidan, 2 perawat, 1 tenaga kesehatan masyarakat dan 1 tenaga kesehatan lingkungan.
  - b) Memberikan subsidi bagi semua layanan di puskesmas dan BLUD Rumah Sakit Kabupaten.
  - c) Menyediakan susu dan makanan balita bersubsidi di setiap puskesmas.
  - d) Menjadikan BLUD Rumah Sakit Kabupaten Konawe yang saat ini sementara dalam tahap pembangunan sebagai rumah sakit rujukan.
  - e) Asuransi kematian.
2. Pembangunan sektor pendidikan :
  - a) Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa D3 dan S1 di semua PTN di Kendari maupun PTS yang direkomendasikan.
  - b) Memberikan bantuan biaya penelitian/penyusunan tugas akhir untuk mahasiswa D3, S1, S2 dan S3.
  - c) Membangun asrama mahasiswa di Kendari.
  - d) Memberikan beasiswa khusus bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 jurusan peternakan.
  - e) Memberikan beasiswa khusus bagi mahasiswa S1 jurusan kedokteran.
  - f) Memberikan beasiswa bagi putra/putri daerah untuk pendidikan kedokteran dan spesialis kedokteran.
  - g) Gratis biaya pendidikan S2 dan S3 pada jurusan peternakan, perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan, pertambangan, metalurgi pada perguruan tinggi yang direkomendasikan.
  - h) Menyediakan dana bagi pelaksanaan riset unggulan terapan di bidang pertanian dan peternakan.
3. Pembangunan sektor pertanian dan peternakan :
  - a) Pertanian
    - Revitalisasi sarana dan prasarana sumber daya air.
    - Mekanisasi pertanian.



- Diversifikasi pertanian.
- Intensifikasi pertanian. (usulan OPD)
- Penguatan kelembagaan ekonomi petani.
- Menyediakan akses permodalan dengan lembaga-lembaga keuangan.
- Menyediakan insentif khusus bagi petani berprestasi.
- Asuransi Pertanian. (usulan OPD)

b) Peternakan

- Memberikan bantuan 4 ekor sapi rumah tangga petani peternak dan buruh tani. (Keluarga prasejahtera) ±22.000 KK Prasejahtera
- Memberikan insentif bagi rumah tangga yang telah memiliki sapi. (IB Gratis, TPP untuk tenaga fungsional)
- Memberikan bantuan bibit rumput gajah/lainnya untuk ditanami di halaman pekarangan atau lahan-lahan kosong sebagai pakan ternak.
- Bantuan layanan kesehatan gratis untuk ternak sapi.
- Membeli sapi-sapi penduduk yang telah berumur 2 tahun sesuai dengan harga pasar. (inti plasma)
- Membangun ranah untuk peternakan dan penggemukan yang dapat menampung minimal 100.000 ekor sapi, baik yang dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah maupun sapi-sapi yang dibeli dari penduduk.
- Pada tahun 2023 telah terbangun pabrik pengolahan daging sapi.
- Perbaikan sarana dan prasarana. (usul OPD)
- Penambahan petugas teknis peternakan. (usul OPD)

4. Pembangunan sektor industry :

- a) Mempercepat proses pembangunan inprastruktur kawasan industry morosi.
- b) Mendorong perusahaan daerah Konawe sebagai perusahaan kawasan industry Morosi.
- c) Melakukan promosi dalam skala nasional dan internasional guna menggaet investor yang nantinya diharapkan akan membangun perusahaan industry dalam Kawasan Industry Morosi yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Konawe.

- d) Menetapkan Kawasan Industri Morosi sebagai pusat pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, kelautan dan sumber daya alam lainnya yang berasal dari Konawe.

## **B. Program Pendukung Utama**

1. Infrastruktur :
  - a) 80% ruas jalan Kabupaten dan jalan transmigrasi telah teraspal pada tahun 2023.
  - b) Revitalisasi kawasan perkotaan Unaaha.
  - c) Pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani.
  - d) Rehabilitasi dan pembangunan dermaga/pelabuhan rakyat. (dermaga penyeberangan pulau bokori)
  - e) Rehabilitasi sarana dan prasarana pengairan/bendungan.
  - f) Pembangunan infrastruktur olahraga dan kepariwisataan. (penataan kawasan wisata soropia)
2. Ekonomi dan lingkungan hidup :
  - a) Memfasilitasi usaha-usaha pertanian, perikanan dan kelautan meliputi peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, peralatan/teknologi, sarana prasarana dan finansial.
  - b) Mendirikan Bank Rakyat Konawe untuk memfasilitasi pembiayaan dan bantuan keuangan lainnya pada sektor peternakan, pertanian, perikanan dan kelautan.
  - c) Melakukan penghijauan pada daerah hulu dan sepanjang aliran sungai.
  - d) Revitalisasi, pengembangan dan promosi pariwisata alam, sejarah, budaya dan kuliner.
  - e) Melakukan evaluasi pelaksanaan izin-izin investasi di Konawe, khususnya dibidang pertambangan dan perkebunan.
3. Kebudayaan :
  - a) Melakukan penulisan sejarah dan kebudayaan tolaki.
  - b) Menyusun kamus lengkap bahasa tolaki.
  - c) Pengenalan diri kalosara dalam bentuk muatan local pada tingkat SD dan SLTP.
  - d) Menyelenggarakan festival lakidende setiap tahun.
  - e) Mempromosikan kebudayaan tolaki di manca Negara.

## **C. Program pendukung wajib**

1. Menerapkan prinsip efisien, efektifitas dan akuntabilitas dalam pelayanan public.

2. Melaksanakan prinsip *reward and punishment* (penghargaan dan sanksi) bagi setiap ASN.
3. Memberikan TPP kepada ASN secara selektif.
4. Melakukan evaluasi dan penataan ASN.
5. Melakukan penataan, pengawasan dan penertiban penggunaan aset-aset daerah.
6. Menerima calon pegawai negeri/kontrak daerah bagi masyarakat Konawe.
7. Penyesuaian honor kepala desa, perangkat desa dan tenaga honorer.

#### **D. Program jaminan sosial**

1. Memberikan bantuan biaya perumahan bagi warga miskin meliputi nelayan, petani dan kelompok sosial rentan lainnya.
2. Memberikan bantuan biaya perumahan bagi tenaga kesehatan, tenaga pendidik dan penyuluh pertanian, perikanan dan kelautan.

#### **6.2 Strategi**

Misi ke-1 adalah ***Menjadikan Sektor Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Serta Kawasan Industry Sebagai Program Utama Pembangunan Konawe.*** Urusan yang terkait dengan misi ini adalah :

- 1) Urusan Pendidikan.
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Urusan Kesehatan. OPD pelaksana :
  - a. Dinas Kesehatan.
  - b. BLUD RSUD.
- 3) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. OPD pelaksana :
  - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.
- 4) Urusan Administrasi Pemerintahan.
  - a. Pemerintah Kecamatan.
- 5) Urusan Penelitian dan Pengembangan.
  - a. Badan Penelitian dan Pengembangan.
- 6) Urusan Transmigrasi.
  - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 7) Urusan Penanaman Modal.
  - a. Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- 8) Urusan Pertanian.

- a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 9) Urusan Kelautan dan Perikanan.
  - a. Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 10) Urusan Tanaman Pangan.
  - b. Dinas Ketahanan Pangan.
- 11) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 12) Urusan Lainnya.
  - a. Badan Narkotika.
  - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Strategi yang digunakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pada misi ke-1 adalah :

Tabel 6.1

Tabel Rumusan Strategi Terhadap Sasaran Pembangunan Pada Misi-1

No.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
1.	MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE	1.1 Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  1.1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh	1. Menyediakan akses dan layanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin di BLUD RSUD dan seluruh Puskesmas melalui subsidi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin serta menyediakan asuransi kematian bagi masyarakat miskin  2. Mengintensifkan pelaksanaan tindakan preventif dan antisipatif terhadap resiko berbagai penyakit serta meningkatkan	1. Urusan Kesehatan  a. Dinas Kesehatan b. BLUD RSUD  1. Urusan Kesehatan a. Dinas Kesehatan b. BLUD RSUD

No.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
			tindakan penanggulangan penyakit secara cepat	
		1.1.2 Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dijenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs	<p>3. Mendorong sumber daya lainnya untuk memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat</p> <p>1. Menyediakan sarana dan prasarana kelas yang memadai serta memberikan insentif tambahan bagi guru-guru yang bertugas di daerah-daerah terpencil</p> <p>2. Menyediakan tambahan subsidi pendidikan bagi siswa/siswi usia sekolah yang teridentifikasi putus sekolah</p> <p>3. Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan paket a dan paket b bagi masyarakat yang belum mengenyam pendidikan formal</p>	<p>1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>a. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB</p> <p>2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>a. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB</p> <p>3. Urusan Lainnya</p> <p>a. Badan Narkotika</p> <p>1. Urusan Pendidikan</p> <p>a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>2. Urusan Perpustakaan</p> <p>a. Dinas Perpustakaan dan Arsip</p> <p>1. Urusan Pendidikan</p> <p>a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>1. Urusan Pendidikan</p> <p>a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>

No.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
			4. Memacu kompetisi dan minat belajar melalui pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa berprestasi dan mahasiswa berprestasi terutama untuk jurusan pertanian, peternakan dan kesehatan	1. Urusan Pendidikan a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.2 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah 1.2.1 Meningkatnya produktifitas daerah pada sektor-sektor unggulan sehingga menjadikan Konawe sentra produksi beras dan sentra produksi ternak	1. Mendorong berkembangnya peran sektor unggulan yakni pertanian, peternakan dan perikanan melalui dukungan "Program Sejuta Ton Beras, Program Sejuta Sapi dan Program Seribu Kolam" beserta pendanaannya untuk menjadikan Kabupaten Konawe sebagai daerah "sentra produksi beras" dan "sentra produksi ternak" nasional. Program-program strategis yang didorong bersifat memberi nilai tambah dan dapat terlaksana secara berkesinambungan.	1. Urusan Pertanian a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan b. Dinas Peternakan dan kesehatan hewan 2. Urusan Kelautan dan Perikanan a. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. Urusan Ketahanan Pangan a. Dinas Ketahanan Pangan 4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 5. Urusan Transmigrasi a. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 6. Urusan Administrasi Pemerintahan

No.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
				a. Pemerintah Kecamatan 7. Urusan Administrasi Pemerintahan a. Pemerintah Kecamatan 8. Urusan Lainnya a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1.2.2 Meningkatnya realisasi investasi daerah	2. Memaksimalkan peran perusahaan daerah dalam upaya menjembatani terbangunnya industri dibidang pertanian dalam arti luas  1. Memberi kemudahan bagi para calon investor untuk mengakses berbagai informasi mengenai potensi investasi daerah serta menyediakan fasilitas dan layanan yang exelent pada instansi yang berwenang.	Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Konawe  1. Urusan Penanaman Modal a. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2. Urusan Lainnya a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Misi ke-2 adalah ***Menjadikan Sektor Infrastruktur, Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Serta Kebudayaan Sebagai Program Pendukung Utama Pembangunan Konawe.*** Urusan yang terkait dengan misi ini adalah :

- 1) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  - a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 2) Urusan Perhubungan. OPD pelaksana :
  - a. Dinas Perhubungan.

- 3) Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. OPD pelaksana :
  - a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 4) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. OPD pelaksana :
  - a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 5) Urusan Perindustrian. OPD pelaksana :
  - a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 6) Urusan Perdagangan. OPD pelaksana :
  - a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 7) Urusan Pemberdayaan Perempuan. OPD pelaksana :
  - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 8) Urusan Dinas Tenaga Kerja. OPD pelaksana :
  - a. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- 9) Urusan Pariwisata. OPD pelaksana :
  - a. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata.
- 10) Urusan Lingkungan Hidup. OPD pelaksana :
  - a. Dinas Lingkungan Hidup.
- 11) Urusan Kebudayaan. OPD pelaksana :
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Strategi yang digunakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pada misi ke-2 adalah sebagai berikut :



Tabel 6.2

Tabel Rumusan Strategi Terhadap Sasaran Pembangunan Pada Misi-2

No.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
2.	MENJADIKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBUDAYAAN SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE	<p>2.1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat</p> <p>2.1.1 Meningkatnya akses infrastruktur pada berbagai sektor dalam rangka mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat</p>	<p>1. Membangun sarana dan prasarana infrastruktur jalan beserta jaringannya pada daerah-daerah potensial untuk mendukung berkembangnya aktifitas sektor unggulan</p> <p>2. Merevitalisasi jaringan irigasi yang ada sehingga dapat berfungsi dengan baik</p> <p>3. Membangun jaringan drainase yang terintegrasi di Kota Unaaha dengan sistem box culvert</p> <p>4. Penataan kawasan permukiman dan pemberian bantuan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni</p>	<p>1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>2. Urusan Perhubungan a. Dinas Perhubungan</p> <p>1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>

No.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
				dan Kawasan Permukiman
			5. Membangun sanitasi untuk rumah-rumah penduduk yang belum memiliki sanitasi layak	1. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		2.1.2 Tersedianya infrastruktur usaha mikro untuk membuka ruang usaha bagi masyarakat	6. Membangun sistem jaringan air bersih dengan memanfaatkan potensi gravitasi dan potensi air tanah setempat	a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1. Membangun pasar dan meningkatkan intensitas pelaksanaan jual beli dipasar serta membangun jejaring ekspor baik pada skala regional, nasional maupun internasional agar terbuka akses ekspor bagi komoditi lokal	1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				1. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				2. Urusan Perindustrian a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				3. Urusan Perdagangan a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				4. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
				a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2. Memfasilitasi para pelaku UKM, UMKM dan IKM dengan pihak perbankan atau lembaga penjamin modal lainnya termasuk pemerintah agar memperoleh fasilitas bantuan permodalan	5. Urusan Tenaga Kerja a. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 6. Urusan Pariwisata a. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 1. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Urusan Perindustrian a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3. Urusan Perdagangan a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 4. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			3. Meningkatkan kompetensi para	a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Urusan Tenaga Kerja

No.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
			pelaku usaha maupun calon tenaga kerja melalui penyediaan fasilitas pendidikan ketenagakerjaan dan wirausaha	a. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2. Urusan Pariwisata
		2.2 <i>Terwujudnya pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup</i> 2.2.1 Terjaganya kualitas lingkungan hidup	4. Membangun kawasan rest area dan kawasan perdagangan khusus (kawasan Inolobungadue Central Park) dengan konsep modern pada daerah-daerah potensial yang menjadi jalur perlintasan utama  1. Meningkatkan intensitas pelaksanaan pembersihan lingkungan dengan melibatkan peran kelurahan hingga ketingkat RT dan RW dalam pengelolaan sampah serta merevitalisasi dan membangun	a. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 1. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Urusan Perindustrian a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3. Urusan Perdagangan a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  1. Urusan Lingkungan Hidup a. Dinas Lingkungan Hidup

No.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
			kawasan-kawasan publik yang modern dan representatif didalam Kota Unaaha	
			2. Melakukan pengujian kualitas lingkungan secara berkala	1. Urusan Lingkungan Hidup a. Dinas Lingkungan Hidup
		2.3 <i>Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konawe</i> 2.3.1 <i>Terimplementasinya nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai identitas masyarakat</i>	3. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat di daerah aliran DAS dalam rangka menjaga ekosistem  1. Menginternalisasikan kurikulum muatan lokal (budaya tolaki) pada tingkat TK/PAUD, SD dan SMP 2. Penyelenggaraan festival budaya tolaki setiap tahunnya	1. Urusan Lingkungan Hidup a. Dinas Lingkungan Hidup  1. Urusan Kebudayaan a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  1. Urusan Kebudayaan a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi ke-3 adalah ***Menjadikan Pembangunan Birokrasi Yang Handal Dan Pelayanan Public Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel Sebagai Program Pendukung Wajib***. Urusan yang terkait langsung dengan misi ini adalah :

- 1) Urusan Kepegawaian :
  - a. Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan.
- 2) Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil :
  - a. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3) Urusan Penanaman Modal :
  - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 4) Urusan Komunikasi dan Informatika. OPD pelaksana :

- a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- 5) Urusan Keuangan. OPD pelaksana :
  - a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
  - b. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- 6) Urusan Perencanaan. OPD pelaksana :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 7) Urusan Pengawasan. OPD pelaksana :
  - a. Inspektorat Kabupaten Konawe.
- 8) Urusan Pertanian. OPD pelaksana :
  - a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
  - b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 9) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. OPD pelaksana :
  - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 10) Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. OPD pelaksana :
  - a. Dinas Satpol dan Linmas.
- 11) Urusan Lainnya. OPD pelaksana :
  - a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
  - b. Badan Penanggulangan Bencana.
  - c. Badan Narkotika.
  - d. Kantor Korpri.
- 12) Urusan Kearsipan. OPD pelaksana :
  - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 13) Urusan Administrasi Pemerintahan. OPD pelaksana :
  - a. Sekretariat DPRD.
  - b. Sekretariat Daerah.
  - c. Pemerintah Kecamatan.
- 14) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. OPD pelaksana :
  - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Strategi yang digunakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pada misi ke-3 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3

Tabel Rumusan Strategi Terhadap Sasaran Pembangunan Pada Misi-3

NO.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
3.	MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIC YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB	<p>3.1 <i>Terwujudnya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe</i></p> <p>3.1.1 Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik</p>	<p>1. Menyediakan gedung kantor yang layak beserta perlengkapannya untuk memenuhi standarisasi pelayanan publik</p> <p>2. Melaksanakan diklat penjenjangan bagi seluruh pejabat struktural secara berkala setiap tahunnya</p>	<p>1. Semua Urusan</p> <p>1. Urusan Kepegawaian</p> <p>a. BKD dan Diklat</p> <p>2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>3. Urusan Lainnya</p> <p>a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa</p> <p>a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</p> <p>5. Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</p> <p>a. Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>6. Urusan Kearsipan</p> <p>a. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p>
		<p>3.1.2 Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek</p>	<p>1. Melakukan pengawasan internal secara disiplin untuk memastikan kepatuhan aparatur dan</p>	<p>1. Urusan Pengawasan</p> <p>a. Inspektorat Kabupaten</p> <p>2. Urusan Keuangan</p>

NO.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
		Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)	<p>organsiasi terhadap peraturan perundangan yang ada</p> <p>2. Membangun aplikasi yang memudahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis on line yang dapat terintegrasi dan pengawasannya terpusat pada instansi yang berwenang</p>	<p>a. BPKAD</p> <p>b. BP2RD</p> <p>3. Urusan Perencanaan</p> <p>a. Bappeda</p> <p>4. Urusan Komunikasi dan Informatika</p> <p>a. Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>5. Urusan Administrasi Fungsi Penunjang</p> <p>a. Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1. Urusan Pengawasan</p> <p>a. Inspektorat Kabupaten</p> <p>2. Urusan Keuangan</p> <p>a. BPKAD</p> <p>b. BP2RD</p> <p>3. Urusan Perencanaan</p> <p>a. Bappeda</p> <p>4. Urusan Komunikasi dan Informatika</p> <p>a. Dinas Komunikasi dan Informatika</p>

Misi ke-4 adalah ***Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Program Jaminan Sosial***. Urusan yang terkait langsung dengan misi ini adalah :

- 1) Urusan Sosial :
  - a. Dinas Sosial.

Strategi yang digunakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pada misi ke-4 adalah sebagai berikut :



**Tabel 6.4**  
**Tabel Rumusan Strategi Terhadap Sasaran Pembangunan Pada Misi-4**

No.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	5	5
4.	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL	<p>4.1 Meningkatnya kesejahteraan sosial</p> <p>4.1.1 Menurunnya jumlah penduduk miskin</p>	<p>1. Memberikan jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu sambil berupaya menggerakkan minat berusaha dan berwirausahaan melalui pemberian bantuan permodalan dan bibit sapi bagi keluarga miskin atau bantuan lainnya yang sesuai dengan karakteristik lingkungannya</p>	<p>1. Urusan Sosial</p> <p>a. Dinas Sosial</p>

Tabel 6.5  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan  
Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023

**VISI “KONAWA YANG MAJU DAN MANDIRI TAHUN 2023”**

NO.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
1.	MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KONAWA	<p>1.1 Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p> <p>1.1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh</p>	<p>1. Menyediakan akses dan layanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin di BLUD RSUD dan seluruh Puskesmas melalui subsidi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin serta menyediakan asuransi kematian bagi masyarakat miskin</p> <p>2. Mengintensifkan pelaksanaan tindakan preventif dan antisipatif terhadap resiko berbagai penyakit serta meningkatkan tindakan penanggulangan penyakit secara cepat</p> <p>3. Mendorong sumber daya lainnya untuk memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat</p>	<p>1. Urusan Kesehatan</p> <p>a. Dinas Kesehatan</p> <p>b. BLUD RSUD</p> <p>1. Urusan Kesehatan</p> <p>a. Dinas Kesehatan</p> <p>b. BLUD RSUD</p> <p>1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>a. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB</p> <p>2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>a. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB</p> <p>3. Urusan Lainnya</p> <p>a. Badan Narkotika</p>
		1.1.2 Meningkatnya angka partisipasi pendidikan	1. Menyediakan sarana dan prasarana	1. Urusan Pendidikan

NO.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
		dijenzang pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs	<p>kelas yang memadai serta memberikan insentif tambahan bagi guru-guru yang bertugas di daerah-daerah terpencil</p> <p>2. Menyediakan tambahan subsidi pendidikan bagi siswa/siswi usia sekolah yang teridentifikasi putus sekolah</p> <p>3. Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan paket a dan paket b bagi masyarakat yang belum mengenyam pendidikan formal</p> <p>4. Memacu kompetisi dan minat belajar melalui pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa berprestasi dan mahasiswa berprestasi terutama untuk jurusan pertanian, peternakan dan kesehatan</p>	<p>a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>2. Urusan Perpustakaan</p> <p>a. Dinas Perpustakaan dan Arsip</p> <p>1. Urusan Pendidikan</p> <p>a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>1. Urusan Pendidikan</p> <p>a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>1. Urusan Pendidikan</p> <p>a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>
		<p>1.2 <i>Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah</i></p> <p>1.2.1 Meningkatkan produktifitas daerah pada sektor-sektor unggulan sehingga menjadikan Konawe sentra produksi beras dan sentra produksi ternak</p>	<p>1. Mendorong berkembangnya peran sektor unggulan yakni pertanian, peternakan dan perikanan melalui dukungan "Program Sejuta Ton Beras, Program Sejuta Sapi dan Program Seribu Kolam" beserta pendanaannya untuk menjadikan Kabupaten Konawe sebagai daerah "sentra produksi beras" dan "sentra produksi ternak" nasional. Program-program strategis yang didorong bersifat memberi nilai tambah dan dapat terlaksana secara berkesinambungan.</p>	<p>1. Urusan Pertanian</p> <p>a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</p> <p>b. Dinas Peternakan dan kesehatan hewan</p> <p>2. Urusan Kelautan dan Perikanan</p> <p>a. Dinas Kelautan dan Perikanan</p> <p>3. Urusan Ketahanan Pangan</p> <p>a. Dinas Ketahanan Pangan</p> <p>4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa</p> <p>a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>

NO.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
		1.2.2 Meningkatkan realisasi investasi daerah	<p>2. Memaksimalkan peran perusahaan daerah dalam upaya menjembatani terbangunnya industri dibidang pertanian dalam arti luas</p> <p>1. Memberi kemudahan bagi para calon investor untuk mengakses berbagai informasi mengenai potensi investasi daerah serta menyediakan fasilitas dan layanan yang exelent pada instansi yang berwenang.</p>	<p>5. Urusan Transmigrasi</p> <p>a. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja</p> <p>6. Urusan Administrasi Pemerintahan</p> <p>a. Pemerintah Kecamatan</p> <p>7. Urusan Administrasi Pemerintahan</p> <p>a. Pemerintah Kecamatan</p> <p>8. Urusan Lainnya</p> <p>a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Konawe</p> <p>1. Urusan Penanaman Modal</p> <p>a. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</p> <p>2. Urusan Lainnya</p> <p>a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p>
2.	MENJADIKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBUDAYAAN SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE	<p>2.1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat</p> <p>2.1.1 Meningkatnya akses infrastruktur pada berbagai sektor dalam rangka mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat</p>	<p>1. Membangun sarana dan prasarana infrastruktur jalan beserta jaringannya pada daerah-daerah potensial untuk mendukung berkembangnya aktifitas sektor unggulan</p>	<p>1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>2. Urusan Perhubungan</p> <p>a. Dinas Perhubungan</p>

NO.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
			2. Merevitalisasi jaringan irigasi yang ada sehingga dapat berfungsi dengan baik  3. Membangun jaringan drainase yang terintegrasi di Kota Unaaha dengan sistem box culvert  4. Penataan kawasan permukiman dan pemberian bantuan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni	1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman  1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman  1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2.1.2 Tersedianya infrastruktur usaha mikro untuk membuka ruang usaha bagi masyarakat	5. Membangun sanitasi untuk rumah-rumah penduduk yang belum memiliki sanitasi layak  6. Membangun sistem jaringan air bersih dengan memanfaatkan potensi gravitasi dan potensi air tanah setempat  1. Membangun pasar dan meningkatkan intensitas pelaksanaan jual beli dipasar serta membangun jejaring ekspor baik pada skala regional, nasional maupun internasional agar terbuka akses ekspor bagi komoditi lokal	1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman  1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman  1. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  2. Urusan Perindustrian a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  3. Urusan Perdagangan a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  4. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  a. Dinas Pemberdayaan
				a. Dinas Pemberdayaan

NO.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
				Perempuan dan Perlindungan Anak 5. Urusan Tenaga Kerja a. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 6. Urusan Pariwisata
			2. Memfasilitasi para pelaku UKM, UMKM dan IKM dengan pihak perbankan atau lembaga penjamin modal lainnya termasuk pemerintah agar memperoleh fasilitas bantuan permodalan  3. Meningkatkan kompetensi para pelaku usaha maupun calon tenaga kerja melalui penyediaan fasilitas pendidikan ketenagakerjaan dan wirausaha  4. Membangun kawasan rest area dan kawasan perdagangan khusus (kawasan Inolobunggadue Central Park) dengan konsep modern pada daerah-daerah potensial yang menjadi jalur perlintasan utama	a. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 1. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Urusan Perindustrian a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 3. Urusan Perdagangan a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 4. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Urusan Tenaga Kerja a. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2. Urusan Pariwisata a. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 1. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Urusan Perindustrian a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
		<p>2.2 <i>Terwujudnya pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup</i></p> <p>2.2.1 Terjaganya kualitas lingkungan hidup</p> <p>2.3 <i>Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konaawe</i></p> <p>2.3.1 Terimplementasinya nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai identitas masyarakat</p>	<p>1. Meningkatkan intensitas pelaksanaan pembersihan lingkungan dengan melibatkan peran kelurahan hingga tingkat RT dan RW dalam pengelolaan sampah serta merevitalisasi dan membangun kawasan-kawasan publik yang modern dan representatif didalam Kota Unaaha</p> <p>2. Melakukan pengujian kualitas lingkungan secara berkala</p> <p>3. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat di daerah aliran DAS dalam rangka menjaga ekosistem</p> <p>1. Menginternalisasikan kurikulum muatan lokal (budaya tolaki) pada tingkat TK/PAUD, SD dan SMP</p> <p>2. Penyelenggaraan festival budaya tolaki setiap tahunnya</p>	<p>3. Urusan Perdagangan</p> <p>a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>1. Urusan Lingkungan Hidup</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>1. Urusan Lingkungan Hidup</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>1. Urusan Lingkungan Hidup</p> <p>a. Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>1. Urusan Pendidikan</p> <p>a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>1. Urusan Pendidikan</p> <p>a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>
3.	MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIC YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB	3.1 <i>Terwujudnya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konaawe</i>		

NO.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
		3.1.1 Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	1. Menyediakan gedung kantor yang layak beserta perlengkapannya untuk memenuhi standarisasi pelayanan publik  2. Melaksanakan diklat penjenjangan bagi seluruh pejabat struktural secara berkala setiap tahunnya	1. Semua Urusan  1. Urusan Kepegawaian a. BKD dan Diklat 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Urusan Lainnya a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 5. Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat a. Satuan Polisi Pamong Praja 6. Urusan Kearsipan
		3.1.2 Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)	1. Melakukan pengawasan internal secara disiplin untuk memastikan kepatuhan aparatur dan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada	a. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1. Urusan Pengawasan a. Inspektorat Kabupaten 2. Urusan Keuangan a. BPKAD b. BP2RD
				3. Urusan Perencanaan a. Bappeda 4. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Dinas Komunikasi dan Informatika

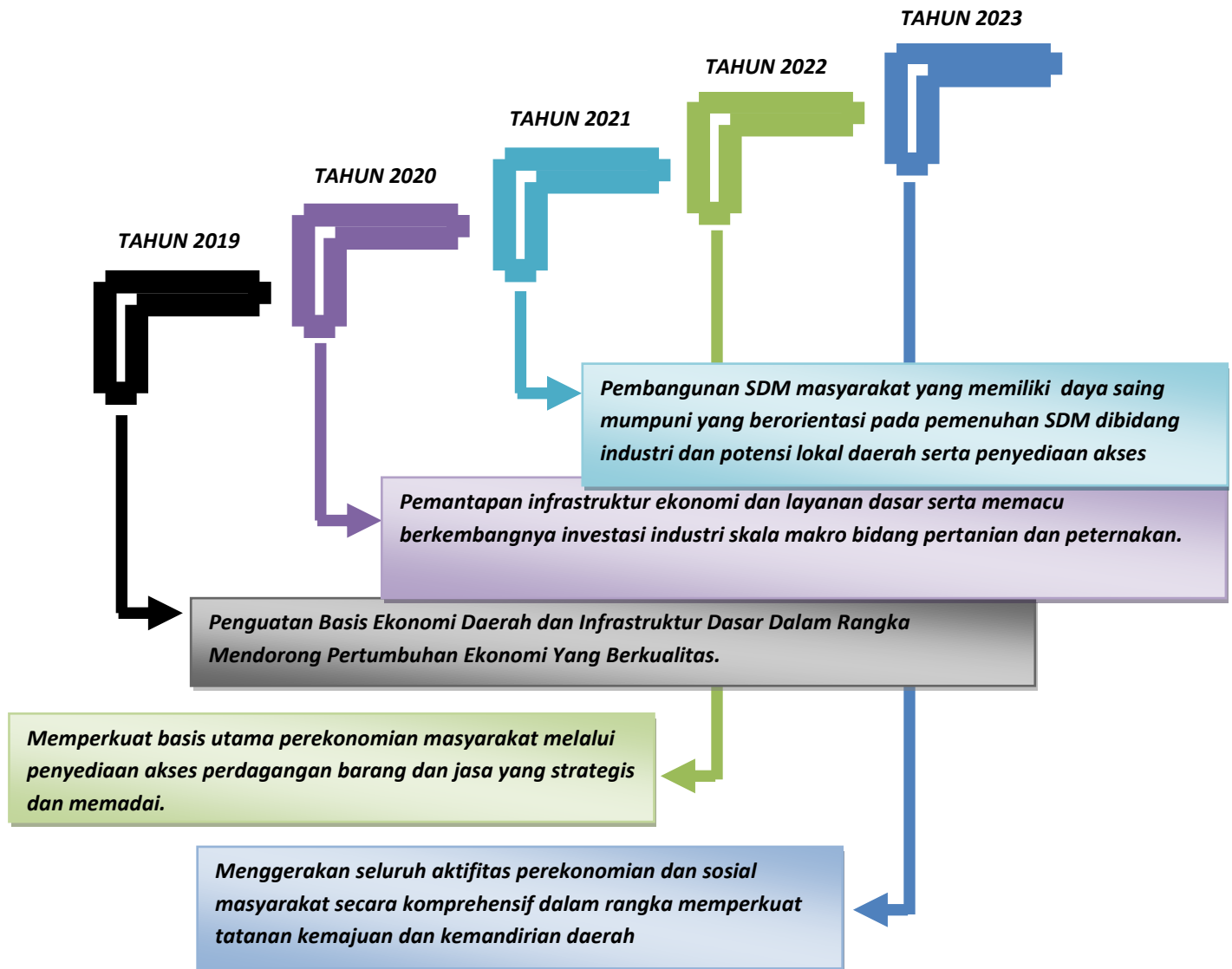


NO.	MISI	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	URUSAN/OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
			2. Membangun aplikasi yang memudahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis on line yang dapat terintegrasi dan pengawasannya terpusat pada instansi yang berwenang	5. Urusan Administrasi Fungsi Penunjang a. Dinas Komunikasi dan Informatika  1. Urusan Pengawasan a. Inspektorat Kabupaten 2. Urusan Keuangan a. BPKAD b. BP2RD 3. Urusan Perencanaan a. Bappeda 4. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL	4.1 Meningkatnya kesejahteraan sosial  4.1.1 Menurunnya jumlah penduduk miskin	1. Memberikan jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu sambil berupaya menggerakkan minat berusaha dan berwirausahaan melalui pemberian bantuan permodalan dan bibit sapi bagi keluarga miskin atau bantuan lainnya yang sesuai dengan karakteristik lingkungannya	1. Urusan Sosial a. Dinas Sosial

### **6.3 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Konawe pada tahun 2018-2023 disusun untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkelanjutan maka terlebih dahulu disusun tema/fokus pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018-2023 maka ditetapkan tema/fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Konawe dengan urutan sebagai berikut :

Gambar 6.2  
Tema/Fokus Pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2019-2023



Dalam rangka memberi bentuk konkrit terhadap usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahapan sebelumnya maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Konawe tahun 2018-2023 sebagai berikut.

Tabel 6.6  
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023

<b>Arah Kebijakan</b>				
<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Meningkatkan daya dukung pelayanan dasar terutama bagi masyarakat miskin dan optimalisasi berbagai potensi pertanian dan peternakan serta penyediaan akses infrastruktur yang memadai dengan menggerakkan secara bersama-sama potensi pembiayaan baik dari instrumen APBD maupun Dana Desa</b>	<b>Melakukan promosi terhadap potensi sumber daya yang ada terutama potensi pengembangan industri pertanian dan industri peternakan dengan menyediakan informasi dan menjamin kemudahan akses berusaha bagi para calon investor yang diikuti dengan pemantapan infrastruktur dasar untuk mendukung aktifitas investasi dalam daerah. Untuk mendukung pengembangan UKM, UMKM dan IKM yang berdaya saing dilakukan dengan memperluas akses fasilitas</b>	<b>Semakin mengintensifkan program jaminan sosial bagi masyarakat sambil mendorong kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan SDM yang berorientasi pada penyediaan tenaga kerja dibidang industri skala besar dan memberikan bantuan bibit sapi bagi keluarga miskin serta mengintensifkan program-program pertanian sambil melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat.</b>	<b>Memperluas akses perdagangan barang dan jasa pada skala lokal daerah dengan meningkatkan intensitas perdagangan dipasar dan membangun kawasan perdagangan khusus serta memfasilitasi terbukanya akses perdagangan bagi komoditi lokal atau produk IKM keluar daerah dengan menggandeng peran pemerintah daerah lainnya dan pihak swasta.</b>	<b>Memastikan sustainability program-program unggulan berjalan secara komprehensif dengan meningkatkan peran instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan program-program unggulan yang ada.</b>

<b>Arah Kebijakan</b>				
<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<i>permodalan bagi para pelaku usaha dengan lembaga BANK atau lembaga permodalan lainnya.</i>			

#### **6.4 Program Pembangunan Daerah**

Program pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja capaiannya (outcome) diperoleh dari hasil analisis terhadap strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah dirumuskan diatas. Sementara penetapan pagu indikatif didasarkan atas target capaian kinerja dan analisis terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja program (outcome).

**Tabel 6.7**  
**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2018 –2023**  
**Kabupaten Konawe**

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN								
1.1	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,72	71,25		72,50		
1.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,76	69,90		70,29		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	2.894.010.000,00	100,00	3.183.411.000,00	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
		Persentase Balita yang ditimbang di Posyandu	%	72,06	77,00		83,00		DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
		Persentase balita usia 6-59 bulan yang mendapatkan kapsul vitamin A	%	90,08	92,00		94,00		DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
		Persentase ibu nifas yang mendapat 90 tablet Fe selama hamil	%	65,05	70,00		80,00		DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
		Persentase rumah tangga ber-PHBS	%	52,00	62,00		72,00		DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi TBC	%	9,01	7,01	1.388.180.000,00	5,01	1.132.630.000,00	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
		Terkendalinya HIV pada populasi dewasa	Kasus	-	-		-		DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
		Cakupan desa/kelurahan UCI	%	82,00	85,00		89,00		DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
		Persentase bayi yang diimunisasi campak	%	86,97	90,00		93,00		DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan	%	100,00	100,00	7.998.685.000,00	100,00	4.595.150.000,00	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program Keluarga Berencana	Persentase Pelaksanaan Program Keluarga Berencana	%	0,95	95,60	12.213.803.000,00	96,00	12.080.632.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Pelaksanaan Program Pelayanan	%	95,00	96,00	155.000.000,00	97,00	127.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase pembinaan Kelompok Kerja kader Tribina, PIK-R/M, dan UPPKS	%	94,00	95,00	152.000.000,00	96,00	282.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase Wilayah Bebas Narkoba	%	65,52	79,31	43.400.000,00	86,21	48.074.180,00	BADAN NARKOTIKA
	Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	Persentase Wilayah Bebas Narkoba	%	65,52	79,31	101.650.000,00	86,21	112.597.705,00	BADAN NARKOTIKA

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Rehabilitasi Pecandu Narkoba	Persentase Rehabilitasi Pecandu Narkoba	%	100,00	100,00	13.700.000,00	100,00	15.175.490,00	BADAN NARKOTIKA
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang telah mengikuti proses akreditasi	%	34,48	58,62	52.995.029.856,00	100,00	48.536.798.599,00	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan dasar	%	100,00	100,00	1.591.265.000,00	100,00	2.189.810.000,00	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase ketersediaan puskesmas yang layak	%	100,00	100,00	91.793.244.998,00	100,00	79.758.554.999,00	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase pembinaan bagi aparatur kesehatan ditingkat Puskesmas	%	100,00	100,00	204.200.000,00	100,00	272.550.000,00	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	%	100,00	-	-	-	-	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Presentase peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	%	100,00	-	-	-	-	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (Bawah dua Tahun)	%	29,06	26,15	36.500.000,00	23,53	34.000.000,00	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyrakat Berprilaku Masyarakat Hidup Bersih Dan Sehat	%	100,00	100,00	-	100,00	-	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase alat kesehatan dan penunjang melalui dana DAK dan APBD	%	100,00	100,00	30.936.714.820,00	100,00	14.973.016.467,00	RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN
		Persentase Pengadaan alat kesehatan dan penunjang	%	100,00	100,00	-	-	-	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian Standar akreditasi Paripurna	%	100,00	100,00	630.000.000,00	100,00	-	RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN
	Program Peningkatan Pelayanan kesehatan BLUD Rumah Sakit	Persentase Jumlah Indikator SPM yang dilaksanakan pada Bidang TU	%		100,00	71.930.600.000,00	100,00	65.100.000.000,00	RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN
		Persentase Jumlah Indikator SPM yang dilaksanakan pada Bidang Pelayanan Medik	%		100,00		100,00		
		Persentase Jumlah Indikator SPM yang dilaksanakan pada Bidang Perencanaan	%		100,00		100,00		
		Persentase Jumlah Indikator SPM yang dilaksanakan pada Bidang Keperawatan	%		100,00		100,00		
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan kesehatan rujukan bagi Pasien Tidak mampu	%	100,00	100,00	600.000.000,00	100,00	750.000.000,00	RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2	Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dijenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	13,03		13,09		
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,94	8,64		8,67		
	Progrm Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana PAUD	%	4,23	15,62	1.508.025.300,00	27,62	1.673.496.322,50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase ketersediaan akses Pelayanan Pendidikan dasar sembilan Tahun	%	93,87	100,00	89.545.736.100,00	100,00	99.858.529.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Pendidikan Non Formal	Persentase penyandang buta aksara yang dientaskan	%	90,63	93,00	6.981.439.000,00	95,37	7.734.412.484,80	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase peningkatan kapasitas guru	%	69,13	75,10	898.475.000,00	81,07	997.691.450,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang telah mengikuti proses akreditasi	%	100,00	100,00	10.156.319.500,00	100,00	10.993.918.775,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Konawe Cerdas	Bantuan Pendidikan Masyarakat Konawe	Orang	200,00	250,00	-	300,00	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pengunjung perpustakaan	Orang	19.655,00	20.500,00	149.312.000,00	21.500,00	165.392.902,40	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.3	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah	Nilai Produktifitas Daerah	Rp.	1.901.759,45	2191822,99		2.444.126,18		
1.3.1	Meningkatnya produktifitas daerah pada sektor-sektor unggulan sehingga menjadikan Konawe sentra produksi beras dan sentra produksi ternak	Pertumbuhan PDRB	%	7,44	10,56		11,61		
		Produksi Padi	Ton	216.381,00	220.000,00		225.000,00		
		Populasi ternak sapi	Ekor	44.497,00	52.000		62.250		
		Produksi perikanan	Ton	121.183,00	124.900		128.500		
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Rupiah	2.086.917,00	3.000.000,00	595.630.000,00	3.200.000,00	3.258.940.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN, DINAS KETAHANAN PANGAN
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Presentase ketersediaan pangan utama	Persen	100,00	100,00	946.105.000,00	100,00	2.438.018.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN
		Tersedianya cadangan pangan daerah	Ton	96,00	97,00		98,00		DINAS KETAHANAN PANGAN
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase Ketersediaan alat-alat pasca panen	Persen	75,00	85,00	4.000.000.000,00	100,00	4.252.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN



NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rasio ketersediaan an alsintan terhadap lahan sawah	Hektar/ 1 Unit	15,00	14,00	3.230.000.000,00	13,00	2.470.171.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Tan. Pangan	Ton	242.438,00	390.335,00	30.296.982.000,00	339.298,00	39.278.677.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Produksi Tan. Perkebunan	Ton	16.417,30	17.238,00		18.059,10		
		Produksi Tan. Hortikultura	Ton	2.572,90	2.701,60		2.830,20		
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Presentase Ketersediaan Penyuluh Pertanian	Persen	52,49	52,49	245.200.000,00	81,82	321.608.040,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	Program Rular Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative Loan 2000001960	Persentase Pelaksanaan Program kerjasama Rural Empo werment and Agricultural Deve lopment scaling UP Initiativ Loan 2000001960	Persen	0,00	100,00	2.725.585.484,00	100,00	8.260.287.984,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	%	100,00	100,00	1.330.000.000,00	100,00	1.550.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase Produksi Hasil peternakan	%	100,00	100,00	45.518.000.000,00	100,00	63.905.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	TON/THN	4345,45	4475,81	14.004.343.000,00	4628,16	20.878.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan Tangkap	TON/THN	116,66	120.154,65	2.866.750.000,00	155274,77	12.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Produksi Perikanan Olahan	TON/THN	183,00	237,49	655.000.000,00	291,81	1.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Persentase kelompok perikanan yang dibina	%	20,00	22,00	174.900.000,00	10,00	850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pesentase kelompok perikanan Tangkap yang dibina	%	10,00	20,00		22,00		
		Pesentase kelompok perikanan Olahan yang dibina	%	10,00	10,00		10,00		
	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	Persentase Areal Pengembangan Tanaman Sagu Sebagai Sumber Pangan Pengganti Beras	lokasi	0	1,00	115.050.000,00	1,00	270.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase sample pangan yang di uji	%	100,00	100,00	23.000.000,00	100,00	25.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
1.3.2	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Realisasi Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA)	Rupiah	4.518.123.973.708,00	4.700.000.000.000,00		5.000.000.000.000,00		
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Investor	%	100,00	100,00	737.355.000,00	100,00	674.513.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	88,00	100,00	324.650.000,00	100,00	335.460.845,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase Potensi Investasi Yang Terpublikasi	%	100,00	100,00	40.000.000,00	100,00	41.332.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi dan Pelayanan Perizinan	Persentase objek perizinan yang diawasi	%	100,00	100,00	100.000.000,00	100,00	103.330.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pelayanan Perizinan	Presentase Penyelesain Izin yang diterbitkan	%	100,00	100,00	552.000.000,00	100,00	570.381.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Penerapan aplikasi on line dalam proses perizinan	%	-	100,00	411.500.000,00	100,00	446.702.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
II	MENJADIKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBUDAYAAN SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE								
2,1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat	Partisipasi Angkatan Kerja	%	98,06	98,40		98,74		
2.1.1	Meningkatnya akses infrastruktur pada berbagai sektor dalam rangka mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat	Indeks konektifitas wilayah	Indeks	0,897	0,931		0,966		
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	45,43	51,52	28.303.500.000,00	59,02	31.309.000.000,00	PU DAN TATA RUANG
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	5,36	5,60	5.728.200.000,00	8,01	8.176.790.000,00	PU DAN TATA RUANG
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Presentase Panjang Jalan dan Jembatan yang di Tingkatkan dan di Rehabilitasi	%	45,43	51,52	85.360.500.000,00	59,02	208.068.500.000,00	PU DAN TATA RUANG
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Peningkatan Penerimaan PAD bidang kebinamargaan	Rp	450000000,00	750.000.000,00	600.000.000,00	800.000.000,00	550.000.000,00	PU DAN TATA RUANG
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan-Jaringan Pengairan Lainnya	Presentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	45,93	55,50	2.925.095.000,00	64,75	3.022.500.664,00	PU DAN TATA RUANG
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Indeks pertanaman	IP	195,00	200,00	440.000.000,00	200,00	6.335.000.000,00	PU DAN TATA RUANG
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	57,33	57,48	15.984.462.909,00	57,72	25.006.112.909,00	PU DAN TATA RUANG
	Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan Kualitas rumah tidak layak huni	unit	1.175,00	1.685,00	4.611.158.000,00	1.741,00	4.708.563.664,00	PU DAN TATA RUANG
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Wajib uji Kendaraan	%	0,35	0,35	142.000.000,00	50 %	162.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Alat Uji Kendaran	%	0,35	0,40		45 %		

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Sarana dan prasarana fasilitas LLAJ	%	33,30	66,60	74.000.000,00	68,82	110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana dan prasarana perhubungan yang ada	%	55,00	60,00	4.185.205.500,00	0,60	5.170.407.190,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketaatan terhadap pemanfaatan ruang	%	83,00	85,00	5.708.000.000,00	90,00	3.578.000.000,00	PU DAN TATA RUANG
	Program Pembinaan Konstruksi	Persentase tenaga terampil yang telah mendapatkan sertifikasi	%	-	100,00	1.310.000.000,00	100,00	1.380.000.000,00	PU DAN TATA RUANG
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Pemeliharaan areal pemakaman	%		100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	PU DAN TATA RUANG
2.1.2	Tersedianya infsrstruktur usaha mikro untuk membuka ruang usaha bagi masyarakat	Pendapatan Per Kapita	Rp	1.901.759,00	2.061.358,00		2.300.682,00		
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UKM yang dibina	%	5,00	10,00	300.000.000,00	15,00	710.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM yang dibina	%	5,00	10,00	734.000.000,00	15,00	1.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pasar yang Terbangun di Kabupaten Konawe	%	100,00	6,45	4.973.774.000,00	6,45	16.700.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Operasi Pasar	Kec.	5,00	-	-	5,00	605.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Penataan Struktur Industri	Persentase IKM yang terbangun di kawasan sentra IKM	%	100,00	100,00	4.500.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%	10,50	30,00	200.000.000,00	50,00	500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	74,17	80,00	200.000.000,00	85,00	500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	Persentase pekerja yang difasilitasi mendapatkan jaminan BPJS ketenagakerjaan	%	13,58	20,00	260.000.000,00	50,00	288.002.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Program Pembinaan Pengawasan dan Pemeriksaan Ketenagakerjaan	Persentase pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan ketenagakerjaan	%	75,00	80,00	60.000.000,00	85,00	66.462.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	Kawasan	1	1	699.000.000,00	1	1.530.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Program Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Persentase KK pada kawasan Transmigrasi yang dibina	%	100,00	100,00	100.000.000,00	100,00	500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	%	75,00	100,00	1.491.500.000,00	100,00	1.647.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase Kelompok Pemuda yang di Bina	%	10,00	13,79	425.000.000,00	24,14	425.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase pelatih dan Wasit yang tersertifikasi	%	10,71	14,29	230.000.000,00	32,14	535.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Kompetisi Olahraga Unggulan	%	100,00	100,00	1.325.000.000,00	100,00	2.415.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olah raga	%	20,69	24,14	1.609.293.000,00	37,93	1.410.230.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Event Wisata	%	50,00	100,00	929.850.000,00	100,00	2.256.835.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Potensi Objek Wisata yang dikembangkan dan dikelola	%	10,00	20,00	6.148.792.000,00	50,00	6.460.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase kerjasama kemitraan	%	20,00	30,00	100.000.000,00	40,00	826.150.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.2	Terwujudnya pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup	Persentase ketaatan terhadap pengelolaan kawasan dan lingkungan	%	30,00	50,00		80,00		
2.2.1	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Range	80,33	80,70		81,10		
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Volume Sampah yang Tertangani	M3	42.824,54	60.263,33	4.398.831.000,00	61.930,47	8.443.000.166,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PEMERINTAH KECAMATAN
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	%	0,30	0,60	121.150.000,00	0,70	637.057.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Luas wilayah yang mendapatkan perlindungan dan pembinaan	%	-	0,40	15.000.000,00	0,43	245.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Luas Wilayah Lingkungan Hidup yang ditetapkan statusnya	%	0,40	0,40	1.247.300.000,00	0,43	900.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	%	0,34	0,60	275.000.000,00	0,70	967.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konawe	Cakupan terjaganya eksistensi adat istiadat dan budaya dalam pergaulan masyarakat	Kec.	29,00	29,00		29,00		
2.3.1	Terimplementasinya nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai identitas masyarakat	Cakupan impelentasi praktek-praktek kearifan budaya pada aktifitas masyarakat	Kec.	29,00	29,00		29,00		
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Penerapan Kurikulum Pendidikan Berbasis Kearifan Budaya Lokal	%	-	100,00	1.333.756.000,00	100,00	1.481.340.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pelestarian peninggalan sejarah purbakala	%		100,00	2.376.747.000,00	100,00	2.627.432.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pelaksanaan event pelestarian kebudayaan daerah	%		100,00	1.407.903.000,00	100,00	1.436.070.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
III	MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIC YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB								
3.1	Terselenggaranya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe	Indeks Kepuasan Masyarakat	Status	Puas	Puas		Sangat Puas		
3.1.1	Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public	Penilaian SAKIP	Status	C	B		BB		
		Penilaian LPPD	Status	Sedang	Tinggi		Sangat Tinggi		
	Program Pelayanan Administrasi Perkatoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkatoran	%	100,00	100,00	54.198.277.120,00	100,00	60.035.431.566,00	SEMUA OPD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	30.094.441.750,00	100,00	33.335.613.126,00	SEMUA OPD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	%	100,00	100,00	2.825.675.000,00	100,00	3.130.000.198,00	SEMUA OPD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100,00	100,00	5.283.917.000,00	100,00	5.852.994.861,00	SEMUA OPD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100,00	100,00	2.171.537.000,00	100,00	2.405.411.535,00	SEMUA OPD
	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan	%	1,00	1,00	518.566.650,00	1,00	1.146.631.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Kompetensi Teknis ASN sesuai Bidang Tugas dan Fungsinya	%	1,00	1,00	1.283.650.000,00	1,00	1.631.588.345,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	%	0,75	0,80	1.731.383.350,00	80,01	3.387.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa	Persentase Aparatur Desa yang dibina	%	25,00	25,00	620.012.000,00	25,00	4.475.940.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Pemerintah Desa yang mengakomodir Program-Program Unggulan Bupati/Wakil Bupati	%	100,00	100,00	4.000.000,00	100,00	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase Bumdes yang Aktif	%	25,00	25,00	41.550.000,00	25,00	475.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	25,00	25,00	217.824.500,00	25,00	1.378.599.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Persentase Pembinaan PKK di Kecamatan	%	25,00	25,00	1.073.318.500,00	25,00	1.210.445.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Berbasis SDA	Persentase Pembinaan TTG di Desa	%	25,00	25,00	150.850.000,00	25,00	2.575.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase cakupan pelayanan administrasi kependudukan	%	92,33	96,66	1.463.378.000,00	99,00	1.620.983.810,60	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase OPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan yang baku	%	4,00	18,00	23.875.000,00	35,00	26.446.337,50	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase pendigitalisasian dokumen/arsip daerah	%	4,00	18,00	10.500.000,00	35,00	11.630.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Kegiatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Keg.	-	5,00	-	5,17	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan areal pencegahan bahaya kebakaran	Kec.	4,00	5,00	542.040.000,00	5,00	600.417.708,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal	Persentase pencegahan tindak kriminal	%	100,00	100,00	2.316.000.000,00	100,00	2.565.433.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Puskesmas yang memenuhi indikator Puskesmas Ramah Anak	%	10,34	31,03	142.630.000,00	48,28	175.000.000,00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Sekolah yang memenuhi indikator Sekolah Ramah Anak	%	4,63	23,15		41,67		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase kelompok usaha Perempuan yang dibina	%	8,00	20,00	144.220.000,00	40,00	224.800.000,00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus perempuan dan anak dari tindak kekerasan	%	100	100,00	112.200.000,00	100,00	387.900.000,00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pengawasan terhadap orang asing dalam rangka menjaga Kantrantibmas	%	0,21	0,34	96.800.000,00	0,55	273.665.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	17,24	34,48	179.475.000,00	0,52	728.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase pemantauan kondisi stabilitas perekonomian daerah	%	17,24	34,48	30.445.000,00	34,48	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi politik masyarakat	%	85,28	85,5	658.530.000,00	85,50	722.225.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase Pembinaan Ormas dan OKP	%	35,21	42,25		49,30		
	Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan	Persentase pembinaan stabilitas keamanan	%	1,00	1,00	46.100.000,00	1,00	145.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Masyarakat Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	%	11,63	23,26	165.750.000,00	69,77	183.601.275,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase Masyarakat Korban Bencana Yang Tertangani	%	100,00	100,00	277.050.000,00	100,00	306.888.285,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase Sarana dan Prasarana Yang Direhabilitasi dan DiRekonstruksi Pascabencana	%	100,00	100,00	2.333.850.000,00	100,00	2.585.205.645,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Jumlah Penelitian Bidang Pertanian, Peternakan dan perikanan serta penelitian bidang budaya tolaki, hukum adat dan kalosara	Keg.	1,00	2,00	198.820.000,00	1,00	220.232.914,00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.1.2	Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)	Opini BPK terhadap LK daerah	Opini	WTP	WTP		WTP		
	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase penerimaan piutang daerah	%	20,00	-	145.000.000,00		435.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase program dan kegiatan yang terakomodir dalam penganggaran	%	80,00	90,00	2.355.750.000,00	95,00	2.200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	%	100,00	100,00	587.200.000,00	100,00	616.560.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Program Peningkatan Administrasi, Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	%	50,00	60,00	933.400.000,00	70,00	980.070.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Program Peningkatan Manajemen dan Pemanfaatan Aset dan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan laporan barang/kekayaan milik daerah	%	50,00	60,00	1.241.155.000,00	70,00	1.303.212.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Program Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Jenis pajak yang dikelola	%	63.64	72.73	332.055.000,00	82,00	367.817.324,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	Program Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Wajib Pajak & Retribusi yang tertagih	%	85,00	87,00	463.130.000,00	100,00	515.700.000,00	BP2RD

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Pengawasan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan Review	Dok.	5,00	8,00	1.234.125.000,00	8,00	2.566.875.000,00	SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
		Pelaksanaan Monev	OPD	63,00	63,00		63,00		
		Pelaksanaan Pendampingan	OPD	63,00	63,00		63,00		
		Pemeriksaan/Pengawasan	OPD	63,00	63,00		63,00		
	Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase ketersediaan tenaga Pemeriksa dan AparaturPengawas	%	0,00	45,95	145.675.000,00	72,97	1.158.242.500,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase ketersediaan data pembangunan berbasis IT	%	60,00	65,00	631.500.000,00	70,00	699.512.550,00	BAPPEDA
		Persentase ketersediaan Data dan Informasi Kecamatan	%	-	100,00		100,00		PEMERINTAH KECAMATAN
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase Program-program pembangunan bidang Fisik Sarana dan Prasarana yang terimplementasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah	%	90,00	95,00	3.507.200.000,00	100,00	1.657.920.000,00	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi pelaksanaan program tahunan dengan dokumen RPJMD	%	80,00	90,00	1.907.100.000,00	95,00	1.465.310.000,00	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Program-program pembangunan bidang ekonomi yang terimplementasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah	%	90,00	95,00	3.456.700.000,00	100,00	1.217.370.000,00	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Program-program pembangunan bidang Sosial Budaya yang terimplementasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah	%	90,00	95,00	1.980.400.000,00	100,00	2.189.447.000,00	BAPPEDA
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase keterlibatan masyarakat dalam penyampaian informasi pembangunan	%	16,48	30,45	175.000.000,00	41,90	859.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program kerjasama informsi dan media massa	Jumlah kerjasama informasi dengan media massa	Media	6,00	6,00	425.000.000,00	6,00	869.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government	Persentase OPD yang telah menerapkan E-Government	%	19,44	27,78	212.100.000,00	41,67	1.105.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi	%	100,00	100,00	17.367.011.125,00	100,00	19.237.438.223,16	SEKRETARIAT DPRD
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100,00	100,00	2.516.000.000,00	100,00	2.786.973.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia	Persentase pembinaan pengembangan SDM di sekolah	%	100,00	100,00	119.910.000,00	100,00	132.824.307,00	SEKRETARIAT DAERAH



NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Pelayanan Bidang Mental Spiritual	Persentase pembinaan kegiatan keagamaan	%	100,00	100,00	789.690.000,00	100,00	874.739.613,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program peningkatan koordinasi, pembinaan, pengawakan dan pelaporan terkait peningkatan kualitas dan kuantitas program jaminan sosial	Laporan pelaksanaan program jaminan sosial	Lap.	1,00	2,00	20.400.000,00	2,00	22.597.080,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program koordinasi, pembinaan, movev dan pelaporan pembangunan bidang pemuda dan olahraga	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemuda dan olahragaIntensitas pelaksanaan koordinasi dan pembinaan	Lap.	1,00	2,00	21.250.000,00	2,00	23.538.625,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program koordinasi, pembinaan, movev dan pelaporan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Lap.	1,00	2,00	21.250.000,00	2,00	23.538.625,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program koordinasi, pembinaan, movev dan pelaporan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan	Laporan Pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuanIntensitas pelaksanaan koordinasi dan pembinaan	Lap.	1,00	2,00	21.250.000,00	2,00	23.538.625,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Layanan Keprotokolan Daerah	Persentase aktifitas pimpinan daerah yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	816.300.000,00	100,00	904.215.510,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Fasilitas LPSE	Persentase informasi pengadaan barang dan jasa yang diproses melalui LPSE	%	40,00	75,00	350.900.000,00	85,00	388.691.930,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase monitoring pelaksanaan pembangunan daerah	%	50,00	70,00	123.000.000,00	80,00	136.247.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program koordinasi pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan	Laporan Pelaksanaan pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan	Lap.	1,00	2,00	16.500.000,00	2,00	18.277.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	%	40,00	75,00	16.500.000,00	85,00	18.277.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ranperda yang dilegalisasi	%	1,00	1,00	529.012.500,00	1,00	585.987.146,25	SEKRETARIAT DAERAH
	Program koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan pelaporan keuangan dan aset daerah	Laporan Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan pelaporan keuangan dan aset daerah	Lap.	1,00	2,00	30.000.000,00	2,00	33.231.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Laporan Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Lap.	1,00	2,00	20.400.000,00	2,00	22.597.080,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kelautan, Perikanan, Energi dan Sumber Dava Mineral	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kelautan, Perikanan, Energi Dan Sumber Daya Mineral		1,00	2,00	20.400.000,00	2,00	22.597.080,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	1,00	2,00	20.400.000,00	2,00	22.597.080,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program koordinasi pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan	Laporan pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan	Lap.	1,00	2,00	38.000.000,00	2,00	42.092.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program koordinasi pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan daerah	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Daerah	Laporan	1,00	2,00	42.500.000,00	2,00	47.077.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Dana Kelurahan	Persentase pemanfaatan Dana Kelurahan Mendukung Program Pembangunan Daerah	%	-	100,00	4.441.656.000,00	100,00	4.920.022.351,20	PEMERINTAH KECAMATAN
IV	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL								
4,1	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	KK	16.800	14.946		13.011		
4.1.1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	%	13,48	12,65		11,65		
		Gini Ratio	%	0,373	0,370		0,367		
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	%	76,07	76,68	417.000.000,00	76,95	733.700.000,00	DINAS SOSIAL
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Masyarakat yang direhabilitasi	%	3,74	5,74	135.500.000,00	10,74	966.500.000,00	DINAS SOSIAL
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar Yang di Bina	%	100,00	100,00	55.000.000,00	100,00	260.000.000,00	DINAS SOSIAL
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase panti asuhan/ Panti jompo yang dibina	%	100,00	100,00	45.000.000,00	100,00	340.000.000,00	DINAS SOSIAL
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial yang ada	%	100,00	100,00	134.000.000,00	100,00	352.600.000,00	DINAS SOSIAL
	Program Pembinaan Usia Lanjut Perlantar, Penyandang Disabilitas dan Wanita Tuna Sosial	Persentase Usia Lanjut Terlantar, Penyandang Disabilitas Dan Wanita Tuna Sosial yang ditangani	%	2,01	4,14	39.350.000,00	8,43	411.550.000,00	DINAS SOSIAL
	Program Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial	Persentase masyarakat terdampak bencana yang dilayani	%	100,00	100,00	283.000.000,00	100,00	351.600.000,00	DINAS SOSIAL

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN											
1.1	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,61		74,72		75,00		75,00		
1.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,67		71,06		71,44		71,44		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	29	45.898.856.490,00	29	42.825.029.356,20	29	47.107.532.291,82	29	135.831.418.138,02	DINAS KESEHATAN
		PRESENTASE TERPENUHINYA PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN	%	100,00	6.891.396.122,00	100,00	17.006.321.658,00	100,00	18.706.953.823,80	100,00	42.604.671.603,80	BLUD RSUD KONAWE
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	CAKUPAN LAYANAN KESEHATAN YANG SESUAI STANDAR	Faskes	29	237.876.997,00	29	324.886.000,00	29	357.374.600,00	29	920.137.597,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	CAKUPAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Faskes	29	567.004.800,00	29	327.614.900,00	29	360.376.390,00	29	1.254.996.090,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	29	556.496.000,00	29	612.145.600,00	29	673.360.160,00	87	1.842.001.760,00	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN (MUKP)	Tahun	20,5	340.388.000,00	21,0	610.000.000,00	21,4	640.000.000,00	21,4	1.590.388.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PERSENTASE PENINGKATAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/MCPR)	%	78,00	7.408.077.392,00	79,50	8.108.237.790,00	81,00	8.186.356.990,00	81,00	23.702.672.172,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PERSENTASE CAKUPAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA MELALUI PEMBINAAN KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	%	8,75	33.054.000,00	9,25	230.000.000,00	10,00	235.000.000,00	10,00	498.054.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.1.2	Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dijenzang pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,15		13,21		13,26		13,26		
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,69		8,72		8,75		8,75		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR	%	100,00	84.684.190.503,00	100,00	100.113.351.781,00	100,00	109.528.803.602,20	100,00	294.326.345.886,20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR	%	87,04	1.941.737.587,00	90,00	1.172.724.300,00	100,00	1.289.996.730,00	100,00	4.404.458.617,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PENERBITAN IZIN PADA PENDIDIKAN DASAR	%	50,00	242.325.065,00	55,00	244.126.827,00	60,00	244.126.827,00	60,00	730.578.719,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah	Nilai Produktifitas Daerah	Rp.	2.799.712,04		3.213.977,42		3.409.796,48		3.409.796,48		
1.2.1	Meningkatnya produktifitas daerah pada sektor-sektor unggulan sehingga menjadikan Konawe sentra produksi beras dan sentra produksi ternak	Pertumbuhan PDRB	%	11,89		12,73		13,09		13,09		
		Produksi Padi	Ton	230.000		235.000		240.000		1.150.000		
		Populasi ternak sapi	Ekor	75.500		92.700		115.500		397.650		
		Produksi perikanan	Ton	132.500		135.800		136.500		658.200		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK	%	50,00	2.332.825.000,00	55,00	2.812.319.418,00	60,00	5.342.170.625,00	60,00	10.487.315.043,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG DIBERI BANTUAN SARANA PERTANIAN	%	100,00	35.816.780,00	100,00	76.000.000,00	100,00	78.000.000,00	100,00	189.816.780,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE LAHAN YANG DIBERI BANTUAN PRASARANA PERTANIAN	%	53,03	20.465.836.014,00	53,03	30.690.000.000,00	53,03	31.910.000.000,00	53,03	83.065.836.014,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK	%	50,00	585.332.600,00	60,00	884.502.750,00	70,00	972.953.025,00	70,00	2.442.788.375,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE LUAS LAHAN YANG MENDAPAT PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	%	13,95	135.160.000,00	11,63	150.000.000,00	18,60	150.000.000,00	18,60	435.160.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	%	30,00	246.700.500,00	35,00	494.396.056,00	40,00	543.835.661,60	40,00	1.284.932.217,60	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERTANIAN	%	8,57	26.970.000,00	13,04	30.000.000,00	30,00	32.000.000,00	30,00	88.970.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG MENDAPATKAN PENYULUHAN PERTANIAN	%	8,28	14.993.236.721,00	8,38	6.950.000.000,00	8,48	5.250.000.000,00	8,48	27.193.236.721,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		PERSENTASE PENINGKATAN SDM KELOMPOK TANI	%	50,00	233.197.420,00	100,00	234.715.000,00	100,00	258.186.500,00	100,00	726.098.920,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH	%	83,00	500.000.000,00	85,00	4.800.000.000,00	86,00	4.800.000.000,00	86,00	10.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	JUMLAH KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN PERKAPITA PERHARI	%	90,30	601.473.500,00	95,00	687.000.000,00	100,00	754.700.000,00	100,00	2.043.173.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE PENURUNAN DAERAH RAWAN PANGAN	%	80,00	35.620.000,00	85,00	113.008.000,00	90,00	124.308.800,00	90,00	272.936.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN SEGAR/OLAHAN	%	0,00	-	90,00	205.000.000,00	95,00	225.500.000,00	95,00	430.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Ton/Tahun	11.911	1.297.856.250,00	17.866	4.395.000.000,00	20.844	4.834.500.000,00	20.844	10.527.356.250,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Ton/Tahun	4.776	7.554.458.641,00	4.927	5.722.793.439,00	4.776	6.295.072.782,90	4.776	19.572.324.862,90	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	JUMLAH KELOMPOK PENGAWAS PERIKANAN YANG DIBINA	Kelompok	10	14.072.614,00	10	55.000.000,00	10	60.500.000,00	10	129.572.614,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PRODUKSI PERIKANAN OLAHAN	Ton/Tahun	346	459.831.149,00	400	1.125.000.000,00	346	1.237.500.000,00	346	2.822.331.149,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Realisasi Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA)	Rupiah	6.000.000.000.000		7.000.000.000.000		8.000.000.000.000		30.700.000.000.000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%	100,00	22.723.000,00	100,00	24.995.300,00	100,00	27.494.830,00	100,00	75.213.130,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE RENCANA INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL	%	100,00	22.497.124,00	100,00	24.746.836,40	100,00	27.221.520,04	100,00	74.465.480,44	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PRESENTASE PENYELESAIN IZIN YANG DITERBITKAN	%	100,00	63.951.633,00	100,00	45.150.196,30	100,00	49.665.215,93	100,00	158.767.045,23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PELAKSANAAN OBJEK PERIZINAN YANG DIAWASI	%	100,00	167.908.000,00	100,00	184.698.800,00	100,00	203.168.680,00	100,00	555.775.480,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE DATA BASE YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	%	100,00	185.773.000,00	100,00	204.350.300,00	100,00	224.785.330,00	100,00	614.908.630,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
II	MENJADIKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBUDAYAAN SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE											
2,1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat	Partisipasi Angkatan Kerja	%	99,07		99,41		99,75		99,75		
2.1.1	Meningkatnya akses infrastruktur pada berbagai sektor dalam rangka mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masvarakat	Indeks konektivitas wilayah	Indeks	0,966		0,966		0,966		0,966		

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PRESENTASE SISTEM JARINGAN IRIGASI DLM KONDISI BAIK	%	66,01	27.066.367.744,00	69,32	45.331.090.000,00	76,25	49.864.199.000,00	76,25	122.261.656.744,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR MINUM	%	1,43	4.762.784.579,00	1,60	5.900.000.000,00	1,76	6.490.000.000,00	1,76	17.152.784.579,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PERSENTASE RUMAH TANGGA BERSANITASI	%	60,00	1.197.371.000,00	3,00	5.500.000.000,00	3,30	6.050.000.000,00	3,30	12.747.371.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PERSENTASE WILAYAH YANG TERBEBAS DARI RESIKO BANJIR	%	2,09	4.688.185.600,00	100,00	4.534.000.000,00	100,00	4.987.400.000,00	100,00	14.209.585.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE KAWASAN PERUMAHAN RAWAN BENCANA	%	0	-	100	4.475.000.000,00	100	5.572.500.000,00	100	10.047.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENATASI PENANGANAN KAWASAN KUMUH	%	100,00	1.075.882.000,00	100,00	2.800.000.000,00	100,00	3.080.000.000,00	100,00	6.955.882.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE BANGUNAN BER IMB	%	100,00	67.323.276,00	100,00	30.000.000,00	100,00	33.000.000,00	100,00	130.323.276,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	%	100,00	5.500.581.075,00	100,00	20.000.000.000,00	100,00	22.000.000.000,00	100,00	47.500.581.075,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PERSENTASE TENAGA TERAMPIL YANG TELAH MENDAPATKAN SERTIFIKASI	%	100,00	113.877.000,00	100,00	513.000.000,00	100,00	564.300.000,00	100,00	1.191.177.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE JALAN DALAM KONDISI MANTAP	%	64,96	47.794.866.481,00	70,00	58.930.000.000,00	77,00	64.823.000.000,00	77,00	171.547.866.481,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PEMANFAATAN RUANG	%	75,00	619.925.652,00	80,00	2.990.000.000,00	85,00	3.289.000.000,00	85,00	6.898.925.652,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE PERUMAHAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU (PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM)	%	100,00	15.200.000,00	100,00	15.200.000,00	100,00	16.720.000,00	100,00	47.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERSENTASE PERLENGKAPAN JALAN DAN PRASARANA LALULINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) YANG LAYAK	%	71,11	2.604.300.000,00	20,00	1.605.502.500,00	75,92	1.766.052.750,00	75,92	5.975.855.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.1.2	Tersedianya infsstruktur usaha mikro untuk membuka ruang usaha bagi masyarakat	Pendapatan Per Kapita	Rp	2.574.233		2.901.933		3.281.976		3.281.976		
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI YANG AKTIF	%	20	38.980.000,00	52,79	76.995.000,00	58,07	84.694.500,00	58,07	200.669.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG MEMILIKI KAPASITAS DAN KOMPETENSI	%	0,00	-	52,79	122.408.000,00	58,07	134.648.800,00	58,07	257.056.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE UMKM YANG MANDIRI	%	20	194.500.000,00	30,20	228.279.000,00	33,22	251.106.900,00	33,22	673.885.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI EKSPOR KOMODITI UNGGULAN	%	50,00	686.898.200,00	100,00	913.862.200,00	100,00	1.005.248.420,00	100,00	2.606.008.820,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TERJAGA KESTABILAN HARGANYA	%	5,00	99.590.000,00	100,00	102.019.000,00	100,00	112.220.900,00	100,00	313.829.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PRODUK DAERAH YANG DIPASARKAN	%	50,00	66.700.000,00	100,00	73.370.000,00	100,00	80.707.000,00	100,00	220.777.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG TERBANGUN DIKAWASAN SENTRA IKM	%	40,00	190.729.200,00	45,00	227.884.620,00	49,50	250.673.082,00	49,50	669.286.902,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG DIPENUHI	%	0,00	-	50	300.000.000,00	100	330.000.000,00	100	630.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PRESENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	%	65,00	22.750.000,00	80,00	325.025.000,00	95,00	357.527.500,00	95,00	705.302.500,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN	%	0,00	-	100,00	126.495.000,00	100,00	139.144.500,00	100,00	265.639.500,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PRESETASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN MELALUI PEJANJIAN BERSAMA OLEH MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	%	80,00	45.650.000,00	100,00	121.310.000,00	100,00	130.293.000,00	100,00	297.253.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PRESENTASE KAWASAN TRANS LAYAK UNTUK MEMBANGUN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	%	85,00	14.400.000,00	100,00	33.150.000,00	0,00	-	100,00	47.550.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMGRASI YANG TERBANGUN	%	85,00	74.030.000,00	100,00	82.846.000,00	100,00	377.710.600,00	100,00	534.586.600,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PRESENTASE WARGA TRANSMIGRAN YANG BINA	%	85,00	13.550.000,00	100,00	84.000.000,00	100,00	92.400.000,00	100,00	189.950.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA YANG MEMILIKI USAHA MANDIRI SERTA PERAN KEPEMUDAAN DALAM PEMBANGUNAN	%	51,72	1.096.252.000,00	100,00	1.759.874.500,00	100,00	1.935.861.950,00	100,00	4.791.988.450,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING OLAH RAGA	%	100,00	1.722.617.500,00	100,00	2.302.804.000,00	100,00	2.533.084.400,00	100,00	6.558.505.900,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	CAKUPAN PEMBINAAN KEPRAMUKAAN	Kecamatan	29	560.000.000,00	29	560.000.000,00	29	616.000.000,00	29	1.736.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE KUNJUNGAN WISATA	%	100,00	499.282.000,00	100,00	1.297.906.000,00	100,00	1.427.696.600,00	100,00	3.224.884.600,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE EVENT PARIWISATA	%	100,00	170.055.000,00	100,00	775.000.000,00	100,00	852.500.000,00	100,00	1.797.555.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	%	0,00	-	100	243.165.000,00	100	267.481.500,00	100	510.646.500,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.2	Terwujudnya pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup	Persentase ketaatan terhadap pengelolaan kawasan dan lingkungan	%	90,00		100,00		100,00		100,00		
2.2.1	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Range	81,50		81,90		82,30		82,30		
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	%	80,00	405.491.500,00	80,00	380.924.000,00	100,00	419.016.400,00	100,00	1.205.431.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	%	80,00	737.842.500,00	70,00	2.221.500.000,00	100,00	2.443.650.000,00	100,00	5.402.992.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE PEMBINAAN TERHADAP JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENGHASILKAN B3 DAN LB3	%	80,00	26.820.000,00	70,00	160.000.000,00	100,00	176.000.000,00	100,00	362.820.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN	%	80,00	25.143.000,00	50,00	270.371.800,00	100,00	297.408.980,00	100,00	592.923.780,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE WILAYAH PENYULUHAN DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP	%	0,00	-	90,00	90.000.000,00	100,00	99.000.000,00	100,00	189.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE LUAS RUANG TERBUKA HIJAU YANG DIKELOLA	%	80,00	132.382.128,00	70,00	3.374.764.000,00	100,00	3.712.240.400,00	100,00	7.219.386.528,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PRESTASI CAPAIAN PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DI RAIH	%	60,00	47.843.000,00	80,00	50.000.000,00	80,00	55.000.000,00	80,00	152.843.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI	%	80,00	27.273.000,00	90,00	75.000.000,00	100,00	82.500.000,00	100,00	184.773.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH	%	16,00	5.186.753.000,00	80,00	7.435.680.000,00	84,00	8.179.248.000,00	84,00	20.801.681.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.3	Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konawe	Cakupan terjaganya eksistensi adat istiadat dan budaya dalam pergaulan masyarakat	Kec.	29		29		29		29		
2.3.1	Terimplementasinya nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai identitas masvarakat	Cakupan impelentasi praktek-praktek kearifan budaya pada aktifitas masvarakat	Kec.	29		29		29		29		

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL	%	50,00	83.561.546,00	60,00	168.000.000,00	65,00	184.800.000,00	65,00	436.361.546,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH	%	100,00	161.238.840,00	100,00	981.514.257,00	100,00	517.603.281,40	100,00	1.660.356.378,40	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PERSENTASE CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN DAN DIKELOLA	%	0,00	-	100,00	581.250.000,00	100,00	1.893.750.000,00	100,00	2.475.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
III	MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIC YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB											
3.1	Terselenggaranya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe	Indeks Kepuasan Masyarakat	Status	Sangat Puas		Sangat Puas		Sangat Puas		Sangat Puas		
3.1.1	Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Penilaian SAKIP	Status	BB		A		A		A		
		Penilaian LPPD	Status	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	650.220.380.970,00	100,00	685.128.521.361,90	100,00	753.033.454.556,79	100,00	2.088.382.356.888,69	SEMUA OPD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	399.434.282,00	100,00	439.377.710,20	100,00	483.315.481,22	100,00	1.322.127.473,42	PEMERINTAH KECAMATAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	1.984.328.204,00	100,00	2.046.856.345,40	100,00	2.108.041.979,94	100,00	6.139.226.529,34	PEMERINTAH KECAMATAN
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	137.561.000,00	100,00	164.701.421,00	100,00	181.171.563,10	100,00	483.433.984,10	PEMERINTAH KECAMATAN

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	97.046.368,00	100,00	106.751.004,80	100,00	117.426.105,28	100,00	321.223.478,08	PEMERINTAH KECAMATAN
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	346.845.415,00	100,00	406.835.996,50	100,00	447.519.596,15	100,00	1.201.201.007,65	PEMERINTAH KECAMATAN
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEPEGAWAIAN DAERAH	%	100,00	1.488.818.966,00	100,00	2.278.454.618,00	100,00	2.536.300.079,80	100,00	6.303.573.663,80	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	PROGRAM PENATAAN DESA	PERSENTASE PENATAAN KELEMBAGAAN DESA	%	100	94.115.000,00	100,00	343.385.000,00	100,00	367.723.500,00	100,00	805.223.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PRESENTASE TERBENTUKNYA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA	%	100	56.752.000,00	100,00	62.427.200,00	100,00	68.669.920,00	100,00	187.849.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENATAAN ADMINISTRASI DESA	%	75,00	272.449.500,00	100,00	1.717.103.600,00	100,00	1.888.813.960,00	100,00	3.878.367.060,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	%	50,00	790.728.766,00	100,00	1.648.636.379,00	50,00	1.813.500.016,90	50,00	4.252.865.161,90	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK	%	93,00	1.647.163.000,00	94,00	1.735.780.000,00	95,00	1.766.999.900,00	95,00	5.149.942.900,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA PENCATATAN SIPIL	%	93,00	499.650.000,00	94,00	667.827.780,00	95,00	705.816.560,20	95,00	1.873.294.340,20	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	%	100,00	243.951.000,00	100,00	318.951.000,00	100,00	335.645.269,00	100,00	898.547.269,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PROFIL KEPENDUDUKAN	%	0,00	-	0,00	-	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE KOLEKSI BUKU YANG TERSEDIA DIPERPUSTAKAN DAERAH	%	96,00	232.550.000,00	100,00	468.745.000,00	100,00	463.199.000,00	100,00	1.164.494.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE PENGELOLAAN ARSIP	%	100,00	39.947.700,00	100,00	15.940.000,00	100,00	45.000.000,00	100,00	100.887.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PERSENTASE PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	%	100,00	39.811.200,00	0,00	-	0,00	-	100,00	39.811.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	%	100,00	2.902.920.000,00	100,00	3.417.140.000,00	100,00	3.758.854.000,00	100,00	10.078.914.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	CAKUPAN AREAL PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Kecamatan	7	760.375.484,00	10	886.030.000,00	15	974.633.000,00	15	2.621.038.484,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	%	0,00	-	92,94	82.063.500,00	92,95	90.269.850,00	92,95	172.333.350,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE OPD PENYEDIA DATA TERPILAH GENDER	%	100,00	27.810.000,00	100,00	30.591.000,00	100,00	33.650.100,00	100,00	92.051.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PERSENTASE PEMENUHAN HAK ANAK	%	100,00	12.440.000,00	100,00	117.006.500,00	100,00	128.707.150,00	100,00	258.153.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE PENANGANAN KASUS ANAK DARI TINDAK KEKERASAN	%	100,00	101.590.500,00	100,00	278.039.480,00	100,00	305.843.428,00	100,00	685.473.408,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PENANGANAN KASUS PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN	%	100,00	230.777.000,00	100,00	178.798.000,00	100,00	196.677.800,00	100,00	606.252.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE WILAYAH BEBAS NARKOBA	%	100,00	65.300.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	165.000.000,00	100,00	380.300.000,00	BADAN NARKOTIKA
		PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	%	68,97	19.429.000,00	86,21	150.000.000,00	100,00	165.000.000,00	100,00	334.429.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	CAKUPAN WILAYAH PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Kecamatan	6	254.123.000,00	10	320.000.000,00	13	378.000.000,00	29	952.123.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	%	68,97	62.270.000,00	86,21	195.540.000,00	86,21	215.094.000,00	86,21	472.904.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PEMBINAAN PERAN PARTAI POLITIK	%	68,97	727.437.000,00	80,00	900.000.000,00	100,00	990.000.000,00	100,00	2.617.437.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	%	56,34	33.202.000,00	65,00	190.000.000,00	100,00	209.000.000,00	100,00	432.202.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE CAKUPAN WILAYAH LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA	%	85,00	1.084.714.167,00	85,00	2.056.640.000,00	85,00	2.437.304.000,00	85,00	5.578.658.167,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG DILAKSANAKAN DAN DITINDAK LANJUTI	%	50,00	60.114.229,00	100,00	2.325.625.651,90	100,00	2.558.188.217,09	100,00	4.943.928.097,99	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.1.2	Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)	Opini BPK terhadap LK daerah	Opini	WTP		WTP		WTP		WTP		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE WAJIB PAJAK & RETRIBUSI YANG TERTAGIH	%	100,00	2.319.836.700,00	100,00	2.825.000.000,00	100,00	3.107.500.000,00	100,00	8.252.336.700,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN YANG TRANSPARANSI, TEPAT WAKTU DAN AKUNTABEL	%	4,00	351.875.729.076,00	100,00	364.030.351.907,00	100,00	400.433.387.097,70	100,00	1.116.339.468.080,70	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG DIKELOLA	%	100,00	937.200.000,00	100,00	1.030.256.000,00	100,00	1.133.281.600,00	100,00	3.100.737.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH	%	100,00	2.921.550.000,00	100,00	4.662.800.000,00	100,00	5.129.080.000,00	100,00	12.713.430.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWA
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PADA OPD	%	85,00	507.460.000,00	100,00	1.425.000.000,00	100,00	1.567.500.000,00	100,00	3.499.960.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWA
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	%	100,00	3.811.710.404,00	100,00	4.976.453.244,40	100,00	5.377.951.968,84	100,00	14.166.115.617,24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KOORDINASI DAN SINGKRONISASI DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG INFRASTRUKTUR, SOSIAL BUDAYA, SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN DAERAH	%	100,00	3.367.762.673,00	100,00	3.969.710.140,30	100,00	4.366.681.154,33	100,00	11.704.153.967,63	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENERIMA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	58.664.000,00	100,00	267.000.000,00	100,00	293.700.000,00	100,00	619.364.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN LAYANAN INFRASTRUKTUR PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH	%	11,29	925.596.800,00	100,00	2.910.000.000,00	53,22	3.201.000.000,00	53,22	7.036.596.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	%	100,00	8.505.769.519,00	100,00	8.863.306.519,00	100,00	9.749.637.170,90	100,00	27.118.713.208,90	SEKRETARIAT DPRD
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	%	100,00	5.489.455.000,00	100,00	5.543.078.000,00	100,00	6.097.385.800,00	100,00	17.129.918.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	%	100,00	1.055.857.588,00	100,00	1.193.579.500,00	100,00	1.312.937.450,00	100,00	3.562.374.538,00	SEKRETARIAT DAERAH
IV	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL											
4,1	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	KK	10.993		10.051		9.067		9.067		
4.1.1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	%	9,65		8,65		7,65		7,65		
		Gini Ratio	%	0,362		0,362		0,358		0,358		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) YANG SEJAHTERA	%	70,00	236.299.036,00	74,00	225.728.951,00	81,40	248.301.846,10	81,40	710.329.833,10	DINAS SOSIAL

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG DIREHABILITASI	%	80,00	437.539.817,00	86,00	460.304.430,00	94,60	506.334.873,00	94,60	1.404.179.120,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN ANAK TERLANTAR YANG MENERIMA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	%	50,00	348.923.066,00	88,00	308.163.836,00	96,80	338.980.219,60	96,80	996.067.121,60	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KOTA	%	100,00	148.110.000,00	100,00	346.055.000,00	100,00	380.660.500,00	100,00	874.825.500,00	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG TERPELIHARA	%	100,00	207.223.175,00	100,00	203.858.175,00	100,00	224.243.992,50	100,00	635.325.342,50	DINAS SOSIAL



### 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan daerah tahun 2018-2023 diperoleh dari perhitungan kemampuan kapasitas riil keuangan daerah pada bab sebelumnya dalam membiayai pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2020**  
**(Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006)**

No.	Uraian	Tahun (Rp)		Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		2019	2020	
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA</b>	<b>1.269.656.875.757,76</b>	<b>1.375.979.947.970,31</b>	<b>8,37</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>780.866.569.043,58</b>	<b>839.431.561.721,84</b>	<b>7,50</b>
	Belanja Pegawai	453.362.459.908,09	487.364.644.401,19	<b>7,50</b>
	Belanja Bunga	9.210.082.826,49	9.900.839.038,48	<b>7,50</b>
	Belanja Hibah	9.000.000.000,00	9.675.000.000,00	<b>7,50</b>
	Belanja Bantuan Sosial	982800000	1.056.510.000,00	<b>7,50</b>
	Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa.	303.311.226.309,00	326.059.568.282,18	<b>7,50</b>
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.375.000.000,00	<b>7,50</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>488.790.306.714,19</b>	<b>536.548.386.248,47</b>	<b>9,77</b>
	Belanja Pegawai	44.838.045.485,42	48.200.898.896,82	<b>7,50</b>
	Belanja Barang dan Jasa	302.947.755.421,22	333.242.530.963,34	<b>10,00</b>
	Belanja Modal	141.004.505.807,55	155.104.956.388,31	<b>10,00</b>

**Tabel 7.2**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023**  
**(Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)**

NO	URAIAN		TAHUN (Rp)			PERTUMBUHAN RATA-RATA (%)
			2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6
	<b>BELANJA</b>		<b>1.387.319.632.822,00</b>	<b>1.563.240.985.237,30</b>	<b>1.667.507.201.998,65</b>	<b>9</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>891.583.674.331,00</b>	<b>1.004.642.411.531,06</b>	<b>1.071.650.802.711,67</b>	<b>9</b>
	a)	Belanja Pegawai	547.473.082.850,00	616.896.309.385,07	658.042.520.955,16	9
	b)	Belanja Barang dan Jasa	279.147.665.152,00	314.545.444.881,55	335.525.232.289,27	9
	c)	Belanja Bunga	10.120.970.139,00	11.404.376.437,36	12.165.034.069,09	9
	d)	Belanja Hibah	53.761.956.190,00	9.360.845.644,81	64.619.895.098,01	9
	e)	Belanja Bantuan Sosial	1.080.000.000,00	1.216.951.179,90	1.298.120.300,15	9
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>158.426.918.591,00</b>	<b>178.516.505.098,78</b>	<b>190.423.332.511,75</b>	<b>9</b>
	a)	Belanja Modal Tanah	2.250.000.000,00	2.535.314.958,12	2.704.417.291,97	9
	b)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.221.873.886,00	31.800.595.115,24	33.921.654.999,63	9
	c)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.074.061.103,00	63.184.624.834,15	67.398.960.212,48	9
	d)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.412.347.602,00	77.087.488.086,80	82.229.127.039,69	9
	e)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.468.636.000,00	3.908.482.104,47	4.169.172.967,98	9
<b>3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		<b>4.000.000.000,00</b>	<b>4.507.226.592,21</b>	<b>4.807.852.963,51</b>	<b>9</b>
	a)	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.507.226.592,21	4.807.852.963,51	9
<b>4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>		<b>333.309.039.900,00</b>	<b>375.574.842.015,25</b>	<b>400.625.213.811,72</b>	<b>9</b>
	a)	Belanja Bantuan Keuangan	333.309.039.900,00	375.574.842.015,25	400.625.213.811,72	9

## **7.2 Program Perangkat Daerah**

Program-program perangkat daerah yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.3**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang di sertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023**

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkatoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkatoran	%	100,00	100,00	54.198.277.120,00	100,00	60.035.431.566,00	SEMUA OPD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	30.094.441.750,00	100,00	33.335.613.126,00	SEMUA OPD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	%	100,00	100,00	2.825.675.000,00	100,00	3.130.000.198,00	SEMUA OPD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100,00	100,00	5.283.917.000,00	100,00	5.852.994.861,00	SEMUA OPD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100,00	100,00	2.171.537.000,00	100,00	2.405.411.535,00	SEMUA OPD
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1.01	Pendidikan								
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
	Progrm Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana PAUD	%	4,23	15,62	1.508.025.300,00	27,62	1.673.496.322,50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase ketersediaan akses Pelayanan Pendidikan dasar sembilan Tahun	%	93,87	100,00	89.545.736.100,00	100,00	99.858.529.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Pendidikan Non Formal	Persentase penyandang buta aksara yang diantaskan	%	90,63	93,00	6.981.439.000,00	95,37	7.734.412.484,80	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase peningkatan kapasitas guru	%	69,13	75,10	898.475.000,00	81,07	997.691.450,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang telah mengikuti proses akreditasi	%	100,00	100,00	10.156.319.500,00	100,00	10.993.918.775,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Konawe Cerdas	Bantuan Pendidikan Masyarakat Konawe	Orang	200,00	250,00	-	300,00	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Penerapan Kurikulum Pendidikan Berbasis Kearifan Budaya Lokal	%	-	100,00	1.333.756.000,00	100,00	1.481.340.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pelestarian peninggalan sejarah purbakala	%		100,00	2.376.747.000,00	100,00	2.627.432.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pelaksanaan event pelestarian kebudayaan daerah	%		100,00	1.407.903.000,00	100,00	1.436.070.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02	Kesehatan								
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan								
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	2.894.010.000,00	100,00	3.183.411.000,00	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
		Persentase Balita yang ditimbang di Posyandu	%	72,06	77,00		83,00		DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
		Persentase balita usia 6-59 bulan yang mendapatkan kapsul vitamin A	%	90,08	92,00		94,00		DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
		Persentase ibu nifas yang mendapat 90 tablet Fe selama hamil	%	65,05	70,00		80,00		DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
		Persentase rumah tangga ber-PHBS	%	52,00	62,00		72,00		DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi TBC	%	9,01	7,01	1.388.180.000,00	5,01	1.132.630.000,00	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
		Terkendalnya HIV pada populasi dewasa	Kasus	-	-		-		DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
		Cakupan desa/kelurahan UCI	%	82,00	85,00		89,00		DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
		Persentase bayi yang diimunisasi campak	%	86,97	90,00		93,00		DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan	%	100,00	100,00	7.998.685.000,00	100,00	4.595.150.000,00	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang telah mengikuti proses akreditasi	%	34,48	58,62	52.995.029.856,00	100,00	48.536.798.599,00	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan dasar	%	100,00	100,00	1.591.265.000,00	100,00	2.189.810.000,00	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase ketersediaan puskesmas yang layak	%	100,00	100,00	91.793.244.998,00	100,00	79.758.554.999,00	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase pembinaan bagi aparatur kesehatan ditingkat Puskesmas	%	100,00	100,00	204.200.000,00	100,00	272.550.000,00	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	%	100,00	0,00	-	0,00	-	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Presentase peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	%	100,00	0,00	-	0,00	-	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (Bawah dua Tahun)	%	29,06	26,15	36.500.000,00	23,53	34.000.000,00	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat Berprilaku Masyarakat Hidup Hidup Bersih Dan Sehat	%	100,00	100,00	-	100,00	-	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE
1.02 - 1.02.02	Rumah Sakit Daerah Kabupaten								
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase alat kesehatan dan penunjang melalui dana DAK dan APBD	%	100,00	100,00	30.936.714.820,00	100,00	14.973.016.467,00	RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN
		Persentase Pengadaan alat kesehatan dan penunjang	%	100,00	100,00	-	0,00	-	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian Standar akreditasi Paripurna	%	100,00	100,00	630.000.000,00	100,00	-	RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN
	Program Peningkatan Pelayanan kesehatan BLUD Rumah Sakit	Persentase Jumlah Indikator SPM yang dilaksanakan pada Bidang TU	%		100,00	71.930.600.000,00	100,00	65.100.000.000,00	RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN
		Persentase Jumlah Indikator SPM yang dilaksanakan pada Bidang Pelayanan Medik	%		100,00		100,00		
		Persentase Jumlah Indikator SPM yang dilaksanakan pada Bidang Perencanaan	%		100,00		100,00		
		Persentase Jumlah Indikator SPM yang dilaksanakan pada Bidang Keperawatan	%		100,00		100,00		
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan kesehatan rujukan bagi Pasien Tidak mampu	%	100,00	100,00	600.000.000,00	100,00	750.000.000,00	RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN



NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	45,43	51,52	28.303.500.000,00	59,02	31.309.000.000,00	PU DAN TATA RUANG
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	5,36	5,60	5.728.200.000,00	8,01	8.176.790.000,00	PU DAN TATA RUANG
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Presentase Panjang Jalan dan Jembatan yang di Tingkatkan dan di Rehabilitasi	%	45,43	51,52	85.360.500.000,00	59,02	208.068.500.000,00	PU DAN TATA RUANG
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Peningkatan Penerimaan PAD bidang kebinamargaan	Rp	450000000,00	750000000,00	600.000.000,00	800000000,00	550.000.000,00	PU DAN TATA RUANG
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan-Jaringan Pengairan Lainnya	Presentase Luas irigasi dalam kondisi baik	%	45,93	55,50	2.925.095.000,00	64,75	3.022.500.664,00	PU DAN TATA RUANG
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Indeks pertanaman	IP	195,00	200,00	440.000.000,00	200,00	6.335.000.000,00	PU DAN TATA RUANG
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	57,33	57,48	15.984.462.909,00	57,72	25.006.112.909,00	PU DAN TATA RUANG
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketaatan terhadap pemanfaatan ruang	%	83,00	85,00	5.708.000.000,00	90,00	3.578.000.000,00	PU DAN TATA RUANG
	Program Pembinaan Konstruksi	Persentase tenaga terampil yang telah mendapatkan sertifikasi	%	0,00	100,00	1.310.000.000,00	100,00	1.380.000.000,00	PU DAN TATA RUANG
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Pemeliharaan areal pemakaman	%		100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	PU DAN TATA RUANG
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
1.04 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan Kualitas rumah tidak layak huni	unit	1175,00	1685,00	4.611.158.000,00	1741,00	4.708.563.664,00	PU DAN TATA RUANG
1.04 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran								
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
1.05 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran								
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Kegiatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Keg.	0,00	5,00	-	5,17	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan areal pencegahan bahaya kebakaran	Kec.	4,00	5,00	542.040.000,00	5,00	600.417.708,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase pencegahan tindak kriminal	%	100,00	100,00	2.316.000.000,00	100,00	2.565.433.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.06	Sosial								
1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial								
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	%	76,07	76,68	417.000.000,00	76,95	733.700.000,00	DINAS SOSIAL
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Masyarakat yang direhabilitasi	%	3,74	5,74	135.500.000,00	10,74	966.500.000,00	DINAS SOSIAL
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar Yang di Bina	%	100,00	100,00	55.000.000,00	100,00	260.000.000,00	DINAS SOSIAL
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase panti asuhan/ Panti jompo yang dibina	%	100,00	100,00	45.000.000,00	100,00	340.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial yang ada	%	100,00	100,00	134.000.000,00	100,00	352.600.000,00	DINAS SOSIAL
	Program Pembinaan Usia Lanjut Perlantar, Penyandang Disabilitas dan Wanita Tuna Sosial	Persentase Usia Lanjut Terlantar, Penyandang Disabilitas Dan Wanita Tuna Sosial yang ditangani	%	2,01	4,14	39.350.000,00	8,43	411.550.000,00	DINAS SOSIAL
	Program Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial	Persentase masyarakat terdampak bencana yang dilayani	%	100,00	100,00	283.000.000,00	100,00	351.600.000,00	DINAS SOSIAL
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.01	Tenaga Kerja								
2.01 . 2.01.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja								
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%	10,50	30,00	200.000.000,00	50,00	500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	74,17	80,00	200.000.000,00	85,00	500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	Persentase pekerja yang difasilitasi mendapatkan jaminan BPJS ketenagakerjaan	%	13,58	20,00	260.000.000,00	50,00	288.002.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Program Pembinaan Pengawasan dan Pemeriksaan Ketenagakerjaan	Persentase pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan ketenagakerjaan	%	75,00	80,00	60.000.000,00	85,00	66.462.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.02 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Puskesmas yang memenuhi indikator Puskesmas Ramah Anak	%	10,34	31,03	142.630.000,00	48,28	175.000.000,00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Sekolah yang memenuhi indikator Sekolah Ramah Anak	%	4,63	23,15		41,67		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase kelompok usaha Perempuan yang dibina	%	8,00	20,00	144.220.000,00	40,00	224.800.000,00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus perempuan dan anak dari tindak kekerasan	%	100	100,00	112.200.000,00	100,00	387.900.000,00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.03	Pangan								
2.03 . 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan								
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Rupiah	2086917,00	3000000,00	595.630.000,00	3200000,00	3.258.940.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN, DINAS KETAHANAN PANGAN
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Presentase ketersediaan pangan utama	Persen	100,00	100,00	946.105.000,00	100,00	2.438.018.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN
		Tersedianya cadangan pangan daerah	Ton	96,00	97,00		98,00		DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rasio ketersediaan an alsintan terhadap lahan sawah	Hektar/ 1 Unit	15,00	14,00	3.230.000.000,00	13,00	2.470.171.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	Persentase Areal Pengembangan Tanaman Sagu Sebagai Sumber Pangan Pengganti Beras	lokasi	0	1,00	115.050.000,00	1,00	270.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase sample pangan yang di uji	%	100,00	100,00	23.000.000,00	100,00	25.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.05	Lingkungan Hidup								
2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup								
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Volume Sampah yang Tertangani	M3	42.824,54	60.263,33	4.398.831.000,00	61.930,47	8.443.000.166,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PEMERINTAH KECAMATAN
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	%	0,30	0,60	121.150.000,00	0,70	637.057.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Luas wilayah yang mendapatkan perlindungan dan pembinaan	%	-	0,40	15.000.000,00	0,43	245.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Luas Wilayah Lingkungan Hidup yang ditetapkan statusnya	%	0,40	0,40	1.247.300.000,00	0,43	900.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	%	0,34	0,60	275.000.000,00	0,70	967.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil								
2.06 . 2.06.01	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase cakupan pelayanan administrasi kependudukan	%	92,33	96,66	1.463.378.000,00	99,00	1.620.983.810,60	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa								
2.07 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa	Persentase Aparatur Desa yang dibina	%	25,00	25,00	620.012.000,00	25,00	4.475.940.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Pemerintah Desa yang mengakomodir Program-Program Unggulan Bupati/Wakil Bupati	%	100,00	100,00	4.000.000,00	100,00	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase Bumdes yang Aktif	%	25,00	25,00	41.550.000,00	25,00	475.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	25,00	25,00	217.824.500,00	25,00	1.378.599.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Persentase Pembinaan PKK di Kecamatan	%	25,00	25,00	1.073.318.500,00	25,00	1.210.445.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Berbasis SDA	Persentase Pembinaan TTG di Desa	%	25,00	25,00	150.850.000,00	25,00	2.575.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2.08 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	Program Keluarga Berencana	Persentase capaian pelaksanaan program Keluarga Berencana	%	0,85	95,60%	12.350.803.000,00	96,00%	12.269.580.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Pelaksanaan Program Pelayanan Kontrasepsi	%	0,74	0,96	155.000.000,00	97,00%	127.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									KELUARGA BERENCANA
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase capaian pelaksanaan program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	%	0,14	0,95	152.000.000,00	0,96	352.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2,09	Perhubungan								
2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan								
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Wajib uji Kendaraan	%	0,35	0,35	142.000.000,00	50 %	162.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Alat Uji Kendaran	%	0,35	0,40		45 %		
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Sarana dan prasarana fasilitas LLAJ	%	33,30	66,60	74.000.000,00	68,82	110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana dan prasarana perhubungan yang ada	%	55,00	60,00	4.185.205.500,00	0,60	5.170.407.190,00	DINAS PERHUBUNGAN
2,1	Komunikasi dan Informatika								
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika								
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase keterlibatan masyarakat dalam penyampaian informasi pembangunan	%	16,48	30,45	175.000.000,00	41,90	859.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program kerjasama informsi dan media massa	Jumlah kerjasama informasi dengan media massa	Media	6,00	6,00	425.000.000,00	6,00	869.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government	Persentase OPD yang telah menerapkan E-Government	%	19,44	27,78	212.100.000,00	41,67	1.105.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2,11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
2.11 . 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan								
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UKM yang dibina	%	5,00	10,00	300.000.000,00	15,00	710.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM yang dibina	%	5,00	10,00	734.000.000,00	15,00	1.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2,12	Penanaman Modal								
2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Investor	%	100,00	100,00	737.355.000,00	100,00	674.513.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	88,00	100,00	324.650.000,00	100,00	335.460.845,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase Potensi Investasi Yang Terpublikasi	%	100,00	100,00	40.000.000,00	100,00	41.332.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi dan Pelayanan Perizinan	Persentase objek perizinan yang diawasi	%	100,00	100,00	100.000.000,00	100,00	103.330.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pelayanan Perizinan	Presentase Penyelesaiain Izin yang diterbitkan	%	100,00	100,00	552.000.000,00	100,00	570.381.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Penerapan aplikasi on line dalam proses perizinan	%	0,00	100,00	411.500.000,00	100,00	446.702.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2,13	Kepemudaan dan Olah Raga								
2.13 . 2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata								
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	%	75,00	100,00	1.491.500.000,00	100,00	1.647.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	Program Pengembangan dan Kesarasian Kebijakan Pemuda	Persentase Kelompok Pemuda yang di Bina	%	10,00	13,79	425.000.000,00	24,14	425.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase pelatih dan Wasit yang tersertifikasi	%	10,71	14,29	230.000.000,00	32,14	535.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Kompetisi Olahraga Unggulan	%	100,00	100,00	1.325.000.000,00	100,00	2.415.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olah raga	%	20,69	24,14	1.609.293.000,00	37,93	1.410.230.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2,17	Perpustakaan								
2.17 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pengunjung perpustakaan	Orang	19655,00	20500,00	149.312.000,00	21500,00	165.392.902,40	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2,18	Kearsipan								
2.18 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase OPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan yang baku	%	4,00	18,00	23.875.000,00	35,00	26.446.337,50	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase pendigitalisasian dokumen/arsip daerah	%	4,00	18,00	10.500.000,00	35,00	11.630.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	Urusan Pilihan								
3,01	Kelautan dan Perikanan								
3.01 . 3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	TON/THN	4345,45	4475,81	14.004.343.000,00	4628,16	20.878.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan Tangkap	TON/THN	116,66	120154,65	2.866.750.000,00	155274,77	12.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Produksi Perikanan Olahan	TON/THN	183,00	237,49	655.000.000,00	291,81	1.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Persentase kelompok perikanan yang dibina	%	20,00	22,00	174.900.000,00	10,00	850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pesentase kelompok perikanan Tangkap yang dibina	%	10,00	20,00		22,00		
		Pesentase kelompok perikanan Olahan yang dibina	%	10,00	10,00		10,00		

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.02	Pariwisata								
3.02 . 2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata								
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Event Wisata	%	50,00	100,00	929.850.000,00	100,00	2.256.835.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Potensi Objek Wisata yang dikembangkan dan dikelola	%	10,00	20,00	6.148.792.000,00	50,00	6.460.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase kerjasama kemitraan	%	20,00	30,00	100.000.000,00	40,00	826.150.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3.03	Pertanian								
3.03 . 3.03.01	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan								
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Rupiah	2086917,00	3000000,00	595.630.000,00	3200000,00	3.258.940.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN, DINAS KETAHANAN PANGAN
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Presentase ketersediaan pangan utama	Persen	100,00	100,00	946.105.000,00	100,00	2.438.018.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase Ketersediaan alat-alat pasca panen	Persen	75,00	85,00	4.000.000.000,00	100,00	4.252.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rasio ketersediaan an alsintan terhadap lahan sawah	Hektar/ 1 Unit	15,00	14,00	3.230.000.000,00	13,00	2.470.171.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Tan. Pangan	Ton	242438,00	390335,00	30.296.982.000,00	339298,00	39.278.677.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Produksi Tan. Perkebunan	Ton	16417,30	17238,00		18059,10		
		Produksi Tan. Hortikultura	Ton	2572,90	2701,60		2830,20		
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Presentase Ketersediaan Penyuluh Pertanian	Persen	52,49	52,49	245.200.000,00	81,82	321.608.040,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	Program Rular Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative Loan 2000001960	Persentase Pelaksanaan Program kerjasama Rural Empo werment and Agricultural Deve lopment scaling UP Initiativ Loan 2000001960	Persen	0,00	100,00	2.725.585.484,00	100,00	8.260.287.984,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.03 . 3.03.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan								
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	%	100,00	100,00	1.330.000.000,00	100,00	1.550.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase Produksi Hasil peternakan	%	100,00	100,00	44.818.000.000,00	100,00	63.135.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.06	Perdagangan								
3.06 . 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan								
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Persentase pasar yang Terbangun di Kabupaten Konawe	%	100,00	6,45	4.973.774.000,00	6,45	16.700.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Operasi Pasar	Kec.	5,00	0,00	-	5,00	605.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.07	Perindustrian								
3.07 . 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan								
	Program Penataan Struktur Industri	Persentase IKM yang terbangun dikawasan sentra IKM	%	100,00	100,00	4.500.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.08	Transmigrasi								
3.08 . 2.01.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja								
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	Kawasan	1,00	1,00	699.000.000,00	1,00	1.530.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Program Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Persentase KK pada kawasan Transmigrasi yang dibina	%	100,00	100,00	100.000.000,00	100,00	500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.01	Administrasi Pemerintahan								
4.01 . 4.01.02	Sekretariat Daerah								
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100,00	100,00	2.516.000.000,00	100,00	2.786.973.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia	Persentase pembinaan pengembangan SDM di sekolah	%	100,00	100,00	119.910.000,00	100,00	132.824.307,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Pelayanan Bidang Mental Spiritual	Persentase pembinaan kegiatan keagamaan	%	100,00	100,00	789.690.000,00	100,00	874.739.613,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program peningkatan koordinasi, pembinaan, pengawar dan pelaporan terkait peningkatan kualitas dan kuantitas program jaminan sosial	Laporan pelaksanaan program jaminan sosial	Lap.	1,00	2,00	20.400.000,00	2,00	22.597.080,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program koordinasi,pembinaan,monev dan pelaporan pembangunan bidang pemuda dan olahraga	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemuda dan olahragaIntensitas pelaksanaan koordinasi dan pembinaan	Lap.	1,00	2,00	21.250.000,00	2,00	23.538.625,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program koordinasi,pembinaan,monev dan pelaporan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Lap.	1,00	2,00	21.250.000,00	2,00	23.538.625,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program koordinasi,pembinaan,monev dan pelaporan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan	Laporan Pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan\Intensitas pelaksanaan koordinasi dan pembinaan	Lap.	1,00	2,00	21.250.000,00	2,00	23.538.625,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Layanan Keprotokolan Daerah	Persentase aktifitas pimpinan daerah yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	816.300.000,00	100,00	904.215.510,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Fasilitas LPSE	Persentase informasi pengadaan barang dan jasa yang diproses melalui LPSE	%	40,00	75,00	350.900.000,00	85,00	388.691.930,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase monitoring pelaksanaan pembangunan daerah	%	50,00	70,00	123.000.000,00	80,00	136.247.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program koordinasi pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan	Laporan Pelaksanaan pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan	Lap.	1,00	2,00	16.500.000,00	2,00	18.277.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Penyelenggaraan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	%	40,00	75,00	16.500.000,00	85,00	18.277.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ranperda yang dilegalisasi	%	1,00	1,00	529.012.500,00	1,00	585.987.146,25	SEKRETARIAT DAERAH
	Program koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan pelaporan keuangan dan aset daerah	Laporan Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan pelaporan keuangan dan aset daerah	Lap.	1,00	2,00	30.000.000,00	2,00	33.231.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Laporan Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Lap.	1,00	2,00	20.400.000,00	2,00	22.597.080,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kelautan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kelautan, Perikanan, Energi Dan Sumber Daya Mineral	Lap.	1,00	2,00	20.400.000,00	2,00	22.597.080,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	1,00	2,00	20.400.000,00	2,00	22.597.080,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program koordinasi pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan	Laporan pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan	Lap.	1,00	2,00	38.000.000,00	2,00	42.092.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program koordinasi pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan daerah	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Daerah	Laporan	1,00	2,00	42.500.000,00	2,00	47.077.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Pengawasan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan Review	Dok.	5,00	8,00	1.234.125.000,00	8,00	2.566.875.000,00	SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
		Pelaksanaan Monev	OPD	63,00	63,00		63,00		
		Pelaksanaan Pendampingan	OPD	63,00	63,00		63,00		
		Pemeriksaan/Pengawasan	OPD	63,00	63,00		63,00		
4.01 . 4.01.03	Sekretariat DPRD								
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi	%	100,00	100,00	17.367.011.125,00	100,00	19.237.438.223,16	SEKRETARIAT DPRD



NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PEMERINTAH KECAMATAN SE-KAB. KONAWE								
	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase ketersediaan Data dan Informasi Kecamatan	%	-	100,00		100,00		PEMERINTAH KECAMATAN
	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase penerimaan piutang daerah	%	20,00	-	145.000.000,00		435.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN
	Program Dana Kelurahan	Persentase pemanfaatan Dana Kelurahan Mendukung Program Pembangunan Daerah	%	-	100,00	4.441.656.000,00	100,00	4.920.022.351,20	PEMERINTAH KECAMATAN
4.02	Pengawasan								
4.02 . 4.02.01	Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe								
	Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase ketersediaan tenaga Pemeriksa dan AparaturPengawas	%	0,00	45,95	145.675.000,00	72,97	1.158.242.500,00	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
	Program Peningkatan Pengawasan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan Review	Dok.	5,00	8,00	1.234.125.000,00	8,00	2.566.875.000,00	SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
		Pelaksanaan Movev	OPD	63,00	63,00		63,00		
		Pelaksanaan Pendampingan	OPD	63,00	63,00		63,00		
		Pemeriksaan/Pengawasan	OPD	63,00	63,00		63,00		
4.03	Perencanaan								
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase ketersediaan data pembangunan berbasis IT	%	60,00	65,00	631.500.000,00	70,00	699.512.550,00	BAPPEDA
		Persentase ketersediaan Data dan Informasi Kecamatan	%	-	100,00		100,00		PEMERINTAH KECAMATAN
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase Program-program pembangunan bidang Fisik Sarana dan Prasarana yang terimplementasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah	%	90,00	95,00	3.507.200.000,00	100,00	1.657.920.000,00	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi pelaksanaan program tahunan dengan dokumen RPJMD	%	80,00	90,00	1.907.100.000,00	95,00	1.465.310.000,00	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Program-program pembangunan bidang ekonomi yang terimplementasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah	%	90,00	95,00	3.456.700.000,00	100,00	1.217.370.000,00	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Program-program pembangunan bidang Sosial Budaya yang terimplementasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah	%	90,00	95,00	1.980.400.000,00	100,00	2.189.447.000,00	BAPPEDA
4.04	Keuangan								
4.04 . 4.04.05	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah								
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase program dan kegiatan yang terakomodir dalam penganggaran	%	80,00	90,00	2.355.750.000,00	95,00	2.200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	%	100,00	100,00	587.200.000,00	100,00	616.560.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Program Peningkatan Administrasi, Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	%	50,00	60,00	933.400.000,00	70,00	980.070.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Manajemen dan Pemanfaatan Aset dan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan laporan barang/kekayaan milik daerah	%	50,00	60,00	1.241.155.000,00	70,00	1.303.212.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.04 . 4.04.06	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah								
	Program Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Jenis pajak yang dikelola	%	63.64	72.73	332.055.000,00	82,00	367.817.324,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	Program Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Wajib Pajak & Retribusi yang tertagih	%	0,85	0,87	463.130.000,00	100,00	515.700.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
4.05	Kepegawaian								
4.05 . 4.05.10	Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan								
	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan	%	1,00	1,00	518.566.650,00	1,00	1.146.631.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Kompetensi Teknis ASN sesuai Bidang Tugas dan Fungsinya	%	1,00	1,00	1.283.650.000,00	1,00	1.631.588.345,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	%	0,75	0,80	1.731.383.350,00	80,01%	3.387.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.07	Penelitian dan Pengembangan								
4.07 . 4.07.11	Badan Penelitian dan Pengembangan								
	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Jumlah Penelitian Bidang Pertanian, Peternakan dan perikanan serta penelitian bidang budaya tolaki, hukum adat dan kalosara	Keg.	1,00	2,00	198.820.000,00	1,00	220.232.914,00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4.08	Lainnya								
4.08 . 4.08.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pengawasan terhadap orang asing dalam rangka menjaga Kantrantibmas	%	0,21	0,34	96.800.000,00	0,55	273.665.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	17,24	34,48	179.475.000,00	0,52	728.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase pemantauan kondisi stabilitas perekonomian daerah	%	17,24	34,48	30.445.000,00	34,48	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi politik masyarakat	%	85,28	85,5	658.530.000,00	85,50	722.225.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase Pembinaan Ormas dan OKP	%	35,21	42,25		49,30		
	Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan	Persentase pembinaan stabilitas keamanan	%	1,00	1,00	46.100.000,00	1,00	145.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.08 . 4.08.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Masyarakat Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	%	11,63	23,26	165.750.000,00	69,77	183.601.275,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase Masyarakat Korban Bencana Yang Tertangani	%	100,00	100,00	277.050.000,00	100,00	306.888.285,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				OPD
					TAHUN 2019		TAHUN 2020		
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase Sarana dan Prasarana Yang Direhabilitasi dan DiRekonstruksi Pascabencana	%	100,00	100,00	2.333.850.000,00	100,00	2.585.205.645,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4.08 . 4.08.03	Badan Narkotika								
	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase Wilayah Bebas Narkoba	%	65,52	79,31	43.400.000,00	86,21	48.074.180,00	BADAN NARKOTIKA
	Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	Persentase Wilayah Bebas Narkoba	%	65,52	79,31	101.650.000,00	86,21	112.597.705,00	BADAN NARKOTIKA
	Program Rehabilitasi Pecandu Narkoba	Persentase Rehabilitasi Pecandu Narkoba	%	100,00	100,00	13.700.000,00	100,00	15.175.490,00	BADAN NARKOTIKA

KODE REKENING					URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	XX	XX			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	650.220.380.970,00	100,00	685.128.521.361,90	100,00	753.033.454.556,79	100,00	2.088.382.356.888,69	SEMUA OPD
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1.01	2.22	0.00	02.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR	%	100,00	84.684.190.503,00	100,00	100.113.351.781,00	100,00	109.528.803.602,20	100,00	294.326.345.886,20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL	%	50,00	83.561.546,00	60,00	168.000.000,00	65,00	184.800.000,00	65,00	436.361.546,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR	%	87,04	1.941.737.587,00	90,00	1.172.724.300,00	100,00	1.289.996.730,00	100,00	4.404.458.617,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PENERBITAN IZIN PADA PENDIDIKAN DASAR	%	50,00	242.325.065,00	55,00	244.126.827,00	60,00	244.126.827,00	60,00	730.578.719,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1.02	0.00	0.00	01.0000		DINAS KESEHATAN											
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	29	45.898.856.490,00	29	42.825.029.356,20	29	47.107.532.291,82	29	135.831.418.138,02	DINAS KESEHATAN

KODE REKENING					URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	CAKUPAN LAYANAN KESEHATAN YANG SESUAI STANDAR	Faskes	29	237.876.997,00	29	324.886.000,00	29	357.374.600,00	29	920.137.597,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	CAKUPAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Faskes	29	567.004.800,00	29	327.614.900,00	29	360.376.390,00	29	1.254.996.090,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	29	556.496.000,00	29	612.145.600,00	29	673.360.160,00	87	1.842.001.760,00	DINAS KESEHATAN
1.02	0.00	0.00	02.00		RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN											
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PRESENTASE TERPENUHINYA PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN	%	100,00	6.891.396.122,00	100,00	17.006.321.658,00	100,00	18.706.953.823,80	100,00	42.604.671.603,80	BLUD RSUD KONawe
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1.03	1.04	0.00	01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PRESENTASE SISTEM JARINGAN IIRIGASI DLM KONDISI BAIK	%	66,01	27.066.367.744,00	69,32	45.331.090.000,00	76,25	49.864.199.000,00	76,25	122.261.656.744,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR MINUM	%	1,43	4.762.784.579,00	1,60	5.900.000.000,00	1,76	6.490.000.000,00	1,76	17.152.784.579,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PERSENTASE RUMAH TANGGA BERSANITASI	%	60,00	1.197.371.000,00	3,00	5.500.000.000,00	3,30	6.050.000.000,00	3,30	12.747.371.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PERSENTASE WILAYAH YANG TERBEBAS DARI RESIKO BANJIR	%	2,09	4.688.185.600,00	100,00	4.534.000.000,00	100,00	4.987.400.000,00	100,00	14.209.585.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE BANGUNAN BER IMB	%	100,00	67.323.276,00	100,00	30.000.000,00	100,00	33.000.000,00	100,00	130.323.276,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	%	100,00	5.500.581.075,00	100,00	20.000.000.000,00	100,00	22.000.000.000,00	100,00	47.500.581.075,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING					URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE JALAN DALAM KONDISI MANTAP	%	64,96	47.794.866.481,00	70,00	58.930.000.000,00	77,00	64.823.000.000,00	77,00	171.547.866.481,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PERSENTASE TENAGA TERAMPIL YANG TELAH MENDAPATKAN SERTIFIKASI	%	100,00	113.877.000,00	100,00	513.000.000,00	100,00	564.300.000,00	100,00	1.191.177.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PEMANFAATAN RUANG	%	75,00	619.925.652,00	80,00	2.990.000.000,00	85,00	3.289.000.000,00	85,00	6.898.925.652,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1.03	1.04	0.00	01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE KAWASAN PERUMAHAN RAWAN BENCANA	%	-	-	100,00	4.475.000.000,00	100,00	5.572.500.000,00	100,00	10.047.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENATASI PENANGANAN KAWASAN KUMUH	%	100,00	1.075.882.000,00	100,00	2.800.000.000,00	100,00	3.080.000.000,00	100,00	6.955.882.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE PERUMAHAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU (PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM)	%	100,00	15.200.000,00	100,00	15.200.000,00	100,00	16.720.000,00	100,00	47.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1.05	0.00	0.00	03.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA											
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	%	100,00	2.902.920.000,00	100,00	3.417.140.000,00	100,00	3.758.854.000,00	100,00	10.078.914.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	CAKUPAN AREAL PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Kecamatan	7	760.375.484,00	10	886.030.000,00	15	974.633.000,00	15	2.621.038.484,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05	0.00	0.00	02.00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											

KODE REKENING					URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE CAKUPAN WILAYAH LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA	%	85,00	1.084.714.167,00	85,00	2.056.640.000,00	85,00	2.437.304.000,00	85,00	5.578.658.167,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
1.06	0.00	0.00	01.00		DINAS SOSIAL											
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) YANG SEJAHTERA	%	70,00	236.299.036,00	74,00	225.728.951,00	81,40	248.301.846,10	81,40	710.329.833,10	DINAS SOSIAL
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG DIREHABILITASI	%	80,00	437.539.817,00	86,00	460.304.430,00	94,60	506.334.873,00	94,60	1.404.179.120,00	DINAS SOSIAL
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN ANAK TERLANTAR YANG MENERIMA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	%	50,00	348.923.066,00	88,00	308.163.836,00	96,80	338.980.219,60	96,80	996.067.121,60	DINAS SOSIAL
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KOTA	%	100,00	148.110.000,00	100,00	346.055.000,00	100,00	380.660.500,00	100,00	874.825.500,00	DINAS SOSIAL
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG TERPELIHARA	%	100,00	207.223.175,00	100,00	203.858.175,00	100,00	224.243.992,50	100,00	635.325.342,50	DINAS SOSIAL
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
2.07	3.32	0.00	02.0000		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA											
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG DIPENUHI	%	-	-	50,00	300.000.000,00	100,00	330.000.000,00	100,00	630.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PRESENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	%	65,00	22.750.000,00	80,00	325.025.000,00	95,00	357.527.500,00	95,00	705.302.500,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING					URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN	%	-	-	100,00	126.495.000,00	100,00	139.144.500,00	100,00	265.639.500,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PRESETASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN MELALUI PEJANJIAN BERSAMA OLEH MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	%	80,00	45.650.000,00	100,00	121.310.000,00	100,00	130.293.000,00	100,00	297.253.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2.08	0.00	0.00	01.00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	%	-	-	92,94	82.063.500,00	92,95	90.269.850,00	92,95	172.333.350,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PENANGANAN KASUS PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN	%	100,00	230.777.000,00	100,00	178.798.000,00	100,00	196.677.800,00	100,00	606.252.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE OPD PENYEDIA DATA TERPILAH GENDER	%	100,00	27.810.000,00	100,00	30.591.000,00	100,00	33.650.100,00	100,00	92.051.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PERSENTASE PEMENUHAN HAK ANAK	%	100,00	12.440.000,00	100,00	117.006.500,00	100,00	128.707.150,00	100,00	258.153.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE PENANGANAN KASUS ANAK DARI TINDAK KEKERASAN	%	100,00	101.590.500,00	100,00	278.039.480,00	100,00	305.843.428,00	100,00	685.473.408,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
2.09	0.00	0.00	01.00		DINAS KETAHANAN PANGAN											
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH	%	83,00	500.000.000,00	85,00	4.800.000.000,00	86,00	4.800.000.000,00	86,00	10.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	JUMLAH KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN PERKAPITA PERHARI	%	90,30	601.473.500,00	95,00	687.000.000,00	100,00	754.700.000,00	100,00	2.043.173.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING					URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN SEGAR/OLAHAN	%	-	-	90,00	205.000.000,00	95,00	225.500.000,00	95,00	430.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE PENURUNAN DAERAH RAWAN PANGAN	%	80,00	35.620.000,00	85,00	113.008.000,00	90,00	124.308.800,00	90,00	272.936.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
2.11	0.00	0.00	01.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	%	80,00	405.491.500,00	80,00	380.924.000,00	100,00	419.016.400,00	100,00	1.205.431.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	%	80,00	737.842.500,00	70,00	2.221.500.000,00	100,00	2.443.650.000,00	100,00	5.402.992.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE LUAS RUANG TERBUKA HIJAU YANG DIKELOLA	%	80,00	132.382.128,00	70,00	3.374.764.000,00	100,00	3.712.240.400,00	100,00	7.219.386.528,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE PEMBINAAN TERHADAP JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENGHASILKAN B3 DAN LB3	%	80,00	26.820.000,00	70,00	160.000.000,00	100,00	176.000.000,00	100,00	362.820.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN	%	80,00	25.143.000,00	50,00	270.371.800,00	100,00	297.408.980,00	100,00	592.923.780,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE WILAYAH PENYULUHAN DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP	%	-	-	90,00	90.000.000,00	100,00	99.000.000,00	100,00	189.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PRESTASI CAPAIAN PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DI RAIH	%	60,00	47.843.000,00	80,00	50.000.000,00	80,00	55.000.000,00	80,00	152.843.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI	%	80,00	27.273.000,00	90,00	75.000.000,00	100,00	82.500.000,00	100,00	184.773.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH	%	16,00	5.186.753.000,00	80,00	7.435.680.000,00	84,00	8.179.248.000,00	84,00	20.801.681.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG											



KODE REKENING					URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
2.12	0.00	0.00	01.00		DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA PENCATATAN SIPIL	%	93,00	499.650.000,00	94,00	667.827.780,00	95,00	705.816.560,20	95,00	1.873.294.340,20	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK	%	93,00	1.647.163.000,00	94,00	1.735.780.000,00	95,00	1.766.999.900,00	95,00	5.149.942.900,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	%	100,00	243.951.000,00	100,00	318.951.000,00	100,00	335.645.269,00	100,00	898.547.269,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PROFIL KEPENDUDUKAN	%	-	-	-	-	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
2.13	0.00	0.00	01.00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA											
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	PERSENTASE PENATAAN KELEMBAGAAN DESA	%	100	94.115.000,00	100,00	343.385.000,00	100,00	367.723.500,00	100,00	805.223.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PRENSENTASE TERBENTUKNYA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA	%	100	56.752.000,00	100,00	62.427.200,00	100,00	68.669.920,00	100,00	187.849.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENATAAN ADMINISTRASI DESA	%	75,00	272.449.500,00	100,00	1.717.103.600,00	100,00	1.888.813.960,00	100,00	3.878.367.060,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	%	50,00	790.728.766,00	100,00	1.648.636.379,00	50,00	1.813.500.016,90	50,00	4.252.865.161,90	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
2.14	0.00	0.00	01.0000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN (MUKP)	Tahun	20,5	340.388.000,00	21,0	610.000.000,00	21,4	640.000.000,00	21,4	1.590.388.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KODE REKENING					URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
																KELUARGA BERENCANA
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PERSENTASE PENINGKATAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/MCPR)	%	78,00	7.408.077.392,00	79,50	8.108.237.790,00	81,00	8.186.356.990,00	81,00	23.702.672.172,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PERSENTASE CAKUPAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA MELALUI PEMBINAAN KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	%	8,75	33.054.000,00	9,25	230.000.000,00	10,00	235.000.000,00	10,00	498.054.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
2.15	0.00	0.00	01.00		DINAS PERHUBUNGAN											
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERSENTASE PERLENGKAPAN JALAN DAN PRASARANA LALULINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) YANG LAYAK	%	71,11	2.604.300.000,00	20,00	1.605.502.500,00	75,92	1.766.052.750,00	75,92	5.975.855.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2.16	2.21	0.00	03.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENERIMA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	58.664.000,00	100,00	267.000.000,00	100,00	293.700.000,00	100,00	619.364.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN LAYANAN INFRASTRUKTUR PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH	%	11,29	925.596.800,00	100,00	2.910.000.000,00	53,22	3.201.000.000,00	53,22	7.036.596.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
2.17	3.30	3.31	07.00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN											
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI YANG AKTIF	%	20	38.980.000,00	52,79	76.995.000,00	58,07	84.694.500,00	58,07	200.669.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH.

KODE REKENING					URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
																PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG MEMILIKI KAPASITAS DAN KOMPETENSI	%	-	-	52,79	122.408.000,00	58,07	134.648.800,00	58,07	257.056.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE UMKM YANG MANDIRI	%	20	194.500.000,00	30,20	228.279.000,00	33,22	251.106.900,00	33,22	673.885.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
2.18	0.00	0.00	01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%	100,00	22.723.000,00	100,00	24.995.300,00	100,00	27.494.830,00	100,00	75.213.130,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE RENCANA INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL	%	100,00	22.497.124,00	100,00	24.746.836,40	100,00	27.221.520,04	100,00	74.465.480,44	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PRESENTASE PENYELESAIN IZIN YANG DITERBITKAN	%	100,00	63.951.633,00	100,00	45.150.196,30	100,00	49.665.215,93	100,00	158.767.045,23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PELAKSANAAN OBJEK PERIZINAN YANG DIAWASI	%	100,00	167.908.000,00	100,00	184.698.800,00	100,00	203.168.680,00	100,00	555.775.480,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE DATA BASE YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	%	100,00	185.773.000,00	100,00	204.350.300,00	100,00	224.785.330,00	100,00	614.908.630,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
2.19	3.26	0.00	02.0000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA YANG MEMILIKI USAHA MANDIRI SERTA PERAN KEPEMUDAAN DALAM PEMBANGUNAN	%	51,72	1.096.252.000,00	100,00	1.759.874.500,00	100,00	1.935.861.950,00	100,00	4.791.988.450,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING OLAH	%	100,00	1.722.617.500,00	100,00	2.302.804.000,00	100,00	2.533.084.400,00	100,00	6.558.505.900,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING					URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						RAGA										
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	CAKUPAN PEMBINAAN KEPRAMUKAAN	Kecamatan	29	560.000.000,00	29	560.000.000,00	29	616.000.000,00	29	1.736.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
1.01	2.22	0.00	02.00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH	%	100,00	161.238.840,00	100,00	981.514.257,00	100,00	517.603.281,40	100,00	1.660.356.378,40	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PERSENTASE CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN DAN DIKELOLA	%	-	-	100,00	581.250.000,00	100,00	1.893.750.000,00	100,00	2.475.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
2.23	2.24	0.00	02.00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN											
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE KOLEKSI BUKU YANG TERSEDIA DIPERPUSTAKAN DAERAH	%	96,00	232.550.000,00	100,00	468.745.000,00	100,00	463.199.000,00	100,00	1.164.494.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
2.23	2.24	0.00	02.00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN											
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE PENGELOLAAN ARSIP	%	100,00	39.947.700,00	100,00	15.940.000,00	100,00	45.000.000,00	100,00	100.887.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PERSENTASE PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	%	100,00	39.811.200,00	-	-	-	-	100,00	39.811.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
3.25	0.00	0.00	01.0000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN											
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Ton/Tahun	11.911	1.297.856.250,00	17.866	4.395.000.000,00	20.844	4.834.500.000,00	20.844	10.527.356.250,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Ton/Tahun	4.776	7.554.458.641,00	4.927	5.722.793.439,00	4.776	6.295.072.782,90	4.776	19.572.324.862,90	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	JUMLAH KELOMPOK PENGAWAS PERIKANAN YANG DIBINA	Kelompok	10	14.072.614,00	10	55.000.000,00	10	60.500.000,00	10	129.572.614,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PRODUKSI PERIKANAN OLAHAN	Ton/Tahun	346	459.831.149,00	400	1.125.000.000,00	346	1.237.500.000,00	346	2.822.331.149,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
2.19	3.26	0.00	02.0000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA											
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	PERSENTASE	%	100,00	499.282.000,00	100,00	1.297.906.000,00	100,00	1.427.696.600,00	100,00	3.224.884.600,00	DINAS

KODE REKENING					URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM						OPD		
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023			KONDISI AKHIR	
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		TARGET	ANGGARAN
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					DESTINASI PARIWISATA	KUNJUNGAN WISATA										KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE EVENT PARIWISATA	%	100,00	170.055.000,00	100,00	775.000.000,00	100,00	852.500.000,00	100,00	1.797.555.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	%	-	-	100,00	243.165.000,00	100,00	267.481.500,00	100,00	510.646.500,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
3.27	0.00	0.00	09.0000		DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN											
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG DIBERI BANTUAN SARANA PERTANIAN	%	100,00	35.816.780,00	100,00	76.000.000,00	100,00	78.000.000,00	100,00	189.816.780,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE LAHAN YANG DIBERI BANTUAN PRASARANA PERTANIAN	%	53,03	20.465.836.014,00	53,03	30.690.000.000,00	53,03	31.910.000.000,00	53,03	83.065.836.014,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE LUAS LAHAN YANG MENDAPAT PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	%	13,95	135.160.000,00	11,63	150.000.000,00	18,60	150.000.000,00	18,60	435.160.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERTANIAN	%	8,57	26.970.000,00	13,04	30.000.000,00	30,00	32.000.000,00	30,00	88.970.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG MENDAPATKAN PENYULUHAN PERTANIAN	%	8,28	14.993.236.721,00	8,38	6.950.000.000,00	8,48	5.250.000.000,00	8,48	27.193.236.721,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27	0.00	0.00	08.00		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN											
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK	%	50,00	2.332.825.000,00	55,00	2.812.319.418,00	60,00	5.342.170.625,00	60,00	10.487.315.043,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK	%	50,00	585.332.600,00	60,00	884.502.750,00	70,00	972.953.025,00	70,00	2.442.788.375,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS	%	30,00	246.700.500,00	35,00	494.396.056,00	40,00	543.835.661,60	40,00	1.284.932.217,60	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE REKENING					URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						PENYAKIT HEWAN MENULAR										
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSentase PENINGKATAN SDM KELOMPOK TANI	%	50,00	233.197.420,00	100,00	234.715.000,00	100,00	258.186.500,00	100,00	726.098.920,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
2.17	3.30	3.31	07.00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN											
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSentase BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TERJAGA KESTABILAN HARGANYA	%	5,00	99.590.000,00	100,00	102.019.000,00	100,00	112.220.900,00	100,00	313.829.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSentase PENINGKATAN NILAI EKSPOR KOMODITI UNGGULAN	%	50,00	686.898.200,00	100,00	913.862.200,00	100,00	1.005.248.420,00	100,00	2.606.008.820,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSentase PRODUK DAERAH YANG DIPASARKAN	%	50,00	66.700.000,00	100,00	73.370.000,00	100,00	80.707.000,00	100,00	220.777.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
2.17	3.30	3.31	07.00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN											
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSentase IKM YANG TERBANGUN DIKAWASAN SENTRA IKM	%	40,00	190.729.200,00	45,00	227.884.620,00	49,50	250.673.082,00	49,50	669.286.902,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
2.07	3.32	0.00	02.0000		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA											
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PRESENTASE KAWASAN TRANS LAYAK UNTUK MEMBANGUN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	%	85,00	14.400.000,00	100,00	33.150.000,00	-	-	100,00	47.550.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMGRASI YANG TERBANGUN	%	85,00	74.030.000,00	100,00	82.846.000,00	100,00	377.710.600,00	100,00	534.586.600,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PRESENTASE WARGA TRANSMIGRAN YANG BINA	%	85,00	13.550.000,00	100,00	84.000.000,00	100,00	92.400.000,00	100,00	189.950.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											

KODE REKENING					URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	01				SEKRETARIAT DAERAH											
08.01	00.00	00.00	01.0000		SEKRETARIAT DAERAH											
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	%	100,00	5.489.455.000,00	100,00	5.543.078.000,00	100,00	6.097.385.800,00	100,00	17.129.918.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	%	100,00	1.055.857.588,00	100,00	1.193.579.500,00	100,00	1.312.937.450,00	100,00	3.562.374.538,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	02				SEKRETARIAT DPRD											
4.02	0.00	0.00	01.00		SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	%	100,00	8.505.769.519,00	100,00	8.863.306.519,00	100,00	9.749.637.170,90	100,00	27.118.713.208,90	SEKRETARIAT DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	01				PERENCANAAN											
5.01	0.00	0.00	01.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	%	100,00	3.811.710.404,00	100,00	4.976.453.244,40	100,00	5.377.951.968,84	100,00	14.166.115.617,24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM Mendukung PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG INFRASTRUKTUR, SOSIAL BUDAYA, SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN DAERAH	%	100,00	3.367.762.673,00	100,00	3.969.710.140,30	100,00	4.366.681.154,33	100,00	11.704.153.967,63	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	02				KEUANGAN											
5.02	0.00	0.00	01.00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH											
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN YANG TRANSPARANSI, TEPAT WAKTU DAN AKUNTABEL	%	4,00	351.875.729.076,00	100,00	364.030.351.907,00	100,00	400.433.387.097,70	100,00	1.116.339.468.080,70	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG DIKELOLA	%	100,00	937.200.000,00	100,00	1.030.256.000,00	100,00	1.133.281.600,00	100,00	3.100.737.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING					URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.02	0.00	0.00	03.00		BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH											
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE WAJIB PAJAK & RETRIBUSI YANG TERTAGIH	%	100,00	2.319.836.700,00	100,00	2.825.000.000,00	100,00	3.107.500.000,00	100,00	8.252.336.700,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	03				KEPEGAWAIAN											
5.03	5.04	0.00	01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEPEGAWAIAN DAERAH	%	100,00	1.488.818.966,00	100,00	2.278.454.618,00	100,00	2.536.300.079,80	100,00	6.303.573.663,80	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
5.05	0.00	0.00	01.00		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG DILAKSANAKAN DAN DITINDAK LANJUTI	%	50,00	60.114.229,00	100,00	2.325.625.651,90	100,00	2.558.188.217,09	100,00	4.943.928.097,99	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6	01				INSPEKTORAT DAERAH											
6.01	0.00	0.00	01.00		INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE											
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH	%	100,00	2.921.550.000,00	100,00	4.662.800.000,00	100,00	5.129.080.000,00	100,00	12.713.430.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PADA OPD	%	85,00	507.460.000,00	100,00	1.425.000.000,00	100,00	1.567.500.000,00	100,00	3.499.960.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN											
07.01	XX.XX	XX.XX	XX.XXXX		PEMERINTAH KECAMATAN											
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	399.434.282,00	100,00	439.377.710,20	100,00	483.315.481,22	100,00	1.322.127.473,42	PEMERINTAH KECAMATAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	1.984.328.204,00	100,00	2.046.856.345,40	100,00	2.108.041.979,94	100,00	6.139.226.529,34	PEMERINTAH KECAMATAN
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	137.561.000,00	100,00	164.701.421,00	100,00	181.171.563,10	100,00	483.433.984,10	PEMERINTAH KECAMATAN
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	97.046.368,00	100,00	106.751.004,80	100,00	117.426.105,28	100,00	321.223.478,08	PEMERINTAH KECAMATAN



KODE REKENING					URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR		
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	346.845.415,00	100,00	406.835.996,50	100,00	447.519.596,15	100,00	1.201.201.007,65	PEMERINTAH KECAMATAN
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
8.01	0.00	0.00	01.0000		BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	%	68,97	62.270.000,00	86,21	195.540.000,00	86,21	215.094.000,00	86,21	472.904.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PEMBINAAN PERAN PARTAI POLITIK	%	68,97	727.437.000,00	80,00	900.000.000,00	100,00	990.000.000,00	100,00	2.617.437.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	%	56,34	33.202.000,00	65,00	190.000.000,00	100,00	209.000.000,00	100,00	432.202.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	%	68,97	19.429.000,00	86,21	150.000.000,00	100,00	165.000.000,00	100,00	334.429.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	CAKUPAN WILAYAH PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Kecamatan	6	254.123.000,00	10	320.000.000,00	13	378.000.000,00	29	952.123.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8.01	0.00	0.00	02.0000		BADAN NARKOTIKA											
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE WILAYAH BEBAS NARKOBA	%	100,00	65.300.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	165.000.000,00	100,00	380.300.000,00	BADAN NARKOTIKA



Penetapan indikator kinerja daerah akan menjadi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018-2023. Indikator kinerja daerah selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci. Terdapat 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018-2023 yang akan diintegrasikan secara berjenjang ke indikator kinerja eselon II, eselon III dan eselon IV. IKU Pemerintah Kabupaten Konawe diambil dari Indikator Kinerja Tujuan sedangkan Indikator Kinerja Sasaran akan menjadi ukuran pencapaian indikator kinerja Eselon II OPD. Selanjutnya pengeintegrasian indikator kinerja hingga ke level eselon IV bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah berperan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018-2023. Indikator kinerja seluruh komponen perangkat tergambar dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD.

Tabel 8.1  
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM					
					TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	2	3		5	6	8	10	12	14	16
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh	1 Usia Harapan Hidup	Tahu n	69,76	69,90	70,29	70,67	71,06	71,44	71,44
2	Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dijenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs	1 Harapan Lama Sekolah	Tahu n	12,98	13,03	13,09	13,15	13,21	13,26	13,26
		2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahu n	8,94	8,64	8,67	8,69	8,72	8,75	8,75
3	Meningkatnya produktifitas daerah pada sektor-sektor unggulan sehingga menjadikan Konawe sentra produksi beras dan sentra produksi ternak	1 Pertumbuhan PDRB	%	7,44	10,56	11,61	11,89	12,73	13,09	13,09
		2 Produksi Padi	Ton	216.381,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00	1.150.000,00
		3 Populasi ternak sapi	Ekor	44.497,00	52.000	62.250	75.500	92.700	115.500	397.950
		4 Produksi perikanan	Ton	121.183,00	124.900	128.500	132.500	135.800	136.500	658.200
4	Meningkatnya realisasi investasi daerah	1 Realisasi Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA)	Rupi ah	4.518.123,97 3.708,00	4.700.000,00 0.000,00	5.000.000,00 0.000,00	6.000.000,00 0.000,00	7.000.000,00 0.000,00	8.000.000,00 0.000,00	30.700.000,0 00.000,00
5	Meningkatnya akses infrastruktur pada berbagai sektor dalam rangka mendukung aktifitas sosial dan	1 Indeks konektifitas wilayah	Indek s	0,897	0,931	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	KONDISI AWAL 2018	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM					
					TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	2	3		5	6	8	10	12	14	16
	ekonomi masyarakat									
6	Tersedianya infrastruktur usaha mikro untuk membuka ruang usaha bagi masyarakat	1 Pendapatan Per Kapita	Rp	1.901.759,00	2.061.358,00	2.300.682,00	2.574.233,00	2.901.933,00	3.281.976,00	3.281.976,00
7	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	1 Indeks kualitas lingkungan hidup	Rang e	80,33	80,70	81,10	81,50	81,90	82,30	82,30
8	Terimplementasinya nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai identitas masyarakat	1 Cakupan impelentasi praktek-praktek kearifan budaya pada aktifitas masyarakat	Kec.	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
9	Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	1 Penilaian SAKIP	Statu s	C	B	BB	BB	A	A	A
		2 Penilaian LPPD	Statu s	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
10	Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)	1 Opini BPK terhadap LK daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Menurunnya jumlah penduduk miskin	1 Persentase penduduk miskin	%	13,48	12,65	11,65	9,65	8,65	7,65	7,65
		2 Gini Ratio	%	0,373	0,370	0,367	0,362	0,362	0,358	0,358

**Tabel 8.2**

**Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan**

**Pemerintahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023**

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
1	Pertumbuhan PDRB	%	7.44	10,56	11,61	11,89	12,73	13,09	13,09
2	PDRB per kapita	%	1.901.759	2.061.358	2.300.682	2.574.233	2.901.933	3.281.796	3.281.796
3	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	13,48	12,65	11,65	9,65	8,65	7,65	7,65
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	70,24	71,55	73,73	76,98	80,33	83,59	83,59
5	Angka melek huruf	%	90,64	92,98	95,32	97,66	100	100	100
6	Angka rata-rata lama sekolah	%	8.94	8.64	8.67	8.69	8.72	8.75	8.75
7	Angka usia harapan hidup	%	69.76	69,90	70,29	70,67	71,06	71,44	71,44
8	Prevalensi Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	10,00	20,00	30,00	40,00	45,00	75,00	75,00
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	98,06	98,40	98,74	99,07	99,41	99,75	99,75

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Tingkat pengangguran terbuka	%	1,94	1,60	1,26	0,93	0,59	0,25	0,25
12	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	16.800	13.440	10.080	6.720	3.360	-	-
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas
14	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	4,18	9,76	11,44	14,04	15,28	14,73	14,73
15	Opini BPK	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Penguatan cadangan pangan	Ton	1	2	10	10	10	10	10
17	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	29,47	32,18	33,50	34,60	34,80	35,20	35,20
18	Pertumbuhan Industri	IKM	0	598	705	818	952	1088	1088
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita/tahun	Rp.	14.071.593	14.140.572	14.209.888	14.279.545	14.349.542	14.419.883	14.490.569
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Rp.	2.086.917	3.000.000	3.200.000	3.400.000	3.500.000	3700000	3700000
3	Angka kriminalitas yang tertangani	%	88,49	92,49	97,49	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
I.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1	Pendidikan								
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	68,00	74,40	80,80	87,20	93,60	100,00	100,00
2	Angka partisipasi kasar Usia 7-12 Tahun (Jenjang SD/MI/Paket A).	%	104,77	103,82	102,86	101,91	100,95	100,00	100,00
3	Angka partisipasi kasar Usia 13-15 Tahun (Jenjang SMP/MTs/Paket B).	%	110,4	108,32	106,24	104,16	102,08	100	100,00
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	85,94	88,76	91,57	94,38	97,19	100,00	100,00
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	54,67	63,73	72,80	81,87	90,93	100,00	100,00
6	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	85,94	88,76	91,57	94,38	97,19	100,00	100,00
7	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	54,67	63,73	72,80	81,87	90,93	100,00	100,00
10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	90,34	92,27	94,20	96,14	98,07	100,00	100,00
11	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	90,23	92,18	94,14	96,09	98,05	100,00	100,00

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	68,28	74,62	80,97	87,31	93,66	100,00	100,00
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	90,21	92,17	94,13	96,08	98,04	100,00	100,00
16	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	111,44	113,67	115,94	118,26	120,63	123,04	123,04
17	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	177,29	180,83	184,45	188,14	191,90	195,74	195,74
20	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	8,09	8,09	8,18	8,26	8,34	8,42	8,42
21	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMP	%	12,32	12,32	12,44	12,57	12,69	12,82	12,82
22	Angka melek huruf	%	90,64	92,98	95,32	97,66	100	100	100,00
2	Kesehatan								
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH	0 per 100.000 KH



No.	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
4	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
5	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	84,00	84,00	86,00	88,00	90,00	95,00	95
6	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
7	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000	195	185	175	170	165	160	160
8	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0	0	0
10	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
11	Cakupan kunjungan bayi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
12	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
13	Cakupan pelayanan anak balita	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)	%	51,52	59,02	66,52	74,02	81,52	81,52	81,52
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	57,48	57,72	61,80	66,02	70,44	70,44	70,44
3	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	5,60	8,01	12,02	16,02	16,02	16,02	16,02
4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	55,50	64,75	66,08	66,14	67,78	67,78	67,78
5	Persentase penduduk berakses air minum	%	61,28	64,12	68,80	73,27	77,54	77,54	77,54
6	Persentase areal kawasan kumuh	%	10,85	24,74	24,74	24,74	14,92	100,00	100,00
8	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	12.617,00	12.623,00	12.623,50	12.625,50	12.627,50	12.627,50	12627,50
10	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	2,28	5,53	15,27	30,32	45,13	56,79	56,79
11	Ketaatan terhadap RTRW	%	83	85	88	90	93	96	100,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
1	Persentase rumah layak huni	12,24	17,55	33,88	65,29	82,64	100,00	100,00	100,00
2	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,00	10,00	22,80	22,80	22,80	13,75	92,15	92,15

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Kec.	5	5	5	5	5	5	5
2	Persentase Penegakan PERDA	%	0,00	20,00	30,00	65,00	85,00	100,00	100,00
6	Sosial								
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	11,74	11,44	11,45	11,44	11,44	57,52	57,52
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	11,74	11,44	11,45	11,44	11,44	57,52	57,52
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
1	Tenaga Kerja								
1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	74,17	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	10,50	30,00	50,00	65,00	80,00	100,00	100,00
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	10,50	30,00	50,00	65,00	80,00	100,00	100,00
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	7,25	-	7,44	-	51,02	51,02	51,02
2	Partisipasi Perempuan di lembaga swasta	%	92,75	92,60	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56
3	Rasio KDRT	%	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0	0
4	Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah umum	%	0	0	0	0	0	0	0
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	96,71	97,01	97,31	97,61	97,91	98,21	98,21
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Pangan								
1	Ketersediaan pangan utama	Ton	233.876	339.000	455.000	525.000	600.000	680.000	2.832.876
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	gr/kap/hari	60	62	64	66	68	70	70
5	Lingkungan Hidup								
1	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Range	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Range	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
3	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase cakupan area pelayanan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Volume sampah yang tertangani	M <sup>3</sup>	39420	39428	39436	39444	39452	46720	204480,00
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Persentase penduduk ber-KTP	%	92	95	97	98	99	100	100
2	Persentase Penduduk memiliki Kartu Keluarga	%	95	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penduduk memiliki Akta Kelahiran	%	90	95	100	100	100	100	100
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Persentase jumlah Bumdes dan UEP yang aktif	%	15	20	30	50	100	100	100
2	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
9	Perhubungan								
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Penumpang	210.726	214.941	219.239	223.624	228.097	232.659	232.659
2	Persentase uji kir angkutan umum	%	67,53	72,53	77,53	82,53	87,53	92,53	92,53
3	Persentase layanan angkutan darat	%	75,86	86,21	93,10	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	67,53	72,53	77,53	82,53	87,53	92,53	92,53
10	Komunikasi dan Informatika								
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Kec.	26	27	28	29	29	29	29
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								
1	Persentase koperasi aktif	%	75,50	77,85	80,20	82,55	84,90	87,25	87,25
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Penanaman Modal								
1	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp.	316.910.163.784	348.601.180.162	380.292.196.541	411.983.212.919	443.674.229.298	475.365.245.676	475.365.245.676

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
13	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>								
1	Cakupan pembinaan olahraga	Cabor	5	6	6	6	6	6	6
14	<b>Kebudayaan</b>								
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	2	3	3	3	3	3	15
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Situs	1	5	3	5	3	5	21
15	<b>Perpustakaan</b>								
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	19.655	20.638	21.670	22.753	23.891	25.085	114036,5963
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	32.513	33.001	33.496	33.998	34.508	35.026	170028,3894
16	<b>Kearsipan</b>								
16,1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	-	20	40	60	80	100	100
III	<b>Layanan Urusan Pilihan</b>								
1	<b>Pariwisata</b>								
1	Kunjungan wisata	Orang	6.926	8.311	9.973	11.968	14.362	17.234	61848,62592
2	PAD sektor pariwisata	Rp.	225.000.000	225.000.000	275.000.000	350.000.000	450.000.000	500.000.000	1800000000
2	<b>Pertanian</b>								



No.	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	29,47	32,18	33,50	34,60	34,80	35,20	35,20
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	233.876	339.000	455.000	525.000	600.000	680.000	680.000
3	Jumlah hewan ternak Sapi	Ekor	54.535	80.160	106.659	140.629	184.685	242.357	242.357
3	Perdagangan								
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	20	25	40	50	60	70	70
4	Perindustrian								
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	20	30	40	50	60	70	70
5	Transmigrasi								
1	Persentase transmigran swakarsa	%	-	10	15	15	-	-	-
6	Kelautan dan Perikanan								
1	Produksi perikanan	Ton	50.298,65	52.330,06	54.503,46	56.827,67	60.354,53	63.135,95	287151,67
IV	Penunjang Urusan								
1	Perencanaan Pembangunan								
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	75	100	100	100	100	100	100

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Capaian Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				2019	2020	2021	2022	2023	
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	75	100	100	100	100	100	100
3	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Keuangan								
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	25,15	28,41	51,95	68	83,79	99,84	99,84
4	Penelitian dan pengembangan								
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	0	100	100	100	100	100	100
5	Pengawasan								
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	70,43	75	78	85	90	95	95
2	Jumlah temuan BPK	Temuan	44	20	15	10	5	-	-
6	Sekretariat Dewan								
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	5

# BAB IX. PENUTUP



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun berdasarkan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025, dan memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 dan RPJM Nasional Tahun 2009-2014. RPJM Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Konawe.

Mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis perencanaan daerah yang mengalami perubahan yang cukup mendasar baik dari sisi regulasi maupun dari sisi kondisi social dan ekonomi yang mengalami perubahan maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian kembali atas kondisi yang terjadi tersebut sebab kondisi factual ini tidak sejalan dengan asumsi awal pemerintah Kabupaten Konawe saat Menyusun RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023. Sehingga dipandang perlu untuk dilakukan revisi terhadap dokumen RPJMD yang ada.

## 9.1 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Pemerintah Kabupaten Konawe (Bupati dan Wakil Bupati) akan mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dengan mengerahkan semua potensi dan sumberdaya daerah, serta para pihak yang berpotensi membantu terwujudnya Visi dan Misi pembangunan jangka menengah.
2. Sekretaris Daerah berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 guna mewujudkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.

3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 yang selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) setiap tahunnya. Dalam kaitan ini Bappeda berkewajiban memandu dan memverifikasi rancangan Renstra OPD sebelum disahkan oleh Bupati. Bappeda juga berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023, yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja oleh OPD serta KUA-PPAS.
4. Sebagai wujud komitmen OPD untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe serta kesanggupan melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023, maka diperlukan perjanjian kinerja seluruh perangkat OPD secara berjenjang.
5. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan tiap tahun dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023.
6. Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar dan/atau merugikan/bertentangan dengan kepentingan nasional. Perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Unaaha, 27 Agustus 2021

